Laporan Tahunan

2018

PERTAMINA

STRENGTHENING COMMITMENT SECURING ENERGY

TEMA

STRENGTHENING COMMITMENT, SECURING ENERGY

Sejalan dengan masifnya pembangunan di berbagai bidang, pemerintah turut mendorong peningkatan pasokan energi untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional. Hal ini menjadi tantangan bagi Pertamina yang telah menetapkan komitmen untuk berada di garis terdepan dalam mendukung cita-cita pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional.

Tahun 2018, Pertamina semakin memperkuat komitmen untuk mengamankan pasokan energi dalam rangka mengimbangi pertumbuhan populasi dan ekonomi nasional. Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, Pertamina mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sinergi agar dapat memberikan kontribusi terhadap kepentingan nasional tersebut. Pertamina meyakini bahwa kekayaan alam yang sudah tersedia di bumi Indonesia dapat dioptimalkan menjadi sumber energi.

Diperolehnya hak pengelolaan Blok Mahakam dan Blok Rokan, serta bergabungnya PT Perusahaan Gas Negara Tbk. menjadi bagian dari Pertamina semakin meningkatkan semangat juang Pertamina untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

KESINAMBUNGAN TEMA

- Pembuka
- Laporan Manajemen
- Profil Perusahaan
- Analisis dan Diskusi Manajemen
- Tata Kelola Perusahaan
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Laporan Keuangan
- Informasi Lain-lain

2014

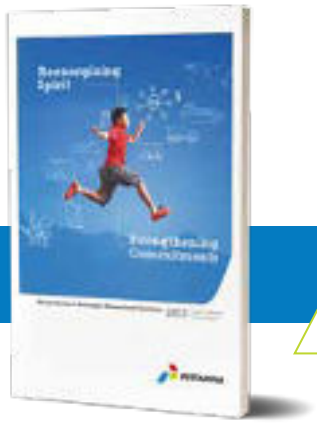

2015

MENGINSPIRASI INDONESIA, MENDUNIA

Di tahun 2014, Pertamina menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dampak negatif akibat turunnya harga minyak mentah dunia sampai terbatasnya ruang pertumbuhan akibat perubahan politik, kebijakan pemerintah, dan birokrasi perizinan. Namun demikian, sebagai sebuah perusahaan kelas dunia, Pertamina mampu mengelola tantangan menjadi sebuah kesempatan, dan tetap kokoh berdiri sebagai sebuah Perusahaan milik Negeri yang memberikan inspirasi bagi Indonesia.

Pertamina konsisten menerapkan strategi pertumbuhan *"aggressive upstream, profitable downstream"*, dengan penekanan pada efisiensi dan optimalisasi produksi serta penguatan kinerja tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Kami mengangkat tema "Inspiring Indonesia to the World" pada Laporan Tahunan 2014 untuk mengiringi laju pergerakan isu energi global dan berbagi inspirasi sebagai penyedia energi. Tentunya, langkah ini perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan untuk bersama mengatasi tantangan, mengelola kesempatan, dan berbagi pembelajaran menuju pentas energi internasional.

STRENGTHENING COMMITMENTS

Terpuruknya harga minyak mentah dunia sejak awal tahun 2015 memberikan tantangan berat bagi perusahaan-perusahaan di sektor migas tidak terkecuali Pertamina. Untuk menopang stabilitas perusahaan di tengah kondisi tersebut, Pertamina mencanangkan program 5 (lima) prioritas strategis yang terdiri dari pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua lini, peningkatan kapasitas kilang dan petrokimia, pengembangan infrastruktur dan *marketing*, serta perbaikan struktur keuangan.

Melalui berbagai inisiatif *breakthrough project* di kelima aspek prioritas strategis yang dicanangkan, Pertamina mampu menutup tahun 2015 dengan membukukan kinerja yang cukup memuaskan baik dari operasional, finansial maupun non finansial. Tahun 2015 dengan demikian menjadi tahun pembuktian bagi Pertamina bahwa kondisi krisis tidak menyurutkan semangat, namun justru membulatkan tekad di seluruh jajaran Perseroan untuk berjuang lebih keras dalam komitmen bersama mewujudkan kemandirian energi bagi bangsa dan negara Indonesia.

2016

MERANGKUL PERUBAHAN, MENDAYAGUNAKAN TANTANGAN

Penurunan harga minyak dunia telah membawa perubahan besar dalam tatanan ekonomi global dan berimbas pada perlambatan kinerja seluruh korporasi dunia. Pertamina memaknai setiap tantangan sebagai bagian dari dinamika usaha yang mendorong untuk lebih tangguh, lebih tangkas dan lebih efisien dalam menghadapi perubahan. Di sektor hulu, rendahnya harga minyak menjadi peluang untuk terus berekspansi mengakuisisi blok-blok migas Internasional untuk mengamankan pasokan minyak mentah sebagai upaya mendukung ketahanan energi nasional. Di sektor hilir, kami terus melakukan revitalisasi kilang untuk menghasilkan produk berkualitas dengan biaya produksi yang paling efisien. Keunggulan operasi didukung oleh upaya efisiensi dan peningkatan nilai tambah melalui inisiatif-inisatif *breakthrough project,* telah menghasilkan kontribusi kinerja yang signifikan dari sektor hulu dan hilir serta memberikan dampak keuangan yang melampaui ekspektasi.

Dengan struktur keuangan yang semakin membaik, Pertamina terus melanjutkan kegiatan investasi hulu dan pengolahan serta pengembangan infrastruktur hilir migas untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang. Dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, Pertamina percaya diri melangkah ke depan meraih visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia.

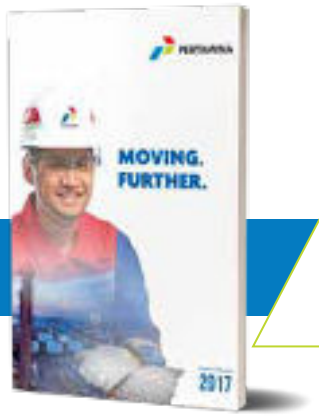

2017

MOVING. FURTHER.

Pertamina menunjukkan keandalannya untuk menghadapi tantangan global di industri migas, di mana volatilitas harga minyak dunia merupakan kondisi yang memberikan tantangan tersendiri bagi Perusahaan. Berbagai strategi yang tepat telah diterapkan Pertamina guna menyikapi kondisi ini, sehingga di tahun 2017 Perusahaan tetap mampu bergerak maju dengan membukukan kinerja keuangan yang sehat.

Selanjutnya, kemampuan Pertamina untuk bertahan dalam situasi yang sulit ini telah meningkatkan keandalan dan kesiapan Perusahaan dalam menghadapi perubahan situasi global di masa mendatang.

Bagi Pertamina, 2017 juga menandai 60 tahun kiprahnya sebagai perusahaan pertambangan minyak & gas yang telah bertransformasi menjadi perusahaan energi terkemuka. Dengan berbagai pengalaman dan kemampuan yang telah terasah selama enam dekade, Pertamina akan terus maju menuju dekade-dekade selanjutnya untuk kembali mencapai berbagai keberhasilan dan pencapaian signifikan lainnya, hingga mampu turut membawa bangsa dan negara ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

DAFTAR ISI

- Pembuka
- Laporan Manajemen
- Profil Perusahaan
- Analisis dan Diskusi Manajemen
- Tata Kelola Perusahaan
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Laporan Keuangan
- Informasi Lain-lain

2 Tema
4 Kesinambungan Tema
6 Daftar Isi
8 Kilas Kinerja 2018
10 Ikhtisar Kinerja Keuangan
10 Ikhtisar Kinerja Operasional
11 Ikhtisar Obligasi
12 Penghargaan
14 Sertifikasi
17 Peristiwa Penting

LAPORAN MANAJEMEN

26 Laporan Dewan Komisaris
32 Laporan Direksi

PROFIL PERUSAHAAN

44 Identitas Perusahaan
46 Sejarah Perusahaan
48 Visi Misi dan Tata Nilai Perusahaan
49 Budaya Perusahaan
50 Struktur Organisasi
52 Jejak Langkah Pertamina
54 Bidang Usaha
58 Produk dan Jasa
59 Profil Dewan Komisaris
63 Profil Direksi
70 Daftar Entitas Anak dan Asosiasi
72 Struktur Grup Perusahaan
74 Fungsi Penunjang

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

88 Tinjauan Ekonomi
92 Tinjauan Industri
96 Tinjauan Kinerja Usaha
118 Tinjauan Kinerja Keuangan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

138 Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/* GCG)
142 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
148 Dewan Komisaris
155 Komisaris Independen
156 Direksi
160 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi
161 Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
162 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
162 Komite Audit
165 Komite Nominasi dan Remunerasi
167 Komite Pemantau Manajemen Risiko
170 Sekretaris Dewan Komisaris
171 Sekretaris Perseroan
173 Internal Audit
176 Akuntan Publik
177 Manajemen Risiko
184 Sistem Pengendalian Internal
187 Kode Etik
188 Kebijakan Anti Gratifikasi
188 Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
189 Kebijakan Partisipasi Dalam Politik
190 Sistem Pelaporan Pelanggaran
192 Informasi dan Klarifikasi Praktik *Bad Governance*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

196 *Corporate Social Responsibility*

LAPORAN KEUANGAN

204 Laporan Keuangan
380 Daftar Istilah

KILAS KINERJA 2018

- Pembuka
- Laporan Manajemen
- Profil Perusahaan
- Analisis dan Diskusi Manajemen
- Tata Kelola Perusahaan
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Laporan Keuangan
- Informasi Lain-lain

Keterangan:

PERTAMAX TURBO
- Italia

HULU PRODUKSI
- Malaysia
- Irak
- Aljazair
- Nigeria
- Tanzania
- Gabon

HULU EKSPLORASI
- Colombia
- Namibia
- Italia
- Prancis
- Venezuela
- Kanada

HILIR PELUMAS
- Australia (*Branch Office*)
- Timor Leste
- Singapura
- Filipina
- Malaysia
- Kamboja
- Myanmar
- Vietnam
- Thailand (pabrik)
- Bangladesh
- Nepal
- Yaman
- Jepang
- Italia
- Nigeria
- Afrika Selatan
- China

HILIR BAHAN BAKAR AVIASI
- Belanda
- Saudi Arabia
- Uni Emirat Arab - Cina
- Hong Kong
- Korea Selatan
- Kamboja
- Malaysia
- Thailand
- Australia
- Singapura
- Asia Selatan

HILIR PETROKIMIA
- Malaysia
- Cina
- India
- Eropa

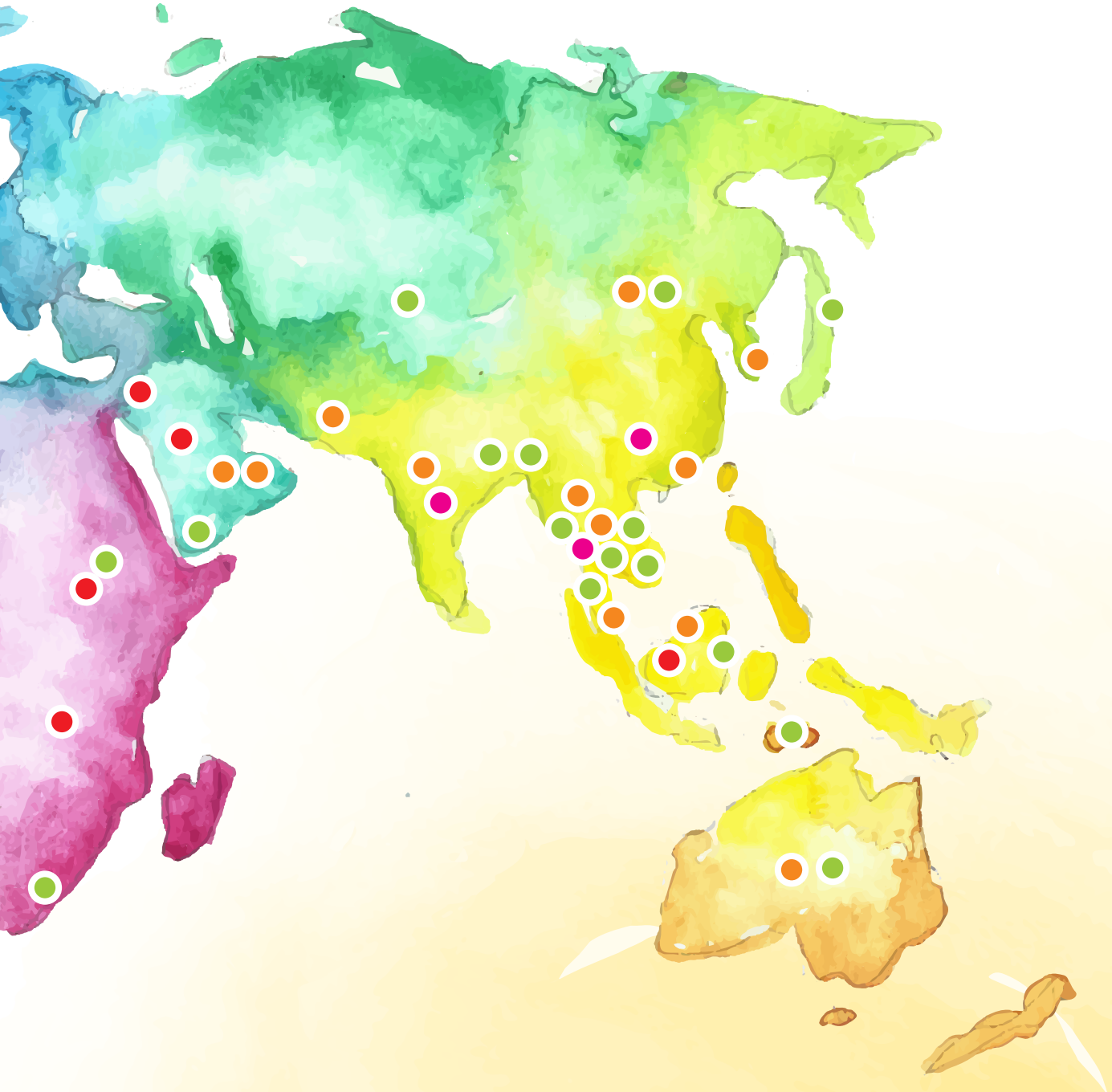

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

- Pembuka
- Laporan Manajemen
- Profil Perusahaan
- Analisis dan Diskusi Manajemen
- Tata Kelola Perusahaan
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Laporan Keuangan
- Informasi Lain-lain

(dalam jutaan USD)

Keterangan	2018	2017**	2016**	2015	2014*
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya	57.934	46.001	39.812	41.763	69.996
Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung Lainnya	48.714	37.625	30.264	35.790	63.347
Beban Operasi: • Beban Penjualan dan Pemasaran • Beban Umum dan Administrasi	 1.643 1.330	 1.590 1.599	 1.340 1.509	 990 1.062	 1.092 1.119
Laba Usaha	6.247	5.187	6.699	3.921	4.438
Laba Bersih	2.636	2.700	3.471	1.442	1.477
EBITDA	9.204	7.256	8.471	5.130	5.728
Total Aset	64.718	57.439	53.976	45.519	50.696
Total Liabilitas	35.108	30.426	28.731	26.044	31.881
Total Ekuitas	29.610	27.013	25.245	19.475	18.815

*Disajikan kembali, akibat penerapan retrospektif PSAK No 24 "Imbalan Kerja" dan PSAK No 66 "Pengaturan Bersama"
** Disajikan kembali, akibat dikonsolidasikannya PT Perusahaan Gas Negara ("PGN") dan reklasifikasi akun tertentu

IKHTISAR KINERJA OPERASIONAL

KINERJA HULU

Keterangan	Satuan	2018	2017	2016	2015	2014
Produksi minyak	MBOPD	393	342	312	278	270
Produksi gas	MMSCFD	3.059	2.035	1.961	1.902	1.613
Produksi migas	MBOEPD	921	693	650	607	549
Tambahan Cadangan Terbukti (P1)	MMBOE	426	314	227	79	282

KINERJA PENGOLAHAN & PENGEMBANGAN KILANG

Keterangan	Satuan	2018	2017	2016	2015	2014
Pengolahan Minyak Mentah, Gas & Intermedia	MMbbl	337	324	328	306	314
Produksi BBM	MMbbl	279	263	266	241	241
Produksi Non-BBM	MMbbl	29	29	26	23	22

KINERJA PEMASARAN

Keterangan	Satuan	2018	2017	2016	2015	2014
Penjualan BBM	Juta Kilo Liter	70	67	65	62	65
Penjualan Non-BBM	Juta Kilo Liter	16	16	15	14	14
Volume penjualan gas	BBTU	1.122.623*	823.769	708.684	705.729	701.724
Volume transportasi gas	BSCF	777*	502	522	531	508

*termasuk PGN

IKHTISAR OBLIGASI

Pertamina telah menerbitkan *Global Bond* sepanjang tahun 2011-2014 dan 2018 serta mencatatkannya pada Bursa Singapura *(Singapore Exchange/SGX)*. Sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah pokok Global Bond Pertamina adalah sebesar USD 9.262 juta. Selama tahun 2015-2018, Pertamina telah melakukan pembelian kembali sebagian obligasi senior senilai USD 238 juta.

Keterangan	Pertamina *Global Bond* 2011 PTM 2021	Pertamina *Global Bond* 2011 PTM 2041	Pertamina *Global Bond* 2012 PTM 2022	Pertamina *Global Bond* 2012 PTM 2042	Pertamina *Global Bond* 2013 PTM 2023	Pertamina *Global Bond* 2013 PTM 2043	Pertamina *Global Bond* 2014 PTM 2044	Pertamina *Global Bond* 2018 PTM 2048
Tanggal Terbit	23 Mei 2011	27 Mei 2011	3 Mei 2012	3 Mei 2012	20 Mei 2013	20 Mei 2013	30 Mei 2014	07 Nov 2018
Tanggal Jatuh Tempo	23 Mei 2021	27 Mei 2041	3 Mei 2022	3 Mei 2042	20 Mei 2023	20 Mei 2043	30 Mei 2044	07 Nov 2048
Tenor	10 Tahun	30 Tahun	10 Tahun	30 Tahun	10 Tahun	30 Tahun	30 Tahun	30 Tahun
Jumlah Obligasi yang Beredar	USD 1.000 Juta	USD 500 Juta	USD 1.242 Juta	USD 1.222 Juta	USD 1.615 Juta	USD 1.433 Juta	USD 1.500 Juta	USD 750 Juta
Kupon	5,250%	6,500%	4,875%	6,000%	4,300%	5,625%	6,450%	6,500%
Harga Penerbitan	98,09%	98,38%	99,41%	98,63%	100%	100%	100%	98,06%
Rating saat Penerbitan:								
S&P	BB+ (*Positive*)	BB+ (*Positive*)	BB+ (*Positive*)	BB+ (*Positive*)	BB+ (*Positive*)	BB+ (*Positive*)	BB+ (*Positive*)	BBB- (Stable)
Fitch	BBB+ (*Positive*)	BBB+ (*Positive*)	BBB- (*Stable*)	BBB- (*Stable*)	BBB- (*Stable*)	BBB- (*Stable*)	BBB- (*Stable*)	BBB (*Stable*)
Moody's	Ba1 (*Stable*)	Ba1 (*Stable*)	Baa3 (*Stable*)	Baa3 (*Stable*)	Baa3 (*Stable*)	Baa3 (*Stable*)	Baa3 (*Stable*)	Baa2 (*Stable*)
Rating Terakhir:								
S&P	BBB- (*Stable*)	BBB- (*Stable*)	BBB- (*Stable*)	BBB- (*Stable*)	BBB- (*Stable*)	BBB- (*Stable*)	BBB- (*Stable*)	BBB- (*Stable*)
Fitch	BBB (*Stable*)	BBB (*Stable*)	BBB (*Stable*)	BBB (*Stable*)	BBB (*Stable*)	BBB (*Stable*)	BBB (*Stable*)	BBB (*Stable*)
Moody's	Baa2 (*Stable*)	Baa2 (*Stable*)	Baa2 (*Stable*)	Baa2 (*Stable*)	Baa2 (*Stable*)	Baa2 (*Stable*)	Baa2 (*Stable*)	Baa2 (*Stable*)

PENGHARGAAN

- Pembuka
- Laporan Manajemen
- Profil Perusahaan
- Analisis dan Diskusi Manajemen
- Tata Kelola Perusahaan
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Laporan Keuangan
- Informasi Lain-lain

No	Tanggal	Nama Penghargaan	Peringkat Dan Kategori	Lembaga Pemberi Award
1	17 Januari 2018	Lifetime Achievement Award		Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI).
2	24 Februari 2018	Sustainability Reporting Award (SRA)	Winner of Best SR for Oil and Gas Category	National Center Sustainability Reporting (NCSR)
3	8 Maret 2018	WOW Brand Festive Day 2018	Gold Champion bidang *resources and energy* untuk kategori Bahan Bakar Non Subsidi - brand Pertamax	MarkPlus.Inc
4	29 Maret 2018	Public Relations Indonesian Award (PRIA) 2018	Silver untuk Kategori Program Corporate PR program komunikasi korporat Pelestarian Keragaman Hayati tuntong laut dan owa Jawa	PR Indonesia
5	6 April 2018	Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan	Kategori Kontribusi Pembangunan Sulawesi Selatan (Sulsel) di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Gubernur Sulawesi Selatan
6	29 Maret 2018	PR Indonesia Awards 2018	Gold untuk kategori Sustainability Report	PR Indonesia
7	26 April 2018	WIPO Awards 2018	Kategori Intellectual Property (IP) Enterprise Trophy	*World Intellectual Property Organization* (WIPO)
8	26 April 2018	Penghargaan BUMN	Kategori Paten terbanyak di Indonesia	Kementerian BUMN
9	31 Mei 2018	Brand Finance TOP 100 Most Valuable Indonesian Brands 2018	*Most Valuable Indonesian Brands 2018 with USD 2.028 million Brand Values & AA- Brand Rating*	SWA bekerja sama dengan Brand Finance
10	29 Juni 2018	The Peer Awards	kategori Regional Asia untuk Program Pendidikan Lingkungan untuk Anak (PELITA) bertajuk "Green Education For Children-Nature Based Preschool" pada kategori "Corporate Responsibility" sub kategori "Educating Community".	Informatology Ltd, Inggris.
11	11 Juli 2018	Indonesia Green Company Achievement 2018	Menjadi 3 terbaik perusahaan yang mendapat Indonesia Green Company Achievement 2018	Majalah SWA dan Yayasan Kehati

No	Tanggal	Nama Penghargaan	Peringkat Dan Kategori	Lembaga Pemberi Award
12	03 Agustus 2018	The Best Contact Center Indonesia 2018	Platinum Accurate team (mens double)	Indonesia Contact Center Association (ICCA)
13	10 Agustus 2018	Anugerah IPTEK 2018	Juara 2 untuk anugerah IPTEK 2018 kategori Abyudaya.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
14	29 Agustus 2018	Anugerah Indonesia's Best Corporate Social Initiatives 2018	Kategori Indonesia's Best Business Practices dengan program Pertamina Energi Baru dan Terbarukan	Majalah Mix MarComm SWA Media Group
15	28 September 2018	Penganugerahan Penghargaan Subroto Tahun 2018	Kategori Inovasi Khusus Pada Industri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
16	31 Oktober 2018	11th APCCAL Expo 2018	Recognition of Performance Excellence	Asia Pasific Contact Centre Asso ciation Leaders (APCCAL)
17	29 Oktober 2018	ASEAN Energy award 2018	Juara pada kategori Special Submission Energy Management in Industry	The 36th ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM)
18	6 Desember 2018	Marketeers Editor's Choice Award 2018	Kategori The Breakthrough Application of the Year	MECA 2018
19	6-9 Desember 2018	Seoul International Invention Fair (SIIF) 2018	Medali Emas dan Penghargaan Spesial	Korea Invention Promotion Association (KIPA) didukung oleh Korea Intellectual Property Organization (KIPO), World Intellectual Property Organization (WIPO), dan International Federation of Inventors Association (IFIA).
20	14 Desember 2018	Indonesia Most Admired CEO (IMAC) 2018	Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati terpilih sebagai Most Admired CEO 2018 dengan kategori Excellent Leadership for Information Communication Technology (ICT) Optimization	

SERTIFIKASI

- Pembuka
- Laporan Manajemen
- Profil Perusahaan
- Analisis dan Diskusi Manajemen
- Tata Kelola Perusahaan
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Laporan Keuangan
- Informasi Lain-lain

Unit operasi dan unit bisnis	Area	Sertifikasi	Masa berlaku	Badan pemberi sertifikasi
Kantor Pusat Dit. Pemasaran	*Shipping Head Office*	ISO 9001:2015	03/12/2018	Lloyd's
	Petrochem Head Office	ISO 9001:2015	19/06/2018	BSI
		ISO 14001:2015	19/06/2018	BSI
		ISO 45001:2018	19/06/2018	BSI
MOR I - Sumatera Bagian Utara	TBBM Medan (Kecuali Belawan)	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Tj. Uban	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM P. Sambu	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Teluk Kabung	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Dumai	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Sei Siak	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Sibolga	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Lhoksemawe	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Krueng Raya	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Kisaran	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Pematang Siantar	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Meulaboh	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	Pangkalan Susu	ISO 14001:2015	27/12/2018	BSI
		ISO 45001:2018	27/12/2018	BSI
MOR II – Sumatera Bagian Selatan	Panjang	ISO 9001:2015	10/08/2018	BSI
MOR III – Jawa Bagian Barat	Depot LPG Tanjung Priok	ISO 14001:2015	01/09/2018	Llyod's
		ISO 45001:2018	01/09/2018	Llyod's
	TBBM Cikampek	ISO 14001:2015	14/09/2018	BSI
		ISO 45001:2018	29/11/2018	BSI
		ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	Depot LPG Balongan	ISO 45001:2018	02/06/2018	AJA
	TBBM Jakarta Group	ISO 9001:2015	14/09/2018	Llyod's
		ISO 14001:2015	14/09/2018	Llyod's
	TBBM Tasikmalaya	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM T. T - Tjg. Gerem	ISO 9001:2015	15/09/2018	DNV
	TBBM Balongan	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
MOR IV - Jawa Bagian Timur	TBBM Cilacap	ISO 14001:2015	14/09/2018	BSI
		ISO 45001:2018	31/08/2018	BSI
		ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI

Unit operasi dan unit bisnis	Area	Sertifikasi	Masa berlaku	Badan pemberi sertifikasi
MOR IV - Jawa Bagian Timur	TBBM Maos	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
		ISO 14001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Pengapon	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
		ISO 14001:2015	14/09/2018	BSI
		SMP	24/05/2018	Sucofindo dan Dir. Bimas Mabes Polri
	TBBM Boyolali	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
		ISO 14001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Rewulu	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Tegal	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
		ISO 14001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Lomanis	ISO 14001:2015	14/09/2018	BSI
MOR V – Jawa Timur Bali Nusa Tenggara	Tj. Perak	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
		ISO 14001:2015	14/09/2018	BSI
	Manggis	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
		ISO 14001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Surabaya Group	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Tuban	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Tj. Wangi	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Malang	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Madiun	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Camplong	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Manggis	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Sanggaran	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Ampenan	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Badas	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Bima	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Tenau	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Maumere	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Atapupu	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Kalabahi	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Waingapu	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Reo	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Ende	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
MOR VI - Kalimantan	Depot LPG Balikpapan	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
	TBBM Balikpapan	ISO 45001:2018	17/11/2018	BSI
	TBBM Samarinda	ISO 45001:2018	17/11/2018	BSI

Unit operasi dan unit bisnis	Area	Sertifikasi	Masa berlaku	Badan pemberi sertifikasi
MOR VII - Sulawesi	Depot LPG Makassar	ISO 45001:2018	17/01/2018	BSI
	TBBM Pare2	ISO 45001:2018	11/11/2018	BSI
MOR VIII – Papua	TBBM Wayame	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
		ISO 45001:2018	14/09/2018	BSI
	TBBM Jayapura	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
		ISO 45001:2018	14/09/2018	BSI
	TBBM Sorong	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
		ISO 45001:2018	14/09/2018	BSI
	TBBM Biak	ISO 9001:2015	14/09/2018	BSI
		ISO 45001:2018	14/09/2018	BSI
PT PGE	Kamojang	ISO 9001:2015	06/06/2018	TUV Nord
		ISO 14001:2015	06/06/2018	TUV Nord
		ISO 45001:2018	06/06/2018	TUV
	Lahendong	ISO 14001:2015	14/09/2018	BSI
PT PHE	*Technical Document Management PHE ONWJ*	ISO 9001:2015	14/09/2018	TUV Nord
	PHE ONWJ Project Quality Managemenr Services, Certifications and Permits (QA-QC Dept. Project)	ISO 9001:2015	17/02/2018	TUV Nord
	PHE ONWJ Provision of Fabrication, Installation & Maintenance Services (Dept. E&I)	ISO 9001:2015	17/02/2018	TUV Nord
	Produksi Gas dan Kondensat/ Jakarta Office & Field JOB Pertamina Talisman Jambi Merang	ISO 9001:2015	02/09/2018	TUV Nord
		ISO 14001:2015	13/11/2018	TUV Nord
		ISO 45001:2018	13/11/2018	TUV Nord
	Production of Crude Oil & Gas JOB Pertamina Petrochina East Java	ISO 14001:2015	14/09/2018	TUV Nord
PT PEP	EP	IEC 17025:2008	17/06/2018	KAN
Refinery Unit II – Dumai	Semua Area	ISO 9001:2015	14/09/2018	TUV Nord
		ISO 14001:2015	14/09/2018	TUV Nord
Refinery Unit III – Plaju	Semua Area	SMP	25/05/2018	Sucofindo
Refinery Unit IV – Cilacap	Semua Area	ISO 9001:2015	14/09/2018	TUV Nord
		ISO 14001:2015	14/09/2018	TUV Nord
Refinery Unit VI – Balongan	Semua Area	ISO 45001:2018	26/03/2018	SGS
	Semua Area	SMP	10/09/2018	Sucofindo

PERISTIWA PENTING

1 Januari 2018

Pertamina Resmi Kelola Blok Mahakam
Pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Mahakam secara resmi beralih dari Total E&P Indonesie (TEPI) ke PT Pertamina (Persero). Proses serah terima diawali dengan penyerahan kembali pengelolaan WK Mahakam dari TEPI & Inpex kepada Pemerintah yang diwakili Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi untuk diserahkan kepada Pertamina yang diwakili oleh Direktur Hulu Syamsu Alam. Peresmian ini dilakukan secara simbolis dengan memberikan buku dan penggantian logo pada pakaian pegawai yang dilakukan bertepatan dengan pergantian tahun pukul 00.00 WITA 1 Januari 2018 di Balikpapan.

Januari 2018

Pertamina Pasok LNG ke Bangladesh dan Pakistan
Menindaklanjuti kerja sama di bidang energi yang diinisiasi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Bangladesh dan Pakistan sejak September 2017, Pertamina melakukan kesepakatan jual beli LNG dan kerjasama lainnya dengan beberapa perusahaan energi di kedua negara tersebut. Salah satunya kesepakatan untuk memasok gas alam cair atau *Liquified Natural Gas* (LNG) ke Bangladesh dan Pakistan, yang akan dilakukan Pertamina ke kedua negara tersebut.

5 Februari 2018

Pertamina EP Bangun 3D Museum Migas Pertama di Indonesia
PT Pertamina EP Asset 2 menginisiasi pembangunan 3D Museum Migas di Kompleks Pertamina EP Prabumulih. Museum ini diharapkan dapat menjadi salah satu *education centre* sehingga nantinya masyarakat luas dapat memperoleh pengetahuan hulu migas secara komprehensif. Museum yang dibangun di atas lahan seluas 4.000 m^2 tersebut menjadi 3D museum migas pertama di Indonesia.

Maret 2018

Pertamina Lubricants Lebarkan Sayap Bisnis di Negeri Kangguru
PT Pertamina Lubricants memperluas bisnisnya di mancanegara. Pada awal Maret 2018, anak perusahaan Pertamina ini membuka Pertamina Lubricants *Representative Office* Australia di Sydney yang menjadi langkah strategis PT Pertamina Lubricants untuk terus mengembangkan pasar internasional, memperkuat jaringan pasar global sekaligus terus memperkenalkan produk pelumas kelas dunia karya anak bangsa di pasar dunia.

30 April 2018

PLTP Karaha Unit 1 Terangi 33 Ribu Rumah di Tasik dan Sekitarnya
PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mulai mengoperasikan secara komersil Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Unit I pada 6 April 2018. Pembangkit dengan kapasitas 30 MW ini akan menerangi 33 ribu rumah di Tasikmalaya dan sekitarnya. Pencapaian ini merupakan realisasi dari program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah, dimana akan meningkatkan kehandalan sistem transmisi Jawa-Bali dengan tambahan suplai listrik sebesar 227 *gigawatt hour* (GWh) per tahun.

20 Mei 2018

Pertamina Resmi Operasikan WK Ogan Komering
PT Pertamina Hulu energy (PHE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero) resmi menerima mandat alih kelola Wilayah Kerja (WK) Ogan Komering, pada Minggu 20 April 2018. Mandat ini merupakan tindak lanjut dari kontrak *Production Sharing Contract* (PSC) antara Pemerintah dengan afiliasi Pertamina pada tanggal 20 April 2018 yang berlaku efektif mulai 20 Mei 2018.

21 Mei 2018

Pertamina Resmi Kelola Lapangan Sukowati
Mengacu pada keputusan Menteri ESDM Nomor 2800/13/MEM.M/2018 tanggal 17 Mei 2018, PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) resmi mengelola Lapangan Unitisasi Sukowati. Lapangan Sukowati yang sebelumnya dioperatori oleh *Joint Operating Body*-Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ), pada 20 Mei 2018 diserahkelolakan kepada PT Pertamina EP.

13 Juli 2018

Pertamina - UNS: Ciptakan Baterai dengan Kekuatan Tempuh 100 Km

PT Pertamina (Persero) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) berhasil memproduksi *Lithium Ion Battery* (LIB) untuk penggerak motor listrik yang hemat dan murah. Dengan baterai ini kendaraan bermotor listrik roda dua mampu menempuh jarak 80-100 kilometer hanya dengan biaya Rp5.000. Pertamina mendukung pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan Roadmap Pertamina 2030 dan sejalan kebijakan global untuk menurunkan kadar emisi melalui penggunaan energi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik.

31 Mei 2018

PHE Tandatangani Kontrak Kerjasama dengan Komitmen Pasti Terbesar Dalam Sejarah

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani dua kontrak kerjasama alih kelola dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan menggunakan sistem kontrak Gross Split, yaitu wilayah kerja Jambi Merang dan wilayah kerja Raja/Pendopo. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Operasi & Produksi PHE Ekariza dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Amien Sunaryadi, disaksikan oleh Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, di Gedung Kementerian ESDM. Arcandra Tahar mengatakan, komitmen pasti di Jambi Merang merupakan yang terbesar dalam sejarah Pertamina.

29 Juni 2018

Penandatanganan *Conditional Sales Purchase* Pertamina - PGN

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (*Conditional Sales Purchase Agreement*/ CSPA) dengan PT Pertamina (Persero). Penandatanganan CSPA antara Pertamina dan PGN ini merupakan kelanjutan dari proses integrasi PGN untuk mengakuisisi Pertagas sebagai tahap lanjutan usai induk BUMN Migas resmi berdiri pada 11 April 2018 lalu (*Holding* BUMN Migas) yang dilakukan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* dan Peraturan Perundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal serta melibatkan berbagai pihak yang mendukung dan mengawal proses.

30 Juli 2018

2021, Pertamina Siap Kelola Blok Rokan

PT Pertamina (Persero) menyambut baik keputusan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memercayakan pengelolaan Blok Rokan kepada BUMN ini. Keputusan tersebut murni diambil atas dasar pertimbangan bisnis dan ekonomi setelah mengevaluasi pengajuan proposal Pertamina yang dinilai lebih baik dalam mengelola blok tersebut.

30 Juli 2018

Pertamina Perkuat Infrastruktur Hilir di Nusa Tenggara Timur

Pertamina terus memperkuat infrastruktur hilir dalam rangka mendistribusikan BBM dan LPG. Direktur Logistik, *Supply Chain* dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo meresmikan *groundbreaking* pengembangan Terminal BBM Maumere, di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Senin (30/7/2018). Proyek pengembangan Terminal BBM Maumere akan meningkatkan kapasitas tangki timbun BBM dari 20.000 Kiloliter (KL) menjadi lebih dari 85.000 KL dan berperan sebagai *point supply* utama di wilayah Nusa Tenggara Timur.

7 Agustus 2018

Pertamina Alih Kelola Blok Sanga Sanga

PT Pertamina (Persero) resmi mengambil alih kelola Wilayah Kerja (WK) Sanga Sanga dari VICO Indonesia, pada Selasa (7/8/2018). Proses peresmian serah terima alih kelola WK Sanga Sanga diawali dengan penyerahan kembali pengelolaan WK Sanga Sanga dari VICO Indonesia kepada Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, untuk selanjutnya diserahkan kepada SVP *Upstream Strategic Planning & Performance Evaluation* Pertamina Meidawati.

WK Sanga Sanga, di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, merupakan salah satu dari 8 WK terminasi yang diserahkan pengelolaannya dari pemerintah kepada Pertamina, pada 20 April 2018.

6 September 2018

Pertamina Kelola Wilayah Kerja Southeast Sumatra

Mulai Kamis (6/9/2018), Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) resmi mengelola 100% wilayah kerja (WK) *Southeast* Sumatra (SES) dari operator lama CNOOC SES Ltd. Selanjutnya WK SES dioperasikan oleh PHE Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) sebagai operator baru.

11 November 18

PHSS Sukses *Lifting* Kargo LNG *Gross Split* Pertama di Indonesia

Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) sukses melakukan *lifting* perdana atas penjualan *Liquid Natural Gas* (LNG) yang merupakan kargo LNG pertama semenjak diterapkannya pengelolaan Wilayah Kerja Migas dengan skema *Gross Split* di Indonesia, pada Minggu (11/11/2018). Volume *lifting* perdana tersebut satu kapal atau kargo. Itu setara 146.000 meter kubik (m^3).

25 Oktober 2018

WK *East* Kalimantan-Attaka Resmi Dikelola Pertamina

PT Pertamina (Persero) resmi melakukan alih kelola Wilayah Kerja (WK) *East* Kalimantan-Attaka dari Chevron Indonesia Company (CICo), mulai pukul 00.00 WITA, pada Kamis (25/10/2018) Pengelolaan WK ini akan dilakukan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT). Secara simbolis serah terima pengelolaan WK tersebut dilakukan oleh Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia Albert Simanjuntak kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia Bambang Manumayoso, disaksikan oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.
PHKT merupakan anak usaha dari Pertamina Hulu Indonesia (*subsidiary* dari PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai pengelola sekaligus operator di WK *East* Kalimantan-Attaka untuk periode kontrak 25 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2038.

17 Oktober 2018

Direktur Utama PGE Resmikan Ulubelu Geothermal Information

Dalam mewujudkan komitmen perusahaan yang senantiasa tumbuh bersama masyarakat, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengembangkan sarana edukasi panas bumi di beberapa area operasinya, tidak terkecuali Area Ulubelu. Terkait hal tersebut, Direktur Utama PGE Ali Mundakir didampingi oleh *General Manager* (GM) Area Ulubelu Dirgo Rahayu meresmikan Ulubelu Geothermal Information (UGI), yang merupakan pusat informasi edukasi geothermal/panas bumi untuk berbagai kalangan, pada (17/10/2018).

10 Desember 2018

Peluncuran *Green Energy Station*

Pertamina meluncurkan *Green Energy Station* (GES) di SPBU Kuningan, Jakarta. Acara peresmian dihadiri oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Direktur utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, dan jajaran direksi lainnya.

Dukungan juga didapatkan dari Kementerian Perindustrian, Sinergi BUMN dengan Telkom dan PLN, lembaga pendidikan melalui UI, pelaku bisnis kendaraan listrik BMW, Toyota, Mitsubishi, dan Gesits, serta pelaku bisnis *charging station* Bosh.

10 Desember 2018

Pertamina Resmikan Dua DPPU di Kalimantan Timur

Tingkatkan pelayanan dan ketahanan stok bahan bakar jenis Avtur di dua bandara baru di Provinsi Kalimantan Timur, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VI Kalimantan meresmikan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) di Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Kota Samarinda dan Bandara Kalimarau di Kota Berau.

Peresmian dilaksanakan bersamaan dengan peringatan HUT ke-61 Pertamina pada Senin (10/12/2018), sekaligus menjadi wujud dukungan Pertamina terhadap program BUMN Hadir Untuk Negeri dari Kementerian BUMN.

19 Desember 2018

Wujudkan *Green Energy*, Pertamina Bangun PLTGU Berkapasitas Terbesar di Asia Tenggara

Pembangunan proyek terintegrasi infrastruktur gas dan pembangkit listrik gas (PLTGU) Jawa 1 resmi dimulai, pada Rabu (19/12/2018). Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ,Darmin Nasution, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke WIdyawati. Pembangunan pembangkit pertama dan terbesar di Asia Tenggara ini memadukan infrastruktur gas (LNG-FSRU) dan pembangkit listrik yang memiliki kapasitas 1.760 MW.

21 Desember 2018

Inovasi *Green Gasoline* dan *Green* LPG, Hemat Devisa USD 160 Juta/tahun

PT Pertamina (Persero) terus berinovasi dalam mendorong pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan, sekaligus mendorong pengurangan impor minyak mentah. Salah satu inovasi yang diterapkan di Kilang Refinery Unit III Plaju. Sejak awal Desember lalu, kilang ini mampu mengolah CPO (*Crude Palm Oil*) atau minyak sawit mentah menjadi *Green Gasoline* (bahan bakar bensin ramah lingkungan) dan *Green* LPG dengan teknologi *co-processing*. Yakni menggabungkan sumber bahan bakar alami dengan sumber bahan bakar fosil untuk diproses di dalam kilang sehingga menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan.

LAPORAN MANAJEMEN

"Sinergi yang terbangun antara Dewan Komisaris dan Direksi berhasil membawa Pertamina lebih untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Sepasang sapi yang dipertautkan dengan bambu tengah dipacu oleh seorang sais dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Kegiatan ini disebut karapan sapi, perlombaan tradisional masyarakat Madura, yang memiliki filosofi bahwa siapa cepat, dia dapat. Dari karapan sapi bisa dilihat bahwa orang Madura umumnya adalah pekerja keras, pantang berdiam diri.

Alexander Lay
Komisaris Independen

Tanri Abeng
Komisaris Utama

Archandra Tahar
Wakil Komisaris Utama

Sahala LG
Komisaris

Suahasil N
Komisaris

Ahmad Bambang
Komisaris

Ego Syahrial
Komisaris

Nicke Widyawati
Direktur Utama

Koeshartanto
Direktur Sumber Daya Manusia

Gandhi Sriwidodo
Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur

M. Haryo Yunianto
Direktur Manajemen Aset

Mas'ud Khamid
Direktur Pemasaran Retail

Ignatius Tallulembang
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia

Basuki Trikora Putra
Direktur Pemasaran Korporat

Budi Santoso Syarif
Direktur Pengolahan

Dharmawan H. Samsu
Direktur Hulu

Pahala N. Mansury
Direktur Keuangan

Heru Setiawan
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Pencapaian kinerja Pertamina tahun 2018 juga merupakan kontribusi pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh Dewan Komisaris.

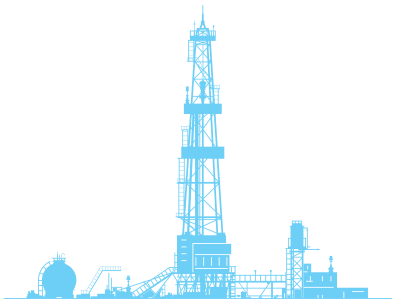

86,72

Kategori Sehat AA

Realisasi tingkat kesehatan Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002

Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dalam tahun 2018 ini Pertamina berhasil melaksanakan tugasnya, baik secara korporasi maupun sebagai *agent of development,* secara maksimal walaupun dalam kondisi yang memang sulit.

KONDISI EKSTERNAL

Ketidakpastian global di tahun 2018 mempengaruhi permintaan ekonomi secara global, ketidakpastian moneter Amerika Serikat hingga Perang Dagang antara Amerika Serikat dan China menyebabkan dinamika pada nilai tukar. Perekonomian Indonesia di tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan inflasi yang terjaga. Hal ini memberikan suasana yang kondusif bagi upaya penguatan momentum pemulihan ekonomi domestik.

Pemerintah menyatakan tidak ada perubahan harga BBM & LPG PSO serta tidak ada perubahan skema penyediaan dan distribusi BBM & LPG PSO. Kondisi ini menyebabkan kinerja Pertamina menurun di awal tahun 2018. Namun Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden 43 tahun 2018, yang di dalamnya menyatakan bahwa Pertamina akan mendapatkan penggantian dari Pemerintah atas selisih antara harga ketetapan dan formula setelah diaudit oleh BPK dan mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan BUMN.

Kebijakan Pemerintah dalam PP 43 tersebut tersebut mempengaruhi kinerja laba dan *cash flow* Pertamina Tahun 2018. Pertamina telah mengakui selisih harga ketetapan dan harga formula untuk penjualan tahun 2017 dan tahun 2018 dalam Laporan Keuangan tahun 2018 karena semua persyaratan telah terpenuhi. Kondisi ini mempengaruhi kinerja laba namun karena Pertamina belum memperoleh pembayaran maka *cash flow* perusahaan relatif terganggu.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris tetap mengapresiasi bahwa Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menghadapi masa sulit pada tahun 2018 sehingga masih dapat menghasilkan laba yang tinggi. Pertamina mencapai laba bersih tahun 2018 sebesar USD 2,64 miliar.

Keberlanjutan pencapaian kinerja ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan Direksi untuk terus melakukan efisiensi dalam kegiatan operasi. Upaya untuk melakukan penurunan *losses* tetap konsisten dilakukan melalui upaya-upaya preventif dan pengendalian. Direksi diharapkan dapat tetap memberikan prioritas pada upaya penurunan *losses*, dalam rangka meningkatkan budaya *"Clean"*.

Pertamina telah meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan investasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, hingga tahap evaluasi. Selain itu, perencanaan investasi ke depan sebaiknya disusun dengan lebih realistis dan memperhatikan kondisi lapangan.

Pertamina menerapkan strategi yang tepat sehingga stok produk migas nasional tetap terjaga dengan baik namun dengan tetap memperhatikan biaya modal kerja yang harus ditanggung Pertamina. Hal ini terbukti antara lain dari hasil kinerja Perkapalan yang melebihi target. Di samping itu, sektor pengolahan juga membukukan kinerja yang cukup baik pada tahun 2018 di sisi *Total Yield on Intake* dan *Yield Valuable on Total Intake*.

Di sektor pemasaran, Pertamina berhasil meningkatkan jumlah volume penjualan di semua lini produknya namun dari sisi pangsa pasar relatif tetap stabil. Kinerja tersebut tetap harus diapresiasi karena dalam persaingan yang ketat, Pertamina terbukti masih mampu mempertahankan pangsa pasarnya. Pertamina diharapkan untuk dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka meminimalisasi faktor-faktor eksternal yang berpotensi mengganggu pencapaian target, misalnya dalam hal infrastruktur.

Kinerja HSSE pada tahun 2018 belum sepenuhnya *excellent* karena masih terdapat kasus *fatality* walaupun dalam jumlah sedikit. Pertamina tetap konsisten dalam meningkatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan sekitar operasi perusahaan, ditandai dengan kenaikan pencapaian jumlah *proper* dari tahun ke tahun.

PENGAWASAN DAN PEMBERIAN ARAHAN

Pencapaian kinerja Pertamina tahun 2018 juga merupakan kontribusi pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh Dewan Komisaris. Sesuai Anggaran Dasar, tidak semua keputusan dapat dilakukan oleh Direksi namun keputusan yang strategis tetap membutuhkan keputusan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Beberapa keputusan yang tidak dapat dilakukan oleh Direksi antara lain investasi penyertaan modal pada perusahaan lain, pengambilan *participating interest*, penyusunan perubahan rencana kerja perusahaaan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi. Bahkan atas setiap keputusan yang diberikan, Dewan Komisaris juga memberikan arahan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Beberapa arahan strategis yang diberikan selama tahun 2018 antara lain:

1. Penyusunan anggaran, pelaksanaan dan *monitoring* investasi perlu mendapatkan perhatian mengingat bahwa pencapaian investasi selalu berada di bawah target dan banyak proyek yang mengalami keterlambatan. Perlu peningkatan kapasitas dalam manajemen proyek. Selain itu, perencanaan investasi ke depan sebaiknya disusun dengan lebih realistis dan memperhatikan kondisi lapangan.
2. Direksi diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya optimalisasi sumur produksi, perbaikan & maintenance peralatan produksi secara berkala, koordinasi dengan ISC untuk mengoptimalkan *lifting*.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Pertamina menyadari perannya sebagai BUMN tidak hanya bertujuan mengejar keuntungan semata. Pertamina juga berperan dalam menyediakan BBM di seluruh wilayah tanah air, mengelola sumber-sumber migas dan menjaga ketahanan energi nasional. Efisiensi dalam setiap lini kegiatan operasi dan keputusan investasi yang tepat dengan mengedepankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat menjadi kunci keberhasilan dalam mengemban tugas tersebut.

Kemampuan Pertamina untuk tetap menghasilkan kinerja optimal di tahun 2018, dalam kondisi kenaikan harga minyak dan kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan, menunjukkan bahwa Perusahaan mampu untuk bertahan dalam kondisi sulit. Persaingan yang semakin ketat pada sektor hilir, mendorong upaya untuk melakukan efisiensi dan peningkatan pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan volume penjualan dan pangsa pasar di sektor hilir.

Pertamina merencanakan melakukan perbaikan dan pemutakhiran infrastruktur distribusi sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dan mengurangi potensi *losses*. Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan *monitoring losses* yang lebih ketat dan perubahan budaya kerja, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi signifikan.

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Dewan Komisaris menilai Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Komitmen pengelolaan tata kelola ini dibuktikan dengan keteraturan perusahaan melakukan penilaian GCG untuk memastikan bahwa semua aspek tata kelola dilaksanakan dengan baik. Perseroan berusaha agar GCG diterapkan dalam setiap keputusan yang diambil dan menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan Perseroan.

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik tersebut menghasilkan kinerja yang baik yang tercermin dalam Tingkat Kesehatan Perusahaan secara keseluruhan, yang mengkombinasikan penilaian kinerja keuangan, operasi dan administrasi. Pada tahun 2018, realisasi tingkat kesehatan Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 mencapai 86,72 (kategori Sehat AA), di samping itu Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham menetapkan kontrak kinerja manajemen berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) mencapai 103,67%. Hal ini berarti kinerja manajemen Pertamina mengalami peningkatan dibanding tahun 2017.

Dewan Komisaris juga melakukan *monitoring* atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan dan masyarakat. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Kegiatan CSR memberikan kontribusi kepada masyarakat di bidang Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan hidup. Kegiatan CSR dilaksanakan untuk mendukung kegiatan operasi Pertamina dan perolehan Proper dari beberapa unit operasi. Kegiatan Bina Lingkungan difokuskan pada kegiatan pemberian bantuan Pendidikan, bencana alam, pembangunan sarana ibadah, olahraga dan peningkatan kesehatan masyarakat. Program kemitraan fokus pada upaya pemberian dukungan modal usaha serta upaya pembinaan dan perluasan akses pasar untuk pengusaha kecil.

PENILAIAN KINERJA ATAS KOMITE DEWAN KOMISARIS

Tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris dilaksanakan secara langsung oleh Dewan Komisaris atau secara tidak langsung melalui Komite-Komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. Pengawasan dilakukan atas aspek–aspek operasional dan strategis yang berkontribusi signifikan bagi kinerja Perseroan.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2018 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam *board manual* dan dilaksanakan dengan baik. Dewan Komisaris menjalankan perannya untuk melakukan *monitoring* jalannya Perseroan dan memberikan keputusan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasan dan penilaian atas pencapaian kinerja Dewan Komisaris secara triwulanan dan tahunan kepada pemegang saham.

Komite Dewan Komisaris telah bekerja dengan baik sesuai ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG). Komite bekerja aktif menganalisis dan merespon perubahan lingkungan bisnis yang berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Komite juga membantu Dewan Komisaris dalam menyiapkan surat Dewan Komisaris terkait permintaan persetujuan, dukungan, saran/nasehat serta tanggapan dari Direksi setelah melakukan proses analisis mendalam.

Komite Audit memonitor kinerja audit internal, auditor independen dalam melakukan audit laporan keuangan, me-*review* laporan Perseroan kepada pihak luar, sistem pengendalian intern Perseroan dan memonitor sistem *whistleblowing*. Komite Audit membantu tugas Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan penghapusan aset, *monitoring* Anak Perusahaan, *monitoring* kinerja operasi dan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Komite Pemantau Manajemen Risiko (PMR) memonitor kinerja sektor hulu, hilir dan investasi, melakukan analisis dan memberikan rekomendasi keputusan strategis di bidang investasi. Komite Nominasi & Remunerasi (NR) membantu dalam memastikan ditempatkannya SDM unggul untuk menduduki posisi kunci pada Perseroan, melakukan *review* atas formulasi remunerasi Direksi & Dewan Komisaris, usulan perubahan struktur organisasi, dan usulan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Pertamina.

Komite-Komite memiliki mitra kerja dengan Manajemen yang mengelola proses bisnis terkait. Hubungan kemitraan yang baik dan harmonis dengan Komite telah menciptakan proses komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga memudahkan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dalam tahun 2018 terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan No.SK-142/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018, RUPS memutuskan :

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr.Edwin Hidayat Abdullah.
2. Mengangkat Sdr.Ahmad Bambang dan Sdr.Ego Syahrial sebagai Komisaris.
3. Menetapkan Sdr.Alexander Lay sebagai Komisaris Independen. Dengan demikian ketentuan minimal 20% Komisaris Independen telah terpenuhi.

APRESIASI

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan Pertamina yang senantiasa mendukung perjalanan Perseroan baik dalam kondisi yang baik maupun dalam kondisi yang sulit. Apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan banyak kemudahan kepada Pertamina dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketersediaan BBM di seluruh tanah air. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh insan Pertamina di seluruh wilayah kerja Pertamina, dari jajaran pekerja sampai dengan Direksi, yang senantiasa giat memberikan kemampuan terbaiknya untuk Pertamina. Apresiasi kepada para pelanggan, pemasok, mitra bisnis kami, atas kerja sama dan jalinan hubungan yang saling menguntungkan yang selama ini telah berjalan dengan baik. Semoga Pertamina mampu terus mengukir prestasi untuk negeri dan menjadi kebanggaan Indonesia.

Atas nama Dewan Komisaris,

Tanri Abeng
Komisaris Utama / Komisaris Independen

Terus Menjunjung Komitmen, Memberikan yang Terbaik

"Pertamina telah berhasil melalui tahun 2018 dengan capaian kinerja yang baik. Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen, dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan."

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkah dan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua sehingga PT Pertamina (Persero) dapat melalui tahun 2018 yang penuh tantangan dengan pencapaian kinerja yang baik. Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi atas tugas pengelolaan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada 31 Desember 2018.

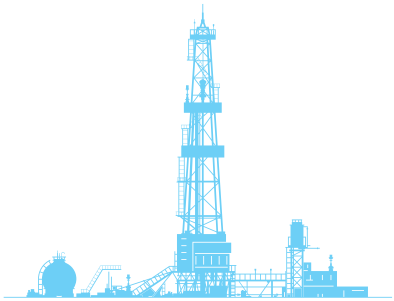

15% ▲

393 MBOPD

Produksi minyak tahun 2018 mencapai sebesar 393 MBOPD, meningkat 15%

KONDISI EKONOMI

Perekonomian global tahun 2018 diwarnai oleh ketidakpastian. Adalah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok dan kenaikan suku bunga The Fed yang ditengarai sebagai penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Perang dagang telah mengakibatkan arus perdagangan dunia mengalami perlambatan. Permintaan barang, khususnya dari Tiongkok mengalami perlambatan dan di lain pihak arus barang dari Tiongkok ke berbagai negara menjadi lebih deras sebagai bagian dari upaya pemerintah Tiongkok untuk mencari pasar substitusi setelah pemerintah AS memberlakukan bea masuk yang tinggi terhadap produk-produk Tiongkok.

Selain itu, kenaikan suku bunga The Fed berdampak pada kondisi pasar keuangan global, di mana arus investasi lebih mengarah ke instrumen yang cenderung aman (*risk aversion*), sehingga pasar saham global terkoreksi cukup tajam.

PERTAMINA

Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh positif. Sepanjang tahun 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Pertumbuhan yang cukup baik itu juga diimbangi dengan tingkat inflasi yang terjaga di level yang rendah yaitu 3,13%.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Pada Oktober 2018, nilai tukar Rupiah terhadap USD sempat menyentuh Rp15.200/USD atau menjadi yang terendah sejak krisis ekonomi tahun 1998.

Neraca perdagangan Indonesia tahun 2018 juga ditutup dengan defisit sebesar 8,6 miliar USD yang disebabkan oleh laju pertumbuhan impor yang jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekspor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pada September 2018 pemerintah membuat kebijakan dengan memberlakukan mandatori perluasan penggunaan bahan bakar diesel atau B20 melalui Perpres No. 66 Tahun 2018 yang salah satu tujuannya adalah untuk menekan laju impor, khususnya impor BBM jenis solar.

FLUKTUASI HARGA MINYAK

Pergerakan harga minyak di pasar Brent dan WTI masih menjadi tantangan bagi Pertamina. Pada periode Januari hingga Oktober 2018 tren harga minyak cenderung mengalami peningkatan dengan puncaknya mencapai 84,1 USD per *barrel* (Brent) dan 75,5 USD per *barrel* (WTI) pada Oktober 2018. Namun setelah itu, harga minyak dunia terjun bebas dan sempat menyentuh level terendah dengan harga 51,6 USD per *barrel* dan 43,6 USD per *barrel* pada Desember 2018 dan akhirnya ditutup dengan harga 54,6 USD per *barrel* dan 46,5 USD per *barrel* di akhir tahun 2018.

Sejalan dengan harga minyak dunia, *Indonesian Crude Price* (ICP) juga berfluktuasi. Pada Januari, ICP berada di harga 65,6 USD per *barrel*, sedangkan ICP SLC pada harga 65,8 USD per *barrel*. ICP berada pada level tertingginya pada Oktober yang mencapai 77,6 USD per *barrel* dan 78,1 USD per *barrel* untuk ICP SLC. Saat harga minyak dunia turun, ICP juga terpengaruh turun mencapai 54,8 USD per *barrel* dan 55,6 USD per *barrel* untuk ICP SLC.

Mengantisipasi perkembangan harga minyak dunia, Pemerintah RI untuk menerbitkan berbagai kebijakan terkait dengan migas yang berdampak kepada operasi dan kinerja Pertamina. Kebijakan tersebut diambil untuk melepas tekanan kepada neraca perdagangan Indonesia, khususnya dari impor migas, menjaga cadangan devisa negara serta untuk menjaga daya beli masyarakat.

MEWUJUDKAN KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL

Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Pertamina berada di baris terdepan untuk mendukung upaya yang telah dicanangkan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Karena itu, dari waktu ke waktu, Pertamina terus memperkuat komitmen untuk melakukan pengembangan usaha di bidang energi baru dan terbarukan serta diversifikasi usaha.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tahun 2018 Pertamina memperoleh hak pengelolaan terhadap 13 Wilayah Kerja (WK) Eks Terminasi yang berakhir masa kontraknya di tahun 2018–2021, sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja samanya yang telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 30 Tahun 2016.

Dari 13 WK Eks Terminasi yang telah diperoleh hak pengelolaannya tersebut, 8 WK telah efektif pada tahun 2018, yaitu Ogan Komering, Tuban, Sanga-Sanga, *South East Sumatera, North Sumatera Offshore,* Tengah (masuk ke dalam WK Mahakam), Attaka dan *East Kalimantan*. Sedangkan WK Raja dan WK Jambi Merang baru akan efektif pada tahun 2019 dan WK Kepala Burung dan WK Salawati akan efektif tahun 2020. Sementara untuk WK Rokan yang merupakan penghasil minyak terbesar nasional baru akan efektif pada tahun 2021. Selain itu, pada 1 Januari 2018, Pertamina juga telah mulai mengoperasikan WK Mahakam yang hak pengelolaannya telah diserahkan kepada Pertamina tahun 2015.

Di tahun 2018 Pertamina telah menandatangani kontrak pengerjaan desain teknik, pengadaan, dan konstruksi (*Engineering, Procurement, and Construction*/EPC) *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Kilang RU V Balikpapan. Dari hasil lelang EPC tersebut, konsorsium yang menjadi pemenang adalah SK Engineering & Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., PT Rekayasa Industri, dan PT PP (Persero) Tbk. Dengan telah terpilihnya pemenang EPC RDMP Kilang RU V Balikpapan, Pertamina menunjukkan komitmen kuat dalam merealisasikan mega proyek kilang yang bertujuan mendukung terwujudnya kemandirian energi nasional.

Dengan hak pengelolaan tersebut, produksi minyak Pertamina akan mengalami peningkatan, sehingga Pertamina semakin dekat untuk mewujudkan cita-cita ketahanan dan kemandirian energi nasional.

PEMBENTUKAN HOLDING BUMN MIGAS

Setelah melalui proses persiapan selama 2 tahun, tahun 2018 pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai Perusahaan Induk (*Holding*) BUMN sektor Migas yang melibatkan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).

Berdasarkan *roadmap* BUMN sektor energi, dinyatakan bahwa perlu adanya konsolidasi bisnis gas BUMN dalam rangka peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik. Penggabungan bisnis PGN dan Pertamina merupakan langkah strategis awal untuk meningkatkan efektivitas dan meningkatkan integrasi rantai nilai industri gas di Indonesia.

Pembentukan *Holding* BUMN sektor Migas ditandai dengan ditandatanganinya Akta pengalihan saham seri B miliki Negara sebesar 56,96% di PGN kepada PT Pertamina (Persero) pada 11 April 2018.

Dengan bergabungnya PGN menjadi entitas anak Pertamina, maka Pertamina menjadi perusahaan gas yang memiliki jaringan pipa gas terpanjang di ASEAN, yaitu sepanjang 9.600 KM.

INISIATIF STRATEGIS

Fokus dan strategi utama Pertamina tahun 2018 adalah untuk mendukung upaya pencapaian ketahanan dan kemandirian energi nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pertamina mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sinergi agar dapat memberikan solusi untuk kepentingan nasional.

Untuk mengurangi impor *crude*, tahun 2018, Pertamina melakukan optimalisasi pengolahan *crude* domestik di kilang. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi pengolahan *crude* impor di kilang, sesuai dengan arahan pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No. 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Upaya tersebut membuahkan hasil yang cukup baik, dimana pengolahan *crude* domestik mengalami peningkatan menjadi 62% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 58%.

Bisnis minyak dan gas terintegrasi yang dijalankan Pertamina memungkinkan untuk membangun sinergi di antara Pertamina Group, yaitu terdiri dari PT Pertamina (Persero) dan anak-anak usahanya baik yang bergerak di usaha hulu migas, hilir migas, maupun non migas. *Value Creation* dari sinergi Pertamina Group di tahun 2018 berhasil mencapai USD 1,9 miliar.

Tahun 2018, Pertamina menjalankan program Berkah Energi Pertamina, yaitu sebuah program sebagai *reward* Pertamina untuk para konsumen yang dengan setia menggunakan produk Pertamina. Program ini dipadukan dengan aplikasi MyPertamina yang menjadi bagian dari strategi Pertamina untuk lebih mendekatkan diri dengan konsumen. Program Berkah Energi Pertamina merupakan bentuk apresiasi kepada loyalitas konsumen di era modern ini seiring berkembangnya teknologi digital.

Program Berkah Energi Pertamina ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai dari 9 Agustus 2018 dan akan berakhir pada 31 Juli 2019. Untuk pengundian hadiah yang bertotal miliaran rupiah ini akan dilaksanakan dalam 3 tahapan periode. Pengundian tahap 1 jatuh pada bulan Desember 2018, tahap 2 pada bulan April 2019, dan pengundian tahap 3 direncanakan jatuh pada bulan Agustus 2019.

KINERJA OPERASIONAL

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, tahun 2018 Pertamina berhasil menunjukan peningkatan kinerja operasional yang cukup baik. Dari Sektor Hulu, Pertamina berhasil mencatat pertumbuhan produksi minyak dan gas sebesar 33% dibandingkan tahun sebelumnya dengan total produksi sebesar 921 MBOEPD.

Produksi minyak tahun 2018 mencapai sebesar 393 MBOPD, meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan produksi gas sebesar 3.059 MMSCFD, meningkat 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, produksi panas bumi yang berasal dari area *own operation* mencapai 4.182 GWh atau lebih tinggi 7% dari tahun sebelumnya.

Selain berhasil meningkatkan produksi, Pertamina juga berhasil meningkatkan cadangan migas terbukti (*proven reserves*, P1) yang tercatat tahun 2018 adalah sebesar 426,25 MMBOE. Angka ini lebih tinggi 36% dibandingkan P1 tahun 2017. *Reserve Replacement Ratio* (RRR) migas adalah 137,81%. Angka RRR tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 143%. Tambahan cadangan migas tahun 2018 sebagian besar berasal dari kegiatan anorganik melalui alih kelola wilayah kerja migas dalam negeri yang habis masa kontraknya, seperti misalnya WK Mahakam, Sanga-Sanga, Attaka, dan *East Kalimantan*. Hal ini menjadi bukti komitmen PT Pertamina untuk tetap menjaga keberlanjutan produksi migas nasional dengan terus melakukan kegiatan eksplorasi.

Kinerja operasi kilang tahun 2018 secara umum juga mengalami peningkatan. Pengolahan minyak mentah, gas dan intermedia tahun 2018 tercatat sebesar 336,54 MMbbl, meningkat 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan volume produksi BBM (10 produk utama) meningkat 6% dibandingkan tahun 2017 menjadi 278,86 MMbbl.

Di Sektor Hilir, kinerja pemasaran Pertamina tahun 2018 juga menunjukan peningkatan yang cukup baik. Penjualan produk BBM tumbuh menjadi 70 juta KL dari tahun sebelumnya 67 juta KL, sedangkan produk non BBM relatif stabil dengan penjualan sebesar 16 juta KL. Penjualan gas meningkat signifikan menjadi 1.222.632 BBTU dari tahun sebelumnya 823.769 BBTU, penambahan signifikan ini akibat bergabungnya PGN menjadi Entitas Anak Pertamina.

Pertamina juga dapat menjalankan penugasan dari pemerintah mewujudkan BBM Satu Harga di Indonesia. Sampai dengan Akhir tahun 2018, secara nasional Pertamina telah merealisasikan pengoperasian dan uji operasi atas lembaga penyalur BBM Satu Harga sebanyak 125 (55 titik di tahun 2017 dan 70 titik di tahun 2018) titik di daerah-daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil atau 3T. Dengan adanya SPBU ini, sekarang masyarakat dapat membeli BBM Premium dan Solar dengan harga yang sama dengan masyarakat di daerah lain yang sudah menikmati harga sesuai Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yaitu Premium Rp6.450/liter, dan produk Solar seharga Rp5.150/liter.

KINERJA KEUANGAN

Peningkatan kinerja operasional sepanjang tahun 2018 berdampak pada kinerja keuangan Perseroan. Secara umum, kinerja keuangan Pertamina tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di atas target RKAP tahun 2018.

Jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya tahun 2018 mencapai USD 57.934 juta, tumbuh 25,94% dibandingkan tahun sebelumnya USD 46.000 juta dan 108,46% di atas RKAP 2018 yang ditetapkan sebesar USD 53.416 juta. Pendapatan usaha Perseroan tahun 2018 utamanya dikontribusi oleh penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak yang mencapai USD 44.743 juta, meningkat 12,45% dibandingkan tahun sebelumnya USD 39.789 juta.

Sementara pertumbuhan pendapatan terbesar tahun 2018 diperoleh dari pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya yang pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 427,87% menjadi USD 3.906 juta dari USD 740 juta pada tahun 2017.

Namun demikian, peningkatan produksi dan penjualan juga diikuti oleh pertumbuhan beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya yang pada tahun 2018 meningkat 29,47% dibandingkan tahun 2017 menjadi USD 48.714. Peningkatan beban pokok produksi dan beban langsung lainnya tersebut utamanya disebabkan meningkatnya harga minyak dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD sepanjang tahun 2018. Hal ini membuat laba usaha yang dibukukan Pertamina tahun 2018 terkoreksi menjadi USD 6.246 juta dan laba tahun berjalan juga terkoreksi menjadi USD 2.636 juta. EBITDA 2018 sebesar USD 9.204 juta, naik 26,86% dibandingkan tahun 2017 sebesar USD 7.256 juta

PROSPEK DAN RENCANA KE DEPAN

Tahun 2019, kondisi ekonomi global diprediksi masih akan dibayangi oleh dampak perang dagang antara AS dan Tiongkok. Selain itu, The Fed juga memiliki rencana untuk kembali menaikan tingkat suku bunga acuan sebagai bagian dari upaya menstabilkan mata uang dan ekonomi AS.

Di tengah kondisi tersebut, industri minyak dan gas juga diwarnai dengan kekhawatiran akan menurunnya produksi minyak akibat krisis yang terjadi di Venezuela. Hal ini dikhawatirkan dapat kembali memicu meningkatnya harga minyak mentah di pasar dunia.

Di tengah kondisi tersebut, Pertamina menatap tahun 2019 dengan optimisme yang tinggi. Bergabungnya 13 Wilayah Kerja (WK) Eks Terminasi, dimana 8 WK telah efektif pada tahun 2018 telah meningkatkan cadangan migas terbukti (*proven reserves*, P1) Pertamina. Tidak hanya itu, produksi migas Pertamina juga akan mengalami peningkatan cukup signifikan, terutama dari WK Rokan yang merupakan WK dengan produksi minyak terbesar nasional.

Di aspek pengolahan migas, proyek pengembangan 4 kilang dan pembangunan 2 kilang baru tidak hanya akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang Pertamina hingga 2.000 MBSD tapi juga meningkatkan kualitas BBM yang diproduksi, dari Euro 2 menjadi Euro 5.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri juga memberikan peluang bagi untuk menghemat biaya angkut minyak mentah impor yang selama ini dilakukan Pertamina.

Pada tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah menetapkan target Bauran Energi Nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional, di mana proporsi EBT meningkat secara bertahap, yaitu 5% pada tahun 2015, 23% pada tahun 2025, dan 31% pada tahun 2050. Walaupun capaian Bauran Energi Nasional masih jauh dari target, Pertamina sebagai perusahaan energi nasional mendukung dan berkomitmen penuh pengembangan EBT. EBT Pertamina yang paling signifikan kemajuan pengembangannya adalah energi panas bumi yang dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Di sisi lain, pemerintah memiliki jalan peta penyediaan bahan bakar nabati, di mana pada tahun 2018 Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Niaga Umum BBM (BU BBM) telah memenuhi target suplai dan pendistribusian bahan bakar nabati jenis biodiesel 20% (B20) ke pasar ritel maupun industri dengan

total volume 16 juta kilo liter. Dengan penerapan B20, Pertamina berhasil mengurangi impor Solar cukup signifikan hingga akhir 2018. Di tahun 2019 pemerintah menargetkan penerapan B30. Peta jalan pemerintah yang cukup agresif ini berpotensi mengurangi impor Solar Pertamina lebih besar lagi, sekaligus menciptakan peluang bagi Pertamina untuk mengembangkan kilang produksi bahan bakar nabati (*green refinery*).

Upaya lain untuk menuju pengembangan energi ramah lingkungan adalah dengan mengoptimalkan bahan bakar gas. Di dalam negeri, permintaan terhadap gas sebagai energi fosil yang lebih ramah lingkungan diproyeksikan akan terus meningkat. Proyeksi tersebut berkaca pada mega proyek pengembangan kilang dan pembangunan kilang baru yang dilakukan oleh Pertamina hingga 5 sampai 6 tahun ke depan akan menyerap gas dalam volume cukup besar. Dengan telah terintegrasinya PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) dengan Pertamina melalui holding BUMN migas, semakin terwujud integrasi infrastruktur gas, sekaligus menghemat biaya modal dan operasional. Kondisi ini menciptakan peluang bagi Pertamina untuk mengintegrasikan bisnis hulu dan hilir gas.

Dalam bisnis gas alam cair (LNG), kompetensi dan pengalaman yang dimiliki Pertamina menciptakan peluang untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Bila selama ini pasar tradisional LNG Pertamina adalah China, Jepang, dan Taiwan, saat ini Pertamina tengah mencari pasar LNG ke Asia Selatan dan Afrika. Ditandatanganinya kesepakatan pasokan LNG dengan Petrobangla Bangladesh pada tahun 2018 yang diinisiasi oleh pemerintah kedua negara menjadi pintu akses Pertamina untuk memperluas pasar di kawasan tersebut.

PENINGKATAN KUALITAS SDM

Bagi Pertamina, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu mata rantai yang paling penting dari rantai bisnis yang terintegrasi. Karena itu, kami terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM dengan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatih sesuai dengan kebutuhan dan rencana perusahaan.

Selain itu, Pertamina juga membangun budaya perusahaan berkinerja tinggi yang didasari oleh perilaku kerja efektif berdasarkan Tata Nilai 6C (*Clean, Competitive, Confident, Customer focus, Commercial,* dan *Capable*) dan didukung iklim kerja yang kondusif berdasarkan keterlibatan Pekerja (*employee engagament*). Pemahaman dan pelaksanaan Tata Nilai 6C akan membentuk perilaku yang menjadi budaya, sebagai ciri khas Pertamina di antara perusahaan-perusahaan lainnya.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, Pertamina juga memperkuat aspek tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG). Pertamina meyakini, penerapan prinsip tata kelola perusahaan menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Karena itu, Pertamina terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG baik yang berkaitan dengan organ maupun mekanisme GCG.

Tahun 2018, sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Pertamina mempererat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan terhadap operasional Pertamina. Selain itu, pada tingkat internal Pertamina juga semakin memperkuat fungsi dari Komite Audit dan Internal Audit dalam melakukan pengawasan internal.

Pertamina juga mulai menerapkan ISO 31000: 2018 sebagai standar mutu di bidang manajemen risiko yang merupakan pengembangan dari standar sebelumnya yaitu ISO 31000: 2009. Standar tersebut berisi prinsip-prinsip, kerangka kerja, serta panduan dalam pengelolaan risiko sesuai dengan karakter bisnis, organisasi dan *culture* Perusahaan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan ERM di Pertamina. Tiga fondasi utama dalam ISO 31000:2018 yang diimplementasikan dalam pengelolaan risiko di Pertamina, terdiri dari Prinsip (*Risk Management Principles*), Kerangka Kerja (*Risk Management Framework*) dan Proses Manajemen Risiko (*Risk Management Process*).

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Tahun 2018, komposisi Direksi Pertamina mengalami perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK - 97/ MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018, Nomor SK - 242/MBU/09/2018 tanggal 13 September 2018, dan Nomor SK-232/ MBU/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan.

Dengan demikian, komposisi Direksi Pertamina pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Nicke Widyawati
Direktur Hulu	: Dharmawan H. Samsu
Direktur Pengolahan	: Budi Santoso Syarif
Direktur Pemasaran Korporat	: Basuki Trikora Putra
Direktur Pemasaran Ritel	: Mas'ud Khamid
Direktur Keuangan	: Pahala N. Mansury
Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur	: Gandhi Sriwidodo
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia	: Ignatius Tallulembang
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko	: Heru Setiawan
Direktur Sumber Daya Manusia	: Koeshartanto
Direktur Manajemen Aset	: M. Haryo Yunianto

APRESIASI

Pertamina telah berhasil melalui tahun 2018 dengan capaian kinerja yang baik. Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada jajaran manajemen dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras di tengah tantangan yang terjadi di industri yang terus meningkat.

Direksi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Dewan Komisaris atas arahan yang diberikan kepada Direksi yang sangat membantu dalam pencapaian kinerja Perseroan tahun 2018. Direksi juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham, pelanggan dan mitra kerja, atas kepercayaan dan kerja sama yang sudah terjalin dengan sangat baik. Perseroan akan terus menjunjung komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Atas Nama Direksi

Nicke Widyawati
Direktur Utama

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 PT PERTAMINA (PERSERO)

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka PT Pertamina (Persero) menerbitkan Laporan Tahunan 2018. Laporan Tahunan 2018 PT Pertamina (Persero) menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina (Persero) untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami, segenap Direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2018 PT Pertamina (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2019

Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero)

Tanri Abeng
Komisaris Utama/
Komisaris Independen

Arcandra Tahar
Wakil Komisaris Utama

Sahala Lumban Gaol
Komisaris

Suahasil Nazara
Komisaris

Alexander Lay
Komisaris Independen

Ego Syahrial
Komisaris

Ahmad Bambang
Komisaris

Edwin Hidayat Abdullah*
Komisaris

Direksi PT Pertamina (Persero)

Nicke Widyawati
Direktur Utama

Dharmawan H. Samsu
Direktur Hulu

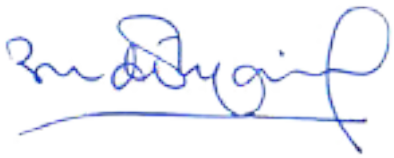

Budi Santoso Syarif
Direktur Pengolahan

Basuki Trikora Putra
Direktur Pemasaran Korporat

Mas'ud Khamid
Direktur Pemasaran Retail

Pahala N. Mansury
Direktur Keuangan

Gandhi Sriwidodo
Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur

Ignatius Tallulembang
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia

Heru Setiawan
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko

Koeshartanto
Direktur Sumber Daya Manusia

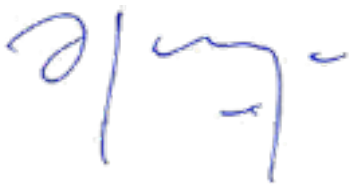

M. Haryo Yunianto
Direktur Manajemen Aset

PROFIL PERUSAHAAN

"Pertamina sepenuhnya mendukung upaya perwujudan ketahanan dan kemandiran energi nasional. Perbaikan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan merupakan langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut.

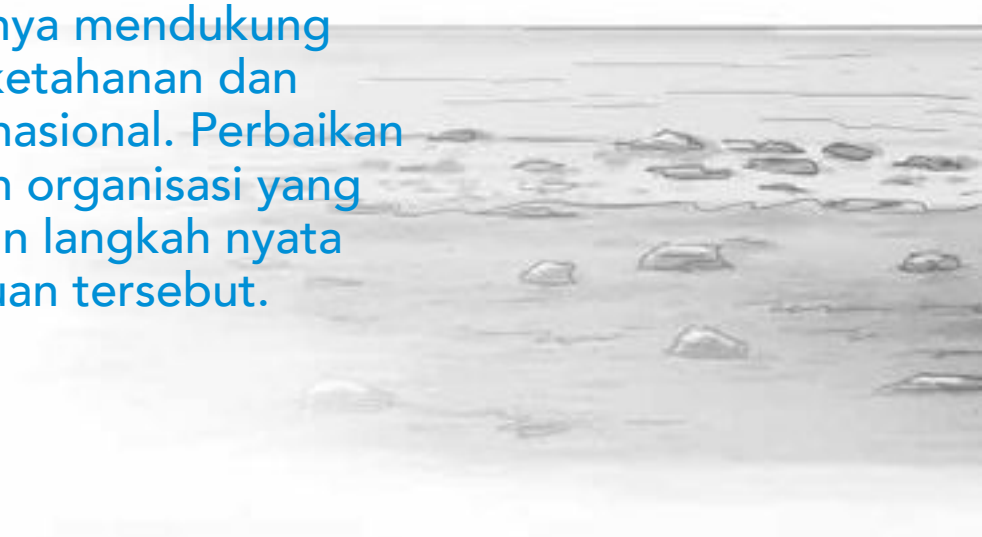

Dua regu sedang melakukan pertandingan sepak takraw, yaitu olah raga permainan menggunakan bola terbuat dari rotan yang dimainkan menggunakan kaki dan semua anggota badan kecuali tangan. Permainan tradisional masyarakat Bugis, Makasar, Sulawesi Selatan ini memiliki filosofi tentang kerja sama yang erat dalam kehidupan bermasyarakat.

IDENTITAS PERUSAHAAN

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Nama Perusahaan
PT Pertamina (Persero)

Jenis Perusahaan/ Bidang Usaha
Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Tanggal Pendirian
- 10 Desember 1957, bernama PT Permina
- 1 Juli 1961, PT Permina menjadi PN Permina
- 20 Agustus 1968, PN Permina dan PN Pertamin dilebur menjadi PN Pertamina
- 15 Desember 1971, PN Pertamina menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
- 17 September 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara menjadi PT Pertamina (Persero).

Bidang Usaha
Energi

Modal Disetor
USD 16.191.204 ribu

Akta Perubahan Terakhir
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina No.29 Tanggal 13 April 2018, Notaris Aulia Taufani, SH. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008395.AH.01.02.TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina tanggal 13 April 2018.

Jumlah Aset
USD 64.718.452 ribu

Modal Dasar

Rp600.000.000.000.000,- (enam ratus triliun Rupiah), terdiri dari 600.000.000,- (enam ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham

Pemegang Saham

100% Pemerintah Republik Indonesia
Saham Perusahaan tidak diperdagangkan

Akta Pendirian Perusahaan

- Akta No.22 tanggal 10 Desember 1957, Meester Raden Pranowo Soewandi, Notaris Pengganti Raden Meester Soewandi
- Peraturan Pemerintah No.198 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (PN Permina)
- Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
- Undang-undang No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
- Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Akta No.20 tanggal 17 September 2003, Notaris Lenny Janis Ishak, SH
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21 November 2003 No.93 Tambahan No.11620.

Dasar Hukum

PP No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Alamat Kantor Pusat

Jl. Medan Merdeka Timur 1A
Jakarta 10110 Indonesia

(62-21) 3815111, 3816111
1 500 000 (PSTN dan Telp seluler)

(62-21) 3843882, 3846865

pcc@pertamina.com

https://www.pertamina.com

@Pertamina

@Pertamina

@Pertamina

SEJARAH PERUSAHAAN

- Pembuka
- Laporan Manajemen
- Profil Perusahaan
- Analisis dan Diskusi Manajemen
- Tata Kelola Perusahaan
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Laporan Keuangan
- Informasi Lain-lain

"Dalam mendukung ketahanan energi nasional, Pertamina telah memproyeksikan pengembangan bisnis lebih lanjut yang mampu mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia dengan dimulainya studi pembangunan *Green Refinery* di Indonesia."

Mewujudkan ketahanan energi nasional merupakan salah satu cita-cita yang diusung oleh PT Pertamina (Persero). Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Pertamina berada di baris terdepan untuk mendukung upaya yang telah dicanangkan pemerintah sejak lama. Karena itu, dari waktu ke waktu, Pertamina terus memperkuat komitmen untuk melakukan pengembangan usaha di bidang energi baru dan terbarukan serta diversifikasi usaha.

Pengalaman dan kapasiatas yang dimiliki Pertamina menjadi modal utama untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pertamina telah memiliki sejarah yang panjang di industri energi nasional. Tonggak sejarah Pertamina diawali sekitar tahun 1950-an, Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Angkatan Darat yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola ladang minyak di wilayah Sumatera. Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA.

Pada tahun 2003, perjalanan Pertamina memasuki babak baru. Berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu hingga Sektor Hilir.

Tepat pada perayaan hari jadi yang ke 50, Pertamina visi Perusahaan yaitu, "menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia" yang kemudian disempurnakan "menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia" pada tahun 2011.

Tahun 2018, fokus utama Pertamina adalah untuk mencapai cita-cita ketahanan dan kemandirian energi nasional di tengah kebutuhan energi yang juga terus mengalami peningkatan. Masifnya pembangunan infrastruktur yang dijalankan pemerintah pada akhirnya akan mendorong peningkatan kebutuhan energi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina, yaitu bagaimana pasokan energi harus di amankan untuk dapat mengimbangi pertumbuhan populasi, ekonomi, infrastruktur serta permintaan energi tersebut.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pertamina mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sinergi agar dapat memberikan solusi untuk kepentingan nasional tersebut. Pertamina miyakini bahwa kekayaan yang sudah tersedia di alam Indonesia dapat dioptimalkan menjadi sumber energi.

Tahun 2018, Pertamina memperoleh hak pengelolaan Blok Rokan dari Pemerintah Indonesia dan akan secara penuh menjadi operator di tahun 2021. Dengan tambahan satu lagi blok raksasa dan Blok Mahakam yang telah diserahkan kepada Pertamina sejak 2017, produksi Pertamina diproyeksikan akan semakin meningkat. Di Tahun 2018, juga menandai perkembangan bisnis gas Pertamina dengan bergabungnya PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Pertamina menjadi pemilik jariangan pipa gas terpanjang di Asia Tenggara dengan total mencapai lebih dari 9.600 km.

Dalam mendukung ketahanan energi nasional, Pertamina telah memproyeksikan pengembangan bisnis lebih lanjut yang mampu mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia dengan dimulainya studi pembangunan *Green Refinery* di Indonesia. *Green Refinery* akan berperan dalam mengolah vegetasi lokal seperti sawit, tebu, dan tanaman lainnya menjadi *biofuel*. Hal ini akan mendukung program pemerintah Indonesia untuk mengurangi impor BBM dengan meningkatkan produksi B20.

VISI MISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Pertamina telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Perusahaan yang berorientasi jangka panjang. Visi dan Misi Perusahaan telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2011 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sedangkan Tujuan Perusahaan telah diperbaharui bersamaan dengan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2011 - 2015. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan adalah sebagai berikut :

VISI

MENJADI PERUSAHAAN ENERGI NASIONAL KELAS DUNIA

MISI

Menjalankan Usaha Minyak, Gas, Serta Energi Baru dan Terbarukan Secara Terintegrasi, Berdasarkan Prinsip-Prinsip Komersial yang Kuat

Tujuan Perusahaan

» Melaksanakan dan menunjang kebijakan Program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Bumi baik di dalam maupun luar negeri serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut, serta;

» Pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BUDAYA PERUSAHAAN

Pertamina memiliki tata nilai sebagai pondasi perusahaan untuk mewujudkan visi dan misinya berdasarkan standar global dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance)*. Tata nilai Pertamina yang disebut dengan 6C, terdiri dari *Clean, Competitive, Confident, Customer Focus, Commercial* dan *Capable*, wajib diketahui dan menjadi pedoman bagi seluruh pekerja dalam aktivitasnya sehari-hari.

Pemahaman dan pelaksanaan Tata Nilai 6C akan membentuk perilaku yang menjadi budaya, sebagai ciri khas Pertamina di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Setiap individu pekerja di Pertamina harus memastikan dirinya berperilaku sesuai dengan Tata Nilai 6C.

CLEAN
(BERSIH)

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menolerasi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

COMPETITIVE
(KOMPETITIF)

Mampu berkompetensi dalam skala regional maupun internasional, mendorng pertumbuhan investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

CONFIDENT
(PERCAYA DIRI)

Berperan dalam pembangunan ekomoni nasional, menjadi pelopor dalam reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan membangun kebanggaan bangsa.

CUSTOMER FOCUS
(FOKUS PADA PELANGGAN)

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

COMMERCIAL
(KOMERSIAL)

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

CAPABLE
(BERKEMAMPUAN)

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

STRUKTUR ORGANISASI

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Dasar:
SK Direksi No. Kpts-20/C00000/2018-S0
tanggal 4 Juli 2018

Nama Pejabat per 31 Desember 2018

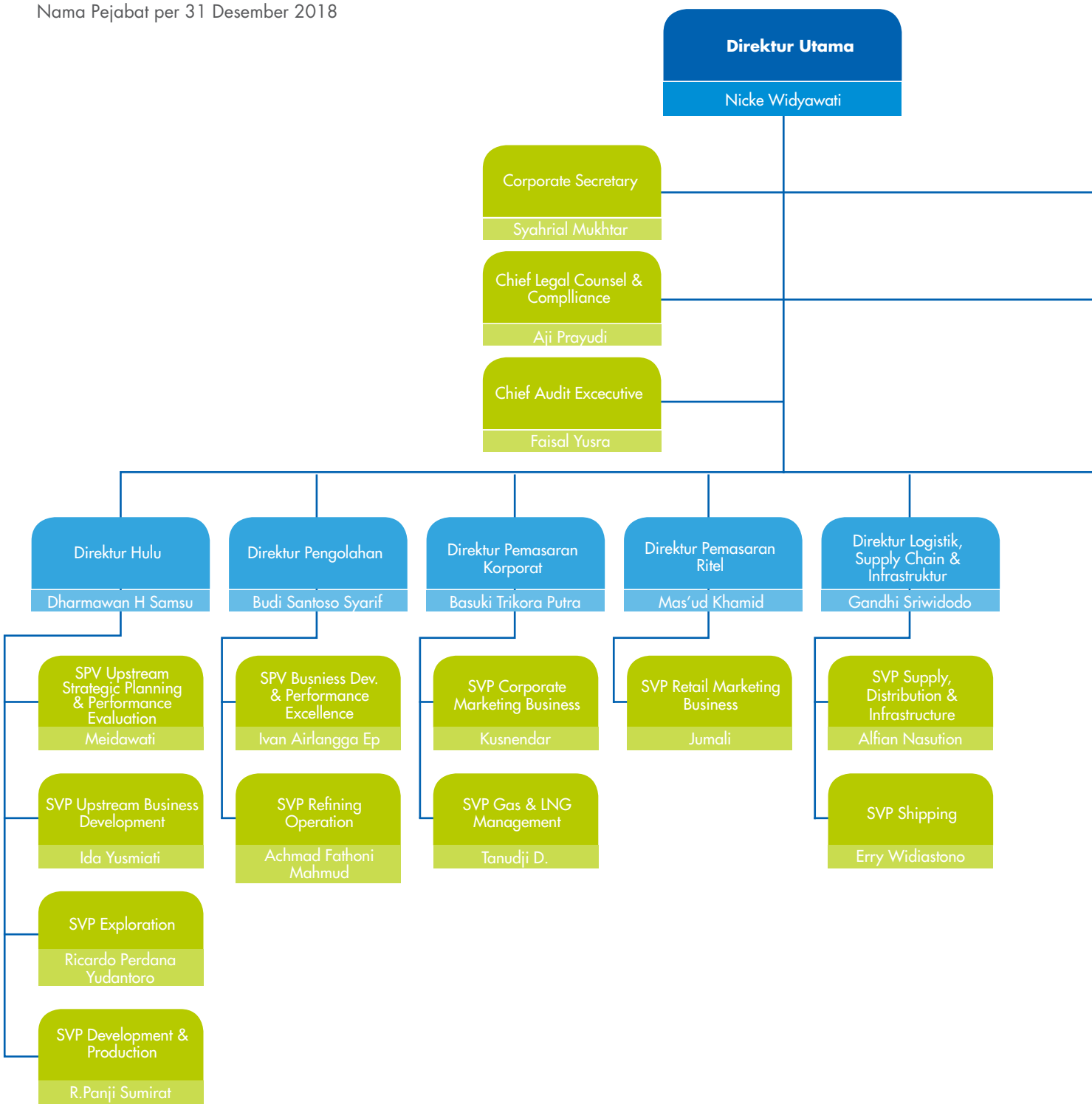

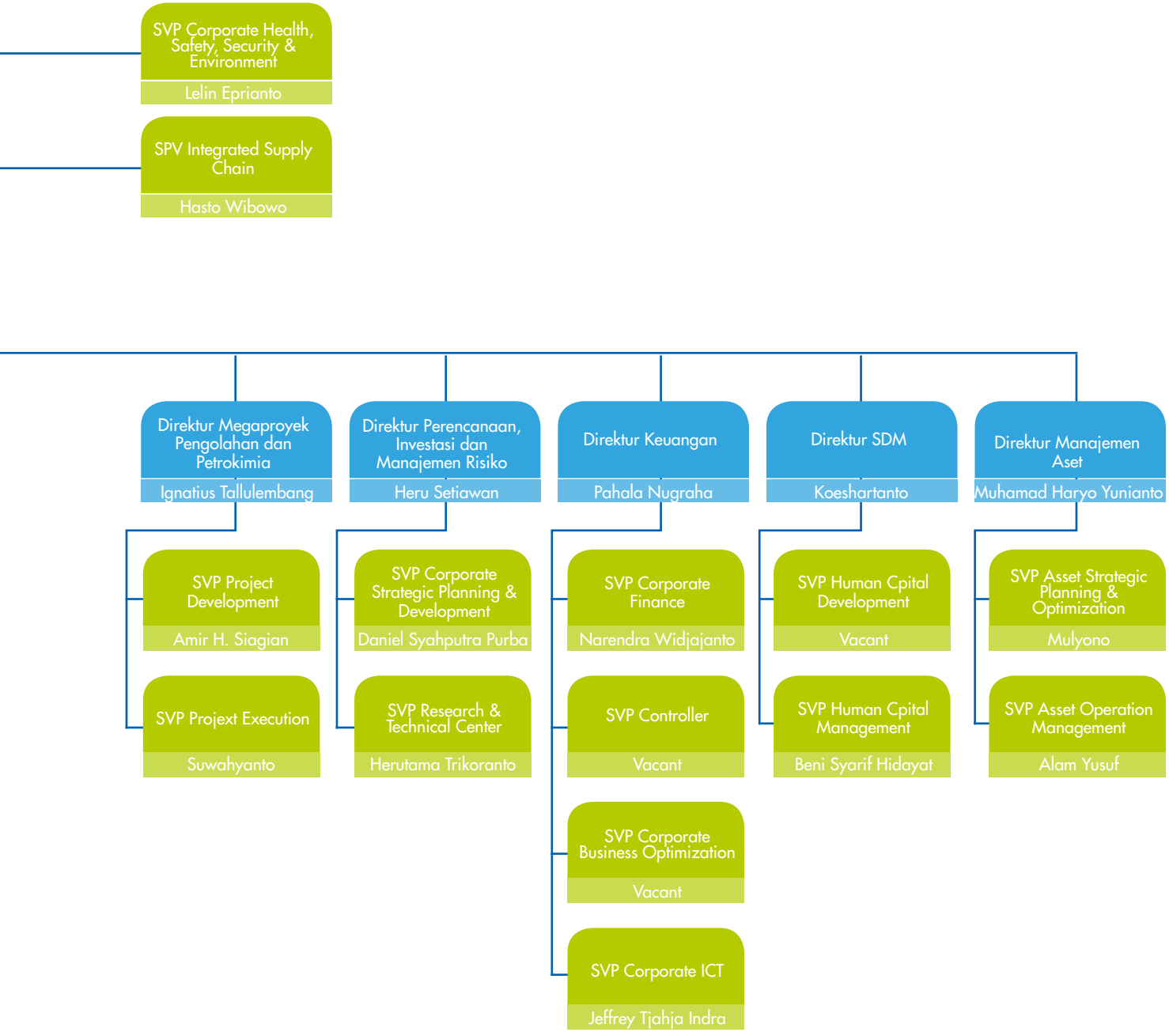
SVP Corporate Health, Safety, Security & Environment
Lelin Eprianto
SPV Integrated Supply Chain
Hasto Wibowo
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia
Ignatius Tallulembang
Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko
Heru Setiawan
Direktur Keuangan
Pahala Nugraha
Direktur SDM
Koeshartanto
Direktur Manajemen Aset
Muhamad Haryo Yunianto
SVP Project Development
Amir H. Siagian
SVP Projext Execution
Suwahyanto
SVP Corporate Strategic Planning & Development
Daniel Syahputra Purba
SVP Research & Technical Center
Herutama Trikoranto
SVP Corporate Finance
Narendra Widjajanto
SVP Controller
Vacant
SVP Corporate Business Optimization
Vacant
SVP Corporate ICT
Jeffrey Tjahja Indra
SVP Human Cpital Development
Vacant
SVP Human Cpital Management
Beni Syarif Hidayat
SVP Asset Strategic Planning & Optimization
Mulyono
SVP Asset Operation Management
Alam Yusuf

JEJAK LANGKAH PERTAMINA

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

1957 — Pemerintah Republik Indonesia pada 10 Desember 1957 mendirikan perusahaan minyak dan gas dengan nama PT Permina

1961 — PT Permina berubah nama menjadi PN Permina.

1968 — PN Permina dan PN Pertamin bergabung menjadi PN Pertamina.

1971 — Berdasarkan UU No.8 Tahun 1971 PN Pertamina berubah menjadi Pertamina yang langsung dikendalikan oleh negara

2001 — Pemberlakuan UU Migas No.22 Tahun 2001 mengubah tata kelola migas di Indonesia sehingga peran Pertamina tidak lagi sebagai regulator.

2003 — Pertamina resmi menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasarkan Akta Notaris No.20 Tahun 2003 PT Pertamina (Persero) didirikan pada tanggal 17 September 2003.

2005 — PERTAMINA

Pada tanggal 10 Desember 2005, PT Pertamina (Persero) berganti logo baru sebagai salah satu upaya untuk menghadapi era persaingan bisnis agar lebih dinamis, andal, dan berwawasan lingkungan.

2007 — PT Pertamina (Persero) menetapkan visi yang baru untuk "Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia" pada tanggal 10 Desember 2007.

2011 — PT Pertamina (Persero) menetapkan visi baru, yaitu "Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia" tanggal 14 Juni 2011.

2012

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 19 Juli 2012 menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Pertamina dalam hal perluasan bidang usaha Pertamina di bidang penyelenggaraan energi, energi baru dan terbarukan.

2014

PT Pertamina (Persero) mencanangkan 5 (lima) pilar strategi bisnis dalam rangka menyongsong Pertamina yang Lebih Baik, yaitu "Pengembangan Sektor Hulu, "Efisiensi di Semua Lini", "Peningkatan Kapasitas Kilang dan Petro Chemical", "Pengembangan Infrastruktur & Marketing", "Perbaikan Struktur Keuangan".

2015

Pada tanggal 14 Desember 2015, Menteri BUMN Selaku RUPS menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pertamina meliputi:

- Penambahan modal disetor dari kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp50 triliun;
- Penambahan kegiatan usaha baru terkait kawasan industri, optimalisasi aset dan kegiatan-kegiatan usaha yang baru bagi Perseroan sebagaimana dirinci dalam Pasal 3 Anggaran Dasar;
- Kewenangan persetujuan organisasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, semula 2 (dua) tingkat di bawah Direksi menjadi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
- Pinjaman kepada Anak Perusahaan yang semula harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, menjadi cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

2016

- Pada bulan Agustus 2016, untuk pertama kalinya Pertamina berhasil menyelesaikan proses akuisisi 24,53% saham Etablissements Maurel & Prom SA (M&P), sebuah perusahaan migas multinasional yang berkedudukan di Prancis dan tercatat di Bursa Saham Paris (Euronext Paris). M&P memiliki aset produksi dan eksplorasi di Afrika, Eropa, Asia dan Amerika.
- Akuisisi saham M&P telah menambah portofolio investasi aset internasional Pertamina di luar negeri, menambah cadangan untuk ketahanan energi nasional serta menjadi pilar pengembangan usaha hulu Pertamina di kancah global.

2017

- Di bulan Februari 2017, Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), telah menuntaskan proses akuisisi Maurel et Prom (M&P), perusahaan migas Prancis, dengan kepemilikan saham 72,65%.
- Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) resmi menggantikan Total E&P Indonesie (TEPI) sebagai pengelola Blok Mahakam setelah kontrak TEPI berakhir pada 31 Desember 2017

2018

- 1 Januari 2018, Pertamina mulai mengoperasikan Blok Mahakam, blok gas terbesar di Indonesia
- 11 April 2018, Pertamina secara resmi menjadi induk perusahaan BUMN Minyak & Gas (MIGAS) dengan ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham Seri B Milik Negara sebesar 56,96% di PGN kepada PT Pertamina (Persero).
- Pada Agustus 2018, Pertamina mendapatkan hak pengelolaan atas Blok Rokan dari pemerintah Indonesia. Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia. Pengelolaan penuh akan dimulai pada 2021.
- Di tahun 2018 Pertamina mulai mengelola penuh 8 WK eks terminasi yang dipercayakan oleh Pemerintah Indonesia.
- Desember 2018, Integrasi bisnis gas antara PGN dan Pertamina dimulai dengan ditandatanganinya *Sales Purchase Agreement* (SPA) Pertagas. Setelah proses integrasi selesai, Pertamina sebagai Holding BUMN Migas mengarahkan PGN selaku Subholding Gas untuk mengelola bisnis gas secara terintegrasi di Indonesia.

BIDANG USAHA

- Pembuka
- Laporan Manajemen
- Profil Perusahaan
- Analisis dan Diskusi Manajemen
- Tata Kelola Perusahaan
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Laporan Keuangan
- Informasi Lain-lain

Kegiatan usaha Pertamina sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS tanggal 24 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang dinyatakan pada akta No. 27 tanggal 19 Desember 2016, adalah kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan tersebut serta pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Pertamina dapat melaksanakan usaha utama, antara lain melaksanakan:

1. Eksplorasi minyak dan gas bumi;
2. Eksploitasi minyak dan gas bumi;
3. Kegiatan di bidang energi listrik termasuk tetapi tidak terbatas pada eksplorasi dan ekploitasi energi panas bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan energi listrik yang dihasilkan Perseroan;
4. Kegiatan pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakar khusus, bahan bakar non-minyak, petrokimia, bahan bakar diesel, gas alam cair (LNG), gas cair (GTL) maupun produk-produk intermedia;
5. Kegiatan penyediaan bahan baku, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Nabati (BBN);
6. Kegiatan pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, BBM, Bahan Bakar Gas, dan/atau hasil/produk lainnya untuk tujuan komersil;
7. Kegiatan penyimpanan yang meliputi penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, BBM, Bahan Bakar gas, dan/atau hasil/produk lainnya untuk tujuan komersil;
8. Kegiatan niaga yang meliputi pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, BBM, bahan bakar gas, dan/atau produk lainnya, penyaluran gas bumi melalui pipa termasuk niaga energi listrik yang dihasilkan Perseroan;
9. Kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi, dan niaga energi baru dan terbarukan, *Coal Bed Methane* (CBM), Batu Bara Cair, Batu Bara Tergaskan (*gassified coal*), *shale gas, shale oil,* Bahan Bakar Nabati, energi surya, energi angin, dan biomassa.

Selain kegiatan usaha utama di atas, Pertamina dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

1. *Trading house, real estate*, pergudangan, pariwisata, *resort*, olahraga dan rekreasi, *rest area*, rumah sakit, pendidikan, penelitian, prasarana telekomunikasi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan, jalan tol dan pusat perbelanjaan;
2. Pengelolaan kawasan ekonomi khusus;
3. Pengelolaan kawasan industri;
4. Melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang menunjang dan terkait dengan kegiatan usaha utama.
   a. Sektor hulu terdiri dari kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak dan gas. Kegiatan usaha lainnya pada sektor ini adalah jasa teknologi bidang hulu, jasa pengeboran, jasa perawatan sumur, pengembangan energi panas bumi dan Gas Metana Batu Bara (GMB) serta *shale gas*.
   b. Sektor Pengolahan mencakup kegiatan usaha di dalam negeri diantaranya kilang pengolahan (*refinery*) dan pengelolaan kilang petrokimia.
   c. Sektor Gas, Energi Baru dan Terbarukan
      Di sektor Gas dan Energi Baru Terbarukan (GEBT), Pertamina telah melakukan beragam penelitian dan pendekatan terkait pengembangan EBT untuk pembangkit listrik dan EBT sebagai bahan bakar nabati non konvensional, termasuk melakukan studi kelayakan untuk pembangkit listrik tenaga biogas dan pembangkit listrik tenaga surya, serta pengembangan bahan bakar nabati berupa *green diesel* dan bio LNG. Sektor ini juga membawahi proyek-proyek infrastruktur gas seperti pembangunan fasilitas regasifikasi LNG, jalur pipa gas, dan SPBG.
   d. Di sektor pemasaran, Pertamina melakukan usaha pemasaran, perdagangan dan distribusi berbagai jenis produk seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), pelumas, LPG, produk petrokimia serta produk-produk non-BBM lainnya untuk pasar domestik dan mancanegara.
   e. Sektor Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia merupakan entitas pendukung usaha sektor pengolahan dengan target meningkatkan kapabilitas dan daya saing kilang.

Kegiatan Usaha Terintegrasi Pertamina

Lihat gambar di bawah ini

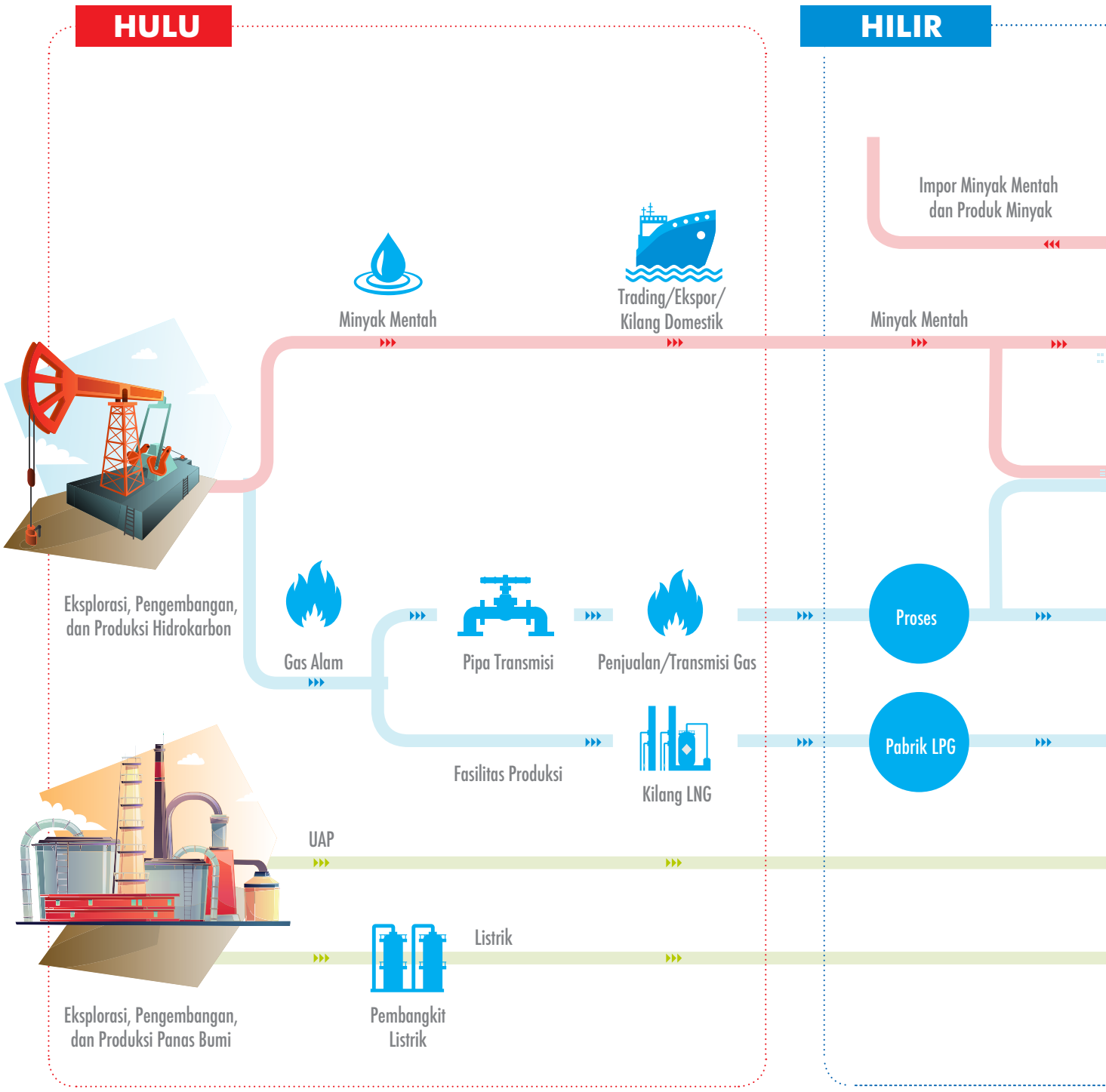

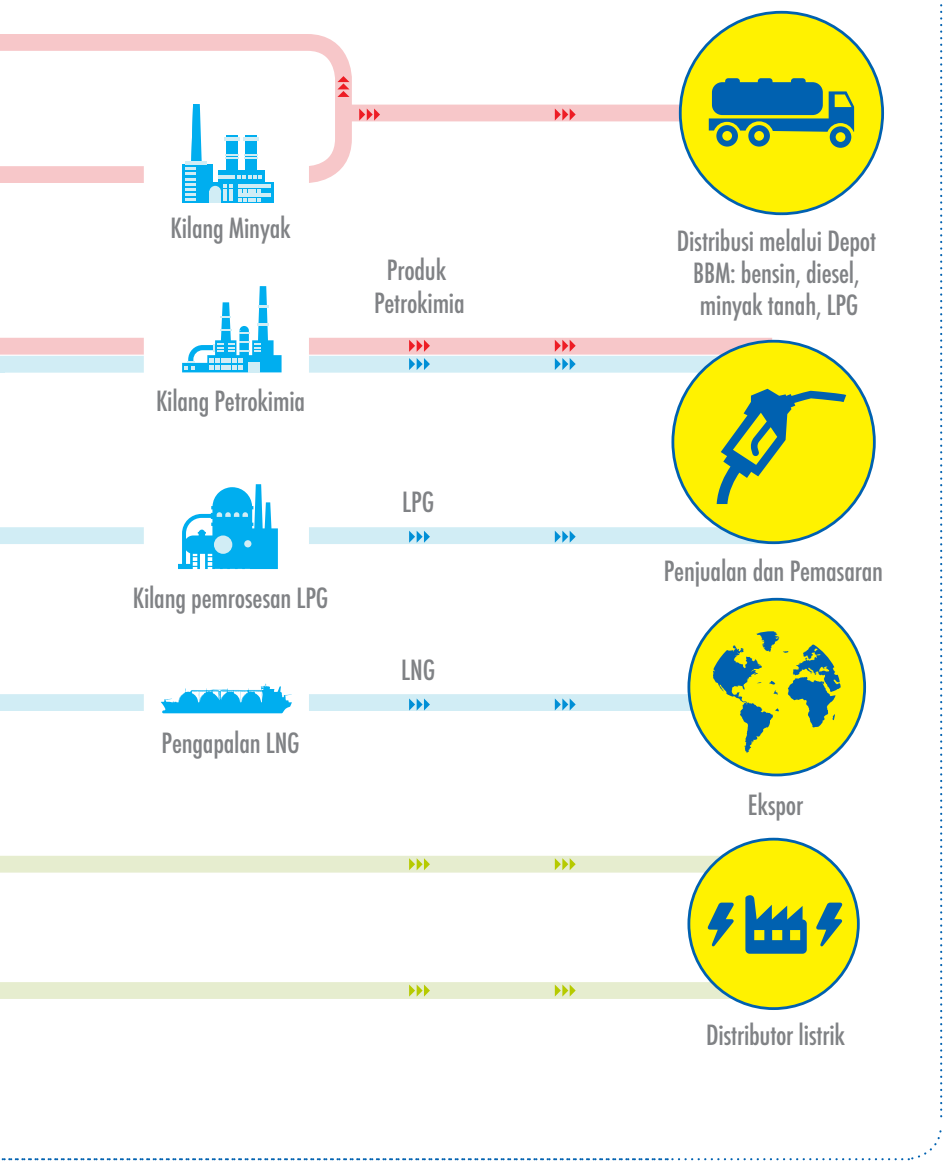

Anak usaha terkait bisnis operasional*

HULU

- PT Pertamina EP
- PT Pertamina EP Cepu
- PT Pertamina Drilling Services Indonesia
- PT Pertamina EP Cepu ADK
- PT Pertamina Hulu Energi
- PT Pertamina Geothermal Energy
- PT Pertamina International Exploration & Production
- PT Pertamina Hulu Indonesia
- PT Elnusa Tbk

HILIR

- PT Pertamina Patra Niaga
- PT Pertamina Trans Kontinental
- PT Pertamina Retail
- PT Pertamina Lubricants
- PT Pertamina International Shipping
- Pertamina International Timor S.A**
- PT Kilang Pertamina Internasional
- PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
- PT Pertamina Power Indonesia
- PT Nusantara Regas

PRODUK DAN JASA

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Produk

Produk BBM Bersubsidi untuk Rumah Tangga	• Minyak Tanah
Produk BBM Bersubsidi/Penugasan untuk Kendaraan Bermotor	• Solar/Biosolar • Premium
Produk BBM Non Subsidi untuk Kendaraan Bermotor	• Pertalite • Pertamax • Pertamax Turbo • Pertamax Racing • Dexlite • Pertamina Dex
Produk Bahan Bakar Minyak untuk Industri	
Produk Bahan Bakar Minyak untuk Marine/Kapal	
Produk Bahan Bakar untuk Aviasi	• Avtur
Produk Non Bahan Bakar Minyak	• Gas Domestik: • Elpiji 3 kg (bersubsidi) • Elpiji 12 Kg • Bright Gas • Musicool (refrigerant) • Vigas (untuk kendaraan bermotor) • Petrokimia • Bitumen • Envogas (untuk kendaraan bermotor) • Pelumas untuk kendaraan bermotor • Pelumas untuk industri

Jasa

1. Jasa angkutan laut Internal *Customer Crude*, Intermedia, produk BBM & Non BBM
2. Jasa angkutan laut eksternal *customer (charter out)*
3. Jasa *Floating Storage & Offloading*
4. Jasa Vetting
5. *Marine Services*: Teknik Bawah Air, *Docking*, *Agency* dan *Mooring Master*
6. Jasa *Offshore Support Vessel*, sarana kepelabuhanan dan dermaga
7. Jasa niaga, transportasi, distribusi, pemrosesan dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya
8. Jasa pengembangan SDM, pengkajian dan konsultasi sistem manajemen
9. Jasa hotel/motel, perkantoran dan penyewaan properti/hotel
10. Jasa asuransi kerugian yang berkaitan dengan operasional industri migas dan *marine hull*
11. Jasa pelayanan kesehatan dan rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya, Cirebon, Balikpapan, Tanjung, dan Prabumulih
12. Jasa transportasi udara, penyewaan pesawat udara dan penerbangan terjadwal (reguler), menyelenggarakan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Tanri Abeng
Komisaris Utama

Kewarganegaraan : Indonesia
Usia : 76 tahun
Domisili : Jakarta, Indonesia

Pendidikan
- Doktor di Universitas Gadjah Mada (2010)
- Advanced Management Program di Claremont Graduate School (USA) (1984)
- Master of Business Administration, State University of New York at Buffalo, New York, USA (1968)

Riwayat Pekerjaan
- Chairman PT Telkom Indonesia (2004 – 2010)
- Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (1998 – 1999)
- CEO di beberapa perusahaan swasta diantaranya Union Carbide Indonesia dan Singapura, PT Multi Bintang Indonesia, dan terakhir PT Bakrie & Brothers (1992 – 1998)

Pengangkatan
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 6 Mei 2015 berdasarkan
- Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-60/MBU/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
- Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No.SK-254/MBU/11/2016 tanggal 14 November 2016 sebagai Komisaris Independen merangkap Komisaris Utama.

Arcandra Tahar
Wakil Komisaris Utama

Kewarganegaraan : Indonesia
Usia : 48 tahun
Domisili : Jakarta, Indonesia

Pendidikan
- Gelar PhD di Texas A&M University Ocean Engineering (2001)
- Master Ocean Engineering di Texas A&M University (1998)
- S1 Jurusan Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung (1994)

Riwayat Pekerjaan
- Wakil Menteri ESDM (2016 – sekarang)
- Menteri ESDM Indonesia (Juli 2016 – Agustus 2016)
- President of Petroneering, LLC, Houston, Texas (2013 - 2016)

Pengangkatan
- Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No.SK-254/MBU/11/2016 tanggal 14 November 2016 sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Sahala Lumban Gaol
Komisaris

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **66 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- Gelar Doctor of Philosophy in Economy dari IOWA State University (1994)
- Gelar Master of Economy di University of Illinois, USA (1988)
- Sarjana Peternakan dari Institut Pertanian Bogor (1977)

Riwayat Pekerjaan
- Komisaris Independen PT BTN Tbk. (2012-2015)
- Staf Khusus Menteri BUMN (2014 - sekarang)
- Komisaris PT Tugu Insurance (2009-2012)

Pengangkatan
- Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.KEP-58/MBU/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero)

Suahasil Nazara
Komisaris

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **48 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- Ph.D dari University of Illinois at Urbana Champaign USA (2003).
- Master of Science di Cornell University USA (1997)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1994)

Riwayat Pekerjaan
- Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan RI pada tanggal 31 Oktober 2016
- Anggota Komite Ekonomi Nasional atau KEN (2013-2014)
- Koordinator Pokja Kebijakan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden RI I (2010-2015)

Pengangkatan
- Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-58/MBU/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero)

Alexander Lay
Komisaris Independen

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **45 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- Master of Laws University of Sidney di Sydney (2006)
- Sarjana Hukum Universitas Atmajaya di Jakarta (2003)
- Sarjana Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung (1997)

Riwayat Pekerjaan
- Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (September 2016-September 2017)
- Staf Khusus Bidang Hukum dari Sekretaris Kabinet RI (2015)
- Partner Pendiri Kantor Hukum Lasut, Lay & Pane (2009-2014)

Pengangkatan
- Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No.SK-194/MBU/09/2017 tanggal 12 September 2017 sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero)

Ego Syahrial
Komisaris

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **56 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- Post Doctoral (Research Associate) Petroleum Engineering di Imperial College of Science, Technology, and Medicine, University of London, UK (2004)
- Ph.D Petroleum Engineering di Imperial College of Science, Technology, and Medicine, University of London, Royal School of Mines, Department of Earth resources Engineering, London, UK (1997)
- Master Petroleum Engineering di Imperial College of Science, Technology, and Medicine, University of London, Royal School of Mines, Department of Earth resources Engineering, London, UK (1993)
- Sarjana Teknik Perminyakan di Universitas Trisakti (1988)

Riwayat Pekerjaan
- Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM (2017 – sekarang)
- Kepala Badan Giologi, Kementerian ESDM (2016-2017)
- Kepala Biro Perencanaan, Kementerian ESDM (2016)

Pengangkatan
- Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No.SK-142/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero)

Ahmad Bambang
Komisaris

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **56 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- Magister Manajemen Industri Queensland University of Technology di Australia (Joint Program) (1999)
- Magister Teknik Universitas Indonesia di Jakarta (1999)
- Sarjana Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung (1986)

Riwayat Pekerjaan
- Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN (2017 – sekarang)
- Komisaris PT Pertamina (Persero) (2016 – 2017)
- Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) (2016-2017)

Pengangkatan
- Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No.SK-142/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero)

Edwin Hidayat Abdullah*
Komisaris

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **47 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- IDEAS Fellow, Sloan School of Management MIT (2009)
- Master of Public Management pada Lee Kuan Yew School of Public Policy, NUS (in Cooperation with Kennedy School of Government, Harvard University di Singapura dan Amerika Serikat) (2005)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1995)

Riwayat Pekerjaan
- Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN (2015 – sekarang)
- Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) (Maret - November 2016)
- Komisaris Independen PT Bumi Serpong Damai Tbk (2004-2015)

Pengangkatan
- Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No.SK-68/MBU/03/2016 tanggal 29 Maret 2016 sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)

* Berhenti pada tanggal 30 Mei 2018 sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No.SK-142/MBU/05/2018

Nicke Widyawati
Direktur Utama

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **51 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan

- Gelar Magister Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran tahun (2009)
- Teknik Industri Institut Teknologi Bandung tahun (1991)

Riwayat Pekerjaan

- PT Pertamina (Persero) – Director of Human Capital/Acting President Director & CEO (2017-2018)
- PT PLN (Persero) – Director of Strategic Sourcing and Renewable Energy (2017)
- PT PLN (Persero) – Director of Corporate Planning and Renewable Energy, tahun (2016 – 2017)

Pengangkatan

- Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina

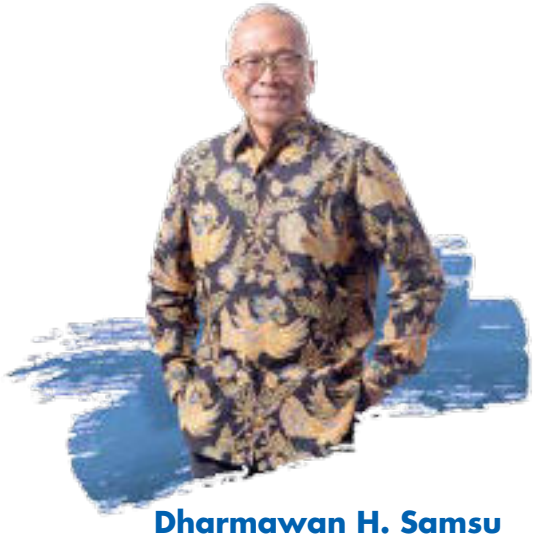

Dharmawan H. Samsu
Direktur Hulu

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **57 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- Teknik Geofisika – Universitas Indonesia tahun 1989

Riwayat Pekerjaan
- Direktur Hulu, PT Pertamina (Persero), August 2018 – present,
- Head of Country, BP Indonesia, 2011 – August 2018,
- Exploration & Renewal Manager, BP Indonesia, 2009 – 2011,
- Reservoir & Wells Manager of BP Offshore Northwest Java (ONWJ) and Subsurface & Wells Functional Manager, BP Berau Ltd., 2006 – 2008,
- Subsurface, Wells and PE Manager, BP Kangean Inc, 2003 - 2005,
- Exploration Team Leader, BP North America, 2000 – 2003,
- Assignments in ARCO Indonesia Inc, ARCO Bali North Inc., ARCO Exploration and Production Technology, ARCO Africa and Middle East Exploration, 1990 – 2000.

Pengangkatan
- Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Budi Santoso Syarif
Direktur Pengolahan

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **55 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- Magister Technique of Industry Engineering University of Indonesia, (1999)
- Graduate Certificate Industrial Engineering Management Queensland University of Technology, Australia (1999)
- Chemical Engineering Gajah Mada University, Yogyakarta (1989)

Riwayat Pekerjaan
- VP Refining Technology (2014 – 2017)
- SVP Business Development & Performance Excellence (Mei - Agustus 2017)
- SVP Refining Operation PT Pertamina (Persero) (2017 – 2018)

Pengangkatan
- Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Basuki Trikora Putra
Direktur Pemasaran Korporat

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **57 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- Sarjana Teknik Mesin Universitas Trisakti, tahun (1988)

Riwayat Pekerjaan
- SVP Non Fuel Marketing, PT Pertamina (Persero) (2017 – 2018)
- Komisaris Utama PT Pertamina EP (2018 – saat ini)
- Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Pertamina (2018 – saat ini)

Pengangkatan
- Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Mas'ud Khamid
Direktur Pemasaran Retail

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **54 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- Executive Education in Harvard Business School (2015)
- Global Leadership Program dari Kellogg School Management Northwestern University of Chicago (2009)
- Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Sepuluh November (1989)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur Consumer Service PT Telkom (2017 –2018)
- Chief of Commissioner PT. Telkom Akses, (2017 –2018)
- Chief of Commisisioner PT. Sigma Citra Caraka, (2015 – 2017)

Pengangkatan
- Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Pahala N. Mansury
Direktur Keuangan

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **48 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- Gelar MBA Finance dari Stern School of Business New York University, Amerika Serikat (1999)
- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1994)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2017 – 2018)
- Managing Director – Treasury & Markets, Chief Financial Officer, Bank Mandiri (2003 – 2017)
- Project Leader pada The Boston Consulting Group (2000 – 2003)

Pengangkatan
- Surat Keputusan No. 242/MBU/09/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Pemberhentian, Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Gandhi Sriwidodo
Direktur Logistik,Supply Chain dan Infrastruktur

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **55 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- Magister Management dari Universitas Hasanudin (2003)
- Teknik Kimia Universitas Diponegoro (S1) tahun (1989)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (2015 – 2018)
- VP Industrial Fuel Marketing PT Pertamina (Persero) (2013 – 2015)
- General Manager Fuel Retail Marketing Region 1 - Medan PT Pertamina (Persero) (2011 – 2013)

Pengangkatan
- Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Ignatius Tallulembang

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **56 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan

- Sarjana Teknik Kimia Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun (1988)

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris PT Pertamina Power Indonesia, (2018 - saat ini)
- Komisaris di PT Pertamina Lubricant, (2017 – 2018)
- Senior Vice President Project Execution Direktorat Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia1 (2017 – 2018)

Pengangkatan

- Surat Keputusan No. 242/MBU/09/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Pemberhentian, Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Heru Setiawan

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **55 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan

- MBA, Energy Management – Universite de Montreal Canada, tahun (2001)
- Mechanical Engineering - Institut Teknologi Bandung (1989)

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero) (April – September 2018)
- SVP Corporate Business Optimization, (Januari – April 2018)

Pengangkatan

Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Koeshartanto
Direktur Sumber Daya Manusia

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **58 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- MBA di IPMI Business School (2000)
- Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro (1985)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur SDM & Umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (2017 –2018)
- President Director, KTalents Asia (2016 -2017)
- Group Human Resources Director, Agung Podomoro Group (2010-2015)

Pengangkatan
- Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

M. Haryo Yunianto
Direktur Manajemen Aset

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Usia : **49 tahun**
Domisili : **Jakarta, Indonesia**

Pendidikan
- Master of Management dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jakarta tahun (2001)
- Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun (1994)

Riwayat Pekerjaan
- Komisaris Utama PT Patra Niaga (2018 - saat ini)
- Presiden Direktur PT Patra Jasa (2016-2018)
- Direktur PT Jaya Ancol (2014-2015)

Pengangkatan
- Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

PERTAMINA
PERTAMINA

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

No.	Nama Entitas Anak	Persentase Kepemilikan Saham	Tanggal Berdiri	Status Operasi	Bidang Usaha
1	PT Pertamina EP	• PT Pertamina (Persero) (99,99%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (0,01%)	13 September 2005	Beroperasi	Usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi meliputi eksplorasi, eksploitasi serta penjualan produksi minyak dan gas bumi hasil kegiatan eksploitasi.
2	PT Pertamina Geothermal Energy	• PT Pertamina (Persero) (90,06%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (9,94%)	12 Desember 2006	Beroperasi	Pengelolaan dan pengembangan sumber daya panas bumi meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, produksi uap dan pembangkitan listrik dan jasa konsultasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pengembangan teknologi di bidang panas bumi.
3	PT Pertamina Hulu Energi	• PT Pertamina (Persero) (98,72%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (1,28%)	29 Juni 2007	Beroperasi	Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi serta energi baik dalam maupun luar negeri serta kegiatan usaha yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi
4	PT Pertamina EP Cepu	• PT Pertamina (Persero) (99%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (1%)	14 September 2005	Beroperasi	Eksplorasi, eksploitasi dan produksi di Blok Cepu,
5	PT Pertamina Drilling Services Indonesia	• PT Pertamina (Persero) (99,89%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (0,11%)	13 Juni 2008	Beroperasi	Pengelolaan dan pengembangan sumber daya jasa drilling meliputi eksplorasi dan eksploitasi migas atau panas bumi,
6	PT Pertamina EP Cepu Alas Dara & Kemuning	• PT Pertamina (Persero) (99%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (1%)	15 Agustus 2013	Beroperasi pada tahap eksplorasi	Eksplorasi, eksploitasi dan produksi di Blok Cepu Alas Dara & Kemuning,
7	PT Pertamina Internasional Eksplorasi Dan Produksi	• PT Pertamina (Persero) (99,999998%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (0,000002%)	18 November 2013	Beroperasi	Melaksanakan usaha dalam bidang minyak, gas bumi, dan energi di luar negeri
8	PT Pertamina Hulu Indonesia	• PT Pertamina (Persero) 99,93%) • PT PT Pertamina Pedeve Indonesia (0,07%)	28 Desember 2015	Beroperasi	• Usaha di bidang minyak, gas bumi dan energi • Usaha minyak, gas bumi termasuk eksplorasi dan eksploitasi • Usaha di bidang energi terkait langsung maupun tidak langsung • Penyertaan saham dan kepemilikan participating interest di dalam negeri • Jasa terkait penyelenggaraan usaha minyak, gas bumi dan energi • Usaha lain yang langsung dan tidak langsung terkait dengan usaha di atas
9	PT Pertamina Power Indonesia	• PT Pertamina (Persero) (99,999031%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (0,000969%)	Berdiri tanggal 26 Oktober 2016	Beroperasi	Produksi, perbaikan dan perdagangan peralatan tenaga listrik, yang berasal dari sumber energi lainnya seperti gas alam, air, panas bumi, matahari, dll
10	PT Pertamina Gas	• PT Pertamina (Persero) (48,99%) • PT Perusahaan Gas Negara (51,00% • Pertamina Pedeve Indonesia (0,01%)	23 Desember 2007	Beroperasi	Niaga, transportasi, distribusi, pemrosesan dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya,
11	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	• PT Pertamina (Persero) (56,96%) • Masyarakat (43,04%)	13 Mei 1965	Beroperasi	Pengangkutan dan niaga gas bumi
12	PT Kilang Pertamina Internasional	• PT Pertamina (Persero) (99,90%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (0,10%)	13 November 2017	Beroperasi	Menjalankan kegiatan produksi, pengolahan dan perdagangan di bidang minyak, gas bumi, dan energi baru dan terbarukan di dalam negeri dan di luar negeri

No.	Nama Entitas Anak	Persentase Kepemilikan Saham	Tanggal Berdiri	Status Operasi	Bidang Usaha
13	PT Pertamina Patra Niaga	• PT Pertamina (Persero) (99,912%) • PT Pertamina Trans Kontinental (0,088%)	Pada 31 Januari 2012 menjadi PT Pertamina Patra Niaga, sebelumnya didirikan pada 27 Februari 1997 bernama PT Elnusa Harapan	Beroperasi	Jasa teknologi, jasa perdagangan non BBM serta industri di bidang pertambangan minyak dan gas bumi
14	PT Pertamina Trans Kontinental	• PT Pertamina (Persero) (99,999%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (0,001%)	9 September 1969	Beroperasi	Jasa operasi perkapalan meliputi supply vessels, tug boat, cargo vessels, keagenan dan pengelolaan dermaga Kabil di Pulau Batam
15	PT Pertamina Retail	• PT Pertamina Gas (99,9995%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (0,0005%)	17 Juni 1997	Beroperasi	Retail SPBU, perdagangan BBM dan jasa pengangkutan BBM
16	PT Pertamina Lubricants	• PT Pertamina (Persero) (99,95%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (0,05%)	23 September 2013	Beroperasi	Melaksanakan kegiatan produksi, perdagangan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan produk pelumas dan turunannya
17	PT Pertamina Internasional Shipping	• PT Pertamina (Persero) (99,95%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (0,05%)	23 Desember 2016	Beroperasi	Usaha bidang pelayaran dengan kegiatan usaha utama pelayaran komoditi minyak dan gas bumi (migas) serta kegiatan penjunjang lainnya
18	PT Pertamina Training & Consulting	• PT Pertamina (Persero) (91%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (9%)	25 Februari 2002	Beroperasi	Jasa pengembangan SDM, pengkajian dan konsultasi sistem manajemen dalam rangka menunjang kegiatan migas dan panas bumi
19	PT Patra Jasa	• PT Pertamina (Persero) (99,999%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (0,001%)	17 Juli 1975	Beroperasi	Hotel/motel, perkantoran dan penyewaan properti/hotel
20	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	• PT Pertamina (Persero) (58,50%) • Siti Taskiyah (10,935%) • Insurance Co., Ltd • (5,294%) • Salvitas Limited (15,75%) • Masyarakat (9,521%)	25 November 1981	Beroperasi	Jasa asuransi kerugian yang berkaitan dengan operasional industri migas dan marine hull
21	PT Pertamina Bina Medika	• PT Pertamina (Persero) (99,98%) • PT Pertamina Pedeve Indonesia (0,02%)	21 Oktober 1997	Beroperasi	Jasa pelayanan kesehatan dan rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya, Cirebon, Balikpapan, Tanjung, dan Prabumulih
22	PT Pelita Air Service	• PT Pertamina (Persero) (99,997%) • PT Patra Jasa (0,003%)	24 Januari 1970	Beroperasi	Jasa transportasi udara, penyewaan pesawat udara dan penerbangan terjadwal (reguler), menyelenggarakan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha
23	PT Pertamina Pedeve Indonesia	• PT Pertamina (Persero) (99,93%) • PT Pertamina Patra Niaga (0,07%)	25 Juli 2002	Beroperasi	Kegiatan modal ventura
24	PT Elnusa Tbk	• PT Pertamina (Persero) (41,10%) • Dana Pensiun Pertamina (14,90%) • Publik (44,00%)	19 Februari 1969	Beroperasi	Kegiatan usaha di bidang jasa, perdagangan, pertambangan, Pembangunan, dan perindustrian
25	Pertamina International Timor S,A*	• PT Pertamina Patra Niaga (50%) • PT Pertamina Retail (45%) • 4- Consorcio Timor Progresso, Lda (5%)	19 Oktober 2015	Beroperasi	Usaha hilir minyak dan gas bumi di Timor Timor
26	PT Pertamina Hulu Rokan	• PT Pertamina (Persero) (100%)	20 Desember 2018	Belum Beroprasi	Eksplorasi, eksploitasi, dan produksi Blok Rokan

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

UPSTREAM

PERTAMINA EP
Pertamina 99,99%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,01%

PERTAMINA EP CEPU ADK
Pertamina 99%
Pertamina Pedeve Indonesia 1%

PERTAMINA HULU ENERGI
Pertamina 98,72%
Pertamina Pedeve Indonesia 1,28%

PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
Pertamina 90,06%
Pertamina Pedeve Indonesia 9,94%

PERTAMINA DRILLING
Pertamina 99,89%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,11%

PERTAMINA E&P LIBYA
Pertamina 100%
**

PERTAMINA EAST NATUNA
Pertamina 99,9%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,1%
*

PERTAMINA EP CEPU ADK
Pertamina 99%
Pertamina Pedeve Indonesia 1%

PERTAMINA INTERNASIONAL EP
Pertamina 99,999998%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,000002%

Conoco Phillips Algeria /Pertamina Algeria
Pertamina 100%

elnusa
Pertamina 41,10%
DP Pertamina14,90%
Pertamina Pedeve Indonesia <5% 44,00%

PERTAMINA HULU ENERGI INDONESIA
Pertamina 99,93%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,07%

DOWNSTREAM

pgn
Pertamina 56,96%
Public 43,04%

PERTAMINA GAS
Pertamina 48,99%
PGN 51,00%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,01%

Pertamina 60%
PT PGN Tbk 40%

PERTAMINA POWER INTERNATIONAL
Pertamina 99,999031%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,000969%

PT KILANG INTERNNATIONAL
Pertamina 99,90%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,10%

PPT PPT Energy Trading Co Ltd
Pertamina 99,9%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,1%

Pertamina 55%
PHE Arun 45%

Badak LNG A World Class Energy Company
Pertamina 55%, Vico 20%, Jilco 15%, Total EP Ind 10%

PT Trans Pacific Petrochemical Indotama
Pertamina 48,59%
PT Tuban Petro 19,16%
Vitol Tuban B.V 8,81%
Polytama Propindo 6,77%
Tuban Petro Ltd 5,15%
Lain-lain ≤5%

= Asosiasi

*) perusahaan sudah berdiri tetapi belum beroperasi
**) beku operasi
***) likuidasi

PERTAMINA PATRA NIAGA
Pertamina 99,912%
PT PTK 0,088%

PERTAMINA RETAIL
Pertamina 99,9995%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,0005%

PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING
Pertamina 99,95%
Pertamina Pedeve Indonesia 0.05%

PERTAMINA EP CEPU ADK
Pertamina 99,999%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,001%

PERTAMINA LUBRICANTS
Pertamina 99,95%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,05%

Pertamina 100%
***

FINANCE & SERVICES

PERTAMINA
Pertamina 99,93%
PT Patra Niaga 0,07%

PERTAMEDIKA
Pertamina 99,98%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,02%

PATRAJASA
Pertamina 99,999%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,001%

Pelita Air Service
Pertamina 99,997%
Pertamina Pedeve Indonesia 0,003%

PTC
Pertamina 91%
Pertamina Pedeve Indonesia 9%

Insurance tugu
Pertamina 58.50%
Salvitas Limited 15,75%
Siti Tasiyah 10,935%
Insurance Co.,Ld 5,294%
Masyarakat 9,521%i

PT Seamless Pipe Indonesia jaya
Pertamina 10,36%
Tenaris Global 77,35%
PT Bakrie & Brother 10%
PT Krakatau Steel 2,91%

FUNGSI PENUNJANG

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

HUMAN CAPITAL

PERAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagi Pertamina, Sumber Daya Manusia (SDM)/*Human Capital* (HC) merupakan salah satu mata rantai yang paling penting dari rantai bisnis yang terintegrasi. Kinerja dan kontribusi dari setiap individu berpotensi untuk menentukan laju pertumbuhan bisnis dalam setiap aspek. Seiring dengan visi Pertamina untuk menjadi Perusahaan Energi Nasional kelas dunia perlu diiringi dengan peningkatan kualitas seluruh SDM dalam organisasi. Untuk mendukung pencapain Visi Perusahaan, Pertamina menyusun *HC Strategy House* yang merefleksikan visi dan strategi HC yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sumber daya manusia berjalan dengan terstruktur dan efektif agar setiap individu mampu memberikan kontribusi terbaik sesuai kapabilitasnya.

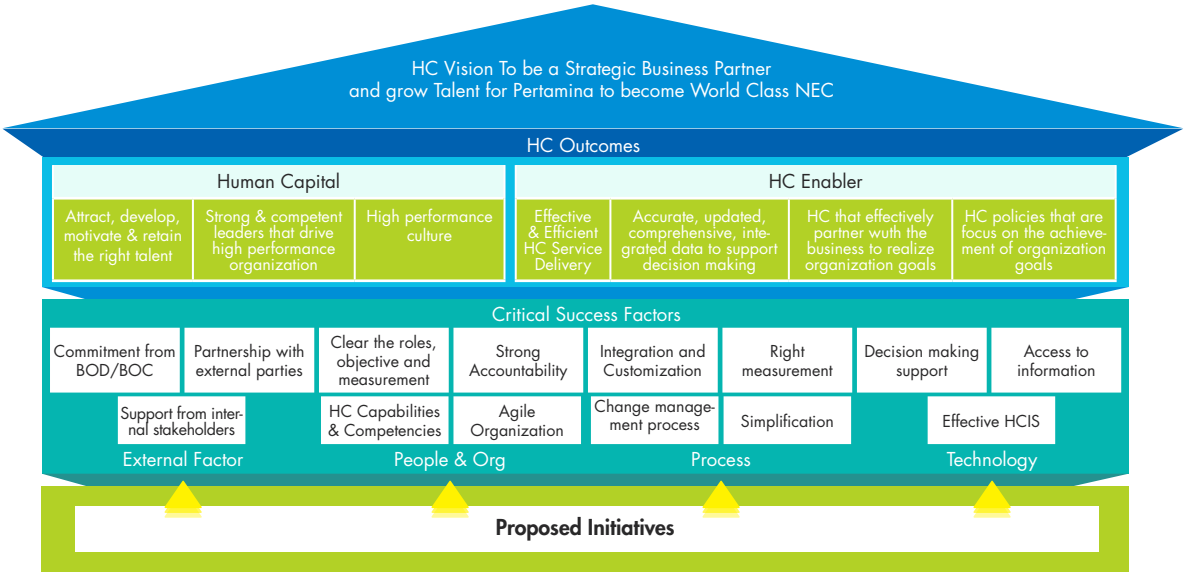

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN TALENT SOURCING

Pertamina melakukan perencanaan tenaga kerja (*strategic workforce planning*) dengan mempertimbangkan sejumlah aspek secara komprehensif diantaranya produktivitas, kinerja keuangan, strategi bisnis, rencana perubahan organisasi, *internal movement,* dan jumlah pekerja yang akan pensiun. Hasil dari *strategic workforce planning* tersebut diterjemahkan ke dalam 6 (enam) strategi pemenuhan jabatan (*job fulfillment strategies*) yaitu:

1. ***Buy***, melakukan rekrutmen eksternal sesuai kebutuhan perusahaan, baik *fresh graduate* maupun *experienced hire* dengan status PWTT maupun PWT.
2. ***Borrow***, mengoptimalkan sumber daya anak perusahaan melalui mekanisme perbantuan ke PT Pertamina (Persero).
3. ***Transform***, menggunakan metode baru dalam menyelesaikan pekerjaan melalui reorgansasi, penggunaan teknologi, dan transformasi digital.
4. ***Regroup***, melalukan perubahan strategi bisnis maupun *business prosess re-engineering*.
5. ***Build***, melakukan pengembangan kapabilitas pekerja sesuai dengan tuntutan bisnis untuk memastikan ketersedian suksesor di setiap level jabatan.
6. ***Bind***, mempertahankan *top talent* melalui program pengembangan yang dapat meningkatkan nilai tambah terhadap Perusahaan.

BUDAYA KORPORAT

Pertamina membangun budaya perusahaan berkinerja tinggi yang didasari oleh perilaku kerja efektif berdasarkan Tata Nilai 6C dan didukung iklim kerja yang kondusif berdasarkan keterlibatan Pekerja (*employee engagament*). Pemahaman dan pelaksanaan Tata Nilai 6C akan membentuk perilaku yang menjadi budaya, sebagai ciri khas Pertamina di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Setiap individu Pekerja di Pertamina harus memastikan dirinya berperilaku sesuai dengan Tata Nilai 6C ini. Tata Nilai 6C tersebut terdiri dari; *Clean, Competitive, Confident, Customer focus, Commercial, dan Capable*.

Guna meningkatkan *Strong Values* dan menurunkan *Limited Values*, meningkatkan *Employee Engagement* (EE) dan konsistensi implementasi Praktik-Praktik Profesional *(Practice Pulse Check atau PPC)* di lingkungan Pertamina, setiap tahun dilakukan Survei Theme-O-Meter. Survei tersebut bertujuan untuk mengukur dan memperoleh masukan dari para pekerja dan manajemen atas ketiga hal tersebut di atas. Pada tahun 2018, survei Theme O Meter (ToMS) dilakukan pada bulan Desember di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan beberapa Anak Perusahaan.

Jumlah responden survei Theme O Meter mengalami peningkatan dari 9.042 pekerja pada tahun 2017 menjadi 10.395 pekerja pada tahun 2018. Peningkatan jumlah responden dimaksud menunjukkan makin meningkatnya kepedulian pekerja terhadap kesehatan budaya Perusahaan.

Hasil Survei Theme-O-Meter, secara umum menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dengan indeks tertinggi dicapai di tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

a. *Employee Engagement* (EE): 86,1% dan *Practise Pulse Check* (PPC): 78,7%. Berikut tren pergerakan indeks EE dan PPC.

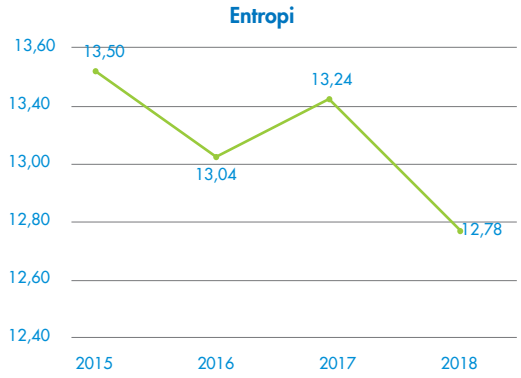

Dari hasil survei EE dan PPC lima tahun terakhir, menunjukan kecenderungan penurunan gap antara EE dan PPC, hal ini mencerminkan peningkatan dalam *employee engagement* dan praktik manajemennya. Namun untuk beberapa aspek masih perlu ditingkatkan, yaitu terkait *Performance Management, Carrier Management, Innovation* dan *Excellent Execution*.

Hasil survei seluruh dimensi EE telah mencapai target 85%, mulai dari dimensi *Aspirations, Accountabilities, Collaboration, Recognition*, dan *People Manager Interaction*. Sedangkan hasil seluruh dimensi PPC yang di atas 77% adalah *People Performance Management, Employee Engagement, Close Leadership Gap, Sense of Urgency For Change, Motivation with Career / Opportunity and Values*, dan *Execution Excellence*.

b. Entropi Budaya mengalami penurunan 0,46% dari 13.24% tahun 2017 menjadi 12,78% tahun 2018 (semakin rendah indeks Entropi Budaya maka semakin sehat suatu perusahaan). Nilai Entropi Budaya tahun 2018 semakin mendekati kategori Prima/Sehat.

RESEARCH & TECHNOLOGY

Untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, Pertamina harus dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada seraya terus mencari sumber daya baru. Untuk itu, Pertamina membentuk *Research and Technology Center* (RTC). RTC merupakan fungsi yang dibentuk dengan tujuan untuk mendukung aspirasi Pertamina menuju perusahaan energi kelas dunia melalui kegiatan inovasi yang terintegrasi dan secara umum mencapai standar yang sama dengan perusahaan energi kelas dunia lainnya.

RTC mendukung Pertamina dalam 4 (empat) aspek kegiatan riset dan pengembangan yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki saat ini dan meningkatkan produksi minyak dan gas dari lapangan yang ada;
2. Mengakses sumber daya yang baru, termasuk sumber daya yang belum tergali dari wilayah yang belum terjamah;
3. Meningkatkan margin atau keuntungan bisnis Pertamina melalui pengembangan ide, menyediakan solusi dan menyebarkan penggunaan teknologi baru;
4. Mendukung keberlanjutan bisnis Pertamina melalui diversifikasi bisnis seperti bisnis petrokimia, kimia dan energi baru terbarukan.

Tahun 2018, RTC telah menjalankan beberapa proyek penelitian dan pengembangan antara lain:

1. Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di fungsi *Upstream Research & Technology* yang terbagi menjadi 5 (lima) bidang riset yaitu *Exploration Research, Development Research, Drilling and Well Construction Research, Production Research* dan *Geothermal Research.* Beberapa proyek utama yang telah berjalan di fungsi ini selama tahun 2018 ialah sebagai berikut:
   a. *Improved Development Module Material Selection for Tubing/Pipeline CO2 Environment*;

   b. Rancang bangun Adsorben Hg, As dan H2S untuk Eksplorasi Geothermal;
   c. Riset *Digital Petrophysics*;
   d. *Development of Stuck Pipe Early Warning System for Drilling Rigs*; serta
   e. *Chemical selection* di Laboratorium Pertamina untuk peningkatan produksi dengan EOR di Lapangan Jirak dan Rantau Pertamina EP
2. Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di fungsi *Downstream Research & Technology* yang terbagi menjadi 4 (empat) bidang riset yaitu *Oil and Gas Research, Process Development Research, Materials and Chemicals Research* dan *Petrochemical and Petroleum Non Fuel Research*. Di fungsi ini, kegiatan yang menjadi proyek utama selama tahun 2018 ialah kegiatan penelitian terkait dengan pengembangan Aspal Pertamina.
3. Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di fungsi *New & Renewable Energy* yang terbagi menjadi 4 (empat) bidang riset yaitu *New Energy Development Research, Renewable Energy Development Research, Power Development and Storage Management Research* serta *Carbon Capture and Storage Research*.
   Beberapa proyek utama yang berjalan di fungsi ini antara lain adalah:
   a. Riset dan Pengembangan Biobutanol & Bioethanol 2nd Gen;
   b. Pengembangan Komponen Material Elektroda, Optimasi Formulasi dan Produksi Prototype Lithium Ion Battery (LIB);
   c. Utilisasi CO2 untuk Value Added Product; serta
   d. PyGas Production by Biomass Pyrolisis.

Agar kinerjanya dapat berjalan lebih optimal, RTC juga didukung oleh fungsi *R&T Planning and Commercial* yang memiliki tiga pilar utama, yaitu: pilar proses bisnis dengan disusunnya sistem tata kelola (STK) RTC, pilar infrastruktur pengelolaan dan pengembangan fasilitas riset serta pilar sumber daya manusia sebagai aset yang akan mengelola dan menentukan arah pengembangan produk dan / atau proses di Pertamina.

Pertamina telah mendaftarkan 134 HKI, di mana RTC berpartisipasi sebanyak 41 paten dengan 19 paten telah granted, diantaranya adalah formulasi refrigeran hidrokarbon sebagai pengganti refrigeran sintetik R-12 dan R-134a (Musicool), proses pembuatan katalis pengolahan hidro yang selektif pada penjenuhan olefin dan penyingkiran senyawa nitrogen dalam umpan hidrokarbon dan produk yang dihasilkan dari proses tersebut (Katalis NHT), pelarut berbahan hidrokarbon untuk membersihkan logam dan proses pembuatannya (Solphy -2) dan komposisi bahan bakar nilai oktan minimal 100 (Pertamax Racing).

QUALITY SYSTEM AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

Pertamina membentuk Fungsi *Quality System and Knowledge Management* (QS&KM) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan melalui penciptaan, budaya perbaikan yang berkelanjutan, peningkatan efektivitas implementasi sistem standar dan budaya berbagi pengetahuan yang dijalankan dalam koridor proses bisnis selaras dengan Prioritas *World Class* Pertamina.

Fungsi QS&KM menjamin implementasi kualitas proses bisnis Perusahaan dalam empat pilar mutu Pertamina, yaitu *Continuous Improvement Program (CIP), System & Standard Management (SSM), Knowledge Management* (KMS) serta *Quality Management Assessment* (QMA). Keempat pilar tersebut memiliki peran berbeda di setiap level korporasi dalam menjamin kualitas bisnis tersebut. Dalam rangka implementasi kualitas proses bisnis tersebut, Fungsi QSKM pada 2018 didukung oleh personel sebanyak 31 orang dengan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan bisnis.

Pada 2018, Fungsi QS&KM telah menjalankan tugas, program kerja, serta pencapaian kinerja mendukung Visi Pertamina yaitu Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia. Fungsi QSKM senantiasa menjamin kualitas yang baik di seluruh unit operasi, unit bisnis, serta anak Perseroan di dalam dan luar negeri sesuai dengan Kebijakan Sistem Manajemen Pertamina dan Code of Pertamina, Pertamina menerapkan kebijakan tersebut melalui Fungsi QSKM guna menjamin kualitas budaya perbaikan berkelanjutan seluruh unit operasi/bisnis/ regional dan anak Perseroan melalui empat pilar utama kegiatan sebagai berikut:

1. *Continuous Improvement Program* (CIP)
   CIP merupakan program kegiatan untuk menyelesaikan masalah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi melalui metode PDCA dan DELTA di lingkungan kerja Pertamina. Pada 2018, Pertamina berhasil menciptakan nilai (*value creation*) sebesar lebih dari Rp40 triliun sebagai wujud komitmen untuk menjalankan bisnis secara efisien dalam bentuk *saving cost, additional revenue* maupun *reduction cost*. Pada 2018 juga telah dilakukan *site visit sustainability* dalam rangka memastikan keberlanjutan implementasi hasil CIP Insan Mutu Pertamina. Dari kegiatan ini berhasil didapatkan *value creation* sebesar Rp525 miliar dari 30 hasil CIP. Penciptaan nilai yang berhasil dilakukan Pertamina merupakan wujud komitmen Perusahaan untuk menjalankan bisnis secara efisien dalam bentuk penghematan dan efektifitas proses dalam mencapai bahkan melampaui target *revenue* yang ditetapkan. Pada 2018, tercatat 3169 CIP yang terselesaikan dengan peningkatan CIP dari tahun 2017. Semakin banyaknya CIP yang terselesaikan memiliki makna bahwa insan Pertamina mulai membiasakan diri untuk menyelesaikan masalah pekerjaan dengan menggunakan PDCA dan DELTA (Delapan Langkah Tujuh Alat).

   Di tahun 2018, Direktorat Manajemen Aset berhasil melakukan beberapa pencapaian kinerja berikut:
   a. Pemindahbukuan Aset Penunjang Usaha (APU)
      Direktorat Manajemen Aset melakukan pemindahbukuan sejumlah Aset Penunjang Usaha (APU) dengan tujuan sebagai berikut:
      - Pengelolaan Aset Penunjang Usaha (APU) secara terpusat, terpadu dan terintegrasi
      - Biaya perawatan Aset Penunjang Usaha (APU) tidak membebani Direktorat Teknis
   b. Penghapusbukuan aktiva
      Direktorat Manajemen Aset membantu proses penghapusan aktiva Direktorat Teknis di tahun 2018 terhadap 643 aktiva tetap, material, *resale commodities*, dan *scrap*. Direktorat Manajemen Aset saat ini sedang mengusulkan penyesuaian prosedur Penghapusan Aktiva sehingga proses birokrasi yang dilalui dapat lebih efektif dan efisien.
   c. Pertamina sampai saat ini sedang melakukan penyelesaian permasalahan aset dengan berkerja sama dengan fungsi dan instansi terkait pengadaan lahan
   d. Pertamina telah melakukan proses pengadaan lahan guna mendukung kebutuhan operasional perusahaan
   e. Transformasi digital dan Penulisan sejarah
      - Direktorat Manajemen Aset sepanjang tahun 2018 masih terus melakukan pengembangan terhadap aplikasi SIMA sehingga dapat mendukung proses bisnis di lingkungan Manajemen Aset.
      - Penulisan sejarah seluruh aset Pertamina dengan cara penelusuran dokumen tanah, penyusunan kronologis perolehan tanah, serta dokumentasi dalam rangka memperkuat status kepemilikan tanah Pertamina
   f. Optimalisasi Aset Penunjang Usaha (APU)
      - Optimalisasi Aset Penunjang Usaha (APU) dilakukan melalui skema bisnis swakelola, sewa, pinjam pakai, kerja sama dan divestasi *(scrap)*.
      - Pertamina melakukan forum Sinergi Anak Perusahaan dan BUMN karya dalam rangka optimalisasi aset Pertamina
      - Rencana optimalisasi aset dengan skema kerja sama dengan anak perusahaan Pertamina sebagai *vehicle*
      - Kerja sama Bandara Warukin antara Dishub dan Pertamina dengan Penugasan kepada PT PAS

g. Pertamina melakukan pengembangan aset dengan bekerja sama dengan Patra Jasa
h. Proses pengajuan terkait peningkatan status kepemilikan/ sertifikasi aset Kantor Pusat dan Unit Operasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan Amandemen
i. Pencapaian kegiatan pengadaan barang/ jasa yang telah diselesaikan selama periode bulan Januari sampai Desember 2018 sebanyak 10.838 proses pengadaan barang/jasa.

2. *Knowledge Management System* (KMS)
KMS berperan dalam meningkatkan budaya berbagi pengetahuan serta mengelola pengetahuan Perusahaan secara terintegrasi. Pertamina memaksimalkan implementasi tekonologi dalam melaksanakan kegiatan berbagi pengetahuan melalui webinar serta pengelolaan aset pengetahuan yang memudahkan diakses di seluruh lingkungan Perusahaan dalam *Knowledge Management* melalui portal KOMET. Selain itu, KMS juga mengelola Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari proses perbaikan berkelanjutan di Pertamina berbasis CIP. Kegiatan berbagi pengetahuan tersebut dilakukan melalui tatap muka (*offline*), informasi (*online*) seperti webinar, dan pengelolaan portal KOMET yang bertujuan untuk menciptakan, mengumpulkan, memantau dan mendistribusikan aset pengetahuan di Pertamina.

3. *Quality Management Assessment* (QMA)
QMA berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) berperan dalam mewujudkan terciptanya kinerja ekselen di seluruh Unit Bisnis/ Unit Operasi/Anak Perusahaan. Pertamina merealisasikan hal ini dengan memonitor integrasi antara *good plan-good execution* dan *good achievement* dari kinerja ekselen tersebut. Pencapaian di setiap Unit Bisnis/Unit Operasi/ Anak Perusahaan dapat mendorong pencapaian kinerja ekselen perusahaan secara korporat.
Hingga akhir tahun 2018, QMA telah diterapkan pada 32 Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan dengan kategori *Emerging Company*.

Pertamina menetapkan kebijakan dan rencana jangka panjang dengan fokus atas implementasi serta praktik manajemen mutu yang ekselen bagi Pertamina. Oleh karena itu, Fungsi QSKM bersama dengan BUMN maupun Perusahaan lain berkolaborasi terkait pengelolaan mutu secara ekselen serta mampu meningkatkan daya saing Perseroan. Salah satu bentuk kolaborasi ini adalah dengan pertukaran tenaga asesor untuk asesmen KPKU, Penugasan Auditor Sistem Standar dalam *Cross Functional Internal* Audit di beberapa Perusahaan. Diharapkan kolaborasi ini dapat memperkuat sumber daya Pertamina dalam meningkatkan jaminan mutu dalam hal produk dan jasa.

Dalam menjamin operasi yang efektif, Fungsi QSKM dalam Pertamina *Standardization & Certification* mengelola seluruh proses implementasi manajemen sistem standar bagi seluruh unit operasi, unit bisnis dan anak Perseroan dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Fungsi *System Business Process* sebagai bagian dari QSKM akan mengupayakan proses pengelolaan dokumen Perseroan, proses pembuatan sistem tata kerja dan mekanisme korespondensi Perseroan yang secara dinamis didesain untuk mendukung proses bisnis dan operasi Perseroan.

Dalam menjamin dan meningkatkan kualitas inovasi dari Insan Mutu Pertamina maka fungsi *Quality Management Corporate* akan berupaya melakukan audit sustainability agar hasil inovasi yang telah dihasilkan Insan Mutu Pertamina tetap berjalan dengan baik. Selain itu fungsi QMC juga mengupayakan agar hasil inovasi yang telah ada dapat direplikasi di Unit Operasi/Bisnis/Anak Perusahaan. Serta untuk menjaga aset pengetahuan yang telah ada fungsi *Knowledge Management* telah mengelola Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari proses perbaikan berkelanjutan di Pertamina berbasis CIP.

CORPORATE ICT

Information, Communication & Technology (ICT) semakin mengambil peran di dunia bisnis. Saat ini hampir tidak ada bisnis yang dapat bertahan tanpa melibatkan peran ICT. Demikian juga dengan Pertamina.

Pertamina menerapkan ICT sesuai dengan kebutuhan dan *alignment* terhadap strategi dan program kerja korporasi dan memerhatikan kebutuhan masing-masing unit bisnis maupun unit *supporting*. Fungsi Corporate ICT di Pertamina bertanggung jawab terhadap penyediaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara menyeluruh dan terintegrasi di semua lini perusahaan baik di PT Pertamina (Persero) maupun di Anak Perusahaan.
Tahun 2018, terjadi perubahan struktur organisasi *Corporate* ICT dimulai dengan perubahan nama *Corporate Shared Service* (CSS) menjadi *Corporate* ICT (CICT) dan adanya 2 fungsi baru, fungsi IT ASP *(Architecture, Security & Policy)* dan Fungsi Digital Transformasi. Fungsi IT ASP dibentuk untuk merumuskan *policy*, arsitektur dan keamanan informasi sebagai bentuk strategi fungsi *Corporate* ICT dalam menghadapi ancaman kejahatan *cyber* dan Fungsi Digital Transformasi dibentuk untuk mengawal transformasi digital di Pertamina.

TRANSFORMASI DIGITAL PERTAMINA

Menimbang semakin pentingnya peran ICT di dunia usaha, maka transformasi digital menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan daya saing. Sejak tahun 2017 Pertamina telah melakukan transformasi digital yang ditandai dengan Digitalisasi Marketing. Tahun 2018, perjalanan Transformasi Digital Pertamina memasuki babak baru yang diawali dengan kegiatan *Kick-Off* BTP Pertamina Digital Transformation dan Pertamina Digital Expo.

Filosofi Transformasi Digital Pertamina:

1. Fokus pada tema utama Transformasi Digital
2. Diarahkan berdasarkan kebutuhan bisnis dan dilaksanakan secara terintegrasi
3. Dilakukan secara holistik aspek *people, process* dan *technology*
4. Fleksibilitas dalam pengembangan solusi

Tim Transformasi Digital Pertamina telah merumuskan 16 Tema Utama yang akan menjadi prioritasi dalam Transformasi Digital dan pada tahun 2018 dipilih 9 tema utama yaitu Digitalisasi SPBU, B2B – CLM *(Customer Loyalty Management), Logistic Planning System, Integrated SCM Planning, Predictive Maintenance, Integrated GGR (Geology, Geophysics & Reservoir), SSO/SSC (Shared Service Organization/ Shared Service Center), Digital HSSE* dan *Corporate Command Center*.

Pertamina menyadari bahwa transformasi digital tidak hanya terkait dengan aspek teknologi dan proses, namun aspek *people (culture)* juga menjadi bagian hal yang penting untuk diperhatikan. Karena itu, sepanjang tahun 2018 Pertamina menjalankan program *digital culture*, antara lain dengan program *Pertamina Digital Community, Digital Expo, Digital Awareness, Digital Roadshow*, survei *Digital Acceleration Index (DAI)* dan *Benchmarking Digital Culture*.

Selain itu, tahun 2018 juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pekerja yang menjadi bagian dari transformasi digital, seperti kegiatan *Pertamina Energy Hackathon 2018, e-Sport Competition, Paper Competition*, dan sebagainya.

PROGRAM STRATEGIS FUNGSI CORPORATE ICT TAHUN 2018

Tahun 2018, dalam rangka mendukung Pertamina mewujudkan visi dan misi perusahaan, *Corporate* ICT telah menjalankan beberapa program strategis, antara lain :

1. Integrasi Data Perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
   Corporate ICT mendukung program integrasi data perpajakan Pertamina dengan DJP secara H2H *(Host-to-Host)*. Saat ini Pertamina sudah mengimplementasikan program H2H E-Faktur dan E-Bupot dan menjadi BUMN pertama yang mengimplementasikan program ini.
2. Alih Kelola Bisnis Hulu
   Pada tahun 2018 *Corporate* ICT sudah banyak terlibat dalam alih kelola bisnis hulu untuk mengawal masa transisi alih kelola untuk aspek ICT. Beberapa proyek alih kelola selama tahun 2018 seperti alih kelola PHE East Ambalat, PHE Tuban East Java, PHE Ogan Komering, PHE OSES, Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS).
3. *Digital Culture*
   Kegiatan *Digital Culture* diperlukan untuk mengubah cara berpikir dan bekerja organisasi, dengan pola pikir *Agile, Collaborative, Innovative, Customer Centric, Data-Driven*, dan *Engaged* guna menghadapi *digital disruption*. *Digital Culture* menjadi kontributor bagi BTP *Digital Transformation*.
4. *Corporate Command Center*
   Project Corporate Command Center bertujuan untuk membangun pusat komunikasi intensif dan informasi operasional Pertamina dengan data *real-time* untuk mendukung visi Pertamina 2025 menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia. Dengan adanya *Corporate Command Center*, Pertamina akan memiliki pusat informasi manajemen dan operasional secara *end-to-end* (hulu sampai hilir) yang bersifat *real-time* dan menjadi sebuah *Executive Gallery* dan *showcase* kinerja Pertamina bagi *stakeholder* dan tamu-tamu penting (VVIP) Pertamina.
5. Pengembangan *Big Data Analytics* untuk mendukung *Corporate Business Analytics*
   Pengembangan *big data analytics* dilakukan untuk membangun data *warehouse* yang terpadu dan andal, mengembangkan data *analytics* dari sumber data ERP dan non ERP yang terpadu, dan memberikan kemampuan *analytics* pada informasi/data guna mendukung pengembangan bisnis.
6. Standarisasi Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data di Pertamina (Persero)
   Tujuan dilakukannya standarisasi infrastruktur jaringan komunikasi data di Pertamina (Persero) adalah untuk memberikan layanan komunikasi Pertamina dengan melakukan Standarisasi Jaringan Data Pertamina dan implementasi *Software Defined* WAN (SDWAN) serta *redesign* Sistem *Video Conference* di Pertamina (Persero).
7. Implementasi *One Data Center*
   Implementasi 1 *(One)* Data *Center* Pertamina, sehingga semua sistem informasi bersifat Pertamina Wide dan standarisasi *Support system* di Unit/Area untuk memperlancar, memudahkan arus informasi dan meningkatkan keamanan Sistem Informasi.
8. *Digital Reporting Service*
   Digital Reporting Service diimplementasikan untuk mengurangi *backlog*, menyediakan *report* sesuai kebutuhan *user* tepat waktu, mengurangi *human error* (otomatisasi) atas *report* yang dihasilkan, dan membantu dalam pengambilan keputusan.
9. *Data Quality Control Automation*
   Peningkatkan kontrol terhadap kualitas data yang dikelola oleh *Shared Processing Center* (SPC) dan Otomatisasi proses pemeriksaan kualitas data.
10. Pertamina *World Class IT Governance*
    Tujuan Pertamina *World Class IT Governance* adalah menyusun dan mengimplementasikan *framework IT governance* berbasis *best practice* yang selaras dengan proses bisnis Pertamina. Membenahi, membangun, hingga menerapkan standar atas proses dan STK yang terintegrasi untuk P*ertamina Wide*.
11. *Cyber Security Resilience Implementation* (CSRI)
    CSRI merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan transformasi ketahanan digital Pertamina dan merupakan kelanjutan dari proyek CSMA *(Cyber Security Maturity Assessment)* pada tahun 2017.

MANAJEMEN ASET

Dalam memaksimalkan potensi aset, pengembangan jaringan bisnis, serta peningkatan pendapatan Perusahaan, Pertamina membentuk Direktorat Manajemen Aset yang terintegrasi dengan Unit Operasi dan Anak Perusahaan dalam menjalankan proses bisnis pengelolaan aset dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis.

Direktorat Manajemen Aset bertanggung jawab atas pengelolaan Aset Penunjang Usaha (APU) Pertamina dalam rangka mendukung bisnis inti Perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Pertamina melakukan penyempurnaan Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Aset Level Manager Ke Atas berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-58/C00000/2017-S0 tanggal 25 Oktober 2017 dan Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Aset Level di bawah Manager berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-01/K00000/2018-S0 tanggal 22 Januari 2018. Dengan adanya penyempurnaan organisasi tersebut diharapkan Pertamina dapat melakukan pengelolaan Aset Penunjang Usaha (APU) dalam rangka meningkatkan pendapatan Perusahaan dan mendukung bisnis inti perusahaan agar lebih efektif dan efisien.

Direktorat Manajemen Aset memiliki misi untuk melaksanakan pengelolaan aset secara professional sebagai *partner* strategis kegiatan bisnis Pertamina dan berdasarkan prinsip komersial dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), melalui pilar utama kegiatan yaitu:

1. Peningkatan pelayanan kepada *customer*
   Pertamina sebagai *strategic business partner*
   Pertamina melaksanakan peningkatan pelayanan guna mendukung kegiatan inti bisnis Pertamina, berupa:
   - Penyediaan lahan untuk kebutuhan perusahaan
   - Penyediaan fasilitas kebutuhan kantor & Rumah Dinas Pekerja (RDP)
   - Pengelolaan gedung, fasilitas, sarana dan prasarana yang efektif dan efisien
2. Monetisasi Aset Penunjang Usaha
   Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban operasional perusahaan dalam melakukan pengelolaan Aset Penunjang Usaha, Pertamina melakukan:
   - Optimalisasi Aset Penunjang Usaha terutama untuk aset yang bersifat *Free* (bersertifikat) & *Clear* (dikuasai)
   - Peningkatan nilai Aset Penunjang Usaha
   - Sinergi anak perusahaan beserta afiliasinya
   - Sinergi BUMN
3. Peningkatan status kepemilikan lahan
   Dalam rangka peningkatan status kepemilikan lahan, Pertamina melakukan:
   - Pengamanan aset dengan bekerja sama dengan fungsi HSSE
   - Pengosongan aset dari penghuni tanpa hak dengan bekerja sama dengan fungsi HSSE dan instansi terkait
   - Sertifikasi lahan
   - Penyelesaian permasalahan lahan
   - *Recovery* aset
4. Restrukturisasi aset
   Guna pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien, Pertamina melakukan restrukturisasi aset berupa:
   - Divestasi aset
   - Inbreng kepada anak perusahaan
   - *Ruistlag* atau tukar guling kepada lembaga/instansi pemerintah lainnya
   - Penyertaan modal kepada pemerintah
5. *Procurement Excellence*
   - Sentralisasi pengadaan barang & jasa komoditi strategis (Korporat, Direktorat, Unit Operasi/Unit Bisnis)

- Sinergi Pertamina *Incorporated* (Pemetaan & Optimalisasi Kompetensi AP melalui Kontrak Payung)
- Optimalisasi *Inventory & Lean Warehouse*
- Digitalisasi *Procurement* (*Procurement* 4.0)
- Implementasi ISO 37001 : 2016
- Sertifikasi Internasional Kompetensi *Procurement*

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT

Health Safety Security Environment (HSSE) merupakan aspek mendasar dalam operasional Pertamina. Setiap prosedur dan tahapan kerja di seluruh kegiatan pertambangan dan produksi hingga distribusi dijalankan sesuai aturan dan pedoman K3 yang berlaku. Seluruh entitas pertambangan dan operasional Pertamina dari mulai operator di lapangan hingga pihak manajemen, serta kontraktor pihak ketiga yang terlibat dengan kegiatan Pertamina diwajibkan mematuhi implementasi HSSE.

Aspek HSSE merupakan salah satu aspek utama dari proses bisnis Pertamina. Manajemen menetapkan bahwa HSSE & *Sustainabilty* menjadi fondasi dalam strategi korporat 2019 – 2026, dengan mandat utama implementasi budaya *HSSE Excellence* dengan baik di semua aspek operasional.

Mandat tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan HSSE Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada Agustus 2018 dengan yang memuat komitmen sebagai berikut:

1. Mengutamakan aspek HSSE Perusahaan dalam pengelolaan bisnis perusahaan;
2. Mematuhi peraturan perundangan HSSE serta menggunakan teknologi tepat guna sesuai standar nasional dan internasional;
3. Mengurangi risiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden pada personil, aset, informasi dan lingkungan;
4. Melakukan intervensi terhadap kondisi maupun tindakan yang dinilai tidak aman;
5. Memastikan pemahaman dan implementasi *Corporate Life Saving Rules* (CLSR) pada pekerja dan mitra kerja;
6. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pekerja serta mitra kerja agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar, aman dan berwawasan lingkungan;
7. Melaporkan seluruh insiden secara transparan dan melakukan investigasi untuk mencegah terjadinya insiden serupa;
8. Menjadikan kinerja HSSE personil, aset, data dan informasi Perusahaan dalam penilaian dan penghargaan terhadap seluruh pekerja.

PT PERTAMINA (PERSERO)

KEBIJAKAN
HEALTH, SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENT (HSSE) PERUSAHAAN

Sebagai langkah / upaya implementasi kebijakan tersebut, Manajemen telah menetapkan 8 program strategis HSSE yaitu :

1. *HSSE Governance*
2. *Safety Culture*
3. *Emergency Readiness*
4. *Safe Work Practices*
5. *Environment Excellent*
6. *Security Excellent Level*
7. *HSE Leading Programs Standardization*
8. *OH-IH Excellent*

1. **HSSE Governance**
   Prinsip, kebijakan, prosedur dan pedoman, sehingga HSSE dapat mengarahkan dan mengendalikan fungsi serta prosesnya
2. **Safety Culture**
   Sikap, keyakinan, presepsi & nilai-nilai yang ditampilkan dalam keselamatan di tempat kerja. Budaya keselamatan pada tingkatan tertinggi (*generative*) adalah safety sudah menjadi "*way of life*"
3. **Emergency Readiness**
   Organisasi, manajemen sumber daya & tanggung jawab untuk menangani semua aspek keadaan darurat (kesiapan, tanggapan, dan pemulihan)
4. **Safe Work Practies**
   Metode tertulis yang menunjukkan bagaimana melakukan tugas dengan risiko minimun terhadap personel, peralatan, bahan, lingkungan dan proses
5. **Evironment Excellent**
   Melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan upaya berguna bagi masyarakat secara jangka panjang
6. **Security Excellent Level**
   Pengamanan fisik dan non fisik, melalui *big data management* untuk melakukan data analytics sehingga dapat dilakukan mitigasi atas timbulnya potensi risiko keamanan
7. **HSSE Leading Programs Standardization**
   Standarisasi HSSE leading program untuk seluruh Direktorat/UO/AP, mulai dari perencanaan, eksekusi hingga monitong. Misalnya *management walkthrough*
8. **OH – IH Excellent**
   Proses OH-IH sudah ada dan telah diimplementasikan. Sistem berkelanjutan, didukung oleh perbaikan secara terus menerus

Sedangkan program utama HSSE yang dilaksanakan selama tahun 2018 adalah :

1. Penyusunan SUPREME menuju *one* Pertamina HSSE *Management System* dengan pendekatan berbasis risiko, menganut prinsip perbaikan berkelanjutan dan PDCA serta bertahap akan menggantikan protokol ISRS, SMP, *Fit to Work*
2. Implementasi *Reward & Consequences* atas kinerja HSSE serta memasukkan bobot HSSE dalam *fit proper test* dan *fit interview* pejabat dan *blast learning from event* (LFE)
3. Melaksanakan *crisis management exercise* dan *emergency drill* secara rutin untuk melatih kesiapan saat menghadapi kondisi krisis/ sebenarnya
4. Penerbitan 11 *Corporate Life Saving Rules* yang dikombinasikan dengan *Demo Room* untuk peningkatan kompetensi pekerja, khususnya *outsourcing*
5. Pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dan audit *Protocol Pertamina Environment Regulation Compliance Assurance* (PERCA) sebagai *baseline* pengelolaan lingkungan UO/ Lokasi/ AP yang tidak masuk penilaian PROPER
6. Pelaksanaan *cross & internal directorate management walkthrough* (MWT) sebagai wadah pembelajaran *leader* serta wadah komunikasi langsung *leader ke frontliner*
7. Pelaksanan audit HSSE terintegrasi di 74 lokasi unit operasi / *field*, yang terdiri dari audit HSSE Manajemen sistem berbasi protokol ISRS, *audit fit to work* (FtW), audit Sistem Manajemen *Pengamanan* dan Survei Budaya

Pada tahun 2018, mulai dilaksanakan audit/ *assessment* yang terintegrasi, dengan penambahan jumlah AP/ Unit Operasi/ *Field* yang diaudit/ *assess* dibandingkan Tahun 2017. Adapun audit/ asesmen HSSE terintegrasi meliputi:

1. Audit HSSE MS Protokol ISRS 2018
   Tahun 2018 dilaksanakan audit HSSE MS Protokol ISRS di 74 lokasi unit operasi / *field*, yang

dilaksanakan oleh internal asesor dan eksternal asesor. Jumlah lokasi audit meningkat sebanyak 12 AP/ Unit Operasi/ *Field*, bila dibandingkan dengan jumlah lokasi *assessment* tahun 2017 sebanyak 62 AP/ Unit Operasi/ *Field*. Sebanyak 41 AP/ Unit Operasi/ Field berhasil memperoleh level *excellent*, dengan 11 AP/ Unit Operasi/ *Field* melebihi target level yang ditetapkan.

2. Pelaksanaan Audit/ *Assessment Fit to Work* (FtW) Tahun 2018 ini mulai dilakukan audit *Fit to Work*, sebagai baseline data untuk selanjutnya dilakukan penyusunan program kerja dalam rangka mewujudkan OH-IH *excellent*. Audit FtW dilaksanakan di 77 AP/ Unit Operasi/ *Field*. Audit/ *assessment* FtW level dinilai dengan skala 0-4,0 dan sebanyak 60 AP/ Unit Operasi/ *Field* (78% dari total AP/ Unit Operasi/ *Field*) memperoleh FtW Level ≥2,0.
3. Audit Berbasis Protokol Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)
   Audit SP tahun 2018 dilaksanakan di 73 lokasi, jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang dilaksanakan di 38 lokasi. Hasil dari pelaksanaan SMP tahun 2018 adalah sebanyak 42 lokasi mendapatkan peringkat *Gold*/ Emas dengan rata-rata nilai seluruh AP/ Unit Operasi/ *Field* yang memperoleh Level *Gold* adalah sebesar 87%. Audit dilaksanakan oleh internal *assessor* Pertamina.
4. Survei Budaya HSE
   Pada tahun 2018, pengukuran terhadap *maturity* level budaya HSE dilaksankan untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan program-program perbaikan di Tahun 2018. Secara umum, pada tahun 2018 skor budaya HSE PT Pertamina (Persero) adalah sebesar 3,97 atau naik sebesar 0,25 dibandingkan tahun 2017, dengan populasi responden yang berada pada level budaya Pathological hingga *Calculative* berkurang 6,69%.

Selain hal tersebut dalam aspek lingkungan, pada tahun 2018 PT Pertamina (Persero) berhasil meraih 83 PROPER Emas dan Hijau dengan rincian 13 Unit Operasi/ *Field* berhasil meraih PROPER Emas dan 70 Unit Operasi/ *Field* berhasil meraih PROPER Hijau.

INTEGRATED SUPPLY CHAIN

Fungsi ISC sebagai penanggung jawab pelaksanaan Optimasi Hilir dan kegiatan pengadaan/penjualan minyak mentah dan produk kilang dituntut untuk dapat melakukan pengadaan minyak mentah dan produk kilang secara efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan Pertamina. Oleh karena itu Fungsi ISC terus melakukan transformasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. *Roadmap* transformasi Fungsi ISC terdiri dari 3 (tiga) fase utama, yaitu: *Fase* 1.0 atau *Fase Quick Win*, *Fase* 2.0 atau *Fase World Class* ISC, dan *Fase* 3.0 atau *Fase Talent Engine*. Dalam *Breakthrough Project* (BTP) tahun 2018, ISC ikut memberikan kontribusi dalam program Pertamina untuk melakukan efisiensi di seluruh lini antara lain :

1. *BTP Downstream Operational Excellence* (DOE)
2. Optimalisasi FSO *Crude* Teluk Semangka
3. Maksimalisasi Pembelian *Crude* Domestik Bagian KKKS

Program *BTP Downstream Operational Excellence* (DOE) merupakan kolaborasi BTP antara 3 Fungsi yaitu Pengolahan, Pemasaran dan ISC dengan target penurunan angka *Integrated Port Time* (IPT), optimasi penggunaan infrastruktur di Pengolahan dan Pemasaran, optimasi *source* pengadaan impor minyak mentah dan produk, dan akselerasi pengembangan infrastruktur dalam mendukung IPT.

Dalam rangka menindaklanjuti dan mengimplementasikan Permen ESDM No.42 Tahun 2018 perihal Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan dalam Negeri, serta untuk memenuhi kebutuhan kilang Pertamina, saat ini ISC mendapatkan minyak mentah dari domestik (GOI, Anak Perusahaan Pertamina dan Pembelian dari KKKS) & pembelian impor. Secara *value*, pembelian impor relatif lebih tinggi dari minyak mentah domestik karena ada tambahan biaya transportasi. Sementara itu saat ini beberapa minyak mentah domestik seperti, KKKS belum sepenuhnya diserap secara maksimal karena terkendala masalah pajak. Hal ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan pembelian MM Domestik bagian KKKS sehingga diharapkan porsi MM domestik yang diolah kilang Pertamina akan lebih besar dan secara keseluruhan akan meningkatkan margin hilir.

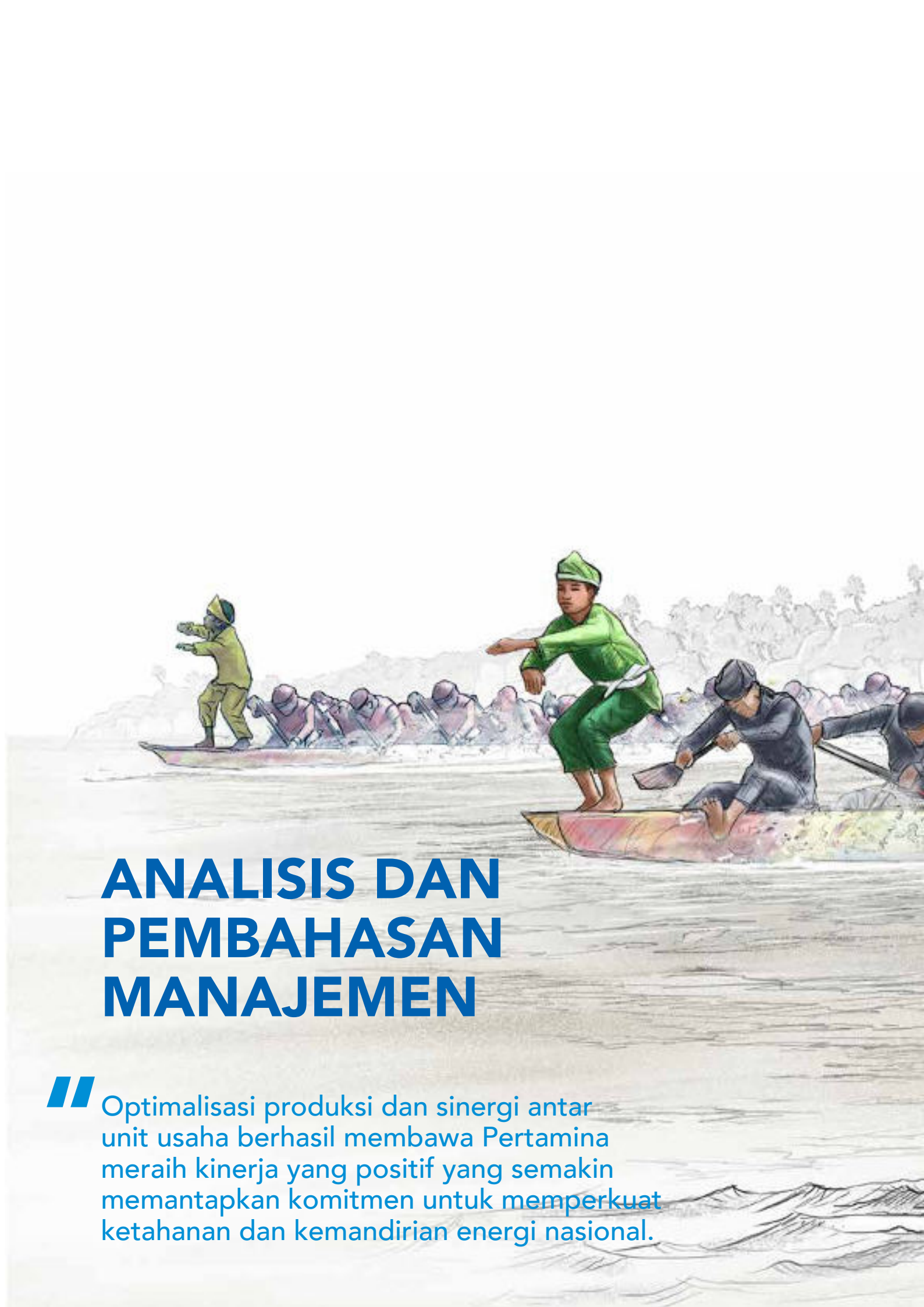

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

"Optimalisasi produksi dan sinergi antar unit usaha berhasil membawa Pertamina meraih kinerja yang positif yang semakin memantapkan komitmen untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Beberapa regu dayung dengan pakaian tradisonal tengah perpacu adu cepat di sebuah sungai yang besar. Perlombaan ini merupakan salah satu budaya masyarakat tradisional Riau yang disebut pacu jalur. Pacu Jalur memiliki filosofi yang mendalam tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mencapai sebuah kesuksesan.

TINJAUAN EKONOMI

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

EKONOMI GLOBAL

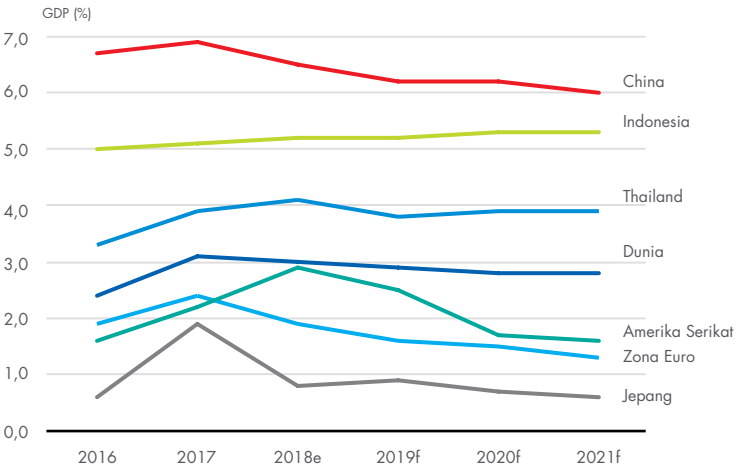

Sumber: Bank Dunia, Jan 2019

Kondisi ekonomi global tahun 2018 diwarnai oleh ketidakpastian. Hal ini salah satunya disebabkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Perang dagang yang melibatkan dua kekuatan utama ekonomi dunia ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap arus perdagangan dunia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global pada semester kedua tahun 2018 berjalan lebih lambat dibandingkan semester pertama.

Pada saat yang bersamaan, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) membuat kebijakan untuk menaikan suku bunga. Sepanjang tahun 2018, The Fed tercatat 4 kali menaikan tingkat suku bunga acuan, hingga ke level 2,5%. Kenaikan suku bunga The Fed juga berdampak pada kondisi pasar keuangan global, di mana arus investasi lebih mengarah ke instrumen yang cenderung aman (*risk aversion*), sehingga pasar saham global terkoreksi cukup tajam.

Kondisi ekonomi global semakin menjadi tidak pasti dengan menguatnya nilai tukar USD terhadap hampir semua mata uang asing, termasuk Rupiah.

Pelemahan ekonomi global tahun 2018 salah satunya tercermin dari melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dengan pertumbuhan sebesar 6,6%, pertumbuhan tersebut menjadi yang terendah dalam 28 tahun terakhir. Di lain pihak, ekonomi AS justru mengalami pertumbuhan yang cukup kuat tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 2,9%, meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 2,2%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi AS diprediksi akan kembali melambat tahun 2019, salah satunya disebabkan dampak dari perang dagang dengan Tiongkok.

EKONOMI INDONESIA

Sebagai bagian dari ekosistem perekonomian global, perekonomian Indonesia juga terdampak oleh ketidakpastian kondisi ekonomi global. Hal ini salah satunya tercermin dari neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit sebesar USD 8,6 miliar dalam 2018.

Untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah dan Bank Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan, salah satunya menaikan tingkat suku bunga BI 7 Days Repo Rate secara bertahap sebanyak enam kali hingga ke level 6,00%. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap USD yang tertekan hampir sepanjang tahun 2018.

Melalui kebijakan ekonomi yang tepat, Pemerintah mampu menekan pelemahan nilai tukar yang Rupiah yang terjadi hampir sepanjang tahun 2018. Bahkan, nilai tukar Rupiah terhadap USD sempat menyentuh Rp15.200 per USD atau menjadi yang terendah sejak krisis ekonomi tahun 1998.

Dengan fundamental ekonomi yang cukup kuat, ekonomi Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2018 dan dapat membukukan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sepanjang tahun 2018, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,17%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya 5,07%. Walau pertumbuhan tersebut masih berada di bawah target pemerintah sebesar 5,40%, namun pencapaian tersebut merupakan hasil yang sangat baik. Indonesia mampu mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dalam 4 tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 dipengaruhi oleh kenaikan pengeluaran konsumsi yang ditopang oleh pengelolaan inflasi yang baik oleh Pemerintah. Inflasi di tahun 2018 sebesar 3,13% atau lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2017 sebesar

3,61%. Pencapaian ini sesuai dengan target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 3,5% (±1%).

Indonesia juga mampu membukukan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Total realisasi investasi di tahun 2018 mencapai Rp721,30 triliun atau tumbuh 4,11% dibandingkan Rp692,9 triliun di tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan investasi PMDN menjadi Rp328,6 triliun di tahun 2018, dari sebesar Rp262,3 triliun di tahun 2017. Sementara itu, investasi PMA turun 8,8% dari posisi tahun 2017 sebesar Rp430,5 triliun menjadi Rp392,7 triliun di tahun berikutnya.

Selain itu, tingkat kepercayaan konsumen tahun 2018 mengalami penguatan dan industri perbankan mengalami perbaikan dengan membukukan pertumbuhan kredit sebesar 12,45% dan meningkatnya kualitas kredit yang ditunjukan dengan rasio kredit bermasalah neto dan bruto yang semakin rendah masing-masing sebesar 2,67% dan 1,14%.

Kebijakan ekonomi yang tepat dan efektif juga telah mendorong lembaga pemeringkat Moody's Investor Service (Moody's) meningkatkan *Sovereign Credit Rating* (SCR) Republik Indonesia dari Baa3/Outlook Positif menjadi Baa2/Outlook Stabil.

Outlook 2019

Pemerintah Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3% di tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan PDB sebesar 5,2% di tahun 2018. Pengendalian inflasi yang telah teruji dengan baik menyebabkan inflasi yang stabil dan berada di level 3,5%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah diperkirakan masih dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pasar global sehingga tekanan terhadap Rupiah masih berlanjut dan kurs Rupiah terhadap USD diperkirakan sebesar 14.400.

Harga minyak dunia diprediksi bertahan di level USD 70/barrel sejalan dengan permintaan komoditas yang berlanjut di tahun 2019.

Tabel Indikator Ekonomi Indonesia

Indikator	Satuan	2018	2019
Pertumbuhan ekonomi	(%, yoy)	5,2	5,3
Inflasi	(%)	3,50	3,50
Nilai tukar Rupiah	(Rp/USD)	13.973	14.400
Suku bunga SPN 3 bulan	(%)	5,00	5,30
Harga Minyak	(USD/*barrel*)	70,0	70,0
Lifting minyak	(ribu *barrel*/ hari)	775	750
Lifting gas	(ribu *barrel* setara minyak/ hari)	1.116	1.250

Sumber: Kementrian Keuangan

Sektor konsumsi baik yang berasal dari rumah tangga maupun pemerintah masih menjadi katalis utama pertumbuhan PDB Indonesia di tahun mendatang. Pengeluaran konsumsi rumah tangga diproyeksikan tumbuh 5,1% sedangkan konsumsi pemerintah naik sedikit tumbuh lebih tinggi 5,4% ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp402,5 triliun, tumbuh 2,4% di tahun 2019. Sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang berkeanjutan ini kualitas infrastruktur Indonesia mengalami perbaikan dengan ditandai dengan perbaikan *ranking* menjadi 52 dari 137 negara (naik 9 peringkat dari tahun 2013 – 2014) berdasarkan data Global Competitiveness Report (2017 – 2018). Selain itu, kinerja logistik Indonesia berada pada *ranking* 46 dari 160 negara (naik 17 peringkat dari tahun sebelumnya) berdasarkan data Logistic Performance Index (2018) di mana infrastruktur yang menjadi salah satu komponen perhitungan juga mengalami perbaikan peringkat (dari peringkat 73 menjadi 54).

TINJAUAN INDUSTRI

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Tahun 2018, harga minyak di pasar Brent dan WTI berfluktuasi. Setelah menyentuh harga tertinggi pada Oktober 2018 yaitu USD 84,1 dan USD 75,5 per *barrel*, harga minyak terjun bebas ke harga terendah dalam 18 bulan yaitu pada Desember 2018 dengan harga USD 51,6 dan USD 43,6 per *barrel* dan ditutup di level USD 54,6 dan USD 46,5 per *barrel* di akhir tahun 2018.

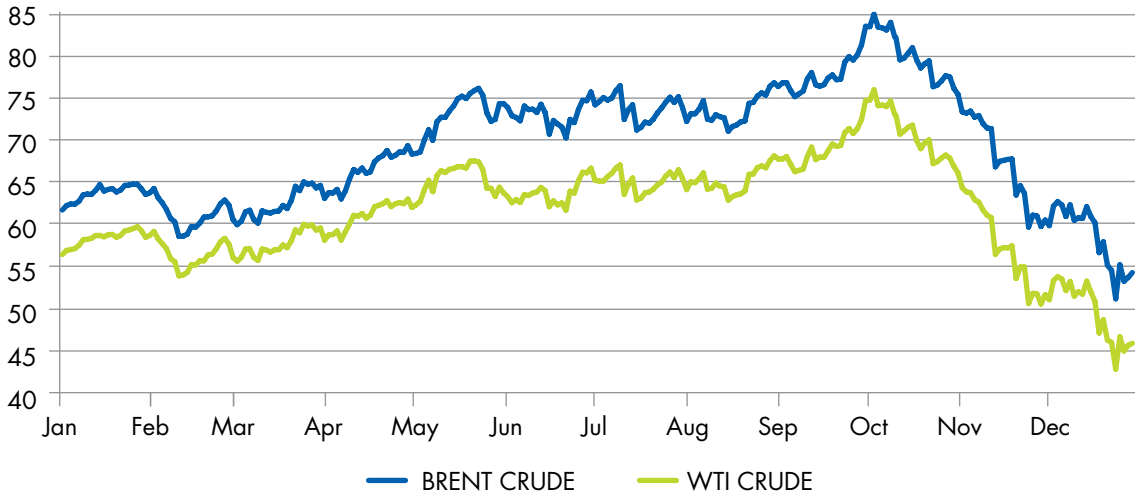

Sumber: Bloomberg, 2019

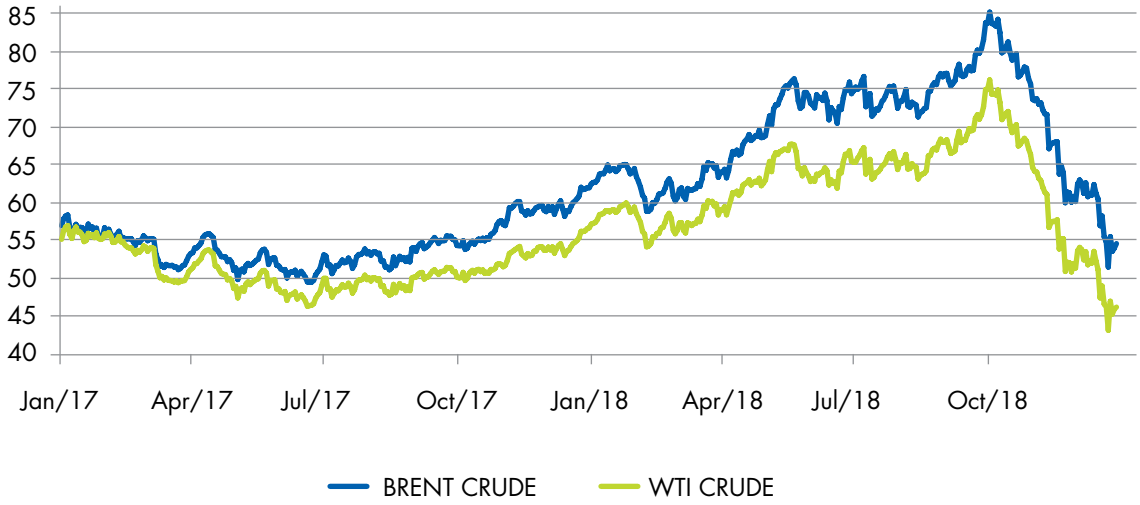

Sumber: Bloomberg, 2019

Naiknya harga minyak dipicu oleh kekhawatiran akan berkurangnya pasokan minyak akibat sanksi terhadap Iran dan krisis di Venezuela, sementara OPEC dan negara lainnya diprediksi tidak dapat menambah produksi minyaknya. Hal tersebut memicu kekhwatiran pelaku pasar dan memicu kenaikan harga.

Namun, ketika prospek pertumbuhan ekonomi global dipangkas, harga minyak terdampak turun. IMF memangkas perkiraan ekonomi global untuk 2018 dan 2019 sebesar 0,2% dari proyeksi sebelumnya, menjadi 3,7%, salah satunya disebabkan perang dagang antara AS dan China yang diprediksi akan membuat permintaan minyak mengalami penurunan.

Sejalan dengan harga minyak dunia, *Indonesian Crude Price* (ICP) juga berfluktuasi. Pada Januari, ICP berada di harga USD 65,6 per *barrel*, sedangkan ICP SLC pada harga USD 65,8 pe *barrel*. ICP berada pada level tertingginya pada Oktober yang mencapai USD 77,6 per *barrel* dan USD 78,1 per *barrel* untuk ICP SLC. Saat harga minyak dunia turun, ICP juga terpengaruh turun mencapai USD 54,8 dan USD 55,6 per *barrel* untuk ICP SLC.

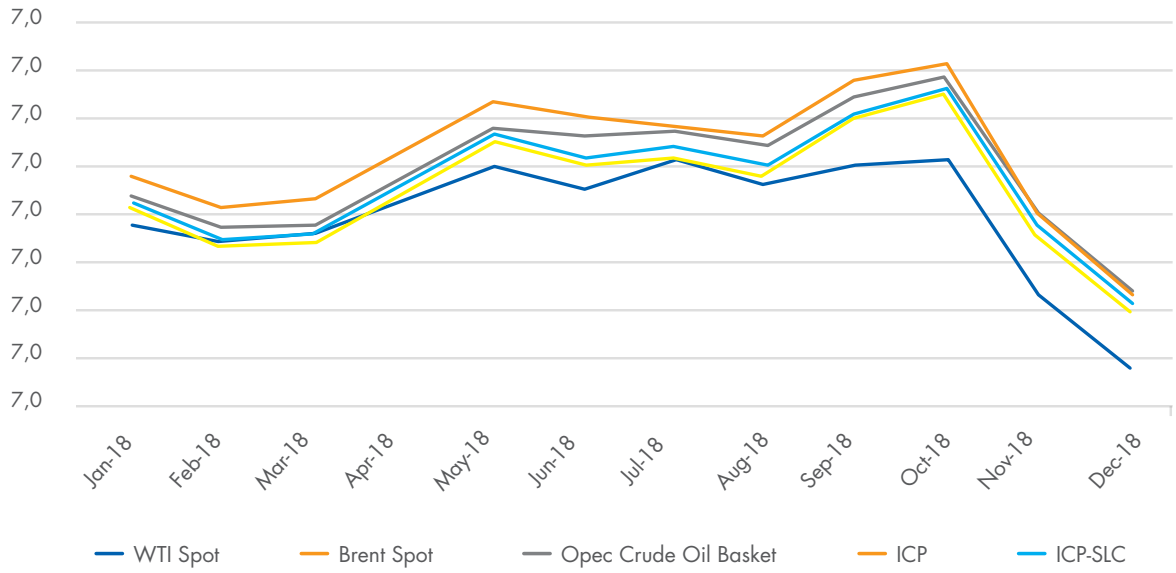

Sumber: Bloomberg, ESDM, 2019

Mengantisipasi perkembangan harga minyak dunia, Pemerintah RI untuk menerbitkan berbagai kebijakan terkait dengan migas yang berdampak kepada operasi dan kinerja Pertamina. Kebijakan tersebut diambil untuk melepas tekanan kepada neraca perdagangan Indonesia, khususnya dari impor migas, menjaga cadangan devisa negara serta untuk menjaga daya beli masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan ini menjadi landasan yang mewajibkan Pertamina sebagai Badan Usaha BBM untuk menyalurkan BBM dengan kandungan biodiesel, baik untuk pasar ritel maupun industri.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, ada kewajiban bagi Perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan minyak mentah dan kondensat domestik untuk diolah dalam kilang Perusahaan. Sementara kontraktor berkewajiban menawarkan sebagian muatannya ke Perusahaan sebelum dijual/diekspor oleh pihak lain.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan No. 43 tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Presiden No.191 tahun 2014, yang memungkinkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan kondisi tertentu, untuk menentukan harga jual eceran produk bahan bakar tertentu (subsidi dan bahan bakar penugasan) berbeda dengan perhitungan formula.

Holding BUMN Migas

Untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, sejak tahun 2016 pemerintah berencana untuk membentuk perusahaan induk (*holding company*) yang membawahi BUMN Sektor Migas. Berdasarkan roadmap BUMN sektor energi, dinyatakan bahwa perlu adanya konsolidasi bisnis gas BUMN dalam rangka peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik yang melibatkan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk (PGN).

Setelah melalui tahap persiapan yang memakan waktu hingga 2 tahun, pada tahun 2018 pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai Perusahaan Induk (Holding) BUMN sektor Migas. Penggabungan bisnis PGN dan Pertamina merupakan langkah strategis awal untuk meningkatkan efektivitas dan meningkatkan integrasi rantai nilai industri gas di Indonesia.

Pembentukan Holding BUMN sektor Migas ditandai dengan ditandatanganinya Akta pengalihan saham seri B miliki Negara sebesar 56,96% di PGN kepada PT Pertamina (Persero) pada 11 April 2018.

Untuk mendukung percepatan proses pembentukan Holding tersebut, perlu dilakukan aksi korporasi dalam bentuk pengalihan (divestasi) kepemilikan Pertamina di Pertagas, yang merupakan Anak Perusahaan Pertamina, kepada PGN. Divestasi ini dilakukan dengan tujuan/ekspektasi untuk:

1. Mendorong ketahanan energi nasional melalui aspek *availability, accessibility, affordability,* dan *acceptability.*
2. Memperkuat bisnis gas Pertamina secara keseluruhan melalui pengelolaan bisnis gas yang terintegrasi oleh PGN.
3. Meningkatkan penciptaan nilai dengan peningkatan efisiensi dan optimalisasi infrastruktur transmisi dan distribusi gas.
4. Mendorong pertumbuhan bisnis gas melalui peningkatan kapasitas investasi untuk ekspansi ke wilayah-wilayah potensial *(demand creation).*

Terkait hal ini, akta jual beli 51% saham Pertamina di dalam Pertagas kepada PGN telah ditandatangani pada akhir bulan Desember 2018. Maka saat ini PGN memiliki 51% saham di Pertagas. Pengambilalihan Pertagas Group (termasuk Anak Perusahaan di dalamnya Pertagas Niaga, Perta Arun Gas, Perta Daya Gas, Perta-Samtan Gas, dan Perta Kalimantan Gas) tersebut oleh PGN memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Pertagas dapat menjadi bagian dari PGN yang merupakan perusahaan terbuka di mana tata kelolanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan di bawah pengawasan OJK. Selain itu, budaya *Good Corporate Governance* (GCG) dapat turut meningkatkan kepercayaan *customer/partner* bisnis.
2. Pertagas dapat menjadi bagian dari PGN yang memiliki fleksibilitas dalam mengelola laba ditahan untuk pengembangan bisnis gas.
3. Implementasi penggabungan dalam hal segmen bisnis tidak terlalu sulit dilakukan karena Pertagas dan PGN mempunyai lini bisnis yang sama dalam hal transportasi dan niaga gas.
4. Potensi sinergi akan maksimal karena pengambilan keputusan strategis untuk lini bisnis hulu ke hilir di bidang gas dilakukan pada satu manajemen baru.
5. Terciptanya *end to end operation* di mana bisnis midstream hingga hilir di bidang gas (CNG, LNG *regasification*, dan LPG *processing*) akan terintegrasi di mana strategi pengembangan akan lebih mudah dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
6. Potensi penghematan biaya operasional dan investasi/ CAPEX karena tidak ada lagi tumpang tindih di dalam pengembangan infrastruktur transportasi gas.
7. Pengambilalihan Pertagas oleh PGN akan menghindari kompetisi untuk pengambilan pangsa pasar satu sama lain.

Dengan bergabungnya PGN menjadi entitas anak Pertamina, maka Pertamina menjadi perusahaan gas yang memiliki jaringan pipa gas terpanjang di ASEAN, yaitu sepanjang 9.600 KM.

TINJAUAN KINERJA USAHA

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

SEKTOR HULU

Kegiatan usaha Pertamina di sektor hulu yang dikelola oleh Direktorat hulu mencakup kegiatan eksplorasi, pengeboran, pengembangan dan produksi minyak, gas dan panas bumi, penyediaan jasa teknologi, serta jasa pemboran dan *services* baik dalam maupun luar negeri. Dalam rangka mencapai pertumbuhan sektor hulu (*upstream growth*) sebagai salah satu dari 8 Pilar Prioritas Strategi Pertamina, strategi usaha di sektor hulu adalah meningkatkan produksi dan menambah cadangan migas baru, baik secara organik melalui kegiatan *Improved Oil Recovery* (IOR) dan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada aset yang telah ada, maupun secara anorganik dengan melakukan strategi *merger and acquisition* (M&A) blok-blok migas di dalam maupun di luar negeri.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Perusahaan melalui Entitas Anak Perusahaan Hulu (APH) yang bertindak sebagai *strategic armlength* Perusahaan di sektor hulu, yakni sebagai berikut :

- PT Pertamina EP (PEP)
- PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
- PT Pertamina EP Cepu (PEPC)
- PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning (PEPC ADK)
- PT Pertamina Internasional Eksplorasi Produksi (PIEP)
- PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)
- PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI)
- PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI)
- PT Elnusa Tbk.

Kinerja Sektor Hulu Tahun 2018

Pada tahun 2018 Pertamina memproduksi minyak dan gas secara total sebesar 921 MBOEPD, lebih tinggi 33% dibandingkan pencapaian produksi tahun 2017. Produksi minyak tahun 2018 yakni sebesar 393 MBOPD, meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan produksi gas sebesar 3.059 MMSCFD, meningkat 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontributor produksi migas diurutkan dari yang terbesar yakni PEP, PHI, PHE, PIEP, dan PEPC. Produksi wilayah kerja terminasi sebesar 58 MBOEPD atau 3% dari produksi Pertamina, dicatatkan di PHE dan PHI. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, secara umum angka produksi migas meningkat. WK luar negeri mengkontribusikan produksi 16,6% dari keseluruhan produksi Pertamina, yang berasal dari WK di di Asset Asia, Asset Middle East dan Asset Africa.

Panas bumi diproduksi oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), yang mengelola total 14 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.822 MW, terdiri dari 617 MW dari WKP *own operation* dan 1.205 MW dari WKP *joint operation*. WKP yang dioperasikan sendiri *(own operation)* terdiri dari :

1. Area Kamojang (kapasitas 235 MW dan produksi setara listrik YTD Desember 2018 sebesar 1.871 GWh),
2. Ulubelu (kapasitas 220 MW dan produksi setara listrik YTD Desember 2018 sebesar 1.410 GWh),
3. Lahendong (kapasitas 120 MW dan produksi setara listrik YTD Desember 2018 sebesar 725 GWh) dan Karaha (kapasitas 30 MW produksi setara listrik YTD Desember 2018 sebesar 176 GWh),
4. Sibayak (kapasitas 12 MW, sedang tidak berproduksi karena kerusakan PLTP milik pihak ketiga).

Total realisasi produksi setara listrik PGE dari area *own operation* pada tahun 2018 adalah sebesar 4.182 GWh. Pencapaian ini lebih tinggi 7% dari tahun sebelumnya.

Pengelolaan WK Eks Terminasi

Untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, tahun 2018 Pertamina memperoleh hak pengelolaan terhadap 13 Wilayah Kerja (WK) Eks Terminasi yang berakhir masa kontraknya di tahun 2018–2021. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya yang telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 30 Tahun 2016.

Dari 13 WK Eks Terminasi yang telah diperoleh hak pengelolaannya tersebut, 8 WK telah efektif pada tahun 2018, yaitu Ogan Komering, Tuban, Sanga-Sanga, *South East Sumatera, North Sumatera Offshore*, Tengah (masuk ke dalam WK Mahakam), Attaka dan East Kalimantan. Sedangkan WK Raja dan WK Jambi Merang baru akan efektif pada tahun 2019 dan WK Kepala Burung dan WK Salawati akan efektif tahun 2020. Sementara untuk WK Rokan yang merupakan penghasil minyak terbesar nasional baru akan efektif pada tahun 2021. Saat ini Pertamina dan Pemerintah sedang melakukan penyusunan kontrak kerja sama dengan skema *gross split*.

Selain itu, pada 1 Januari 2018, Pertamina juga telah mulai mengoperasikan WK Mahakam yang hak pengelolaannya telah diserahkan kepada Pertamina tahun 2015.

Dengan hak pengelolaan tersebut, produksi minyak Pertamina akan mengalami peningkatan, sehingga Pertamina semakin dekat untuk mewujudkan cita-cita ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Produksi Minyak dan Gas Harian

Minyak Mentah (MBOPD)

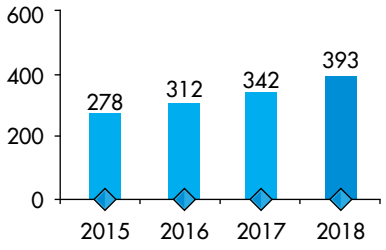

Gas Bumi (MMSCFD)

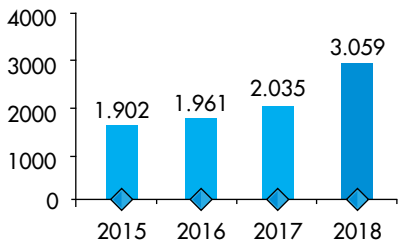

Minyak dan Gas (MBOEPD)

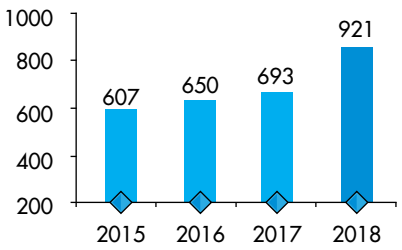

Produksi Minyak dan Gas Selama 1 Tahun

Minyak Mentah (MMBO)

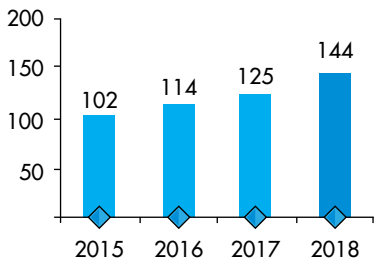

Gas Bumi (BSCF)

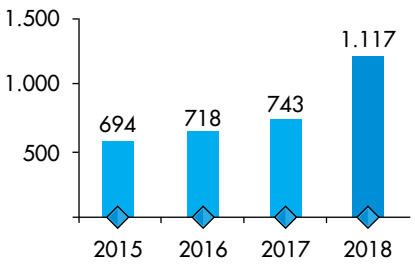

Minyak dan Gas (MMBOE)

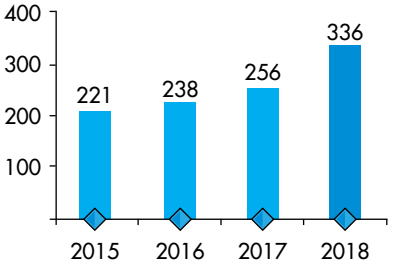

Produksi Panas Bumi (GWh)

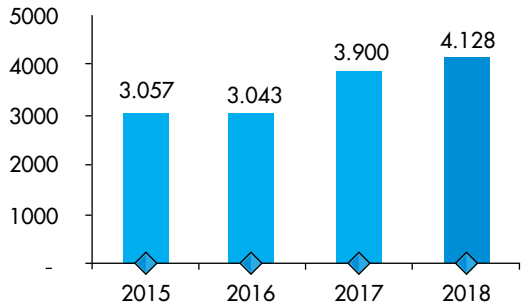

Tambahan cadangan migas terbukti (*proven reserves*, P1) yang tercatat tahun 2018 adalah sebesar 426,25 MMBOE. Angka ini lebih tinggi 36% dibandingkan P1 tahun 2017. *Reserve Replacement Ratio* (RRR) migas adalah 137,81%. Angka RRR tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 143%. Tambahan cadangan migas tahun 2018 sebagian besar berasal dari kegiatan anorganik melalui alih kelola wilayah kerja migas dalam negeri yang habis masa kontraknya, seperti misalnya WK Mahakam, Sanga-Sanga, Attaka, dan *East* Kalimantan.

Tambahan Cadangan Migas Terbukti (P1) (MMBOE)

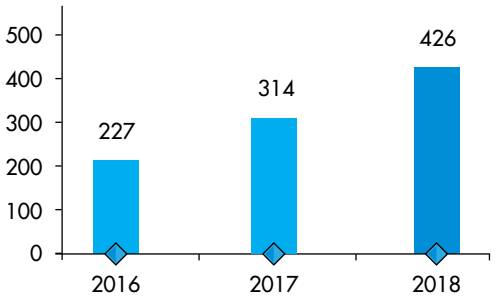

Pertamina Hulu Mahakam (PHM) pada tahun 2018 menyelesaikan 58 sumur pemboran (*completed*), 73 *workover* sumur, dan 6.671 *well service*. Produksi minyak PHM hingga Desember 2018 adalah sebesar 35,2 MBOPD dan gas sebesar 879 MMSCFD. Akuisisi Blok Mahakam menyumbang tambahan sumber daya 2C minyak sebesar 51.33 MMBO & 2C gas 1265.01 BSCF atau total 2C migas setara 269.67 MMBOE. Selain itu juga menambah cadangan P1 minyak sebesar 22.77 MMBO & P1 gas sebesar 794.58 BSCF atau total tambahan P1 migas setara 159.91 MMBOE. Tantangan yang dihadapi oleh PHM adalah *declining rate* produksi yang tinggi yang mencapai 57%. Angka ini lebih besar 8 % dari asumsi RKAP. Hal ini disebabkan beberapa sumur *existing* mengalami *water breakthough* dan *pressure declining* yang signifikan.

Kegiatan Eksplorasi

Sepanjang tahun 2018, realisasi pemboran eksplorasi sebanyak 14 sumur yang terdiri dari PEP sebanyak 8 sumur, PHE 5 sumur, dan PGE 1 sumur. Sedangkan total realisasi Seismik 2D adalah sebesar 2.490 km yang terdiri dari PEP 1.090 km dan PHE 1.400 km. Total realisasi Seismik 3D seluas 928 km^2 terdiri dari PEP 507 km^2 dan PHE 421 km^2.

Realisasi Sumber Daya 2C di tahun 2018 mencapai sebesar 794,31 MMBOE, terdiri dari 270,19 MMBO minyak dan 3.036,63 BSCF gas. Kontribusi sumber daya 2C dari PEP sebanyak 71 MMBOE, PHE 195 MMBOE, dan PHI 529 MMBOE.

Pada bulan Agustus 2018 PT Pertamina EP melalui kegiatan eksplorasi di Sumur Akasia Maju (AMJ)-001 berhasil menemukan sumber daya hidrokarbon baru sebesar 11.45 MMBOE. Keberhasilan ini juga didapatkan dari pemboran lain yang dilakukan oleh PT Pertamina EP, diantaranya Sumur Titanum (TTN)-001, Pinus Harum (PHR)-001 dan Wolai (WOL)-001. Sedangkan untuk PT PHE keberhasilan dalam penemuan sumber daya hidrokarbon juga didapatkan dari pemboran Sumur N-7, SES-1, Kumis-2 dan KKX-1. Pemboran sumur-sumur tersebut juga bertujuan untuk pembuktian prospek baru kegiatan eksplorasi yang pada akhirnya akan dapat membantu peningkatan produksi PT Pertamina. Hal ini menjadi bukti komitmen PT Pertamina untuk tetap menjaga keberlanjutan produksi migas nasional dengan terus melakukan kegiatan eksplorasi ketika perusahaan migas lainnya yang beroperasi di Indonesia saat ini masih menunda kegiatan eksplorasinya, akibat turunnya harga minyak dunia.

Dalam rangka mendukung kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan, selain kegiatan pemboran juga dilakukan *study* yang bertujuan untuk menemukan dan atau mematangkan *play concept* baru, terutama di area *frontier*. *Study* dilakukan dengan melibatkan seluruh pekerja di Anak Perusahaan Hulu Pertamina, dintaranya *study* yang bertujuan untuk melihat peluang berkembangnya *Play* Pra Tersier di Salawati Basin Papua serta Studi Delta di Cekungan Kalimantan Timur–Utara untuk melihat peluang eksplorasi dengan analog delta Mahakam.

Pengembangan Usaha Hulu

Pertamina berupaya meningkatkan pertumbuhan cadangan, produksi dan *lifting* migas dan panas bumi (geothermal) agar ketahanan energi nasional tetap terjaga dengan cara melakukan kegiatan ekspansi secara agresif, selektif dan proaktif melalui kegiatan pengembangan usaha secara anorganik sepanjang tahun 2018. Adanya beberapa Wilayah Kerja di Indonesia yang habis masa kontraknya di tahun 2018, 2019 dan 2021 merupakan *opportunity* yang baik untuk Pertamina dalam upaya mengembangkan portofolio serta meningkatkan produksi dan cadangan migas khususnya di Indonesia.

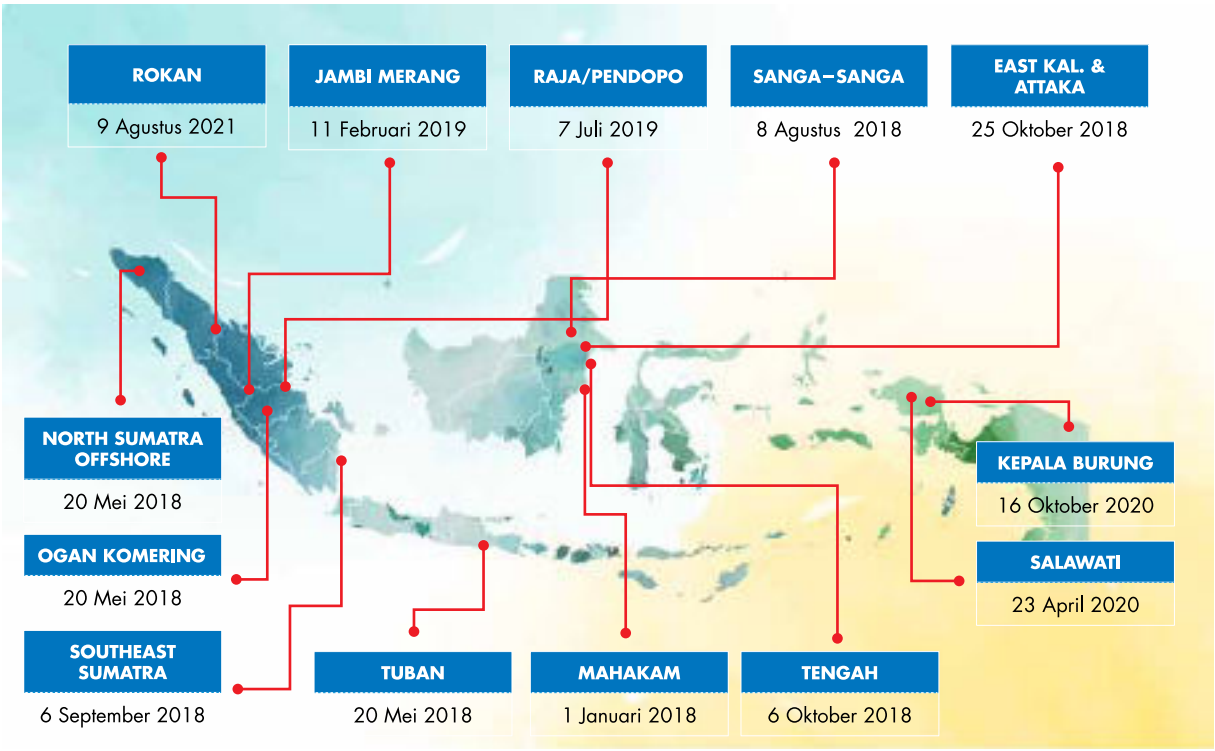

Alih Kelola WK tahun 2018 – 2021 ke Pertamina

Pada Tahun 2018 Pertamina telah berhasil memperoleh 13 Wilayah Kerja (WK) Terminasi yang berakhir masa kontraknya di tahun 2018 – 2021. WK yang efektif dikelola Pertamina pada tahun 2018 sebanyak 8 WK, yaitu Ogan Komering, Tuban, Sanga-Sanga, *South East Sumatera, North Sumatera Offshore*, Tengah (masuk ke dalam WK Mahakam), Attaka dan *East Kalimantan*. 2 WK yang akan efektif di tahun 2019 yaitu WK Raja dan WK Jambi Merang. 2 WK yang akan efektif di tahun 2020 yaitu WK Kepala Burung dan WK Salawati. 1 WK yang akan efektif di tahun 2021 yaitu WK Rokan yang merupakan penghasil minyak terbesar nasional, saat ini Pertamina dan Pemerintah sedang melakukan penyusunan kontrak kerja sama dengan skema *gross split*. Sedangkan WK Mahakam yang hak pengelolaannya diserahkan kepada Pertamina di tahun 2015 mulai dioperasikan Pertamina pada 1 Januari 2018.

Pemerintah juga telah menetapkan Pertamina sebagai pemenang penawaran WK Minyak dan Gas Bumi Eksplorasi yaitu WK Maratua.

Prospek ke Depan Sektor Hulu

Tantangan ke depan sektor hulu migas secara umum adalah upaya berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan minyak impor. Kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri terus meningkat sekitar 13% per tahun. Hal ini berarti kebutuhan pasokan minyak yang dibutuhkan juga meningkat. Mengindikasikan bisnis sektor hulu migas masih sangat menarik. Namun demikian perlu diketahui bahwa harga migas akhir-akhir ini cenderung fluktuatif dan rendah yang agak mengurangi minat investasi sektor hulu.

Peningkatan kebutuhan konsumsi migas dalam negeri belum dapat dipenuhi oleh peningkatan produksi dalam negeri. Sebagai akibatnya, Indonesia semakin tergantung pada minyak impor. Untuk itu peningkatan produksi migas dalam negeri merupakan syarat mutlak yang perlu terus upayakan. Baik melalui penemuan cadangan migas raksasa (*giant oil field*) baru dan juga melalui optimalisasi produksi lapangan-lapangan *mature* eksisting melalui mekanisme peningkatan keandalan peralatan dan fasilitas produksi, IOR, EOR dan penerapan *reservoir management* yang tepat.

Dapat dikatakan bahwa blok-blok di luar negeri di mana Pertamina memiliki operasi dan partisipasi keikutsertaan modal melalui PIEP, di satu sisi menyimpan potensi dapat menambah *revenue* dan menambah sumber *supply* minyak ke kilang-kilang domestik. Namun di sisi lain juga menyimpan tantangan mengenai seberapa jauh Pertamina dapat berperan lebih aktif dan masuk lebih dalam terkait kegiatan operasional lapangan-lapangan migas di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan performa operasi yang meliputi efisiensi, keandalan dan kemampuan eksekusi proyek.

Selain itu, blok-blok migas yang telah habis masa kontraknya dan dialihkelolakan oleh Pemerintah kepada Pertamina memang menyimpan potensi penambahan produksi dan cadangan migas. Akan tetapi, di balik itu juga menyimpan tantangan tersendiri yang berhubungan dengan penuruan secara alami produksi migas dari lapangan-lapangan yang sudah tua. Upaya menggenjot produksi sumur-sumur tua perlu terus dilakukan. Atau setidaknya mempertahankan *rate* produksi atau meminimalkan proses-proses *natural declining* yang dialami sumur-sumur tua. Kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber cadangan migas raksasa baru perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi terkini dengan tingkat akurasi tinggi.

Beberapa isu yang perlu juga menjadi pertimbangan dalam pengembangan bisnis hulu migas di masa depan diantaranya adalah beberapa isu global yang saling terkait. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan semakin maraknya pemanfaatan teknologi digital yang mendorong otamasi di segala lini kehidupan serta pertukaran data yang cepat dalam kegiatan bisnis. Hal ini juga mempengaruhi perubahan-perubahan secara cepat atau disebut juga disrupsi pada pola konsumen generasi milenial yang secara natural telah lahir, tumbuh dan berkembang di era digital. Tren penggunaan energi di masa mendatang tentunya juga akan dipengaruhi oleh tren konsumen generasi ini. Hal lainnya yang mempengaruhi tren konsumsi energi adalah upaya-upaya pengurangan emisi karbon melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, dan penggunaan peralatan atau kendaraan yang tidak menggunakan energi berbasis karbon.

Tumbuhnya penggunaan kendaraan berbahan bakar listrik di dunia juga patut mulai diperhitungkan. Hal ini berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak di masa mendatang. Sebagaimana diketahui, sektor transportasi merupakan sektor terbesar konsumen bahan bakar minyak Indonesia.

Namun demikian, Pertamina sejauh ini telah cukup konsisten mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi dalam tren penggunaan energi masa depan. Produksi energi ramah lingkungan dari panas bumi yang selama ini dilakukan konsisten melalui PT PGE menjadi batu pijakan yang bagus sekaligus persiapan bagi Pertamina masuk ke bisnis energi ramah lingkungan.

SEKTOR PENGOLAHAN DAN PENGEMBANGAN KILANG

Kinerja dan *highlight* pengolahan

Saat ini, Pertamina memiliki enam kilang yaitu Refinery Unit (RU) II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU VII Kasim. Kapasitas pengolahan terpasang total dari kilang-kilang tersebut mencapai 1.031 MBOPD, atau sekitar 90% dari kapasitas pengolahan yang ada di Indonesia.

Operasi kilang-kilang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Operasi Kilang BBM, terdiri dari Kilang RU II sampai dengan RU VII yang memproduksi BBM dan non BBM serta produk lainnya.
2. Operasi Kilang Petrokimia, terdiri dari Kilang *Paraxylene* di RU IV Cilacap yang memproduksi *Paraxylene* dan *benzene* serta produk lainnya, Kilang *polypropylene* di RU III Plaju yang memproduksi *Polytam* (*Polypropylene* Pertamina) serta Kilang OCU (*Olefien Convertion Unit*) di RU VI Balongan yang memproduksi *Propylene*.
3. Operasi Kilang Lube Base di RU IV Cilacap yang memproduksi Lube Base HVI-60, HVI-95, HVI-160, HVI650, *paraffinic, Slack Wax, Minarex* dan *Asphalt*.

SPESIFIKASI KILANG PERTAMINA

Spesifikasi	RU II Dumai	RU III Plaju	RU IV Cilacap	RU V Balikpapan	RU VI Balongan	RU VII Kasim		
Kapasitas	170 MBOPD	118 MBOPD	348 MBOPD	260 MBOPD	125 MBOPD	10 MBOPD		
NCI	7,5	3,1	6	3,3	11,9	2,4		

PROYEK PENGEMBANGAN KILANG PERTAMINA

Spesifikasi	RDMP RU II Dumai		RDMP RU IV Cilacap	RDMP RU V Balikpapan	RDMP RU VI Balongan		NGRR Tuban	NGRR Bontang
Kapasitas	300 MBOPD		400 MBOPD	360 MBOPD	269 MBOPD		300 MBOPD	300 MBOPD
NCI	9		9	9	9		9	9

Sejalan dengan cita-cita mewujudkan ketahanan energi nasional, Pertamina berkewajiban untuk mengamankan pasokan dan memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pertamina telah mengambil sejumlah upaya strategis, antara lain melakukan optimasi unit *Residual Fluid Catalytic Cracking* (RFCC) di RU IV Cilacap dan optimasi unit *Residue Catalytic Cracking* (RCC) di RU VI Balongan. Pertamina juga telah mengoperasikan kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban. Upaya lainnya untuk meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan revamping dan upgrading pada RU eksisting dan terus mengupayakan pembangunan kilang minyak baru sejalan dengan rencana Perseroan.

Tahun 2018, Pertamina telah mencanangkan rencana kerja strategis atau yang disebut dengan program 8 Pilar Prioritas Strategi Pertamina yang salah satu fokusnya untuk menuju *world class refinery* melalui 5 aspek, yaitu *Safety & Environmental , Reliability, Profitability, Quality* dan *Sustainability*. Program kerja ini menjadi acuan bagi seluruh *Refinery Unit* dalam menjalankan proses bisnisnya.

OPTIMASI DAN EFISIENSI KINERJA

Untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri, Pertamina harus dapat memastikan bahwa produksi di kilang miliknya dapat berjalan dengan optimal. Untuk itu, Pertamina telah melakukan berbagai upaya optimasi proses pengolahan dengan tetap mengedepankan dan efisiensi kinerja kilang secara berkelanjutan untuk meningkatkan *performance* kilang Pertamina. Upaya yang dilakukan Pertamina diantaranya adalah:

Optimalisasi Pengolahan *Crude* Domestik Bagian KKKS

Tahun 2018, Pertamina melakukan optimalisasi pengolahan *crude* domestik di kilang. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi pengolahan crude impor di kilang, sesuai dengan arahan pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No. 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Upaya tersebut membuahkan hasil yang cukup baik, di mana pengolahan *crude* domestik mengalami peningkatan menjadi 62% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 58%.

Upgrade Material Kilang untuk Fleksibilitas Pengolahan *Crude*

Untuk mengatasi terbatasnya ketersediaan *crude super heavy import* yang dapat diolah di kilang karena *sulphur content* yang tinggi *(sour crude)*, Perseroan melakukan *upgrade* material kilang untuk meningkatkan fleksibilitas pengolahan *sour crude*. *Upgrade* material kilang dilakukan secara bertahap, dimulai tahun 2018 di RU VI Balongan selanjutnya RU V Balikpapan dan RU IV Cilacap di tahun 2019.

Integrasi Power PLN dengan Power RU IV Cilacap

Konsumsi *Refinery Fuel Oil* dan *Fuel Gas* di kilang selama ini sebagian besar menggunakan *fuel gas* dan *fuel oil* hasil *processing crude* di kilang. Sebagai bagian dari efisiensi penggunaan *Refinery Fuel Oil* dan Fuel Gas, Pertamina melakukan kerja sama dengan PT PLN untuk pemanfaatan potensi *outsource* listrik dari PLN sebesar 30 MW ke RU IV Cilacap. Diharapkan integrasi tersebut sudah bisa dimanfaatkan pada pertengahan tahun 2019.

Optimasi Produk Intermedia antar Kilang

Produk Intermedia merupakan produk yang belum jadi dan memiliki nilai jual rendah. Untuk meningkatkan margin kilang dan meminimalkan produk tersebut, maka dilakukan optimasi antar kilang dengan mengolahnya kembali supaya menjadi produk yang bernilai tinggi *(valuable)*.

INVESTASI DAN PENGEMBANGAN

Tahun 2018, terdapat beberapa proyek investasi dan pengembangan di sektor pengolahan yang dimulai atau tengah dalam perencanaan, antara lain :

1. JV *Calciner* (Dumai)
   Proyek pembangunan calciner dan fasilitas *bending coke* di Dumai melalui kemitraan strategis untuk mengolah 300 KTA *Green Petroleum Coke* (GPC) Dumai dengan tambahan 100 KTA GPC impor menjadi *Calcined Petroleum Coke* (CPC) anoda *grade* sebesar 300 KTA menggunakan teknologi *Shaft Kiln*. Saat ini proyek dalam tahapan pelaksanaan *engineering study* dan perizinan.

2. *Open Access* RU III Plaju
Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas kilang dalam mengolah *crude*. *Crude supply* via pipa ke RU III Plaju terus menurun, sedangkan *crude supply* via kapal terkendala pendangkalan alur Sungai Musi. Dengan adanya *open acces* tersebut, kilang RU III Plaju dapat mengoptimalkan kapasitas produksinya untuk turut membantu pasokan BBM di wilayah Indonesia Barat.

KINERJA TAHUN 2018

Tahun 2018, realisasi pengolahan *(total intake)* konsolidasi lebih tinggi 3,8% dibandingkan realisasi tahun 2017 pada periode yang lama.

Tabel : Realisasi kinerja operasi kilang tahun 2018 dibandingkan dengan target tahun 2018 dan realisasi 2016-2017

Pengolahan Kilang	Satuan	2018	2017	2016
Pengolahan Minyak Mentah, Gas & Intermedia	MMbbl	337	324	328
Volume Produksi BBM* (10 Produk Utama)	MMbbl	279	263	255
Volume Produksi Non BBM (Petrokimia, Solvent dan NBBM)	MMbbl	29	29	20

Yield total *output* kilang (perbandingan total *output* terhadap *total intake*) tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 94,69% tahun 2017 menjadi 94,44% pada tahun 2018. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penyesuaian optimasi hilir dan beberapa kendala unit operasi.

Data mengenai persentase perbandingan *input* dan *output* kilang dalam 5 tahun terakhir disajikan pada diagram berikut.

Tabel & Grafik : *Persentase Output* – Input Kilang (dalam Prosentase)

Juta bbl	2018	2017	2016	2015	2014
% Yield Total	95	95	94	95	94

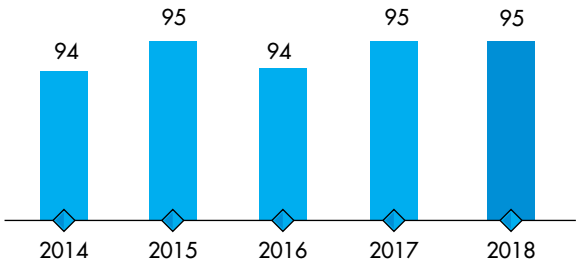

Sementara itu, *yield valuable product* tahun 2018 adalah 79,57%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 78,13%. *Valuable Product* terdiri dari produk: Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus/ Pertamax Turbo, *Kerosene*, Avtur, Solar, Dexlite, Pertadex, *Paraxylene* dan *Benzene*.

Tabel & Grafik : *Persentase Valuable Product* - Input Kilang (dalam Prosentase)

Juta bbl	2018	2017	2016	2015	2014
% *Yield Valuable Product**	80	78	77	76	73

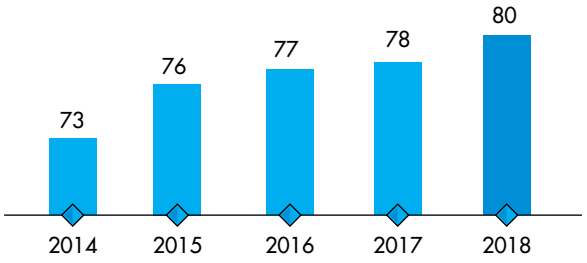

HIGHLIGHT PENGEMBANGAN KILANG

Saat ini Pertamina mengelola proyek-proyek skala raksasa di sektor pengolahan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan, sekaligus mendukung pengembangan usaha Pertamina ke bisnis petrokimia. Sejak Oktober 2016 Pertamina membentuk Direktorat Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia (MP2) yang difokuskan untuk menangani megaproyek yang terdiri dari program revitalisasi kilang eksisting (proyek *Residual Fuel Catalytic Cracking*/RFCC Cilacap, Proyek Langit Biru Cilacap/PLBC, dan Proyek *Refinery Development Master Plan*/RDMP di kilang Balikpapan, Cilacap, Dumai dan Balongan, serta pembangunan kilang baru (*Grass Root Refinery*/GRR).

Berdasarkan roadmap peningkatan kapasitas kilang yang telah disusun Pertamina, target produksi BBM setelah proyek-proyek RFCC, PLBC, RDMP dan New GRR selesai akan mencapai 2 juta *barrel* per hari di tahun 2025. Terealisasinya proyek ini akan membuat Indonesia lepas dari ketergantungan impor BBM dan menghasilkan pendapatan yang signifikan serta kontribusi kepada negara dalam bentuk devisa. Selain itu, pembangunan kilang minyak baru juga berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui penciptaan nilai tambah di sektor hilir dengan mengintegrasikan kilang minyak dengan petrokimia.

SEKTOR PEMASARAN

Pertamina menjalankan bisnis pada dua segmen yang sangat berbeda karakteristiknya, yaitu segmen ritel dan segmen korporat. Karena itu, pemasaran produk Pertamina dilakukan melalui dua fungsi utama yaitu Pemasaran Ritel dan Pemasaran Korporat. Pemasaran Ritel menjual produk Bahan Bakar Minyak (BBM) di sektor transportasi, pelumas dan LPG untuk rumah tangga dan non rumah tangga baik produk bersubsidi maupun produk non subsidi. Sementara, Pemasaran Korporat menjual produk Bahan Bakar Minyak (BBM) di sektor industri, penerbangan, perkapalan, dan produk Non BBM lainnya seperti aspal dan produk petrokimia untuk sektor industri. Kedua fungsi utama tersebut didukung oleh Infrastruktur yang andal mulai dari truk tangki BBM, *skid tank*, depot, pelabuhan hingga kapal. Sehingga, energi terdistribusi ke seluruh Indonesia dengan lancar.

Kegiatan pemasaran ritel dilakukan baik secara langsung maupun melalui lembaga penyalur (sistem *dealership*). Pertamina memasarkan BBM ritel untuk sektor transportasi, rumah tangga dan nelayan melalui SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga 2019, Jumlah lembaga penyalur Pertamina ialah 7.146 yang tersebar di seluruh Indonesia baik SPBU Reguler, Mini, Modular, dan SPBU Nelayan.

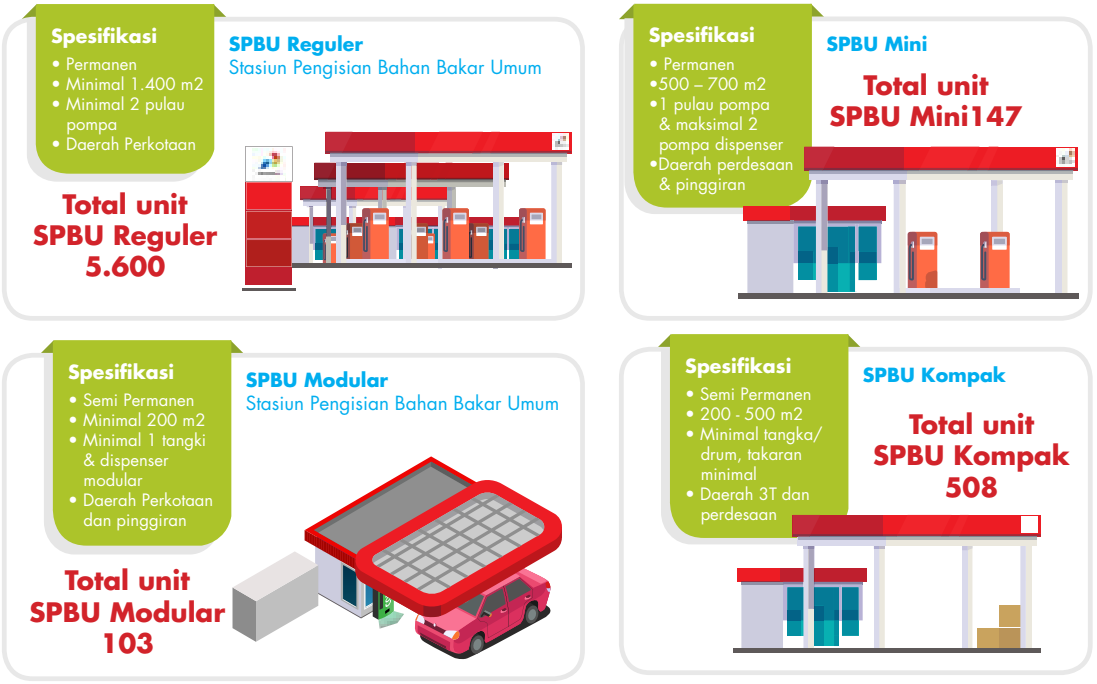

Spesifikasi
- Permanen
- 400 m2
- Minimal 1 pompa dispenser 2 nozzle
- Daerah sentra nelayan & usaha perikanan

SPDN
Solar Pack Dealer Nelayan

Total unit SPDN 111

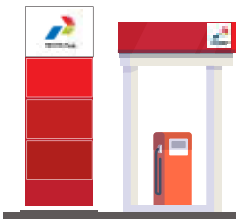

Spesifikasi
- Permanen
- Daerah 3T & perdesaan

APMS
Agen Premiun & Minyak Solar

Total unit APMS 93

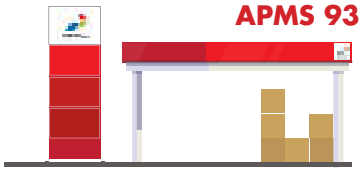

Spesifikasi
- Permanen
- Daerah sentra nelayan dan usaha perikanan

SPBU-N
Statsiun Pengisian Bahan Bakar Umum & Nelayan

Total unit SPBU-N 382

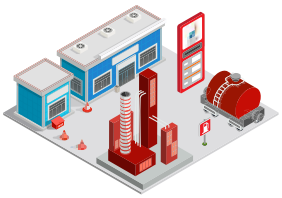

Spesifikasi
- Disalurkan ke pangkalan
- Daerah yang belum terkorvensi ke LPG

AMT
Agen Minyak Tanah Subsidi

Total unit AMT 406

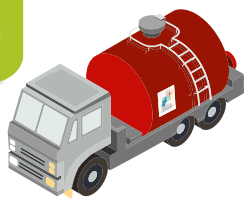

Untuk menjaga standar pelayanan di SPBU Pertamina, Pertamina melalui program Pertamina Way mengembangkan program SPBU Pasti Pas melalui penilaian Audit berupa staf yang terlatih, Fasilitas dan Peralatan, Produk dan Layanan Tambahan, Format Fisik, dan Kualitas-Kuantitas.

Kemudian pada tahun 2016, Pertamina mulai mengembangkan program layanan *excellent* berupa Pasti Prima Pengembangan program Pasti Prima terdiri dari 5 (lima) pilar utama yaitu Energi terintegrasi (Produk Pertamina lainnya), lini bisnis *Non-Fuel Retail* yang nyaman dan lengkap, Pelayanan yang efisien dan ramah, Pemasaran modern (digital dan loyalti), dan Fasilitas umum yang dikelola dengan baik. Dengan Program Pasti Prima maka konsumen akan mendapatkan pengalaman baru terutama layanan digital yang disesuikan dengan gaya hidup saat ini yang di implementasikan di area SPBU.

Pada tahun 2018, produk BBM yang didistribusikan secar ritel mencakup Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) berupa produk *Kerosene* dan Solar (Diesel). Premium didistribusikan sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Sementara produk Pertalite (Mogas RON 90), Pertamax (Mogas RON 92), Pertamax Turbo (Mogas RON 98), Dexlite (CN 51), Pertamina Dex (CN 53) dipasarkan sebagai Jenis Bahan Bakar Umum (JBU).

Selain produk BBM, Pertamina juga memasarkan produk gas domestik. Sejak tahun 1968, Pertamina berkomitmen untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia dengan menyediakan LPG dan Produk Gas sebagai bahan baku dan bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, transportasi, komersial dan industri. LPG semakin dikenal oleh masyarakat dengan adanya program Pemerintah meng yaitu Program Konversi Minyak Tanah ke LPG, dengan mengganti penggunaan minyak tanah ke LPG yang lebih ekonomis, lebih efisien dan lebih ramah lingkungan.

Dalam perkembangannya Pertamina terus mengembangkan varian produk gas domestik untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Produk-produk gas domestik Pertamina saat ini meliputi produk LPG untuk kebutuhan memasak rumah tangga yaitu ELPIJI 12 kg, Bright Gas 5,5 kg, Bright Gas 12 kg, produk LPG untuk komersial yaitu ELPIJI 50 kg, dan ELPIJI Bulk, produk gas turunan LPG lainnya antara lain *Bright Gas Can* (LPG kemasan kaleng), HAP (*Hydrocarbon Aerosol Propellant* atau pendorong produk aerosol), Musicool (bahan pendingin/*refrigerant*), dan Vi-Gas bahan bakar LPG untuk kendaraan.

BBM SATU HARGA

Pertamina mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk mewujudkan BBM Satu Harga di Indonesia. Sampai dengan Akhir tahun 2018 , secara nasional Pertamina telah merealisasikan pengoperasian dan uji operasi atas lembaga penyalur BBM Satu Harga sebanyak 125 (55 titik di tahun 2017 dan 70 titik di tahun 2018) titik di daerah-daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil atau 3T. Dengan adanya SPBU ini, sekarang masyarakat dapat membeli BBM Premium dan Solar dengan harga yang sama dengan masyarakat di daerah lain yang sudah menikmati harga sesuai Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yaitu Premium Rp 6.450,- / liter, dan produk Solar seharga Rp 5.150,- / liter.

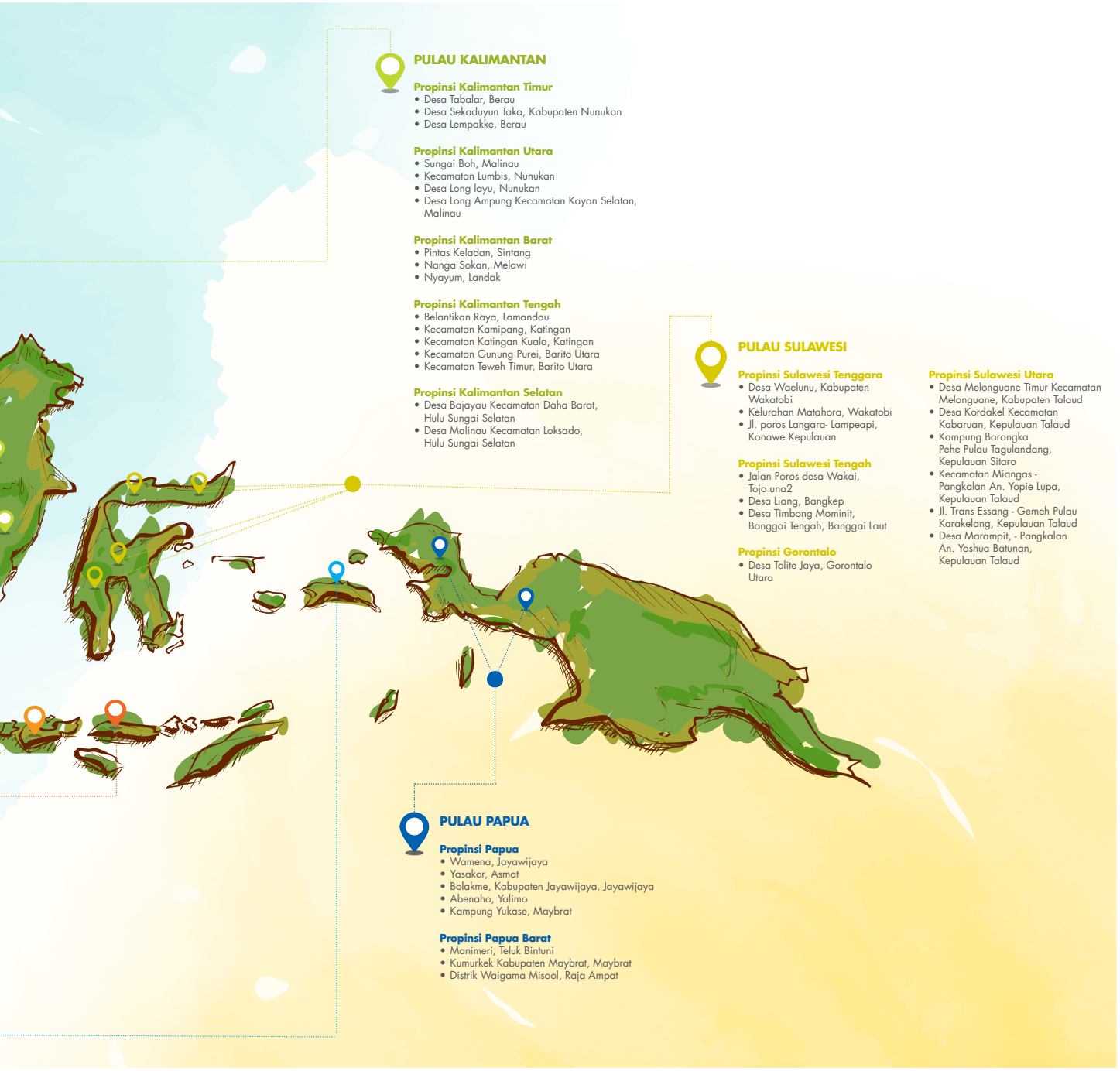

PULAU KALIMANTAN

Propinsi Kalimantan Timur
- Desa Tabalar, Berau
- Desa Sekaduyun Taka, Kabupaten Nunukan
- Desa Lempakke, Berau

Propinsi Kalimantan Utara
- Sungai Boh, Malinau
- Kecamatan Lumbis, Nunukan
- Desa Long layu, Nunukan
- Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan, Malinau

Propinsi Kalimantan Barat
- Pintas Keladan, Sintang
- Nanga Sokan, Melawi
- Nyayum, Landak

Propinsi Kalimantan Tengah
- Belantikan Raya, Lamandau
- Kecamatan Kamipang, Katingan
- Kecamatan Katingan Kuala, Katingan
- Kecamatan Gunung Purei, Barito Utara
- Kecamatan Teweh Timur, Barito Utara

Propinsi Kalimantan Selatan
- Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat, Hulu Sungai Selatan
- Desa Malinau Kecamatan Loksado, Hulu Sungai Selatan

PULAU SULAWESI

Propinsi Sulawesi Tenggara
- Desa Waelunu, Kabupaten Wakatobi
- Kelurahan Matahora, Wakatobi
- Jl. poros Langara- Lampeapi, Konawe Kepulauan

Propinsi Sulawesi Tengah
- Jalan Poros desa Wakai, Tojo una2
- Desa Liang, Bangkep
- Desa Timbong Mominit, Banggai Tengah, Banggai Laut

Propinsi Gorontalo
- Desa Tolite Jaya, Gorontalo Utara

Propinsi Sulawesi Utara
- Desa Melonguane Timur Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud
- Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan, Kepulauan Talaud
- Kampung Barangka Pehe Pulau Tagulandang, Kepulauan Sitaro
- Kecamatan Miangas - Pangkalan An. Yopie Lupa, Kepulauan Talaud
- Jl. Trans Essang - Gemeh Pulau Karakelang, Kepulauan Talaud
- Desa Marampit, - Pangkalan An. Yoshua Batunan, Kepulauan Talaud

PULAU PAPUA

Propinsi Papua
- Wamena, Jayawijaya
- Yasakor, Asmat
- Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Jayawijaya
- Abenaho, Yalimo
- Kampung Yukase, Maybrat

Propinsi Papua Barat
- Manimeri, Teluk Bintuni
- Kumurkek Kabupaten Maybrat, Maybrat
- Distrik Waigama Misool, Raja Ampat

LAYANAN PRIMA DI HARI RAYA

Guna memastikan penyaluran BBM aman selama masa Ramadhan Idul Fitri dan Natal-Tahun Baru, Pertamina mengadakan Satgas RAFI dan Naru selama tahun 2018. Selama Satgas RAFI (Ramadhan Idul Fitri 2018), Pertamina menyediakan layanan tambahan bagi para Masyarakat yang memanfaatkan momen Lebaran dan akhir tahun yang terdiri atas Kiosk Pertamax, Serambi Pertamax dan Motor Kemasan dengan realisasi penjualan sebanyak 2.417 KL Pertamax - 183 KL Dexlite (selama RAFI) dan 973 KL Pertamax – 114 KL Dexlite(selama NARU 2018).

LAYANAN DI ERA DIGITAL

Untuk meningkatkan loyalitas konsumen di era digital yang diprediksi penuh dengan tantangan ke depan, Pertamina memiliki program MyPertamina. MyPertamina merupakan *cashless payment* sekaligus *one stop digital service* Pertamina yang diluncurkan pada 20 Desember 2017. Tahun 2018, MyPertamina terus dikembangkan, dan saat ini tidak hanya dapat digunakan di SPBU, namun juga di Bright Store dan Bright Oli Mart.

PEMASARAN NON RITEL

Avtur

Pesatnya perkembangan industri aviasi, baik di Indonesia maupun di dunia merupakan peluang bagi Pertamina. Dengan kapasitas yang dimilikinya Pertamina dapat memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan perusahaan penerbangan. Pertamina memiliki produk bahan bakar penerbangan, baik produk jet A-1 maupun *aviation gasoline*.
Pertamina menggunakan merek Avtur untuk produk jet A-1 yang dijual ke perusahaan penerbangan dalam dan luar negeri di bandar udara (bandara) dalam negeri (domestik). Pengisian Avtur di dalam negeri dilakukan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) yang tersebar di 8 Marketing Operation Region (MOR). Sedangkan pengisian bahan bakar jet A-1 di bandara di luar negeri dilakukan dengan melakukan *reseller agreement* dengan mitra setempat.

Pertamina terus memperluas jaringan pengisian bahan bakar penerbangan baik di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2018, Pertamina menambah satu DPPU di satu bandara baru di dalam negeri. Sedangkan penambahan layanan pengisian Avtur di luar negeri terbanyak di China.

Hingga akhir tahun 2018, jaringan pengisian bahan bakar pesawat udara Pertamina telah merambah wilayah Eropa, Australia, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Sebagian besar konsumen yang dilayani di lokasi-lokasi tersebut adalah maskapai berjadwal. Selain konsumen maskapai berjadwal, Pertamina juga mendukung penerbangan non reguler/ ad-hoc seperti penerbangan pesawat kepresidenan, VVIP, *charter flight* dan *delivery flight* pesawat baru di berbagai lokasi di dunia.

Di sisi komersial, sepanjang tahun 2018 Pertamina aktif mengikuti tender penyediaan bahan bakar untuk pengisian di berbagai bandara di dunia sekaligus bekerja sama dengan *supplier* bahan bakar setempat melalui *reseller agreement*. Di sisi infrastruktur pengisian bahan bakar, Pertamina terus melakukan modernisasi keandalan sarana dan fasilitas pengisian bahan bakar pesawat, meningkatkan keandalan stok, dan melakukan integrasi sistem informasi dan kustomisasi layanan operasi.

Petrokimia

Salah satu produk non BBM yang dipasarkan oleh Pertamina adalah Petrokimia. Produk yang dipasarkan meliputi produk Bitumen (Aspal), Paraxylene, Benzene, Propylene & Polypropylene, dan non BBM lainnya seperti Sulphur, Solvent, Rubber Processing Oil, Smooth Fluid, Petroleum Coke, dan Kimia Pertanian.

Pada tahun 2018, pencapaian realisasi penjualan produk petrokimia relatif stabil dari penjualan tahun 2017, dengan pertumbuhan penjualan sekitar 4% dalam tiga tahun terakhir.

Permintaan pasar terhadap produk-produk petrokimia masih berpotensi meningkat, oleh karena itu pada aktivitas pemasarannya selain memasarkan hasil produksi kilang juga melakukan kegiatan *trading* untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia, aktifitas trading terutama untuk produk Bitumen, Benzene, Paraxylene dan Sulphur yang menyumbang volume 550 ribu MT atau sekitar 22% dari total penjualan produk petrokimia.

Tahun 2018, Pertamina melakukan pengembangan pasar dengan merambah pasar ekspor, antara lain ke Malaysia, China, India sampai Eropa. Produk utama yang dijual ke pasar ekspor adalah *Green Coke Slack Wax*, EXDO-4 dengan volume mencapai 275 ribu MT. Selain hal tersebut Pertamina juga fokus merancang pengembangan infrastruktur *supply point* produk Bitumen, dan penetrasi pasar produk *Smooth Fluid*, dan non Karsinogenik EXDO-4 yang lebih ramah lingkungan ke pasar domestik.

BBM Industri & Marine

Selain memasarkan BBM ritel, Pertamina juga memasarkan BBM ke sektor industri dan Kelautan dalam skala besar. Hingga saat ini, Pertamina memiliki lebih dari 100.000 konsumen di seluruh Indonesia. Beberapa konsumen Pertamina yaitu PLN, TNI/POLRI, kontraktor kerja sama, industri pertambangan, industri kertas, industri baja, perkebunan, manufaktur dan industri lainnya.

Saat ini, segmen pasar terbesar adalah segmen listrik/ PLN. Namun permintaan BBM dari PLN cenderung menurun seiring kebijakan pengurangan penggunaan BBM dengan konversi energi ke gas, batubara dan energi terbarukan lainnya (air, geothermal, dan lain-lain).

Di bidang Marine, Pertamina memasarkan BBM dengan fokus pada pengembangan jaringan layanan penjualan BBM di semua pelabuhan vital Indonesia. Pemasaran BBM di bidang marine dilakukan melalui sinergi BUMN dan kerja sama dengan pihak swasta. Di samping itu, Pertamina juga memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, terlebih hal itu juga didukung dengan kebijakan Pemerintah berupa Pemberian pembebasan Pengenaan PPN di Indonesia untuk kapal-kapal *ocean going*. Selain itu, Pertamina juga dapat memanfaatkan jalur pelayaran yang melewati wilayah perairan Indonesia (misal rute Australia – Jepang/Korea/China) menjadi potensi yang cukup besar untuk meningkatkan volume sektor bunker.

Dalam memasarkan BBM ke sektor industri dan marine, Pertamina memiliki berbagai keunggulan. Pertamina menjamin ketersediaan pasokan BBM yang ditunjang dengan tujuh kilang domestik, lebih dari 115 Terminal BBM, sarana dan fasilitas angkut darat dan laut yang lengkap tersebar di seluruh Indonesia. Kualitas dan kuantitas BBM Pertamina terjamin dengan standar Dirjen Migas maupun standar internasional.

Kunci kesuksesan Pertamina dalam persaingan di era globalisasi terletak pada hubungan kemitraan jangka panjang yang berdedikasi pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Antara lain melalui layanan *after sales* berupa layanan *Vendor Held Stock* serta *Techincal*

Support & Safety Advisor yang andal dalam rangka menyediakan *energy total solution* kepada pelanggan dengan mengusung Tagline "We Bring Energy Solution". Melengkapi portofolio produk untuk pemenuhan energi bagi pelanggan, *Industrial Fuel Marketing* menerapkan pemasaran terintegrasi energi primer dan sekunder, berupa penyediaan BBM, Gas, hingga penyediaan energi sekunder berupa listrik melalui sinergi dengan Anak Perusahaan.

Tuntutan pelanggan yang semakin tinggi dengan kecenderungan pengadaan BBM melalui sistem tender serta kebijakan multi *supplier* untuk memastikan persaingan yang sehat dalam *supply* logistik yang dibutuhkan konsumen. Pertamina menjawab tantangan tersebut dengan memberikan harga yang kompetitif, ketersediaan suplai yang andal, layanan kredit /*term of payment* (TOP) dengan jangka waktu yang bersaing, serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. Di tahun 2018 Pertamina masih memiliki posisi yang kuat di pasar domestik dengan penguasaan pangsa pasar di atas 70% untuk sektor industrial dan *marine fuel*. Kepuasan pelanggan konsumen Pertamina yang diukur setiap tahun melalui survei untuk mengetahui *Customer Satisfaction Index* (CSI) dan *Customer Loyalty Index* (CLI), pada tahun 2018 hasil survei menunjukkan nilai 4,0 dalam skala likert.

Kinerja Operasi Gas

Di segmen hilir gas, bisnis yang dilakukan Pertamina antara lain penjualan gas (pipa), transportasi gas, regasifikasi, dan penjualan CNG transportasi. Selain itu, Pertamina juga berperan sebagai penjual gas pipa maupun LNG. Untuk gas pipa, Pertamina melayani baik pelanggan industri, pembangkit listrik (PLN) maupun rumah tangga (gas kota). Dengan bergabungnya PT PGN Tbk. (PGN) ke Pertamina, infrastruktur PGN dan Pertagas diintegrasikan, dan PGN akan mengelola bisnis hilir gas domestik.

Di bisnis hilir gas, volume penjualan gas di tahun 2018 naik 36% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan volume transportasi naik 55% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan baik volume penjualan maupun transportasi gas terutama dikarenakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) telah berintegrasi dengan Pertamina.

BISNIS GAS TERINTEGRASI PERTAMINA

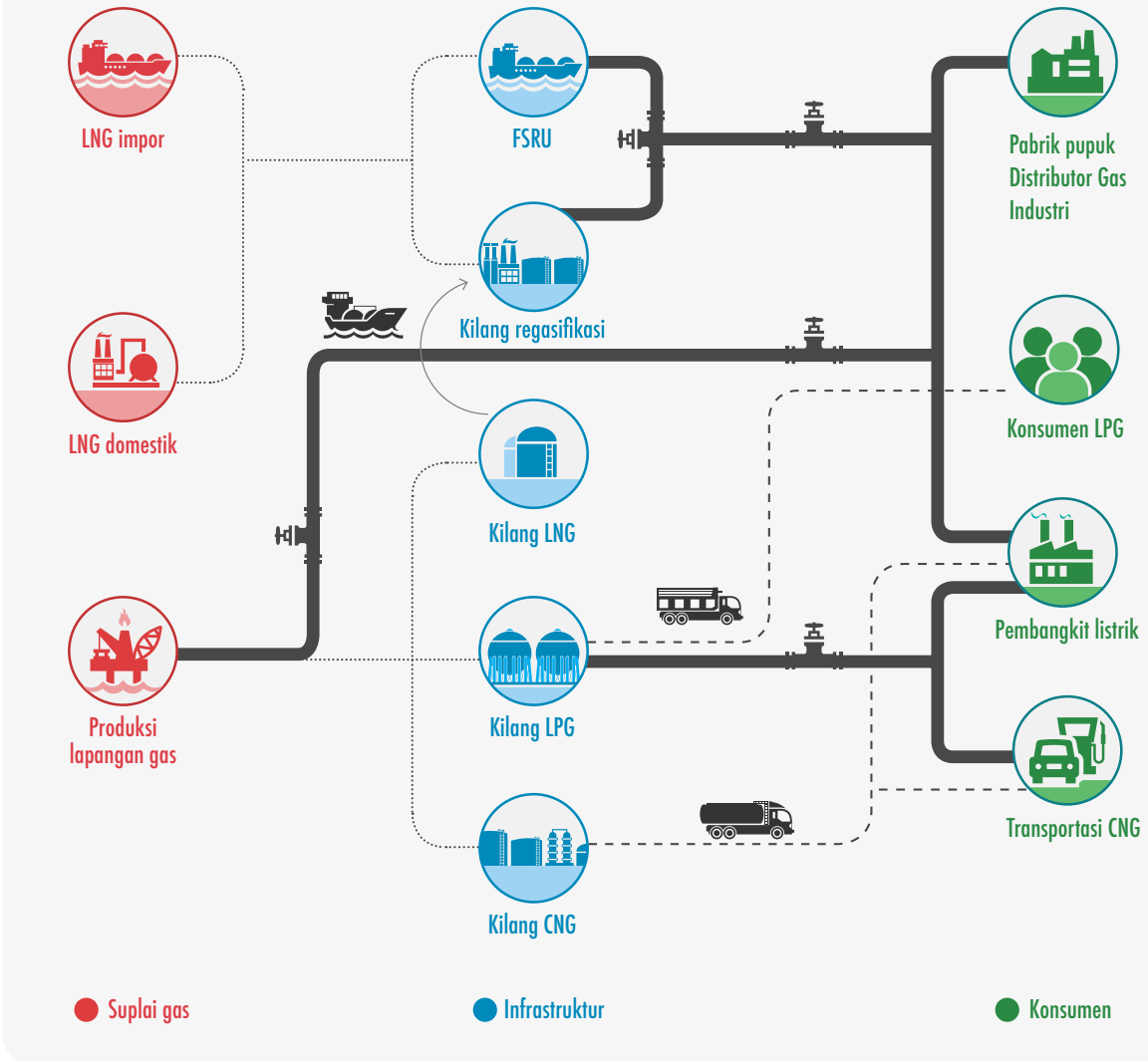

KINERJA PEMASARAN

Di tahun 2018, tingkat penjualan produk BBM maupun Non BBM mencapai tumbuh masing-masing 5% dan 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikontribusikan oleh penjualan produk Pertalite, Solar, Avtur, dan LPG. Sedangkan kinerja bisnis hilir gas meningkat cukup signifikan dengan bergabungnya PGN. Bisnis gas ke depan akan fokus pada pemenuhan kebutuhan kilang Pertamina serta penugasan penjualan gas bagian negara baik gas pipa maupun LNG.

Bisnis gas ke depan akan fokus pada pemenuhan kebutuhan kilang Pertamina serta penugasan penjualan gas bagian negara baik gas pipa maupun LNG.

Penjualan Produk BBM (Juta kiloliter)

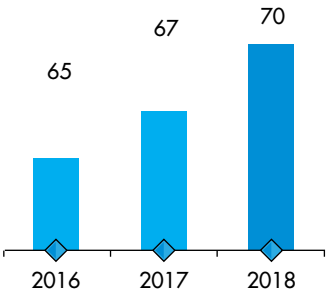

Penjualan Produk Non BBM (Juta kiloliter)

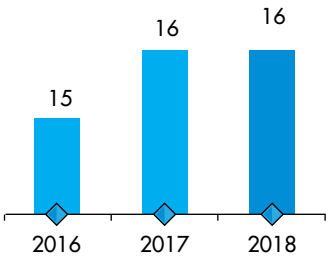

Penjualan Gas (BBTU)

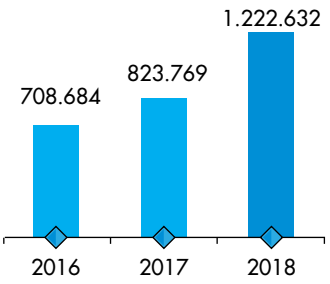

Transportasi Gas (BSCF)

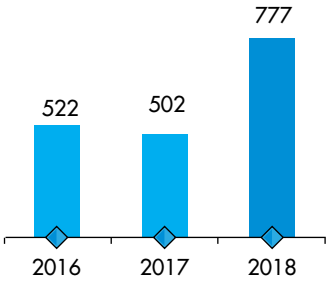

SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN SUPPLY CHAIN PEMASARAN

Dalam memenuhi kebutuhan energi, khususnya BBM, Pertamina mengelola dan mengoperasikan infrastruktur di seluruh Indonesia.

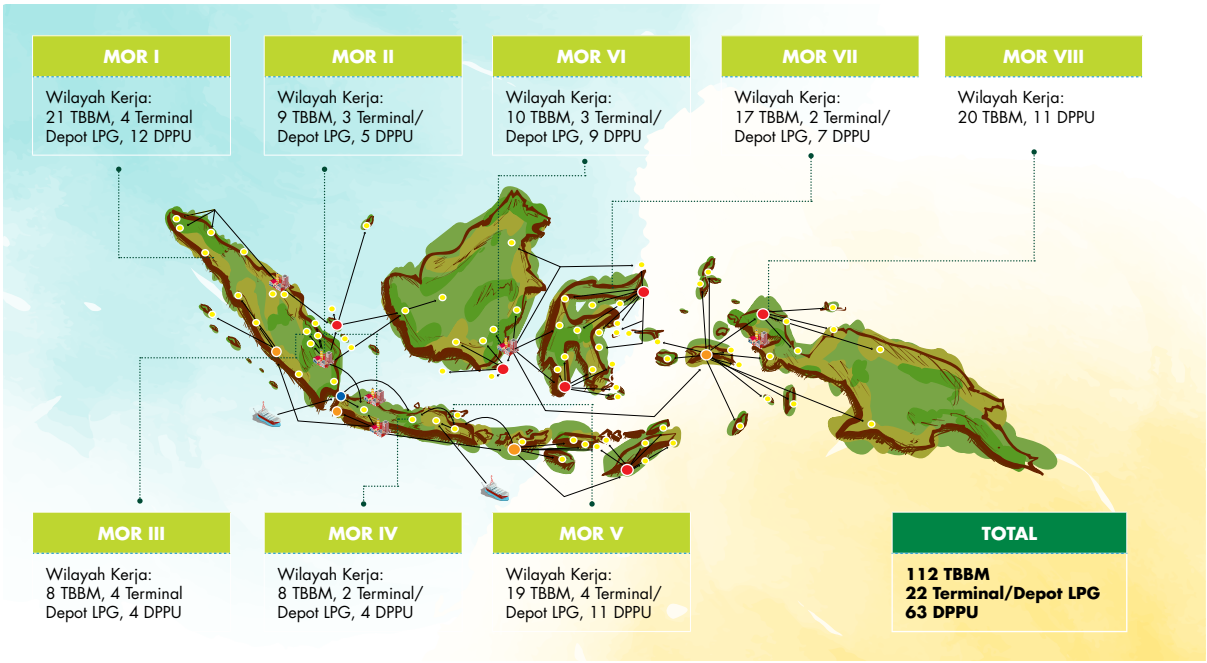

Gambar 1 – Pola Distribusi BBM

- ±500 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji
- ±60 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU)
- ±20 Terminal LPG
- >1 *Lube Oil Blending Plant* (LOBP)
- >100 Terminal BBM
- Mengelola >60 unit Tanker Milik dan >100 unit *Tanker Charter*
- >5.500 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- >100 Dermaga
- >10 SPM (*Single Point Mooring*)
- >5 lokasi STS (*Ship to Ship*)
- ±10 CBM (*Conventional Buoy Mooring*)
- > 100 Kapal Ringan
- ±2 *Bitumen Plant*
- ±2 *Chemical Storage Plant*
- >30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)

Pengembangan Infrastruktur Pemasaran

Breakthrough Project (BTP) Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Pemasaran yang telah disusun untuk periode 2020, 2025 dan 2030 yang terintegrasi dengan seluruh perencanaan jangka panjang di Direktorat Pemasaran, Direktorat Pengolahan, Direktorat Gas, Direktorat Keuangan dan Fungsi ISC mencakup proyek-proyek strategis dan rencana induk pengembangan infrastruktur sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan Terminal BBM di 5 lokasi (Region I, III, dan V).
2. Penggantian pipa Cikampek-Plumpang yang ditargetkan selesai tahun 2019-2020 dan pengembangan pipa CB II Lomanis Tasikmalaya dan CY II Lomanis-Rewulu.
3. Relokasi DPPU Sultan Hasanudin di Makasar, Sultan Thaha di Jambi, Sepinggan di Balikpapan, DEO di Sorong, Supadio di Pontianak, Ahmad Yani di Semarang dan Mutiara di Palu (sedang dalam pengerjaan) dan pembangunan DPPU Kertajati di Majalengka.

4. Pembangunan dan Pengembangan terminal LPG:
   a. Pembangunan Tangki LPG *Pressurized* di Terminal LPG di Region I.
   b. Pembangunan Tangki LPG *Pressurized* di Terminal LPG di Region III.
   c. Pembangunan Tangki LPG *Pressurized* di Terminal LPG di Region IV.
   d. Pembangunan Terminal LPG tangki LPG *Pressurized* di Region I.

5. Pembangunan dan Pengembangan Terminal LPG di Indonesia Timur:
   Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2157 K/10/MEM/2017 Tanggal 31 Mei 2017 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan LPG, dengan lokasi yang ditetapkan pada lampiran I Kepmen ESDM tersebut mencakup 14 lokasi di NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, maka secara bertahap Pertamina telah memulai pembangunan di Nusa Tenggara dan Papua.
6. Proyek yang sedang berjalan saat ini:
   a. Pembangunan DPPU di Region III untuk melayani pengisian pesawat udara di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
   b. Pembangunan Tangki LPG *Refrigerated* di Terminal LPG Jawa Barat untuk mengantikan/ mendaratkan STS.
   c. Pembangunan Tangki LPG *Pressurized* di Region V.
   d. Pembangunan Tangki LPG *Pressurized* di Terminal LPG Region I.
   e. Pembangunan Tangki LPG *Pressurized* di Terminal LPG Region II.
   f. Pembangunan TBBM di Region IV.

Usaha Perkapalan

Sampai akhir tahun 2018, Pertamina mengelola 67 armada kapal milik sendiri dengan masuknya 1 armada baru Pertamina *Shipping* yatu MT Pasaman pada tanggal 27 April 2018 dan 200 kapal *charter* untuk mengangkut kargo internal. Armada kapal Pertamina akan bertambah 4 kapal baru yang saat ini tengah dalam proses pembangunan di mana penambahan armada baru tersebut untuk memperkuat distribusi BBM domestik (*White Oil*).

Tabel 1 – Jumlah Kapal Milik Pertamina

Tipe Kapal	DWT	Unit
Bulk Lighter	1.642	1
Small I	38.762	11
Small II	85.812	13
General Purpose	189.176	11
Medium Range	450.878	13
Large Range	822.997	9
Small LPG	14.138	5
Midsize LPG	34.800	2
Very Large Gas Carrier	109.254	2
Total	1.747.459	67

Sejalan dengan komitmen pemerintah sejak tahun 2017, Pertamina berperan aktif dalam sinergi BUMN dengan telah ditandatanganinya kesepakatan kerja sama antara Pertamina dan NSHI (*National Shipbuilding & Heavy Industries*). Pertamina juga ikut berkontribusi memajukan sektor maritim nasional secara konsisten dan menjaga kepatuhan terhadap asas *cabotage* dengan mewajibkan armada kapalnya yang beroperasi di Indonesia menggunakan bendera Indonesia dan memberdayakan awak kapal berkebangsaan Indonesia.

Selain memastikan transportasi kargo ke seluruh pelosok Indonesia, pelaksanaan distribusi perlu didukung oleh layanan *marine* di setiap pelabuhan yang disinggahi. Saat ini terdapat 107 pelabuhan yang dikelola Pertamina, yang terdiri dari 46 Terminal Khusus (Tersus) dan 61 Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Pertamina. Pertamina juga mengelola 169 dermaga, 13 *Single Point Mooring* (SPM), 7 lokasi *Ship to ship* (STS) transfer, 11 *Central Buoy Mooring* (CBM)/*Multiple Buoy Mooring* (MBM), dan 2 *Island Berth*.

Sejalan dengan pencanangan 8 Pilar Prioritas Strategi Pertamina untuk mendukung visinya sebagai "Perusahaan Energi Kelas Dunia". Pertamina memiliki 8 Prioritas strategis perkapalan, yaitu *safety operation, environmental compliance, vessels & port reliability, shipping cost, vessel performance, vessel ownership, service excellence*, dan *manpower*.

Pertamina menerapkan *operational excellence* untuk kapal-kapal milik dan terminalnya dengan implementasi TMSA (*Tanker Management & Self-Assessment*) yang saat ini telah meraih skor 2,81 dan pencapaian SIRE (*Ship Inspection Report*) sebanyak 23 unit kapal milik. Implementasi tersebut sangat dibutuhkan untuk kapal yang akan melakukan trading sebagai prasyarat untuk sandar di pelabuhan minyak internasional. Diikuti oleh implementasi MTMSA (*Marine Terminal Mangement Self-Assessment*) yang saat ini telah diimplementasikan kepada 2 unit terminal, yaitu terminal Baubau dan terminal Cilacap. Hal yang sama juga dilakukan oleh usaha *Vetting Inspection*, dengan adanya perubahan *passing/initial grading* untuk *medium risk* dari tahun 2017 sebesar 60% menjadi 65% di tahun 2018. Pada tahun 2018, Pertamina juga berhasil untuk melakukan *renewal* sertifikat ISO 9001:2015, pencapaian ISM *Compliance* sebesar 100%, *comply* terhadap MARPOL, dan skala *low risk* khusus kapal milik meningkat dari 25 kapal menjadi 30 kapal.

PT Pertamina International Shipping (PT PIS)

PT Pertamina International Shipping (PT PIS) didirikan berdasarkan Akta No.37 tanggal 23 Desember 2016 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta dengan penyertaan modal sebesar USD 10 Juta, ditambah 4 (empat) unit kapal MR dan 1 (satu) unit *Floating Storage Offloading* (FSO), yaitu MT Fastron, MT Sungai Gerong, MT Sambu, MT Sei Pakning dan FSO Pertamina Abherka melalui mekanisme *spin-off* pada tahun 2017.

Sebagai langkah awal dalam upaya mewujudkan visi PT PIS yaitu "*To be the Choice of a World Class Company*", PT PIS fokus pada kegiatan angkutan cargo FOB, charter out 4 (empat) unit kapal MR dan 1 (satu) unit FSO serta optimalisasi cargo internal antara lain pemenuhan kebutuhan *critical organization* perusahaan, mendukung aktivitas perkapalan Pertamina, pengelolaan angkutan impor dan *third party trading* ISC, mengelola transportasi laut dan *floating storage*, menyewa *qualified ship management* dan penjajakan untuk ekspansi market kapal LNG. Dengan kontrak volume angkutan kargo impor produk dengan ISC Pertamina memberikan ruang gerak untuk dapat bertumbuh dari sisi aset dan profitabilitas.

Sampai akhir tahun 2018, dengan masuknya 1 armada baru PT PIS, yaitu MT PIS Pioneer pada tanggal 30 Maret 2018, armada yang dikelola PT PIS menjadi 6 kapal milik dan dibutuhkan kurang lebih 38 unit kapal charter untuk mengangkut kargo impor ISC. Armada PT PIS akan bertambah 2 kapal baru pada tahun 2020 yang saat ini tengah dalam proses pembangunan di Japan Marine United Corporation (JMUC), di mana penambahan armada baru tersebut untuk memperkuat portfolio angkutan *crude oil* PT PIS.

Pada tahun 2018 PT PIS telah menjalankan bisnis jasa angkutan kargo impor produk dan pengembangan bisnis perusahaan dengan menambahkan bisnis jasa angkutan kargo impor *crude* serta penetrasi jasa angkutan kargo pihak ketiga.

PT PIS telah mendirikan anak perusahaan di Singapura dengan nama Pertamina International Shipping Pte. Ltd. Perusahaan tersebut merupakan *shipping arm* PT PIS yang akan bergerak dalam *supporting* angkutan impor Pertamina serta melakukan penetrasi pada pasar kargo pihak ketiga Internasional dengan memulai operasinya di Singapura sebagai salah satu hub terbesar di dunia. PIS Pte. Ltd. juga akan menjadi wadah peletakan aset kapal melaui *Special Purpose Vehicle* (SPV) sebagai upaya mitigasi risiko sesuai dengan *best International shipping practice* dan upaya untuk kepentingan mendapatkan pendanaan investasi.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

LAPORAN LABA RUGI

Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya

Penjualan dan pendapatan usaha lainnya diperoleh dari penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak, penggantian biaya subsidi dari Pemerintah, penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi dan produk minyak, imbalan jasa pemasaran dan pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya.

Selama tahun 2018, penjualan dan pendapatan usaha lainnya Pertamina mencapai USD 57.934 juta atau lebih tinggi 25,94% dibanding pencapaian tahun 2017 sebesar USD 46.000 juta. Pencapaian tahun 2018 tersebut merupakan kontribusi dari:

1. Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak sebesar USD 44.743 juta atau 77,23% dari total penjualan dan pendapatan usaha lainnya
2. Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah sebesar USD 5.632 juta atau 9,72% dari total penjualan dan pendapatan usaha lainnya
3. Penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi dan produk minyak sebesar USD 3.637 juta atau 6,28% dari total penjualan dan pendapatan usaha lainnya
4. Imbalan jasa pemasaran sebesar USD 15 juta atau 0,03% dari total penjualan dan pendapatan usaha lainnya
5. Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya USD 3.906 juta atau 6,74% dari total penjualan dan pendapatan usaha lainnya

Tabel: Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya

Dalam Jutaan USD

Uraian	Pencapaian RKAP %	YoY 2018 %	RKAP 2018	2018	2017**	2016**	2015	2014*
Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak	107,17	12,45	41.748	44.743	39.789	35.842	36.560	44.587
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah	106,09	57,68	5.309	5.632	3.572	2.569	3.187	17.857
Penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi dan produk minyak	98,48	94,07	3.693	3.637	1.874	968	1.270	6.707
Imbalan jasa pemasaran	140,29	-38,27	11	15	25	(257)	23	99
Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya	147,13	427,87	2.655	3.906	740	690	723	746
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	108,46	25,94	53.416	57.934	46.000	39.812	41.763	69.996

*Disajikan kembali, akibat penerapan retrospektif PSAK No 24 "Imbalan Kerja" dan PSAK No 66 "Pengaturan Bersama"
** Disajikan kembali, akibat dikonsolidasikannya PT Perusahaan Gas Negara ("PGN") dan reklasifikasi akun tertentu

Kenaikan penjualan dan pendapatan usaha lainnya selama tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh kenaikan penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak. Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak pada tahun 2018 sebesar USD 44.743 juta atau naik 12,45% dibanding tahun 2017 sebesar USD 39.789 juta. Faktor utama penyebab kenaikan tersebut dipengaruhi oleh rata-rata harga jual produk yang lebih tinggi karena dipengaruhi realisasi ICP dan kuantitas penjualan yang lebih tinggi di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Rata-rata ICP tahun 2018 sebesar USD 67,47/*barrel* sedangkan rata-rata ICP tahun 2017 sebesar USD 51,17/*barrel*. Untuk harga rata-rata MOPS PSA tahun 2018 sebesar USD 81,71/*barrel* sedangkan harga rata-rata MOPS PSA tahun 2017 sebesar USD 64,78/*barrel*.

Faktor lain penyebab kenaikan penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak pada tahun 2018 adalah peningkatan volume penjualan. Volume penjualan produk minyak selama tahun 2018 mencapai 88,72 juta KL sedangkan tahun 2017 mencapai 85,74 juta KL. Peningkatan signifikan terjadi pada penjualan produk Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU), di mana volume penjualan tahun 2018 mencapai 17,75 juta KL atau naik 122% dengan kenaikan volume penjualan di tahun 2017 sebesar 3,24 juta KL.

Pada tahun 2018, penggantian biaya subsidi dari pemerintah sebesar USD 5.632 juta atau naik 57,67% dibandingkan tahun 2017 sebesar USD 3.572 juta. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh:

- Kenaikan harga rata-rata CP Aramco selama tahun 2018 sebesar USD 540/MMT dibandingkan harga rata-rata CP Aramco tahun 2017 sebesar USD 487/MMT. Seiring dengan kenaikan harga rata-rata CP Aramco tersebut, volume penjualan LPG Refill 3 kg PSO juga mengalami kenaikan. Volume penjualan LPG Refill 3 kg tahun 2018 sebesar 6,55 juta MT atau naik 4% dari volume penjualan tahun 2017 sebesar 6,31 juta MT.
- Kenaikan volume penjualan Solar/Biosolar PSO tahun 2018 sebesar 15,36 juta KL atau naik 7,2% dari tahun 2017 sebesar 14,33 juta KL.

Penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi dan produk minyak selama tahun 2018 mencapai USD 3.637 juta atau naik 94,08% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 sebesar USD 1.874 juta. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan realisasi rata-rata ICP dan MOPS tahun 2018.

Imbalan jasa pemasaran tahun 2017 tercatat senilai USD 25 juta terdiri dari estimasi imbalan jasa pemasaran periode 2017 senilai USD 20 juta dan realisasi imbalan jasa

pemasaran periode 2015 yang diterima pada tahun 2017 senilai USD 5 juta. Estimasi Imbalan jasa pemasaran pada tahun 2018 sebesar USD 15 juta mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar USD 20 juta. Penurunan ini disebabkan Pertamina melaukan perubahan perhitungan estimasi penerimaan atas imbalan jasa pemasaran yang lebih konservatif mengingat saat ini pemerintah masih merumuskan perhitungan atas imbalan jasa tersebut kepada Pertamina. Imbalan jasa pemasaran merupakan komisi jasa yang diperoleh Pertamina dalam memasarkan minyak mentah, gas bumi, dan LNG milik Pemerintah.

Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya tahun 2018 sebesar USD 3.906 juta mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar USD 740 juta. Faktor utama penyebab kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 yang menyebabkan penyesuaian harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.

Beban-beban

Pada tahun 2018, beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya mencapai USD 48.714 juta atau naik 29,47% dari realisasi di tahun 2017 sebesar USD 37.625 juta. Beban-beban tersebut terdiri dari beban pokok penjualan, beban produksi hulu dan *lifting*, beban eksplorasi dan beban dari aktivitas operasi, dengan kontribusi kenaikan terbesar yaitu kenaikan dari beban pokok penjualan.

Tabel: Beban-Beban

Dalam Jutaan USD

Uraian	Pencapaian RKAP %	YoY 2018 %	RKAP 2018	2018	2017**	2016**	2015	2014*
Beban pokok penjualan	107,34	28,97	39.863	42.788	33.176	26.181	31.911	59.585
Beban produksi hulu dan *lifting*	91,56	28,22	4.791	4.387	3.421	3.270	3.072	2.842
Beban eksplorasi	92,94	62,23	288	268	165	109	158	198
Beban dari aktivitas operasi lainnya	97,77	47,39	1.301	1.272	863	703	648	722
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA	105,34	29,47	46.243	48.714	37.625	30.263	35.790	63.347
Beban penjualan dan pemasaran	112,45	3,32	1.461	1.643	1.590	1.340	990	1.092
Beban umum dan administrasi	57,05	-16,83	2.331	1.330	1.599	1.509	1.061	1.119

*Disajikan kembali, akibat penerapan retrospektif PSAK No 24 "Imbalan Kerja" dan PSAK No 66 "Pengaturan Bersama"
** Disajikan kembali, akibat dikonsolidasikannya PT Perusahaan Gas Negara ("PGN") dan reklasifikasi akun tertentu

Beban pokok penjualan selama tahun 2018 sebesar USD 42.788 juta atau naik 28,97% dari tahun 2017 sebesar USD 33.176 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya harga pembelian bahan baku dan impor produk yang dipengaruhi kenaikan realisasi ICP dan publikasi harga minyak di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, realisasi beban produksi hulu dan *lifting* sebesar USD 4.387 juta atau naik 28,22% dari realisasi tahun 2017 sebesar USD 3.421 juta. Kontribusi kenaikan tertinggi pada tahun 2018 berasal dari beban depresiasi dan deplesi yaitu naik sebesar USD 932 juta dibandingkan tahun 2017. Realisasi kenaikan beban depresiasi dan deplesi tersebut terutama disebabkan dengan adanya

entitas baru PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI). Di sisi lain, realisasi beban kontrak juga ikut mengalami kenaikan yaitu sebesar USD 201 juta dibandingkan tahun 2017. Realisasi beban kontrak tersebut terutama dari entitas PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) dimana pada tahun 2018 mengelola empat anak perusahaan baru yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Pertamina Hulu Attaka (PHA), Pertamina Hulu Sangasanga (PHSS) dan Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

Beban eksplorasi tahun 2018 sebesar USD 268 juta atau naik 62,23% dari tahun 2017 sebesar USD 165 juta. Kenaikan beban eksplorasi tersebut sebagai upaya Pertamina dalam pencarian cadangan minyak dan gas bumi baru seiring dengan adanya kenaikan *lifting* tahun 2018 sebesar 34.379 MBO sedangkan tahun 2017 sebesar 33.574 MBO.

Penambahan beban dari aktivitas operasi lainnya sebesar 47,39% atau sebesar USD 1.272 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar USD 863 juta terutama disebabkan adanya kontribusi beban atas kegiatan operasional anak perusahaan Pertamina yang bergerak disektor pelayaran yaitu PT Pertamina International Shipping (PIS). Adapun dalam pengembangan operasional bisnis PIS yaitu jasa angkutan *Lube Base Oil dan Additive* milik Pertamina Lubricants, jasa angkutan Asphalt milik Petrokimia Pertamina dan STS operation.

Beban usaha terdiri dari beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi. Pada tahun 2018, beban penjualan dan pemasaran mengalami penurunan 6,78% yaitu dari sebesar USD 3.189 juta di tahun 2017 menjadi sebesar USD 2.973 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi sebesar USD 1.330 juta atau turun 16,83% dari tahun 2017 sebesar USD 1.599 juta yang disebabkan oleh rendahnya realisasi biaya *maintenance* dan komponen biaya umum lainnya serta upaya dalam pelaksanaan efisiensi perusahaan.

Laba Tahun Berjalan

Tingginya prosentase kenaikan penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar 25,94% dari tahun sebelumnya, menyebabkan laba usaha tahun 2018 naik 20,45%, dimana laba usaha tahun 2018 sebesar USD 6.247 juta dan laba usaha tahun 2017 sebesar USD 5.187 juta. Realisasi kenaikan tersebut berasal dari segmen hilir Pertamina dimana kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 yang menyebabkan penyesuaian harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.

Adapun beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya naik sebesar 29,47% dari tahun sebelumnya hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan sebagai dampak kenaikan ICP di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Penurunan laba setelah beban pajak penghasilan disertai dengan adanya kenaikan beban pajak penghasilan neto, terkait meningkatnya harga minyak di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga laba tahun berjalan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan merupakan laba usaha dikurangi dengan sejumlah beban yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha perusahaan. Laba tahun berjalan tahun 2018 sebesar USD 2.636 juta atau turun 2,37% dari tahun 2017 sebesar USD 2.700 juta.

Tabel: Laba (Rugi) — Dalam Jutaan USD

Uraian	Pencapaian RKAP %	YoY 2018 %	RKAP 2018	2018	2017**	2016**	2015	2014*
Laba usaha	184,76	20,45	3.381	6.247	5.187	6.699	3.921	4.438
Laba tahun berjalan	588,40	-2,37	448	2.636	2.700	3.471	1.442	1.477

*Disajikan kembali, akibat penerapan retrospektif PSAK No 24 "Imbalan Kerja" dan PSAK No 66 "Pengaturan Bersama"
** Disajikan kembali, akibat dikonsolidasikannya PT Perusahaan Gas Negara ("PGN") dan reklasifikasi akun tertentu

Laba usaha tahun 2018 sebesar USD 6.246 juta atau naik 20,42% dari tahun 2017 sebesar USD 5.187 juta. Adapun kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan dan pendapatan usaha lainnya yang sebagian besar berasal dari kontribusi penjualan dalam negeri minyak mentah, gas, energi

panas bumi, dan hasil minyak serta pendapatan usaha lainnya. Realisasi penjualan dalam negeri minyak mentah, gas, energi panas bumi, dan hasil minyak sebesar USD 44.742,51 juta atau 112,5% dari realisasi 2017 sebesar USD 39.788,78 juta. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya kuantitas penjualan Pertalite, Solar, Premium, LPG *Mixed* dan BBM non subsidi.

EBITDA

EBITDA untuk tahun 2018 sebesar USD 9.204 juta atau naik 26,85% dari tahun 2017 sebesar USD 7.256 juta, karena terdapat peningkatan penjualan dalam negeri atas minyak mentah, gas, energi panas bumi, dan hasil minyak. Di sisi lain terdapat kenaikan realisasi ICP dan publikasi harga minyak di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mempengaruhi beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya. Adapun terkait kenaikan realisasi ICP menyebabkan kenaikan beban pajak di sektor hulu tahun 2018 sehingga mengalami kenaikan 158,2%, dimana pajak kini tahun 2018 sebesar USD 2.627 juta dan pajak tangguhan sebesar USD 386 juta.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

Pada akhir tahun 2018, jumlah aset Pertamina tercatat sebesar USD 64.718 juta yang terdiri dari 35,78% aset lancar dan 64,22% aset tidak lancar. Jumlah aset tersebut mengalami kenaikan 12,67% dibandingkan tahun 2017 sebesar USD 57.439 juta.

Tabel: Jumlah Aset — Dalam Jutaan USD

Uraian	(%)	2018	2017**	2016**	2015	2014*
Aset Lancar	20,87	23.154	19.156	18.434	14.330	20.493
Aset Tidak Lancar	8,57	41.564	38.283	35.542	31.189	30.203
JUMLAH ASET	12,67	64.718	57.439	53.976	45.519	50.696

*Disajikan kembali, akibat penerapan retrospektif PSAK No 24 "Imbalan Kerja" dan PSAK No 66 "Pengaturan Bersama"

** Disajikan kembali, akibat dikonsolidasikannya PT Perusahaan Gas Negara ("PGN") dan reklasifikasi akun tertentu

Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonominya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun atau kurang dari satu siklus operasi. Aset lancar tahun 2018 mencapai USD 23.154 juta atau naik 20,87% dari jumlah aset lancar tahun 2017 sebesar USD 19.156 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang pemerintah dan persediaan. Di sisi lain terdapat penurunan dari kas yang dibatasi penggunaannya dan investasi jangka pendek.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar merupakan aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonominya dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Realisasi jumlah aset tidak lancar tahun 2018 mencapai USD 41.564 juta atau naik 8,57% dari tahun 2017 sebesar USD 38.283 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap, minyak dan gas serta panas bumi dan piutang pemerintah. Di sisi lain terdapat penurunan pada penyertaan jangka panjang dan pajak dibayar di muka.

LIABILITAS

Pada akhir tahun 2018, jumlah liabilitas Pertamina tercatat sebesar USD 35.108 juta yang terdiri dari 39,80% liabilitas jangka pendek dan 60,20% liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas tersebut naik 15,39% dibandingkan tahun 2017 sebesar USD 30.426 juta.

Tabel: Jumlah Liabilitas — Dalam Jutaan USD

Uraian	(%)	2018	2017**	2016**	2015	2014*
Liabilitas Jangka Pendek	42,04	13.973	9.837	8.893	8.547	13.746
Liabilitas Jangka Panjang	2,65	21.136	20.589	19.838	17.497	18.136
JUMLAH LIABILITAS	15,39	35.108	30.426	28.731	26.044	31.881

*Disajikan kembali, akibat penerapan retrospektif PSAK No 24 "Imbalan Kerja" dan PSAK No 66 "Pengaturan Bersama"

** Disajikan kembali, akibat dikonsolidasikannya PT Perusahaan Gas Negara ("PGN") dan reklasifikasi akun tertentu

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek. Liabilitas jangka pendek tahun 2018 mencapai USD 13.973 juta atau naik 42,04% dibandingkan tahun 2017 sebesar USD 9.837 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka pendek, utang pajak, utang pemerintah dan beban akrual. Di sisi lain terdapat penurunan dari utang usaha dan pendapatan tangguhan.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi. Liabilitas jangka panjang tahun 2018 mencapai USD 21.136 juta atau naik 2,65% dibandingkan tahun 2017 sebesar USD 20.589 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas pajak tangguhan dan utang obligasi. Di sisi lain terdapat penurunan dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas imbalan kerja karyawan.

EKUITAS

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2018 tercatat sebesar USD 29.610 juta atau naik 9,61% dari USD 27.013 juta pada 31 Desember 2017.

Tabel: Ekuitas — Dalam Jutaan USD

Uraian	(%)	2018	2017**	2016**	2015	2014*
Modal Saham	13,76	15.267	13.420	13.420	9.868	9.869
Proforma penyertaan modal Pemerintah dalam rangka pendirian Holding Migas	(100,00)	-	1.804	1.801	-	-
Uang muka setoran modal	-	-	-	-	3.552	-
Penyesuaian akun ekuitas	-	-	-	-	-	(2.648)
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	40.012,00	401	1	1	1	1
Komponen ekuitas lainnya	24,50	608	488	665	730	997
Saldo Laba	20,32	11.323	9.411	7.778	5.131	10.393
Selisih Transaksi Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-	-
Kepentingan non-pengendali	6,48	2.011	1.889	1.579	193	203
EKUITAS	9,61	29.610	27.013	25.244	19.475	18.815

*Disajikan kembali, akibat penerapan retrospektif PSAK No 24 "Imbalan Kerja" dan PSAK No 66 "Pengaturan Bersama"

** Disajikan kembali, akibat dikonsolidasikannya PT Perusahaan Gas Negara ("PGN") dan reklasifikasi akun tertentu

Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan modal saham menjadi sebesar USD 15.267 juta atau naik sebesar 13,76% dibandingkan tahun 2017 sebesar USD 13.420 juta. Realisasi ini menunjukkan terdapat perubahan akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Negara pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebanyak 13.809.038.755 lembar saham yang mewakili 56,96% total saham PGN.

Adapun pada tahun 2018 Pertamina menandatangani berita acara serah terima pengoperasian / penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa jaringan gas dan SPBG dengan Sekretaris Jenderal Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM selaku kuasa pengguna anggaran / barang. Nilai aset BMN tersebut adalah sebesar Rp 5,8 triliun, namun yang dicatat sebesar Rp 2,5 triliun yaitu sebesar aset yang beroperasi sampai menunggu keputusan selanjutnya (setara dengan USD 171 juta), sehingga meningkatkan bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya.

LAPORAN ARUS KAS

Pada tahun 2018, Pertamina memiliki arus kas positif dari aktivitas operasional, yaitu sebesar USD 3.169 juta. Aktivitas investasi berkontribusi pada pengurangan arus kas sebesar USD 3.504 juta dan arus kas untuk pendanaan mencapai USD 3.269 juta.

Tabel: Arus Kas — Dalam Jutaan USD

Uraian	(%)	2018	2017**	2016**	2015	2014*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	(22,27)	3.169	4.077	8.391	7.425	4.211
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	47,29	(3.504)	(2.379)	(2.619)	(3.363)	(5.714)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(265,77)	3.269	(1.972)	(3.480)	(4.431)	623
(Penurunan) kenaikan bersih kas dan setara kas	(1.170,80)	2.934	(274)	2.292	(370)	(880)
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	527,03	(232)	(37)	21	(158)	(57)
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun	(4,63)	6.410	6.721	4.408	3.639	4.576
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun	42,15	9.112	6.410	6.721	3.111	3.639

*Disajikan kembali, akibat penerapan retrospektif PSAK No 24 "Imbalan Kerja" dan PSAK No 66 "Pengaturan Bersama"
** Disajikan kembali, akibat dikonsolidasikannya PT Perusahaan Gas Negara ("PGN") dan reklasifikasi akun tertentu

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun 2018 lebih rendah USD 908 juta dibandingkan tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan kepada pemerintah sebagai akibat kenaikan harga rata-rata ICP tahun 2018. Di sisi lain, kenaikan harga rata-rata ICP tahun 2018 menyebabkan kenaikan pendapatan di entitas hulu dan berdampak terhadap peningkatan pembayaran pajak penghasilan badan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun 2018 lebih tinggi USD 1.125 juta dibandingkan tahun 2017. Hal ini seiring dengan kenaikan aset tetap, aset minyak, gas dan panas bumi serta penambahan investasi jangka panjang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan selama tahun 2018 lebih tinggi USD 5.241 juta dibandingkan tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan adanya penambahan kas dari penerimaan pinjaman jangka pendek *(trust receipt)* sebagai akibat kenaikan harga rata-rata ICP tahun 2018.

RASIO-RASIO KEUANGAN

Aspek Keuangan	Satuan	2018		Realisasi vs Target	
		Target	Realisasi		
Return on Equity (ROE)	%	2,08	13,21	11,13	535,27%
Return on Investment (ROI)	%	10,29	15,66	5,37	5,6%
Rasio Kas/*Cash Ratio*	%	44,23	66,83	22,60	81,1%
Rasio Lancar/*Current Ratio*	%	170,17	165,71	(4,46)	10,5%
Periode Penagihan/*Collection Period*	Hari	52	50	(2)	-30,9%
Perputaran Persediaan/*Inventory Turn Over*	Hari	60	40	(20)	4,0%
Total Asset Turn Over (TATO)	%	87,07	99,23	12,16	5,1%
Total Modal Sendiri (TMS) terhadap Total Aset	%	35,63	40,31	4,69	9,2%

Return on Equity (ROE)

ROE Pertamina pada tahun 2018 mencapai 13,21%, di atas RKAP 2018 sebesar 2,08%. *Return on Equity* (ROE) merupakan salah satu *profitability ratio* yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan.

Return on Investment (ROI)

ROI Pertamina pada tahun 2018 mencapai 15,66%, di atas RKAP 2018 sebesar 10,29%. *Return on Investment* (ROI) sebagai perbandingan antara EBITDA dengan *capital employed* digunakan untuk menganalisis keseimbangan antara laba dengan dana yang telah diinvestasikan untuk kegiatan operasi perusahaan.

Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas Pertamina pada tahun 2018 mencapai 66,83%, di atas RKAP 2018 sebesar 44,23%. Rasio kas diperoleh dengan membandingkan kas dan setara kas ditambah dengan investasi jangka pendek dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar Pertamina pada tahun 2018 mencapai 165,71%, di bawah RKAP 2018 sebesar 170,17%. Rasio lancar (*current ratio*) merupakan salah satu *liquidity ratio* yang digunakan Perusahaan untuk mengukur seberapa jauh aset lancar yang dimiliki Perusahaan dapat digunakan untuk melunasi liabilitas jangka pendek.

Periode Penagihan (*Collection Period*)

Periode penagihan Pertamina di tahun 2018 adalah 50 (lima puluh) hari atau lebih cepat 2 (dua) hari dibandingkan dengan periode penagihan dalam RKAP 2018 yaitu 52 (lima puluh dua) hari.

Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

Perputaran persediaan Pertamina pada tahun 2018 adalah 40 (empat puluh) hari atau lebih cepat 20 (dua puluh) hari dibandingkan dengan RKAP 2018 yaitu 60 (enam puluh) hari. Hal ini terutama dipengaruhi adanya kenaikan nilai persediaan sebagai akibat kenaikan harga rata-rata ICP dan harga publikasi minyak tahun 2018.

Total Asset Turn Over (TATO)

TATO Pertamina pada tahun 2018 sebesar 99,23%, lebih tinggi dibandingkan RKAP 2018 sebesar 87,07%. TATO merupakan *activity ratio* untuk menilai efektivitas penggunaan dana yang tertanam dalam jumlah aset dalam rangka menghasilkan pendapatan. TATO dihitung dengan membandingkan total pendapatan dengan *capital employed*.

Total Modal Sendiri (TMS) terhadap Total Aset (TA)

TMS terhadap TA Pertamina pada tahun 2018 sebesar 40,31%, lebih tinggi dari RKAP 2018 sebesar 35,63%. TMS terhadap TA dihitung dengan membandingkan total modal sendiri dengan total aset. Total modal sendiri merupakan total ekuitas dikurangi dengan saldo laba belum ditentukan penggunaannya.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Grafik Rasio Kemampuan Membayar Utang Pertamina dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	Satuan	2018	2017	2016	2015	2014
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	%	66,99	56,2	59,99	71,23	94,76
Rasio liabilitas terhadap aset	%	28,57	24,58	26,3	30,18	34,79
Rasio liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas	%	51,14	54,3	58,92	61,73	67,97
Rasio liabilitas jangka panjang terhadap aset	%	21,81	23,75	25,83	26,15	24,96
Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset	%	3,9	4,56	6,15	3,12	2,85
Rasio laba (rugi) terhadap jumlah pendapatan	%	4,33	5,63	8,23	3,36	2,06

Secara umum kewajiban Pertamina sepanjang tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017. Peningkatan kewajiban tersebut disebabkan meningkatnya *hutang* jangka pendek sebagai akibat kenaikan harga rata-rata ICP tahun 2018 dibandingkan dengan 2017. Secara keseluruhan Perseroan masih mampu menjaga dengan baik stabilitas *hutang* dengan menurunkan rasio liabilitas jangka panjang terhadap aset untuk memastikan terjaminnya pembayaran *hutang* yang akan jatuh tempo 12 bulan ke depan.

Sedangkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya ditunjukkan dengan rasio laba terhadap aset dan pendapatan yang menunjukkan nilai positif yang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajibannya.

TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG

Pada tahun 2018, Pertamina memiliki tingkat kolektibilitas piutang sebesar 50 hari, lebih lama 12 hari dari tingkat kolektibilitas tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan terdapat peningkatan piutang usaha seiring dengan peningkatan pendapatan usaha dari penjualan dalam negeri minyak mentah, gas, energi panas bumi, dan hasil minyak serta pendapatan usaha lainnya terkait dengan subsidi pemerintah.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan kolektibilitas piutang Pertamina dalam 5 tahun terakhir.

Grafik Periode Kolektibilitas Piutang Pertamina dalam 5 tahun terakhir

Keterangan	Satuan	2018	2017	2016	2015	2014
Periode Penagihan/*Collection Period*	Hari	50	38	43	42	38

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Tabel: Investasi Aktiva Tetap untuk Pengembangan Usaha Tahun 2018

No	Direktorat	Realisasi 2018 (jutaan USD)	Realisasi 2017 (jutaan USD)
1	Direktorat Hulu	642	1.642
2	Direktorat Pengolahan	0	26
3	Direktorat Logistik, Supply Chain & Infrastruktur	132	202
4	Direktorat Megaproyek PP	194	334
5	Direktorat Pemasaran Korporat	95	141
6	Direktorat Pemasaran Ritel	9	0
7	Direktorat Manajemen Aset	8	111
8	Direktorat Keuangan	0	89
9	Direktorat PIMR	13	0
10	AP SDM	1	0
Jumlah		1.095	2.520

KONTRIBUSI KEPADA PEMERINTAH (DIVIDEN DAN PAJAK)

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen Pertamina kepada pemerintah mengacu kepada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pengembangan Perseroan. RUPS tanggal 2 Mei 2018 memutuskan kewajiban Pertamina untuk membayar dividen atas kinerja tahun 2017 sebesar Rp 8,57 triliun dengan *dividend payout ratio* 25%. Kewajiban tersebut seluruhnya telah disetorkan kepada pemerintah.

Pada tahun 2017, dividen atas laba bersih 2016 ditetapkan RUPS tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp 12,1 triliun dengan *dividend payout* ratio 29% yang seluruhnya telah disetorkan oleh Pertamina ke pemerintah.

Pada tahun 2016, dividen atas laba bersih 2015 ditetapkan RUPS tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp 6,8 triliun dengan *dividend payout ratio* 36% yang seluruhnya telah disetorkan oleh Pertamina ke pemerintah.

Tabel: pembayaran dividen Pertamina untuk tahun buku 2015-2017

Keterangan	Berdasarkan RUPS Tahun Buku					
	2017	Tanggal Bayar	2016	Tanggal Bayar	2015	Tanggal Bayar
Dividen Payout Ratio	25%		29%		36%	
Jumlah Dividen Menurut RUPS (juta Rp)	8.569.790		12.103.431		6.800.000	
Jumlah Lembar Saham	171.227.044		133.090.697		133.090.697	
Dividen per Lembar Saham (Rp)	50.049		90.941		51.093	
Jumlah yang Direalisasi-kan (juta Rp)	8.569.790		12.103.431		6.800.000	
Pembayaran Dividen Interim			500.000	12/6/2016		
Pembayaran I	2.142.447,5	31/05/2018	3.025.858	13/04/2017	1.700.000	29/06/2016
Pembayaran II	1.285.468,5	02/08/2018	1.715.515	16/05/2017	1.700.000	29/07/2016
Pembayaran III	1.285.468,5	03/09/2018	1.715.515	14/07/2017	1.700.000	31/08/2016
Pembayaran IV	1.285.468,5	02/10/2018	1.715.515	15/09/2017	1.700.000	30/09/2016
Pembayaran V	2.570.937,0	02/11/2018	1.715.515	16/10/2017		
Pembayaran VI			1.715.515	16/11/2017		
Jumlah yang Belum Direalisasikan			-		-	

KETAATAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Salah satu bentuk kontribusi Pertamina kepada negara diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak. Sebagai wajib pajak, Perseroan selalu patuh dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Sedangkan sebagai pemotong dan pemungut pajak, Perusahaan berperan aktif dalam melakukan pemotongan dan pemungutan terhadap setiap objek kena pajak.

Besaran Pajak yang Dibayarkan

Pembayaran pajak Pertamina yang terdiri dari PPh Potong/Pungut, Pajak dibayar di muka, PPN Keluaran, cukai/bea masuk, dan Pajak Daerah sampai dengan transaksi bulan Desember 2018 adalah sebesar Rp 79,91 triliun. Bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp 75,92 triliun, terdapat kenaikan sebesar 5,26%.

Pernyataan Kepatuhan Waktu Membayar Pajak

Pertamina telah melakukan pembayaran pajak meliputi PPh Potong/Pungut, PPN, PBB dan pajak daerah lainnya dalam jangka waktu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Pertamina juga telah menyampaikan dokumen pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh dan PPN, SPT Tahunan PPh Badan dan dokumen kewajiban perpajakan lainnya kepada otoritas perpajakan yang berwenang dalam jangka waktu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

KINERJA ANAK PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pertamina membentuk sejumlah anak perusahaan, dimana Pertamina memiliki pengendalian keuangan dan operasional melalui kepemilikan sebesar 100% ataupun mayoritas. Hingga Akhir tahun 2018, anak perusahaan Pertamina berjumlah 25 perusahaan dengan bidang usaha, data jumlah aset, pendapatan usaha dan laba bersih dua tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

(dalam jutaan USD)

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Jumlah Aset		Pendapatan Usaha		Laba Bersih	
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
Cluster Hulu								
1	PT Pertamina EP	Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas	7.498,64	7.621,46	3.160,58	2.770,08	756,04	614,78
2	PT Pertamina Hulu Energi	Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas	4.531,67	4.780,79	2.528,09	1.999,08	474,12	248,89
3	PT Pertamina Geothermal Energy	Eksplorasi & Produksi Panas Bumi	2.555,69	2.404,90	660,84	622,47	107,40	95,73
4	PT Pertamina Drilling Services Indonesia	Jasa Pengeboran Minyak & Gas	560,42	574,40	237,82	235,34	20,64	18,21
5	PT Pertamina EP Cepu	Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas	2.992,89	2.608,02	1.779,01	1.328,94	842,40	662,21
6	PT Pertamina EP Cepu ADK	Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas	12,85	18,53	0,00	0,00	-10,63	-57,79
7	PT Pertamina Internasional Eksplorasi Dan Produksi	Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas	5.838,79	5.803,30	1.191,60	1.162,47	-39,71	142,73
8	PT Pertamina Hulu Indonesia	Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas	1.510,15	304,84	2.209,97	0,00	779,86	-2,65
9	PT ElnusaTbk	Jasa survey seismic, Logistic base, Teleko-munikasi, Konstruksi dan pemasaran BBM (Pertamax)	390,67	358,38	465,01	372,01	19,40	18,47

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Jumlah Aset		Pendapatan Usaha		Laba Bersih	
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
10	PT Pertamina Hulu Rokan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	785,00	-	-	-	-	-
Cluster Hilir								
11	PT Pertamina Power Indonesia	Produksi tenaga listrik yang berasal dari sumber energi lain-nya seperti gas alam, cair, panas bumi, matahari,	114,76	101,11	0,04	0,00	-1,53	-1,66
12	PT Nusantara Regas	Liquified Natural Gas ("LNG") regasifica-tion	240,82	277,44	682,95	568,66	54,40	48,94
13	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Perdagangan minyak dan gas bumi, trans-portasi gas, pemros-esan, distribusi dan penyimpanan minyak dan gas	7.939,27	8.183,18	3.870,27	3.570,60	304,99	196,91
14	PT Kilang Pertamina Inter-nasional	Menjalankan kegiatan produksi, pengolahan dan per-dagangan di bidang minyak, gas bumi, dan energy baru dan terbarukan di dalam negeri dan di luar negeri	1,84	-	-	-	0,01	-
15	PT Pertamina Patra Niaga	Jasa Perdagangan & Aktivitas Industri	869,27	915,38	1.572,19	1.390,85	36,20	84,03
16	PT Pertamina Retail	Penyalur Bahan Bakar	203,10	150,64	902,99	891,84	13,50	10,63
17	PT Pertamina Trans Kontinental	Usaha di bidang Jasa Pelayaran, Jasa Mar-itim, & Jasa Logistik	307,52	287,01	143,91	132,95	19,59	13,67
18	PT Pertamina Lubricants	Pengolahan dan Pemasaran Pelumas	416,58	500,64	777,79	719,29	124,78	134,42
19	PT Pertamina Internasional Shipping	Usaha di bidang Jasa pelayaran komoditi minyak dan gas bumi	296,33	208,97	404,75	99,51	52,73	14,92

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Jumlah Aset		Pendapatan Usaha		Laba Bersih	
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
Cluster Finance & Services								
20	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Jasa Asuransi	1.204,25	1.091,91	179,32	183,34	17,47	34,71
21	PT Pertamina Pedeve Indonesia	Melakukan penyertaan modal	62,10	71,33	8,14	14,80	5,48	3,20
22	PT Patra Jasa	Jasa pelayanan meliputi perhotelan, ruang kantor, rumah, apartemen dan bangunan lainnya.	241,17	235,57	97,77	75,57	9,31	8,55
23	PT Pelita Air Service	Jasa transportasi udara, penyewaan pesawat udara	60,38	65,66	48,66	56,54	-0,55	2,65
24	PT Pertamina Bina Medika	Jasa layanan kesehatan, mengelola rumah sakit	105,74	111,01	91,40	98,80	0,63	3,88
25	PT Pertamina Training & Consulting	Jasa konsultasi manajemen, pelatihan, penyediaan tenaga keamanan	39,80	40,77	111,72	106,27	2,88	2,15

PENILAIAN PERUSAHAAN

Tingkat Kesehatan Perusahaan (TKP)

Dengan tetap mengacu pada Kep.Men. BUMN No KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, pencapaian Skor tingkat perusahaan pada tahun 2018 sebesar **86,72** yang berarti perusahaan dalam kondisi **SEHAT AA**. Hasil tersebut diperoleh dari beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

Indikator	Skor
Aspek Keuangan	64,50
Aspek Operasional	13,22
Aspek Administrasi	9,00
Total Skor	86,72

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Tahun 2018, Pertamina telah melaksanakan asesmen kinerja perusahaan berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dengan kriteria yang diadopsi dari "*Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence*" yang dilakukan oleh Asesor FEB BUMN.

Proses asesmen meliputi kegiatan klarifikasi, verifikasi dan *site visit* dari 7 fokus Utama KPKU dengan Kerangka Kerja (Perspektif Kesisteman) KPKU BUMN seperti di bawah ini:

KPKU BUMN merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menilai/mengukur semua elemen sistem pengelolaan perusahaan dan faktor-faktor peningkatan proses juga peningkatan hasil sebagai pertimbangan ketika melakukan penilaian.

Hasil Penilaian KPKU 2018

Berdasarkan hasil asesmen KPKU BUMN tahun 2018, Pertamina memperoleh skor 755.75 dengan kategori "*Industri Leader*", meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 739.50.

Prospek Dan Rencana Ke Depan

Di tengah berbagai kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan industri migas global, Pertamina menatap tahun 2019 dengan optimisme yang tinggi. Produksi dan penjualan Pertamina diyakini akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di sektor hulu, bergabungnya 13 Wilayah Kerja (WK) Eks Terminasi akan meningkatkan cadangan migas terbukti (*proven reserves*, P1) Pertamina. Terlebih 8 WK telah efektif menjadi bagian dari Pertamina sejak tahun 2018. Hal ini akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan produksi Pertamina di tahun 2019 dan seterusnya. Tidak hanya itu, produksi migas Pertamina juga akan mengalami peningkatan cukup signifikan, terutama dari WK Rokan yang merupakan WK dengan produksi minyak terbesar nasional yang akan habis kontrak pengelolaannya oleh operator lama pada tahun 2021.

Di sektor hilir, kebutuhan BBM domestik terus meningkat yang dapat diartikan sebagai peluang bagi Pertamina untuk meningkatkan penjualannya, baik di segmen industri maupun ritel. Namun demikian, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O berimplikasi pada BBM yang didistribusikan di dalam negeri harus memenuhi standar kualitas Euro 4. Pertamina berkomitmen untuk menghadirkan BBM berkualitas tinggi di tanah air. Untuk itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM domestik dari segi kuantitas maupun kualitas ini, Pertamina melalui mega proyek kilang sedang dan akan mengembangkan 4 kilang (*Refinery Development Master Plan* atau disingkat RDMP) serta membangun 2 kilang baru (*new grass root refinery* atau disingkat NGRR). Keseluruhan mega proyek ditargetkan selesai pada tahun 2025 dengan kapasitas pengolahan kilang meningkat dari 1,3 juta barrel per hari menjadi 2 juta barrel per hari dan menghasilkan BBM dengan standar Euro 5.

Namun demikian, dalam rangka menghadirkan BBM berkualitas tinggi, Pertamina juga memperhatikan terpenuhinya komponen Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah menetapkan target Bauran Energi Nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional, di mana proporsi EBT meningkat secara bertahap, yaitu 5% pada tahun 2015, 23% pada tahun 2025, dan 31% pada tahun 2050. Kerja keras dan komitmen kuat dari berbagai pihak diperlukan mengingat capaian Bauran Energi Nasional saat ini cukup jauh dari target. Namun demikian, Pertamina sebagai perusahaan energi nasional mendukung dan berkomitmen penuh pengembangan EBT. EBT Pertamina yang paling signifikan kemajuan pengembangannya adalah energi panas bumi yang dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Komitmen pemerintah untuk menyediakan bahan bakar alternatif juga diwujudkan dengan kebijakan pendistribusian bahan bakar nabati. Sesuai jalan peta penyediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel pemerintah, pada tahun 2018 Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Niaga Umum BBM (BU BBM) telah memenuhi target suplai dan pendistribusian bahan bakar nabati jenis biodiesel 20% (B20) ke pasar ritel maupun industri dengan total volume 16 juta kilo liter. Dengan penerapan B20, Pertamina berhasil mengurangi impor Solar cukup signifikan hingga akhir 2018. Di tahun 2020 pemerintah menargetkan penerapan B30. Peta jalan pemerintah yang cukup agresif ini berpotensi mengurangi impor Solar Pertamina lebih besar lagi, sekaligus menciptakan peluang bagi Pertamina untuk mengembangkan kilang produksi bahan bakar nabati *(green refinery)*.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri juga memberikan peluang bagi untuk menghemat biaya angkut minyak mentah impor yang selama ini dilakukan Pertamina.

Upaya lain untuk menuju pengembangan energi ramah lingkungan adalah dengan mengoptimalkan bahan bakar gas. Di dalam negeri, permintaan terhadap gas sebagai energi fosil yang lebih ramah lingkungan diproyeksikan akan terus meningkat. Proyeksi tersebut berkaca pada mega proyek pengembangan kilang dan pembangunan kilang baru yang dilakukan oleh Pertamina hingga 5 sampai 6 tahun ke depan akan menyerap gas dalam volume cukup besar. Dengan telah terintegrasinya PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) dengan Pertamina melalui *holding* BUMN migas, semakin terwujud integrasi infrastruktur gas, sekaligus menghemat biaya modal dan operasional. Kondisi ini menciptakan peluang bagi Pertamina untuk mengintegrasikan bisnis hulu dan hilir gas.

Dalam bisnis gas alam cair (LNG), kompetensi dan pengalaman yang dimiliki Pertamina menciptakan peluang untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Bila selama ini pasar tradisional LNG Pertamina adalah China, Jepang, dan Taiwan, saat ini Pertamina tengah mencari pasar LNG ke Asia Selatan dan Afrika. Ditandatanganinya kesepakatan pasokan LNG dengan Petrobangla Bangladesh pada tahun 2018 yang diinisiasi oleh pemerintah kedua negara menjadi pintu akses Pertamina untuk memperluas pasar di kawasan tersebut.

KELANGSUNGAN USAHA

Tahun 2018, tidak terdapat faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Pertamina. Kondisi lingkungan internal dan eksternal Perseroan berada dalam kondosi yang cukup baik bahkan mengalmi tren peningkatan.

Manajemen Pertamina telah melakukan sejumlah langkah antisipatif untuk mengurangi dan mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi Perseroan dengan menerapkan sistem manajemen risiko yang baik. Manajemen Pertamina telah menetapkan sejumlah faktor yang dapat berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Pertamina, antara lain:

Fluktuasi Harga Minyak Mentah Dunia

Sebagai industri komoditas, bisnis minyak dan gas sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia sebagian besar dipengaruhi oleh kesetimbangan antara pasokan dan permintaan dunia terhadap komoditas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasokan dan permintaan minyak mentah dunia antara lain transisi penggunaan bahan bakar fosil ke EBT yang terjadi di sejumlah negara yang menyebabkan permintaan terhadap minyak mentah menurun; faktor geopolitik seperti sanksi Amerika Serikat terhadap Iran dan Venezuela, di mana kedua negara ini termasuk produsen minyak mentah dunia yang cukup besar; dan pertumbuhan ekonomi baik di negara-negara maju maupun negara *emerging markets* yang mempengaruhi permintaan atas pasokan minyak dan gas maupun energi secara umum.

Average Crude Oil Spot Price Forecasts

Average spot prices for UK Brent, Dubai, and West Texas Intermediate (WTI)

Word Bank: Averange Crude Oil Crude Projections
$/bbl

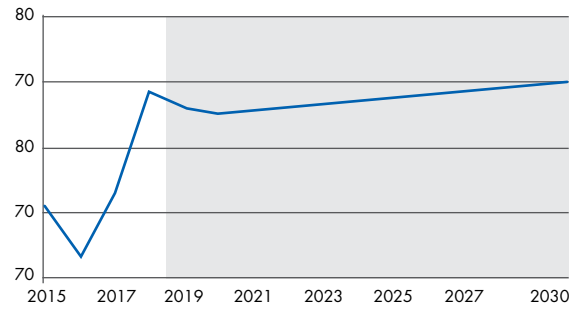

Year	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
$/bbl	96.24	50.75	42.81	52.81	68.35	66.00	65.00	65.48	65.97

Source: World Bank Commodity Forecast Price Data, April 2019

IMF : Average Crude Oil Price Projections
$/bbl

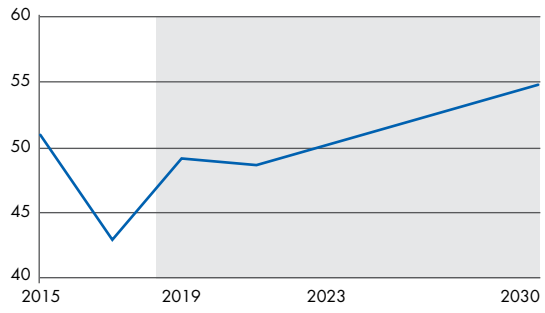

	Units	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
$/bbl	$/bbl	96.25	50.79	42.84	49.01	48.63	50.33	51.83	53.33

Source: IMF Commodity Price Forecasts, July 2017

Sumber: https://knoema.com/yxptpab/crude-oil-price-forecast-2019-2020-and-long-term-to-2030

Nilai Tukar Mata Uang Asing

Mengingat Pertamina masih melakukan impor baik minyak mentah, LNG, maupun produk minyak dan gas, maka Pertamina sangat terekspos dengan perubahan nilai tukar rupiah terhadap USD.

STRATEGI PERTAMINA UNTUK KEBERLANJUTAN USAHA

Kontrak Jangka Panjang

Untuk meminimalisir terekspos dengan risiko fluktuasi harga minyak mentah, Pertamina melakukan kontrak jangka Panjang untuk pembelian minyak mentah karena harga ditentukan pada saat tanggal pembelian.

Mitigasi Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Mitigasi risiko nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dilakukan Pertamina dengan cara melakukan lindung nilai. Rasio lindung nilai minimum ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank. Mitigasi lain yang dilakukan Pertamina adalah dengan membuat analisa secara berkala dampak melemah dan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap USD terhadap keuangan perusahaan.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

"

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam operasional Pertamina.

Masyarakat tradisional Yogyakarta tengah adu ketangkasan memanah. Gaya memanah khas Mataram Yogyakarta ini berbeda dengan olah raga panahan modern terutama dari bentuk busur panah, para pemainnya harus mengenakan busana tradisional dan duduk bersila. Olah raga tradisional yang disebut jemparingan ini memiliki filosofi, bahwa jemaparingan bukan sekadar olah raga namun juga seni mengolah rasa agar tenang dan fokus.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*/GCG)

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
▸ Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Tata Kelola Peusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG (*Transparency Accountability, Responsibility, Independence, Fairness)*. Prinsip-prinsip GCG tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja Perusahaan. Penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan, pemantauan dan penilaian risiko usaha, memaksimalkan kinerja serta pengembangan budaya kerja di lingkungan Perusahaan.

Bagi Pertamina, penerapan GCG tidak hanya sekadar melaksanakan kewajiban, namun merupakan suatu kebutuhan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertamina terus mengembangkan GCG selaras dengan *best practice* untuk memaksimalkan nilai Perusahaan, melaksanakan kegiatan usaha yang efektif dan efisien, pengelolaan Perusahaan yang profesional dan mandiri, menciptakan pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan berdasarkan pada nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan perlindungan dan perlakukan adil bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara maksimal, serta memberdayakan energi untuk inovasi yang berkelanjutan.

Pertamina optimis dengan komitmen dan kepatuhan terhadap penerapan seluruh prinsip GCG, dapat menjamin pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap Perusahaan. Sepanjang tahun 2018, implementasi GCG Pertamina yang telah dilakukan antara lain:

1. Menerapkan GCG *Soft Structure* yang terdiri dari:
   a. *Board Manual* (komitmen antara Direksi dan Dewan Komisaris)
   b. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*)
   c. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*)
   d. Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)
   e. Pedoman Gratifikasi
   f. Tata Kerja Organisasi (TKO) *Whistleblowing System*
2. Melakukan evaluasi dan menyampaikan rekomendasi atas hasil *assessment* GCG Pertamina Tahun 2017 kepada fungsi terkait dan Organ Perseroan terkait.
3. Melakukan *assessment* terhadap penerapan GCG di Pertamina untuk periode 2018.
4. Mengelola *Whistle Blowing System* yang optimal disertai dengan tindak lanjut melalui penelaahan awal atas laporan yang diterima.
5. Mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk para pejabat yang merupakan wajib lapor di Pertamina.
6. Menyampaikan terkait GCG di lingkungan Pertamina secara internal dan eksternal
7. Melakukan internalisasi mengenai perangkat GCG dan program-program kerja terkait GCG dan *Compliance*.
8. Mengimplementasikan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal.
9. Melaksanakan kegiatan usaha dan kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang jelas dan transparan.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaannya, Pertamina mengacu pada kebijakan, peraturan-peraturan BUMN di antaranya Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo. No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, serta Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, sebagai langkah Pertamina untuk mengimplementasikan Pasal 44 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 dalam melakukan pengukuran (penilaian dan evaluasi) terhadap penerapan GCG di Pertamina.

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai BUMN, Pertamina berkomitmen untuk menguatkan kerangka tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Prinsip-prinsip GCG diterapkan ke dalam seluruh sistem tata kerja perusahaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh Insan Pertamina. Penerapan GCG di Pertamina tidak lagi sebagai sesuatu yang bersifat *mandatory* melainkan sudah menjadi budaya dan kebutuhan dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari mulai dari manajemen puncak hingga pekerja di lapangan.

Komitmen Pertamina untuk menjadi perusahaan yang bersih dan bebas korupsi sebagai suatu rangkaian *Road Map* BUMN Bersih terangkum dalam rangkaian program-program kerja *Compliance* seperti: (i) implementasi *Whistle Blowing System* (WBS) berikut tindak lanjut dan evaluasinya, (ii) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), (iii) Unit Pengendali Gratifikasi dan program-program edukasi lainnya seperti (i) pelaksanaan sosialisasi/internalisasi GCG bagi calon pekerja baru, manajemen baru termasuk anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi Pertamina yang baru didirikan/bergabung dengan Pertamina Group, pembuatan *campaign* GCG sebagai reminder atas pentingnya perilaku berintegritas dalam bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Pertamina juga menjadi *pilot project* dalam berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti pembentukan budaya Profesional Berintegritas (PROFIT) dan Koordinasi Supervisi Pengelolaan Sektor Energi.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PROSEDUR PELAKSANAAN

Sebagai bagian dari proses penerapan GCG yang berkelanjutan, Pertamina melaksanakan penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan dari tahun ke tahun guna memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG terhadap praktik kerja terbaik di lingkungan Pertamina. Adapun salah satu tujuan dari penilaian atas penerapan GCG adalah untuk mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Pertamina.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Dengan mengacu pada parameter yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, kriteria yang digunakan sebagai indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG meliputi (i) komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan; (ii) Pemegang Saham dan RUPS; (iii) Dewan Komisaris; (iv) Direksi; (v) Pengungkapan Informasi dan Transparansi; (vi) serta Aspek Lainnya.

Penilaian atas kinerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) setiap tahunnya dilakukan oleh *assessor*/penilai independen. Untuk tahun 2018, penilaian tersebut dilakukan oleh PT RSM Indonesia Konsultan.

HASIL PENILAIAN

Hasil Penilaian GCG Pertamina pada tahun 2018 mencapai skor 92,375% sedangkan tahun sebelumnya sebesar 91,971%.

No	Aspek Pengujian/ Indikator/ Parameter	Bobot	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7.000	96	
2	Pemegang Saham dan RUPS	9.000	95	
3	Dewan Komisaris	35.000	92	
4	Direksi	35.000	91	
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9.000	90	
6	Aspek Lainnya	5.000	100	
Skor Capaian Keseluruhan			92	Sangat Baik

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN

Rekomendasi Hasil Penilaian:

1. Melakukan *review* dan penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur perusahaan;
2. Memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan dilaksanakan secara konsisten;
3. Mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan sehubungan penerapan praktik tata kelola secara memadai; dan
4. Memperbaiki pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola perusahaan di Pertamina terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu, Pertamina membentuk organ pendukung yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Manajemen Risiko, Sekretaris Perseroan, Fungsi *Compliance*, serta Satuan Pengawasan Intern. Seluruh organ tata kelola perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan ketentuan lainnya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan.

1 Prinsip GCG	2 Struktur Tata Kelola	3 Proses Tata Kelola	4 Hasil Tata Kelola
Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness	RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Manajemen Risiko, Sekretaris Perseroan, Fungsi *Compliance*, serta Satuan Pengawasan *Intern*.	Pelaksanaan RUPS; pelaksanaan fungsi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi; pelaksanaan kebijakan dan strategi sejalan dengan Visi dan Misi; serta pelaksanaan program CSR dan PKBL.	Kesinambungan usaha; efektivitas dan efisiensi bisnis; ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan, serta kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Penyelenggaraan RUPS merupakan kewajiban Perusahaan sebagai wadah pemegang saham untuk mengambil keputusan penting, dengan memerhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di mana keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan.

Dalam acara RUPS tersebut, juga dapat dimasukkan usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Perseroan hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut dan keputusan RUPS atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.

RUPS Pertamina terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan. Dalam rapat tersebut, Direksi menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk proyeksi Laporan Keuangan serta hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam rapat tersebut, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan, Usulan penggunaan laba bersih Perseroan, serta hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perusahaan.

DASAR PENYELENGGARAAN RUPS:

Penyelenggaraan RUPS Pertamina didasari oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara
5. Keputusan Menteri BUMN No Kep.-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara
6. Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Perubahan No. 29 tahun 2018 tanggal 13 April 2018, yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani Sarjana Hukum dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0008395.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 13 April 2018. Perubahan dilakukan pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai Modal, Pasal 11 ayat (2) mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi. Perubahan ini tertuang dalam Surat Kementerian BUMN No. S-217/MBU/04/2018 tanggal 11 April 2018.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, Perseroan menyelenggarakan RUPS sebanyak 29 kali, yaitu RUPS Tahunan sebanyak 2 kali dan RUPS Luar Biasa sebanyak 27 kali. Rincian dari penyelenggaraan RUPS tersebut adalah sebagai berikut :

1. RUPS Tahunan

   Tahun 2018, Pertamina menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 kali, yaitu RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 dan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2017.

   a. RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018

      Dikarenakan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 tidak terselenggara pada tahun 2017 karena adanya pergantian Deputi Teknis yang membidangi PT Pertamina (Persero) di akhir bulan Desember 2017, maka RUPS RKAP 2018 diadakan pada bulan Januari 2018.

      RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 PT Pertamina (Persero) telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	Rabu, 17 Januari 2018
Waktu	14.00 – 16.00 WIB
Tempat	Kementerian BUMN, Lantai 9 Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat
Pimpinan	Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
Kuasa Pemegang Saham	Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN

Agenda dari RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Agenda	Keterangan
1	Agenda 1	Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2018.
2	Agenda 2	Persetujuan indikator aspek operasional PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.
3	Agenda 3	Pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dengan Pemegang Saham PT Pertamina (Persero).
4	Agenda 4	Persetujuan penarikan Kredit Modal Kerja dan penarikan pendanaan eksternal.
5	Agenda 5	Persetujuan pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Jenis BBM Tertentu (JBT) serta penugasan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) oleh PT Pertamina (Persero).

Pemegang Saham telah menyetujui dan mengesahkan seluruh agenda RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018. Hasil keputusan RUPS telah disahkan berdasarkan Akta No 8 tanggal 17 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH.

b. RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PT Pertamina (Persero)
RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PT Pertamina (Persero) telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	Rabu, 02 Mei 2018
Waktu	09.00 – 12.00 WIB
Tempat	Kementerian BUMN, Lantai 6 Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat
Pimpinan RUPS	Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
Kuasa Pemegang Saham	Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN

Adapun agenda dari RUPS tersebut adalah sebagai berikut :

No	Agenda	Keterangan
1	Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2017, Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017, serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.
2	Agenda 2	Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017.
3	Agenda 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
4	Agenda 4	Penetapan Tantiem dan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja tahun buku 2017, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas tahun 2018.
5	Agenda 5	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pemegang Saham telah menyetujui dan mensahkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta No. 03 tanggal 8 Mei 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pertamina (Persero) yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Jennis Ishak, SH

c. RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019
Pada tahun 2018, tidak terselenggara RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 dan akan diselenggarakan pada bulan Januari 2019.

2. RUPS Luar Biasa

Pada tahun 2018, terdapat 27 kali RUPS Luar Biasa yang seluruhnya dilakukan secara sirkuler, dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	8 Januari 2018	Laporan Akhir Tahun Mengenai Tantangan dan Pencapaian Strategis Pertamina Periode 2017
2	22 Januari 2018	Persetujuan Pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan
3	22 Januari 2018	Arahan Rencana Kerja Anggaran PKBL Tahun 2018
4	7 Februari 2018	Pencalonan Direktur Utama Anak Perusahaan
5	8 Februari 2018	Audit oleh KAP terhadap Pelaksanaan PKBL Tahun 2017
6	9 Februari 2018	Persetujuan RUPS atas Pelaksanaan investasi proyek
7	9 Februari 2018	Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
8	19 Februari 2018	Pengusulan Pengangkatan Calon direksi Anak Perusahaan
9	21 Februari 2018	Tanggapan atas Laporan Progress proyek
10	12 Maret 2018	Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Bergerak Direktorat Pemasaran dan Direktorat SDM & Umum PT Pertamina (Persero)
11	11 April 2018	Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham dan Persetujuan Prinsip Integrasi PT Pertamina Gas ke dalam PT Perusahaan Gas Negara Tbk
12	11 April 2018	Persetujuan Peningkatan Modal Dasar, Penambahan Modal Disetor, serta Perubahan AD PT Pertamina (Persero)
13	20 April 2018	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
14	9 Mei 2018	Pelimpahan Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Seri A kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak PT Perusahaan Gas Negara Tbk
15	15 Mei 2018	Laporan progress proyek
16	30 Mei 2018	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
17	7 Juni 2018	Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Pertamina
18	29 Juni 2018	Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Kesehatan Keuangan PT Pertamina (Persero)
19	19 Juli 2018	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Perusahaan Gas Negara Tbk
20	29 Agustus 2018	Pengalihan Tugas, Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
21	7 September 2018	Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)
22	7 September 2018	Perubahan Pengurus PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)
23	13 September 2018	Pemberhentian, Pengalihan Penugasan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
24	1 Oktober 2018	Persetujuan RKAP Revisi Tahun 2018 PT Pertamina (Persero)
25	9 November 2018	BUMN *University* untuk Pengembangan SDM seluruh BUMN
26	3 Desember 2018	Laporan *progress* proyek
27	27 Desember 2018	Persetujuan Divestasi 51% Saham PT Pertagas

Di luar RUPS Luar Biasa di atas, Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan para pemegang saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa (Keputusan Sirkuler) sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali. Berdasarkan Pasal 91 UU no. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permeneg BUMN no. Per-01/MBU/2011, keputusan yang diambil dengan cara tersebut sah dan mengikat seluruh pemegang saham, Perseroan dan pihak-pihak yang tercantum dalam keputusan tersebut.

REALISASI HASIL KEPUTUSAN RUPS

Pertamina telah merealisasikan seluruh hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2018, dengan demikian tidak ada keputusan RUPS yang belum direalisasikan per 31 Desember 2018.

RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2017, Perseroan menyelenggarakan RUPS sebanyak 14 kali, yaitu 1 kali RUPS Tahunan dan 13 kali RUPS Luar Biasa. Ada pun hasil keputusan RUPS tersebut adalah sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

Pada tahun 2017 Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan Laporan Tahunan tahun buku 2016 pada hari Rabu, 16 Maret 2017 bertempat di Gedung Kementerian BUMN Lantai 7, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Hasil RUPS tersebut juga dan telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 20 tentang Berita acara RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 PT Pertamina (Persero) yang disahkan oleh Notaris Lenny Jennis Ishak, SH tanggal 16 Maret 2017.

Adapun agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

No	Agenda	Keterangan
1	Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2016, Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016, serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.
2	Agenda 2	Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016.
3	Agenda 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016.
4	Agenda 4	Penetapan Tantiem dan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja tahun buku 2016, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas tahun 2017.
5	Agenda 5	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pada tahun 2017, tidak terselenggara RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018, dikarenakan pergantian Deputi teknis yang membidangi PT Pertamina (Persero) di akhir bulan Desember 2017.

RUPS LUAR BIASA

Pada tahun 2017, Pertamina menyelenggarakan 13 kali RUPS Luar Biasa yang seluruhnya dilakukan secara sirkuler, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Agenda
1	5 Januari 2017	Usulan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris perusahaan afiliasi
2	5 Januari 2017	Usulan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina Retail
3	5 Januari 2017	Usulan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina Gas
4	3 Februari 2017	Pemberhentian dan Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
5	16 Maret 2017	Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
6	3 Mei 2017	Persetujuan Tindakan Direksi untuk Mengikutsertakan PT Pertamina (Persero) dalam Program *Tax Amnesty* (TA) Tahun 2017
7	12 Juni 2017	Persetujuan Penghapusan dan Pelepasan salah satu Aset Kapal
8	15 Agustus 2017	Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
9	12 September 2017	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
10	17 November 2017	Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2017 PT Pertamina (Persero)
11	27 November 2017	Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
12	8 Desember 2017	Persetujuan/Pengesahan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pertamina (Persero) 2017
13	11 Desember 2017	Permohonan Persetujuan RUPS atas Tindakan Direksi dalam Penambahan Penyertaan Modal PT Pertamina (Persero) kepada PT Pertamina Power Indonesia

Di luar RUPS Luar Biasa di atas, Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan para pemegang saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa (Keputusan Sirkuler) sebanyak 21 (dua puluh satu) kali. Berdasarkan Pasal 91 UU no. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permeneg BUMN No. Per-01/MBU/2011, keputusan yang diambil dengan cara tersebut sah dan mengikat seluruh pemegang saham, Perseroan dan pihak-pihak yang tercantum dalam keputusan tersebut.

HASIL KEPUTUSAN RUPS

Pertamina telah melaksanakan seluruh hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2017, dengan demikian tidak ada keputusan RUPS yang belum direalisasikan per 31 Desember 2017.

DEWAN KOMISARIS

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Sebagai salah satu organ Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki fungsi utama untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perusahaan dan apabila dinilai perlu, dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2018, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris. Berdasarkan RUPS tanggal 30 Mei 2018, Saudara Edwin Hidayat Abdullah diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris dan menetapkan Saudara Ego Syahrial & Saudara Ahmad Bambang sebagai Komisaris, sehingga jumlah anggota Komisaris Pertamina menjadi 7 (tujuh) orang. Pada 31 Desember 2018, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Penunjukan	Periode Jabatan
Tanri Abeng	Komisaris Utama / Komisaris Independen	Penetapan sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.KEP-60/MBU/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 dan Penetapan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-254/MBU/11/2016 tanggal 14 November 2016	6 Mei 2015 – 31 Desember 2018
Arcandra Tahar	Wakil Komisaris Utama	Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-254/MBU/11/2016 tanggal 14 November 2016	14 November 2016 – 31 Desember 2018
Sahala Lumban Gaol	Komisaris	Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-58/MBU/05/2015 tanggal 6 Mei 2015	6 Mei 2015 – 31 Desember 2018
Suahasil Nazara	Komisaris	Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-58/MBU/05/2015 tanggal 6 Mei 2015	6 Mei 2015 – 31 Desember 2018
Alexander Lay	Komisaris Independen	Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-194/MBU/09/2017 tanggal 12 September 2017 dan Penetapan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-142/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018	12 September 2017 – 31 Desember 2018
Ahmad Bambang	Komisaris	Keputusan Menteri selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-142/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018	30 Mei 2018 – 31 Desember 2018
Ego Syahrial	Komisaris	Keputusan Menteri selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-142/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018	30 Mei 2018 – 31 Desember 2018

Mengacu pada UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 27, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero). Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015.

BOARD MANUAL DAN PEDOMAN TATA TERTIB KERJA

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, *Board Manual*, serta Pedoman Tata Tertib Kerja. Secara garis besar, *Board Manual* Dewan Komisaris mengatur beberapa hal sebagai berikut:

Isi dari pedoman tersebut antara lain mengatur tentang:

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
4. Etika Jabatan Dewan Komisaris
5. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
6. Wewenang Dewan Komisaris
7. Hak Dewan Komisaris
8. Rapat Dewan Komisaris
9. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
10. Organ Pendukung
11. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi

Selain *Board Manual*, yang mengatur hubungan tata kerja seluruh organ Perusahaan terutama mencakup Direksi dan Dewan Komisaris serta organ pendukungnya, Dewan Komisaris juga memiliki Pedoman Tata Kerja *(Board Charter)*. Dewan Komisaris telah menetapkan Pedoman Tata Kerja di lingkungan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.15/KPTS/K/DK/2014 tanggal 19 Juni 2014. Dokumen tersebut dievaluasi setiap tahun sesuai perubahan peraturan yang berlaku dan kebutuhan Perseroan. Dari 2015 sampai dengan pertengahan November 2016 masih digunakan pedoman tersebut. Pada 18 November 2016, dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja Dewan Komisaris saat ini, maka Dewan Komisaris merasa perlu untuk menyesuaikan dan menetapkan kembali Pedoman Tata Kerja di lingkungan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.012/KPTS/K/DK/2016 yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan, memberikan saran kepada Direksi, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris juga memiliki kewajiban untuk:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta bertindak profesional.
2. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak/golongan tertentu.
4. Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris.
5. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
8. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
9. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penunjukan Auditor Eksternal yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

10. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun.

Independensi Dewan Komisaris Perusahaan juga dapat dilihat dari kepemilikan saham dan rangkap jabatannya, di mana tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di Perusahaan dan perusahaan lain yang berhubungan dengan Perusahaan, serta tidak merangkap jabatan di perusahaan.

Kriteria Independensi	Tanri Abeng	Arcandra Tahar	Sahala Lumban Gaol	Suahasil Nazara	Alexander Lay	Ahmad Bambang	Ego Syahrial
Bukan Pemegang Saham mayoritas atau pejabat pada institusi Pemegang Saham mayoritas atau terasosiasi langsung dengan Pemegang Saham mayoritas	√	×	×	×	√	×	×
Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan atau afiliasinya	√	√	√	√	√	√	√
Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perseroan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya	√	√	√	√	√	√	√
Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkungan Perseroan	√	√	√	√	√	√	√

Independensi Dewan Komisaris juga dapat dilihat dari rangkap jabatan yang masing-masing anggota Dewan Komisaris yang pada tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Nama	Jabatan Internal	Jabatan Eksternal
Tanri Abeng	Komisaris Utama / Komisaris Independen	Rektor Tanri Abeng University
Arcandra Tahar	Wakil Komisaris Utama	Wakil Menteri ESDM
Sahala Lumban Gaol	Komisaris	Staf Khusus Menteri BUMN
Suahasil Nazara	Komisaris	Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
Alexander Lay	Komisaris Independen	Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara
Ahmad Bambang	Komisaris	Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN
Ego Syahrial	Komisaris	Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam tahun 2018, di lingkungan Dewan Komisaris telah dilakukan :

1. Rapat yang diikuti Dewan Komisaris dan Komite adalah 2 kali RUPS, 19 kali Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi, 9 kali Rapat Internal Dewan Komisaris, dan Rapat Komite sebanyak 69 kali.
2. Dewan Komisaris dan Komite telah melakukan kunjungan kerja sebanyak 24 kali di dalam negeri, antara lain ke RU-II Dumai, Sei Pakning & TBBM Dumai, MOR I Medan, MOR II Palembang, MOR V Surabaya & Bali, MOR VII Makasar, RU V & Proyek RDMP Balikpapan. Selain itu kunjungan kerja 6 kali di luar negeri, antara lain ke proyek Pertamina di Aljazair & Tanzania, USA, dan Singapura.

Dengan memerhatikan isu-isu penting yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris, maka dengan dukungan Komite Penunjang (Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko), Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan pengawasan, antara lain :

Program Kerja Dewan Komisaris untuk Pengawasan Bidang Audit yang telah terealisasi adalah:

1. Telah melakukan *monitoring* dan evaluasi atas realisasi kinerja Internal Audit Tahun 2018 dan Rencana Tahun 2019, serta memberikan arahan yang diperlukan kepada Direksi.
2. Telah melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh KAP tahun 2017, serta telah mengusulkan penetapan KAP untuk audit Laporan Keuangan dan Laporan PKBL PT Pertamina (Persero) Tahun 2018.
3. Telah melakukan kajian dan memberikan tanggapan atas usulan RKAP Tahun 2018, Laporan Interim 2018, Laporan Keuangan 2017, *Annual Report* 2017 dan *Sustainability Report* 2017, serta LHEK dan PSA62.
4. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas Realisasi Pencapaian RKAP 2018 dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2018, serta memberikan saran / arahan kepada Direksi sesuai keperluan.
5. Telah melakukan *monitoring* dan evaluasi, serta memberikan arahan kepada Direksi, atas beberapa permasalahan antara lain yang terkait dengan investasi, implementasi ICoFR & IFRS, manajemen aset, pengelolaan anak perusahaan, dan WBS.

Program Kerja Dewan Komisaris untuk Pengawasan Bidang Investasi & Manajemen Risiko yang telah terealisasi adalah :

1. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja proyek investasi dalam RKAP 2018 dan proyek investasi susulan Tahun 2018.
2. Memantau dan evaluasi atas kinerja kegiatan operasional dan pelaksanaan investasi pada RKAP 2018.
3. Pemantauan dan penelaahan terhadap kebijakan dan penerapan manajemen risiko Perusahaan secara terintegrasi.

Program Kerja Dewan Komisaris untuk Pengawasan Bidang Nominasi dan Remunerasi yang telah terealisasi adalah :

1. Mengusulkan gaji/honorarium bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 dan Tantiem 2017 untuk ditetapkan oleh RUPS.
2. *Monitoring* dan evaluasi, serta memberikan persetujuan/tanggapan atas usulan penggantian Direksi - Komisaris Anak Perusahaan dan beberapa jabatan strategis di Direktorat.
3. *Monitoring* dan evaluasi, serta memberikan persetujuan/tanggapan atas permasalahan yang terkait organisasi.

KUNJUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dapat melakukan kunjungan ke lokasi operasional Perseroan. Pada tahun 2018, Dewan Komisaris melakukan kunjungan kerja sebagai berikut :

Tabel Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Dalam Negeri Tahun 2018

No	Tanggal Event	Nama Anggota	Kegiatan
1	3 - 5 Apr 2018	Tanri Abeng	Kunjungan ke MOR V Bali dan MOR VII Makasar
2	9 - 11 Apr 2018	Tanri Abeng	Menghadiri Acara Indonesia Africa Forum di Nusa Dua Bali
3	25 Mei 2018	Arcandra Tahar	Bersama Dir. Pms.Retail mendampingi Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Makasar
4	16 - 18 Jun 2018	Tanri Abeng	Mendampingi Wapres RI kunjungan di Makasar
5	11 - 13 Sep 2018	Tanri Abeng	Kunjungan Dinas Dewan Komisaris ke Pertamina Balikpapan dan PT Badak NGL
6	11 - 12 Sep 2018	Ego Syahrial	Kunjungan Dinas Dewan Komisaris ke Pertamina Balikpapan
7	21 - 23 Sep 2018	Tanri Abeng	Melakukan Kunjungan ke Pertamina MOR V di Bali
8	2 - 3 Oct 2018	Sahala Lumban Gaol	Menghadiri Undangan dari Menteri BUMN RI pada acara Peresmian Pembukaan Indonesia Business & Development Expo 2018 di Grand City Surabaya
9	9 - 10 Oct 2018	Tanri Abeng Sahaka Lumban Gaol Suahasil Nazara	Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero) di Patra Jasa Bali (ref. No.Und-105/K/DK/2018)
10	26 - 27 Oct 2018	Sahala Lumban Gaol	Melakukan Kunjungan ke Sentra Pemberdayaan Tani (SPT) Nglanggeran di Yogyakarta
11	9 - 11 Nov 2018	Ahmad Bambang	Kunjungan Dinas ke MOR V Surabaya
12	11 - 12 Nov 2018	Tanri Abeng	Kunjungan ke MOR VII Makasar
13	21 - 23 Sep 2018	Tanri Abeng	Kunjungan ke MOR V di Bali
14	24 - 25 Nov 2018	Tanri Abeng	Kunjungan MOR II Palembang
15	5 - 8 Des 2018	Tanri Abeng Arcandra Tahar Sahala Lumban Gaol Suahasil Nazara Alexander Lay Ahmad Bambang Ego Syahrial	Retreat Dewan Komisaris dan Direksi di Bali
16	17 - 18 Des 2018	Tanri Abeng	*Speech* acara Internal Audit di Bali

Tabel Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Luar Negeri Tahun 2018

No	Tanggal Event	Nama Anggota	Kegiatan
1	2 - 8 Mar 2018	Tanri Abeng Arcandra Tahar Suahasil Nazara Edwin Hidayat Abdullah Alexander Lay	Kunjungan Lapangan ke Proyek Pertamina di Aljazair & Tanzania, dan Rapat dgn Manajemen M&P di Paris
2	11 - 12 Mei 2018 (Singapura)	Arcandra Tahar Alexander Lay	Diskusi dengan Perusahaan Migas di Singapura mengenai Petroleum Operation bersama Tim ISC
3	8 - 15 Mei 2018 (New York, USA)	Tanri Abeng	Rapat dengan Lionsgate Group Ltd tertanggal 30 April 2018
4	20 - 22 Jul 2018	Tanri Abeng	Menghadiri pertemuan dengan Datok Seri Anwar Ibrahim dan Meeting dengan NOC Turki
5	27 Sep - 3 Okt 2018	Tanri Abeng	Menghadiri pertemuan dengan Qatar Gas & Qatar Petroleum di Doha serta pertemuan dengan Maurel and Prom di Paris
6	14 - 15 Nov 2018	Tanri Abeng	Menghadiri Pertemuan dengan Presiden RI dan Dirut untuk acara ASEAN Summit di Singapura

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada SK Dewan Komisaris No.012/KPTS/K/DK/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris, Bagian VII. Mekanisme Kerja, Huruf A. Pengambilan Keputusan, intinya adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris :
   a. Tata cara pengambilan keputusan harus memenuhi ketentuan-ketentuan pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris (antara lain : ketentuan terkait dengan kuorum kehadiran, penggunaan surat kuasa).
   b. Keputusan yang dibuat dalam rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Dewan Komisaris atau Surat Keputusan atau Surat atau Memorandum yang ditandatangani oleh Komisaris yang hadir dalam rapat.
2. Pengambilan keputusan secara sirkuler dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan atau Berita Acara atau Surat atau Memorandum yang ditandatangani oleh Komisaris.
   Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Standar waktu berkisar antara 7 hari (baik) dan sampai dengan 14 hari (cukup) dan tidak boleh melebihi batas waktu 30 hari sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak usulan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris atau telah disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara tertulis disertai dengan seluruh dokumen pendukung secara lengkap untuk keputusan sirkuler.

PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS ATAS TRANSAKSI MATERIAL

Selama tahun 2018, beberapa transaksi atau tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan / tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 8 dan 10, antara lain sebagai berikut :

No	Transaksi / Tindakan Direksi	Jumlah
1	Pengambilalihan / Pelepasan Participating Interest di WK Migas	2
2	Pengambilalihan / Pelepasan saham di Anak Perusahaan / Joint Venture / Perusahaan lain	6
3	Penyertaan Modal / Tambahan Penyertaan Modal di Anak Perusahaan / Joint Venture	8
4	Pengelolaan WK Migas	11
5	Penggantian Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan	46
6	Penghapusan / Pelepasan / Optimalisasi Aset Perusahaan	12
7	Pembentukan / Likuidasi Anak Perusahaan	5
8	Struktur Organisasi Perusahaan	2
9	Global Bond / Financing	1

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali dan rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi sebanyak 19 (sembilan belas) kali.

PROGRAM PENGENALAN BAGI KOMISARIS BARU

Ketentuan mengenai Program Pengenalan bagi Komisaris Baru diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *jo.* No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.012/KPTS/K/DK/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). Program pengenalan bagi Bapak Ego Syahrial telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2018 dan Bapak Ahmad Bambang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018.

PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan, Dewan Komisaris setiap tahunnya melakukan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan/kompetensi Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2018 pelatihan, seminar dan pendidikan yang pernah diikuti Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tabel program Pelatihan untuk pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris Tahun 2018

No	Tanggal	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kegiatan
1	9 - 15 Jul 2018	Arcandra Tahar Alexander Lay	Pelatihan dari Stanford University - USA mengenai *Executive Education "Stanford Design Thinking Bootcamp : From Insights to Innovation"*

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip- prinsip GCG, hal ini tertuang pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Pasal 13 ayat 3 dan 4.

Salah satu fungsi Komisaris Independen adalah agar memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, objektif dan independen karena Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dalam arti dapat menjalankan tugas tanpa adanya tekanan dan kepentingan dari pihak manapun.

Didasari oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, komposisi Komisaris Independen paling sedikit adalah 20% dari total Komisaris Perusahaan.

KOMPOSISI DAN DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Komposisi Komisaris Independen merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN yakni paling sedikit sebanyak 20%. Melalui Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero), yang tertuang dalam SK No. 254/MBU/11/2016 tanggal 14 November 2016 menetapkan Tanri Abeng (Komisaris Utama) sebagai Komisaris Independen dan SK No.142/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 menetapkan Alexander Lay sebagai Komisaris Independen. Profil beliau telah terdapat dalam pembahasan Profil Dewan Komisaris. Dengan demikian, ketentuan komposisi 20% tersebut telah terpenuhi.

KRITERIA PENENTUAN

Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Kriteria penentuan Komisaris Independen merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Pasal 13 ayat 3 dan 4.

PERNYATAAN INDEPENDENSI

Komisaris Independen berkomitmen untuk menjunjung tinggi independensi, objektivitas dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan menghindari adanya keputusan dan kebijakan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau preferensi terhadap kepentingan salah satu pihak. Komisaris Independen turut mempertahankan reputasi Perseroan dengan menjalankan prinsip praktik GCG yang benar sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, yang tercermin dalam sikap, perbuatan dan segala kebijakan yang diambil, baik secara individual dan mufakat.

DIREKSI

Direksi bertanggung jawab terhadap kepentingan dan pengelolaan bisnis Perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dengan kegiatan Perusahaan. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

No	Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Hukum Pengangkatan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS
1	Nicke Widyawati	Direktur Utama	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
2	Dharmawan H. Samsu	Direktur Hulu	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
3	Budi Santoso Syarif	Direktur Pengolahan	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
4	Basuki Trikora Putra	Direktur Pemasaran Korporat	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
5	Mas'ud Khamid	Direktur Pemasaran Retail	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
6	Pahala N. Mansury	Direktur Keuangan	Jakarta	Surat Keputusan No. 242/MBU/09/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Pemberhentian, Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
7	Gandhi Sriwidodo	Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur	Jakarta	Surat Keputusan no. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
8	Ignatius Tallulembang	Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia	Jakarta	Surat Keputusan No. 242/MBU/09/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Pemberhentian, Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
9	Heru Setiawan	Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko	Jakarta	Surat Keputusan No. 242/MBU/09/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Pemberhentian, Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

No	Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Hukum Pengangkatan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS
10	Koeshartanto	Direktur Sumber Daya Manusia	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
11	M. Haryo Yunianto	Direktur Manajemen Aset	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

TUGAS & WEWENANG MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Direksi merupakan organ tata kelola yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Direksi bertugas menetapkan arah tujuan Perseroan, menetapkan kebijakan serta upaya-upaya pencapaiannya. Tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

DIREKTUR UTAMA

1. Sebagai *Chief Executive Officer* (CEO), memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan visi, misi, dan strategi Perseroan.
2. Memimpin para anggota Direksi dalam melaksanakan keputusan Direksi.
3. Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
4. Menentukan keputusan yang diambil apabila dalam Rapat Direksi terdapat jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya.
5. Atas nama Direksi, mengesahkan semua Surat Keputusan Direksi/Direktur Utama sesuai dengan jenis keputusan yag diatur dalam AD/ART atau ketetapan lainnya.
6. Atas nama Direksi, menunjuk pekerja atau perihal lain untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.
7. Memimpin dan mendorong terlaksananya pembentukan budaya Perusahaan, peningkatan citra, dan tata kelola Perseroan (*Good Corporate Governance*).

DIREKTUR HULU

1. Mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan bisnis hulu termasuk geothermal melalui peningkatan cadangan dan produksi secara terintegrasi dalam lingkup nasional dan internasional sesuai prinsip-prinsip *good oil engineering and operation best practices.*

DIREKTUR PENGOLAHAN

1. Mengembangkan *engineering* dan teknologi melalui riset yang terintegrasi dengan masterplan bisnis untuk mendukung daya saing dan kelangsungan bisnis perusahaan.
2. Mengembangkan, mengoptimalkan dan mengelola Megaproyek sesuai dengan masterplan dan pengembangan bisnis perusahaan secara terintegrasi sesuai dengan prinsip GCG dan *good engineering best practices.*
3. Membangun kapabilitas pengelolaan *project* strategis sesuai standar *best practices.*

DIREKTUR PEMASARAN KORPORAT

1. Menyusun strategi dan mengoptimalkan segmentasi pasar secara efektif.
2. Mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan bisnis pemasaran dan penjualan produk meliputi pengembangan pasar, ekspansi bisnis yang berorientasi B2B.

DIREKTUR LOGISTIK, SUPPLY CHAIN, DAN INFRASTRUKTUR

1. Merencanakan pengembangan infrastruktur logistik dan *supply chain* memenuhi permintaan di pasar.
2. Merencanakan dan mengelola seluruh aktivitas *supply and distribution* produk sesuai dengan kebutuhan permintaan dalam domestik.
3. Merencanakan dan melakukan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan untuk *supply and distribution* produk.

DIREKTUR MEGAPROYEK, PENGOLAHAN, DAN PETROKIMIA

1. Mengelola, mengoptimalkan, dan mengembangkan bisnis pengolahan dan petrokimia secara terintegrasi dengan fokus pada kehandalan dan efisiensi operasi sesuai prinsip-prinsip *good oil engineering and operation best practices*.

DIREKTUR PERENCANAAN, INVESTASI, DAN MANAJEMEN RISIKO

1. Mengembangkan strategi dan *masterplan* bisnis perusahaan untuk menjadi acuan sasaran kerja jangka pendek, menengah dan panjang.
2. Mengkaji dan mengevaluasi rencana investasi dan portofolio bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip bisnis dan manajemen risiko dalam mendukung daya saing dan kelangsungan bisnis perusahaan.
3. Mengembangkan *engineering* dan teknologi melalui riset yang terintegrasi dengan *masterplan* bisnis untuk mendukung daya saing dan kelangsungan bisnis perusahaan.
4. Mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan bisnis gas, *power* dan *New & Renewable Energy* (NRE) secara terintegrasi melalui pengembangan pasar dan akselerasi komersialisasi bisnis NRE dalam mendukung kelangsungan bisnis perusahaan.
5. Mengelola *Quality, System, Knowldege & Integrated Loss Management* untuk mendukung operasi dan efisiensi perusahaan.

DIREKTUR KEUANGAN

1. Mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan secara prudent, efisien dan memberi nilai tambah untuk mendukung bisnis dan rencana kerja perusahaan.
2. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif dan *accountable*.
3. Mengoptimalkan dan mengembangkan bisnis perusahaan melalui business *synergy and integration* serta pengelolaan AP/JV
4. Memastikan dan mengendalikan kesehatan Perusahaan sesuai standar akuntansi dan keuangan *best practices*.
5. mengoptimalkan dan mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung bisnis perusahaan

DIREKTUR SDM

1. Mengelola dan mengembangkan *human capital* untuk mendukung strategi bisnis dan perasional perusahaan.
2. Mengelola dan mengembangkan *talent* & infrastruktur *human capital* untuk mendukung strategi bisnis dan operasional perusahaan dengan produktifitas tinggi

DIREKTUR MANAJEMEN ASET

1. Mengembangkan strategi dan pengelolaan asset penunjang usaha secara optimal, efisien dan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.
2. Mengelola, mengoptimalkan dan mengintegrasikan proses *procurement* secara Pertamina Group.

INDEPENDENSI DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertindak secara indepeden dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun hal ini dapat juga terlihat dari kepemilikan saham anggota Direksi di dalam Perusahaan atau rangkap jabatan anggota Direksi dalam Perusahaan.

Tabel berikut menunjukan Independensi Direksi dalam Perusahaan:

Kriteria Independensi	Nicke Widyawati	Dharmawan H. Samsu	Budi Santoso Syarif	Basuki Trikora Putra	Mas'ud Khamid	Pahala N. Mansury	Ignatius Tallulembang	Heru Setiawan	Koesartanto	M. Haryo Yunianto
Bukan Pemegang Saham mayoritas atau pejabat pada institusi Pemegang Saham mayoritas atau terasosiasi langsung dengan Pemegang Saham mayoritas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan atau afiliasinya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perseroan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkungan Perseroan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PENGUNGKAPAN PROSEDUR, INDIKATOR DAN DASAR PENETAPAN REMUNERASI

Prosedur dan indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian BUMN dan tidak berada pada kewenangan Perusahaan. Adapun dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER–04/MBU/2014 jo No.PER-01/MBU/06/2017 jo No.PER-06/MBU/06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri BUMN SK-148/MBU/05/2018.

Secara khusus, besaran remunerasi ditetapkan dalam Surat Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media an. Menteri BUMN No.SR-605/MBU/D3/06/2018 perihal Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) Tahun 2018.

STRUKTUR DAN KOMPONEN REMUNERASI

Stuktur dan komponen remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kinerja.

1. Gaji
   a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero).
   b. Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan, yaitu sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
   c. Honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.
   d. Honorarium Wakil Komisaris Utama adalah sebesar 42,5% dari Direktur Utama.
   e. Honorarium Anggota Dewan Komisaris adalah 90% dari honorarium Komisaris Utama.
2. Tunjangan
   Untuk Direksi, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan. Sedangkan untuk Dewan Komisaris, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan.
3. Fasilitas
   Fasilitas yang diterima oleh Direksi terdiri dari fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, fasilitas bantuan hukum. Sedangkan yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.
4. Tantiem/Insentif Kinerja Ketentuan dalam pemberian tantiem ini, sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri.

Struktur dan komponen remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina tidak terdapat pemberian bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal kekeluargaan maupun keuangan dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal kekeluargaan maupun keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham.

Uraian	Hubungan Kekeluargaan			Hubungan Bisnis		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Dewan Komisaris						
Tanri Abeng	x	x	x	x	x	x
Arcandra Tahar	x	x	x	x	x	x
Sahala Lumban Gaol	x	x	x	x	x	x
Suahasil Nazara	x	x	x	x	x	x
Alexander Lay	x	x	x	x	x	x
Ahmad Bambang	x	x	x	x	x	x
Ego Syahrial	x	x	x	x	x	x
Direksi						
Nicke Widyawati	x	x	x	x	x	x
Dharmawan H. Samsu	x	x	x	x	x	x
Budi Santoso Syarif	x	x	x	x	x	x
Basuki Trikora Putra	x	x	x	x	x	x
Mas'ud Khamid	x	x	x	x	x	x
Pahala N. Mansury	x	x	x	x	x	x
Gandhy Sriwidodo	x	x	x	x	x	x
Ignatius Tallulembang	x	x	x	x	x	x
Heru Setiawan	x	x	x	x	x	x
Koeshartanto	x	x	x	x	x	x
M. Haryo Yunianto	x	x	x	x	x	x

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Secara khusus Pertamina tidak memiliki kebijakan dalam menentukan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dalam menentukan keberagaman komposisi tersebut merupakan hak Pemerintah selaku Pemegang Saham.

Saat ini, komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina mencakup keragaman bidang keahlian, pendidikan dan pengalaman terkait dengan kegiatan utama Pertamina, keuangan, ekonomi dan tata kelola perusahaan.

Meski demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2018 dari aspek keahlian memiliki keberagaman latar belakang pendidikan di bidang teknik, manajemen, keuangan maupun bisnis yang dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dari aspek seperti karier dan pengalaman kerja, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direktur memiliki jalur pengembangan karier yang juga berbeda, seperti di bidang perminyakan dan energi, pendidikan, perbankan, dan teknologi informasi, baik swasta maupun pemerintahan. Dari segi usia, anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga memiliki rentang usia yang berbeda.

KOMITE AUDIT

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

Nama	Agus Yulianto
Jabatan	Anggota
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	57 tahun
Domisili	Tangerang Selatan
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 023/KPTS/K/DK/2015
Riwayat Pendidikan	• Master of Accountancy, Case Western Reserve University, Cleveland OH, USA (1993). • Diploma IV Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Jakarta (1991)
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Komite Audit PT Telkom Tbk, tahun 2010- 2015 • Whistle Blower Protection Officer (WPO) tahun 2010- 2015 • Head Financial Management Specialist , Multi Donor Fund dan World Bank di Aceh (2009-2010). • Konsultan Internal Audit dan penyedia jasa pelatihan bidang akuntansi keuangan dan internal auditing. tahun 2000 - 2009 • Bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1993-1999)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Bonar Lumban Tobing
Jabatan	Anggota
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	59 tahun
Domisili	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.023/KPTS/K/DK/2015
Riwayat Pendidikan	• Program MBA jurusan Finance di Business School Rutgers The State University of New Jersey, USA (1993) • Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia (1986)
Riwayat Pekerjaan	• SVP-Dean of Retail Banking Academy – Mandiri University (2013-2015) • SVP- Regional CEO di PT Bank Mandiri (Persero) (2009-2012) • VP-Deputi Regional CEO di PT Bank Mandiri (Persero) (2009) • VP-Area Manager, di PT Bank Mandiri (Persero), (2005-2008)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Dwi Martani
Jabatan	Anggota
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	48 tahun
Domisili	Depok, Jawa Barat
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 023/KPTS/K/DK/2015
Riwayat Pendidikan	• Gelar Doktor di bidang Ilmu Keuangan, Universitas Indoesia (2004) • Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia, Indonesia (1993)
Riwayat Pekerjaan	• Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (1996-sekarang) • Wakil Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2018-sekarang) • Anggota Komite Audit LPP TVRI (2008-2011) • Anggota Komite Audit PT Adhi Karya (Tbk) (2005-2007)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

TANRI ABENG / KETUA KOMITE AUDIT

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

SAHALA LUMBAN GAOL/WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

AHMAD BAMBANG - WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA

Profil dapat dilihat pada pembahasan profil Dewan Komisaris.

INFORMASI RANGKAP JABATAN

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Informasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris. Seluruh Anggota Komite Audit yang tidak menjabat sebagai Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan eksternal di luar Pertamina yang mengandung konflik kepentingan.

INDEPENDENSI KOMITE

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Audit berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan bersikap objektif, professional dan independen. Komite Audit tidak akan mengambil keputusan di bawah tekanan dan intervensi dari pihak mana pun serta berkomitmen untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Oleh sebab itu, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan dan hubungan bisnis dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Internal Audit maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.
6. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perseroan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, laporan manajemen dan informasi lainnya.
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
8. Melakukan penelaahan dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
9. Mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah dan kompetensi auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.
10. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.
11. Melakukan penelaahan atas independensi dan objektivitas akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan dan kegiatan audit lainnya.
12. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
13. Melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat dan memonitor pelaksanaan *whistleblower*.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat berkala secara internal untuk menyelesaikan Program Kerja Komite dan melakukan rapat koordinasi dengan komite-komite lain di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit menyelenggarakan 53 (lima puluh tiga) kali rapat baik internal maupun mengundang pihak manajemen akan tergambar dalam tabel berikut ini :

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		Rapat Internal	Rapat mengundang Direktorat
Tanri Abeng	Ketua Komite	0	1
Sahala Lumban Gaol	Wakil Ketua Komite	4	11
Ahmad Bambang	Anggota	0	0
Agus Yulianto	Anggota	4	48
Bonar Lumban Tobing	Anggota	4	48
Dwi Martani*	Anggota	2	18

Keterangan:
*Beliau berhenti di tanggal 30 April 2018

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

SUAHASIL NAZARA/ KETUA KOMITE

Profil beliau dapat dlihat pada pembahasan profil Dewan Komisaris.

TANRI ABENG/ WAKIL KETUA KOMITE

Profil beliau dapat dlihat pada pembahasan profil Dewan Komisaris.

EGO SYAHRIAL - WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA

Profil dapat dilihat pada pembahasan profil Dewan Komisaris.

Nama	Apep Fajar Kurniawan
Jabatan	Anggota
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	35 tahun
Domisili	Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.023/ KPTS/K/DK/2015.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Bidang Manajemen Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama (2014) • Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (2013-sekarang) • Program Pasca Sarjana (Magister Sains Bidang Strategi Intelijen) Universitas Indonesia (2009) • Sarjana Teologi, Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin (2006) • Sarjana Filsafat Universitas Islam Negeri (2006)
Riwayat Pekerjaan	• Direktur Utama PT Melia Samudera Khatulistiwa (2014-2017) • Direktur Hubungan Perusahaan "Corporate Affair The Leader Magazine" (2014-2017) • Direktur Indonesia Student and Youth Forum (2011-2015) • Komisaris PT Trisula Energi (2013- 2014) • Direktur Operasional PT Lintas Strategi Indonesia (2012-2013) • Manager Marketing Communication PT RM Book (2010-2012) • Co-Founder/Tim Pendiri dan Wakil Rektor Universitas Tanri Abeng (2010-2012) • Direktur Program Pusat Studi Agama dan Peradaban (2006-2009) • Angggota Dewan Pengarah Nasional – Jaringan Pemantau Pemilu Rakyat (JPPR) (2002-2004)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

INDEPENDENSI KOMITE

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan bersikap objektif, profesional, independen. Komite Nominasi dan Remunerasi tidak akan mengambil keputusan di bawah tekanan dan intervensi dari pihak mana pun serta berkomitmen untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Oleh sebab itu, seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan dan hubungan bisnis dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas perencanaan kegiatan Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta kegiatan lainnya sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Dewan Komisaris mengenai pembagian tugas di antara Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta kegiatan lainnya sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Dewan Komisaris mengenai Pembagian Tugas di antara Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris.
3. Melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan kebijakan Nominasi dan Remunerasi.
4. Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Komisaris terkait kegiatan Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. Memberikan masukan dan rekomendasi atas laporan Direksi mengenai kegiatan Nominasi dan Remunerasi.
6. Memberikan telaahan dan saran strategis serta melakukan pemantauan tentang implementasi GCG di Perseroan, antara lain atas pelaksanaan asesmen GCG secara berkala oleh asesor independen, pelaksanaan *whistleblowing* dan hal-hal terkait kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Membuat Rencana Kerja tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang terkait dengan kegiatan Nominasi dan Remunerasi maupun tugas khusus lainnya.
9. Melaporkan hasil-hasil kerja Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
10. Komite Nominasi dan Remunerasi juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya dari Dewan Komisaris serta membantu Komite-Komite lainnya.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan 12 (dua belas) kali rapat baik yang dilaksanakan secara internal maupun mengundang pihak manajemen lainnya. Frekuensi kehadiran rapat Komite Nominasi dan remunerasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		Rapat Internal	Rapat Mengundang Direktorat
Suahasil Nazara	Ketua Komite	0	2
Tanri Abeng	Wakil Ketua Komite	1	4
Ego Syahrial	Anggota	0	2
Apep Fajar Kurniawan	Anggota	1	11

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

ARCANDRA TAHAR/ KETUA KOMITE

Profil beliau dapat dlihat pada pembahasan profil Dewan Komisaris

SAHALA LUMBAN GAOL / WAKIL KETUA KOMITE

Profil beliau dapat dlihat pada pembahasan profil Dewan Komisaris

ALEXANDER LAY / WAKIL KETUA KOMITE

Profil beliau dapat dlihat pada pembahasan profil Dewan Komisaris

Nama	Yusuf Didi Setiarto
Jabatan	Anggota
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	45 tahun
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.017/KPTS/K/DK/2016.
Riwayat Pendidikan	Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta (1994-1999).
Riwayat Pekerjaan	Associate Lawyer di Indrawan Heisky & Partner (1999), Associate Lawyer di Wiriadinata & Widyawan (2000-2003), Divisi Hukum BPMIGAS/SKKMIGAS (2003-2012), dan Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKKMIGAS (2013-2015).
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Poerwo Tjahjono
Jabatan	Anggota
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	62 tahun
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.023/ KPTS/K/DK/2015
Riwayat Pendidikan	Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran – Bandung (1984) dan Program Pascasarjana jurusan Ilmu Manajemen Universitas Gadjah Mada (1999).
Riwayat Pekerjaan	Program Bimbingan Sarjana Akuntansi tahun1985, Staf Keuangan Pertamina Daerah Kalimantan (1992), Kepala Keuangan Daerah Operasi EP Sangatta (1995), Manager Pengembangan ERP (2005) yang sebelumnya anggota Proyek Implementasi SAP. Tahun 2006 menjabat Kepala Divisi Kontroler, kemudian sebagai Vice President Keuangan Hilir (2007), Vice President Perencanaan Strategik (2008) dan Senior Vice President Controller (2011). Staf Masa Purna Karya (2012) dan Juni 2012 sebagai Anggota Komite Audit PT Pertamina Hulu Energi sampai dengan medio 2015.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Averrouz Mostavan
Jabatan	Anggota
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	37 tahun
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.008/KPTS/K/DK/2018.
Riwayat Pendidikan	• Sarjana jurusan Geophysical Engineering di ITB - Bandung • Pascasarjana jurusan Applied Geophysics dari TU Delft, The Netherlands.
Riwayat Pekerjaan	• QC Geophysicist – PGS. Offshore New Zealand, North Sea (Norwegian and UK Sectors) and West of Shetland (2009), • Sales Supervisor – PGS, Jakarta and Singapore (2009-2010), • Geophysicist – PGS, Singapore (2010-2012), • Senior Geophysicist – PGS. Singapore (2012-2014), • Senior Geophysicist – PGS, Houston, Texas, USA (2014-2018)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

INDEPENDENSI KOMITE

Seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan bersikap objektif, profesional, independen. Komite Pemantau Manajemen Risiko tidak akan mengambil keputusan di bawah tekanan dan intervensi dari pihak mana pun serta berkomitmen untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Oleh sebab itu, seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan dan hubungan bisnis dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas perencanaan kegiatan hulu-hilir Perusahaan (RJPP/RKAP).
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan hulu- hilir Perusahaan berdasarkan rencana atau anggaran (RJPP/RKAP) dan analisis hasil atas kegiatan hulu-hilir Perusahaan.
3. Melakukan evaluasi atas perencanaan investasi kegiatan hulu-hilir dan tingkat risiko yang terukur dan selaras dengan strategi serta keekonomiannya.
4. Melakukan pemantauan pelaksanaan investasi kegiatan hulu-hilir dan analisis hasil investasi.
5. Melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan kebijakan investasi kegiatan hulu-hilir dan pengurusan Perseroan dari aspek manajemen risiko.
6. Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Komisaris terkait kegiatan hulu-hilir Perseroan.
7. Memberikan masukan dan rekomendasi *(advisory)* atas laporan Direksi mengenai kegiatan hulu-hilir Perusahaan.
8. Membuat rencana kerja tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang terkait dengan kegiatan hulu-hilir Perusahaan.
10. Melaporkan hasil-hasil kerja Komite kepada Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan penugasan lainnya dari Dewan Komisaris serta membantu Komite-komite lainnya.

RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dalam tahun 2018, Komite Pemantau Manajemen Risiko menyelenggarakan Rapat Internal dan Rapat mengundang pihak manajemen sebanyak 5 (lima) kali.

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		Rapat Internal	Rapat Mengundang Direktorat
Arcandra Tahar	Ketua Komite	0	5
Sahala Lumban Gaol	Wakil Ketua Komite/ Anggota	0	2
Alexander Lay	Wakil Ketua Komite/ Anggota	0	4
Yusuf Didi Setiarto	Anggota	0	4
Poerwo Tjahjono	Anggota	0	5
Averrouz Mostavan	Anggota	0	1

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Nama	Yuki Indrayadi
Jabatan	Sekretaris Dewan Komisaris
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	46 tahun
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan No. 003/KPTS/K/DK/2016
Riwayat Pendidikan	• Fakultas Teknik Industri ITB, Bandung (1996), • Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (M.Eng - 1998) • Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (Ph.D - 2002).
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Komite Independen PT Semen Indonesia Tbk (2013- 2016), • Sekretaris Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk (2008-2013), • Managing Director PT Quant Capital Management – Jakarta (2008), • SVP Research PT Infinite Global Kapital, Jakarta (2007-2008) • Field Engineer di Schlumberger Wireline & Testing (1996-1997).
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat *(briefing sheet)* Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menetapkan prinsip-prinsip GCG.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
9. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
10. Sebagai penghubung *(liaison officer)* Dewan Komisaris dengan pihak lain.
11. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.

SEKRETARIS PERSEROAN

PROFIL SEKRETARIS PERSEROAN

Nama	Syahrial Mukhtar
Jabatan	Corporate Secretary
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	52 tahun
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Kpts.P-028/C00000/2017-S8
Riwayat Pendidikan	• Bachelor Degree, Industrial Engineering, Institut Teknologi Bandung (1985-1990) • Magister Manajemen, Department of Business Internasional, Universitas Gadjah Mada (1998-2000) • Doctor of Management Stategic, Postgraduated in Management Faculty of Economic, Universitas Indonesia (2005-2011)
Riwayat Pekerjaan	• Technical Expert & Strategic Advisor Financial, PT Pertamina (Persero) (2015-2016) • Vice President of Corporate Internal Audit, PT Petamina (Persero) (2014-2015) • Head of Internal Audit, Pertamina Drilling Service Indonesia (2013-2014) • Business Strategic Planning Manager, PT Pertamina (Persero) (2012-2013) • Management Business and Information Data Manager, PT Pertamina (Persero) (2010-2011)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Menentukan dan menetapkan strategi komunikasi korporat baik ke dalam maupun ke luar, meliputi namun tidak terbatas pada pengelolaan kegiatan komunikasi media, pengelolaan merek korporat, dan komunikasi internal perusahaan untuk membentuk dan meningkatkan citra dan reputasi Pertamina di mata pemangku kepentingan.
2. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi pembinaan relasi dengan stakeholder perusahaan yang terdiri dari namun tidak terbatas pada pemegang saham, bondholders/investor keuangan, pemerintah, legislatif, judiciary, NGO, TNI, POLRI, kedutaan besar, dan pemangku kepentingan internasional, serta memastikan kesetaraan protokoler Board Management dengan pemangku kepentingan terkait, dalam rangka memperoleh pengakuan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan baik antara perusahaan dengan *stakeholders* serta memajukan kepentingan Pertamina.

3. Mengarahkan dan menentukan strategi serta menjalankan kegiatan *Corporate Social Responsibility & Small Medium Enterprise Partnership Program* (CSR & SMEPP) Pertamina yang efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat, khususnya sekitar wilayah operasi perusahaan, dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka implementasi UU no 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.
4. Mengelola kegiatan korporasi terkait pelaporan kepada Pemegang Saham antara lain menyiapkan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan Perusahaan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Menentukan dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan dukungan kepada aktivitas Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk pengelolaan Administrasi dan Kesekretariatan Direktur Utama dalam rangka memenuhi tata kelola perusahaan yang baik.
6. Mengelola data dan informasi Pertamina, khususnya untuk kepentingan stakeholder eksternal meliputi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi, pelayanan dan verifikasi bahan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat umum dan pemangku kepentingan perusahaan, guna mewujudkan implementasi prinsip GCG.
7. Mengelola perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Corporate Secretary sesuai otorisasi Perusahaan.
8. Mengelola perencanaan, penempatan dan pembinaan pekerja di lingkungan Corporate Secretary.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Corporate Secretary secara periodik kepada Direktur Utama.

PROFIL KEPALA INTERNAL AUDIT

Nama	Faisal Yusra
Jabatan	Chief Audit Executive
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	54 tahun
Domisili	Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No.Kpts.P-166/ C00000/2017-S8 tanggal 15 September 2017
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Sumatera Utara (1987), • Sarjana Ilmu Hukum Universitas Tridharma Balikpapan • S2 Pasca Sarjana Ekonomi Universitas Jendral Soedirman (2001).
Riwayat Pekerjaan	• Staf Gambar Listrik di Unit Pengolahan Daerah Kalimantan, • Pengawas Evaluasi Proyek Kapital Balikpapan, • Pengawas Utama Kontrak Office RU Balikpapan, • Asisten Manajer Bang Sis. Ops.Kilang BBM Direktorat Pengolahan, • Asisten Manajer Pengawasan Direktorat Pengolahan, • Asisten Manajer Kontrak – Integrated Supply Chain, • Quality Management Manager PT Pertamina (Persero), • VP Quality System & Knowledge Management Pertamina (2014-2017),
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

Unit Pertamina Internal Audit mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensi dari seluruh kegiatan atau unit kerja yang diaudit. Unit Pertamina Internal Audit dipimpin oleh Chief Audit Executive yang memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris.

Jabatan-jabatan pada Pertamina Internal Audit diatur dalam aturan SK Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum No.Kpts-049/K00000/2018-S0 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi Internal Audit PT Pertamina (Persero).

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Berikut adalah diagram struktur organisasi Unit Pertamina Internal Audit.

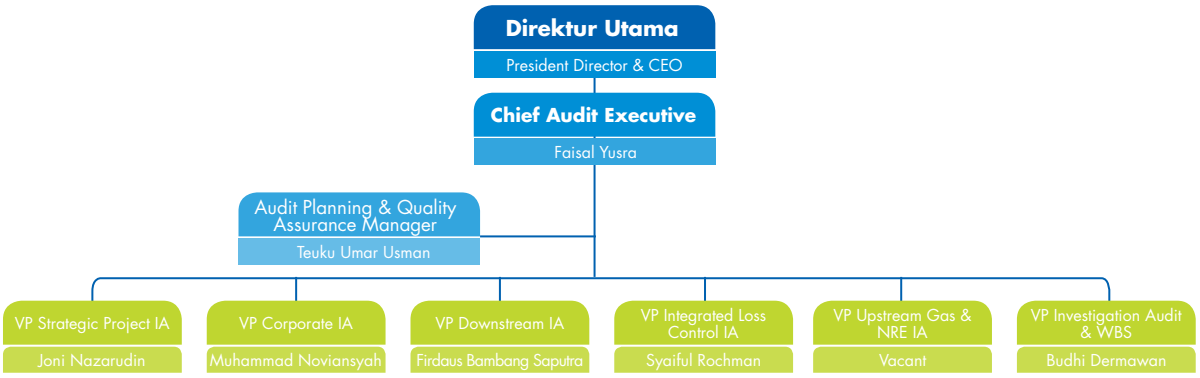

JUMLAH PEGAWAI

Pada 2018, jumlah posisi jabatan yang terisi di Unit Pertamina Internal Audit sebanyak 134 dari sejumlah 189 jabatan yang ada, di mana 55 (lima puluh lima) posisi atau sebesar 29% masih *vacant*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Fungsi Pertamina Internal Audit	Formasi	Terisi	Vacant
1	Chief Audit Executive	2	2	0
2	Audit Planning & Quality Assurance (APQA)	13	10	3
3	Investigation Audit	19	14	5
4	Upstream & Gas IA	17	14	3
5	Downstream IA	83	63	20
6	Corporate IA	33	23	10
7	Strategic Project IA	13	6	7
8	Integrated Loss Control IA	9	2	7
	Jumlah	189	134	55
	Prosentase	100%	71%	29%

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas, dan tanggung jawab Unit Pertamina Internal Audit sebagaimana yang dituangkan dalam Piagam Audit Internal sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan program kerja pengawasan tahunan/ *Annual Audit Plan* dan rencana anggaran biaya untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama.
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* di seluruh unit kerja di Perusahaan.
3. Melaksanakan koordinasi pengawasan dengan Internal Audit Anak Perusahaan dan afiliasi Perusahaan.
4. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko.
5. Melaksanakan *review* atas laporan secara periodik.
6. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.

7. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi Perusahaan.
8. Melaksanakan koodinasi dengan Komiter Audit.
9. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan pihak yang berkompeten menerima laporan.
10. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal,eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
11. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengawasan dengan eksternal audit.
12. Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi Compliance/Chief Compliance Officer serta pihak terkait lainnya dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/penyingkapan melalui *Whistle Blowing System* (WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Melaksanakan audit investigasi terhadap masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
14. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan peningkatan mutu (*improvement program*) dalam kegiatan pengawasan intern.
15. Melaporkan kegiatan pengawasan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.
16. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA SERTIFIKASI PROFESI

PT Pertamina (Persero) senantiasa mengikutsertakan pegawai Unit Pertamina Internal Audit dalam program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui program sertifikasi (nasional maupun internasional) dan non sertifikasi melalui *training/workshop* baik yang diselenggarakan secara *inhouse* maupun yang diadakan oleh pihak eksternal. Sedangkan, sertifikasi profesi yang dimiliki pegawai di bidang Internal Audit antara lain CIA, CFE, CISA, CRMA, CCSA, QIA, CPA, CRMP, dan CFrA. Pemegang sertifikasi tersebar pada Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan, sehingga dapat mengakomodir seluruh auditor di Pertamina. Berikut adalah sertifikasi profesi pegawai Unit Pertamina Internal Audit dan jumlah pemegang sertifikat di Pertamina pada 2018:

Tabel Sertifikasi Pegawai

No.	Jenis Sertifikasi	IA Persero	IA AP	Σ Auditor	Keterangan
1	Certified Internal Audit (CIA)	8	1	9	Internasional
2	Certified Fraud Examiner (CFE)	23	16	39	Internasional
3	Certified Information System Auditor (CISA)	8	1	9	Internasional
4	Certified Risk Management Assurance (CRMA)	0	1	1	Internasional
5	Certified Control Self Assessment (CCSA)	2	1	3	Internasional
6	Qualified Internal Audit (QIA)	110	64	174	Nasional
7	Certified Public Accountant (CPA) Indonesia	0	1	1	Nasional
8	Certified Risk Management Professional (CRMP)	6	4	10	Nasional
9	Certified Forensic Auditor (CFrA)	15	13	28	Nasional

PELAKSANAAN TUGAS 2018

Berdasarkan evaluasi data *Audit Management System* (AMS), pada tahun 2018 Unit Pertamina Internal Audit menerbitkan laporan 33 laporan yang terdiri dari 18 Laporan Hasil Audit, 10 Laporan Hasil Audit Investigasi, dan 5 Laporan Hasil Konsultasi. Dari 590 temuan yang harus ditindaklanjuti di tahun 2018, 573 temuan telah selesai ditindaklanjuti oleh manajemen (97,12%).

Selama tahun 2018, fungsi Pertamina Internal Audit telah melakukan pengawalan 7 penugasan Audit BPK RI, pengawalan 29 penugasan BPKP dan sebagai *counterpart* Kantor Akuntan Publik dalam audit Laporan Keuangan PT Pertamina tahun buku 2018.

AKUNTAN PUBLIK

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diputuskan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris. Informasi daftar nama Kantor Akuntan Publik beserta opini yang diberikan atas laporan keuangan Pertamina selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Buku	Nama KAP	Akuntan Publik	Opini
2018	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Drs Hari Purwantoro	Opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain
2017	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Drs Hari Purwantoro	Opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain
2016	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Drs Hari Purwantoro	Opini tanpa modifikasian
2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Drs Hari Purwantoro	Opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain
2014	Tanudiredja ,Wibisana & Rekan (PWC)	Drs Haryanto Sahari	Opini tanpa modifikasian

Biaya audit Laporan Keuangan tahun buku 2018 sebesar Rp37.850.000.000 (belum termasuk PPN), biaya tersebut termasuk biaya audit laporan keuangan 23 Anak Perusahaan, PKBL dan Dana Pensiun Pertamina. Dalam hubungan kerja ini, tidak ada hubungan afiliasi antara auditor dan Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham Perusahaan.

Selain melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja juga memberikan jasa penugasan lain dan termasuk dalam biaya audit, yakni:

1. Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina (Persero) Tahun Buku 2018.
2. Audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pengendalian internal (PSA 62) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018.
3. Prosedur yang disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PT Pertamina (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018.
4. Prosedur yang disepakati atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non-bank PT Pertamina (Persero) untuk triwulan IV tanggal 31 Desember 2018.
5. Menerbitkan *Management Letter* atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan termasuk *Management Letter* terhadap Anak Perusahaan, PKBL dan Dana Pensiun Pertamina untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018, yang menekankan pada efektivitas pengendalian internal.
6. Prosedur yang disepakati atas Laporan Capaian Kontrak Manajemen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

MANAJEMEN RISIKO

Pertamina, sebagaimana Perusahaan Energi lainnya, menghadapi kondisi bisnis dengan tingginya *volatility, uncertainty, complexity & ambiguity* (VUCA). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya eksposur risiko Pertamina. Untuk itu, risiko menjadi aspek yang melekat dan harus diperhitungkan dalam setiap lini bisnis Pertamina. *Enterprise Risk Management* (ERM) dibentuk dengan tujuan meminimalkan potensi kerugian serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pencapaian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan Rencana Jangka Panjang. Manajemen Risiko juga diharapkan dapat memaksimalkan *opportunities*, mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif, membangun kepercayaan investor, meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan tata kelola perusahaan yang sehat, mengantisipasi perubahan lingkungan yang pesat dan mengintegrasikan strategi korporat.

Landasan penerapan Manajemen Risiko di Pertamina mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, khususnya pasal 25 mengenai pemenuhan kewajiban melaksanakan Manajemen Risiko. Selain itu, Pertamina memiliki landasan berupa:

1. Piagam Manajemen Risiko Pertamina sebagai bentuk komitmen Direksi atas penerapan Manajemen Risiko diperbaharui dan ditandatangai pada 01 November 2017.
2. Sistem Tata Kerja Enterprise Risk Management No.A002/H30000/2015–S9 Revisi 1 Tanggal 3 Oktober 2016 yang berisi Pedoman Manajemen Risiko yang berlaku di Pertamina.
3. Tata Kerja Organisasi (TKO) & Tata Kerja Individu (TKI) yang berisi petunjuk teknis pengelolaan Manajemen Risiko.

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Landasan Manajemen Risiko di Pertamina disusun dengan tujuan mewujudkan *Enterprise Risk Management* (ERM) *Roadmap* Pertamina, yaitu kematangan pengelolaan manajemen risiko dengan tahapan *low non existence, basic, mature, mature growth, dan advance optimization*. ERM *Roadmap* ini akan menjadi acuan dalam menerapkan dan mengevaluasi Manajemen Risiko di Pertamina.

FRAMEWORK ISO 31000:2018 SEBAGAI KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO DI PERTAMINA

Pertamina mulai menerapkan ISO 31000: 2018 sebagai standar mutu di bidang manajemen risiko yang merupakan pengembangan dari standar sebelumnya yaitu ISO 31000: 2009. Standar tersebut berisi prinsip-prinsip, kerangka kerja, serta panduan dalam pengelolaan risiko.

Di lingkungan Pertamina, penerapan ISO 31000:2018 sebagai landasan kerangka kerja manajemen risiko, dilakukan terintegrasi sesuai dengan kondisi lingkungan dan proses bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, Pertamina melakukan penyesuaian dalam penerapan ISO 31000:2018 sesuai dengan karakter bisnis, organisasi dan *culture* Perusahaan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan ERM di Pertamina. Tiga fondasi utama dalam ISO 31000:2018 yang diimplementasikan dalam pengelolaan risiko di Pertamina, terdiri dari Prinsip *(Risk Management Principles)*, Kerangka Kerja *(Risk Management Framework)* dan Proses *(Risk Management Process)* Manajemen Risiko.

Risk Management Principles
Continual improvement
Integrated
Human and cultural factors
Structured and compre-hensive
Value Creation and Protection
Best available information
Customized
Dynamic
Inclusive
Integration
Improvement
Design
Leadership and Commitment
Evaluation
Implementation
Risk Management Process
Scope, Context, Criteria
COMMUNICATION AND CONSULTATION
Risk Assessment
Risk Identification
Risk Analysis
Risk Evaluation
MONITORING AND REVIEW
Risk Treatment
RECORDING AND REPORTING
Risk Management Framework
Risk Management Process

IMPLEMENTASI ISO 31000:2018 DI PERTAMINA

ISO 31000:2009 mulai diterapkan di Pertamina pada tahun 2011. Penerapan kerangka kerja tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan kebijakan hingga proses manajemen risiko. Pada Agustus 2018, terdapat beberapa perubahan dalam prinsip, framework dan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018. Secara garis besar, ISO 31000:2018 menekankan pada *protecting and creating the value*. Bahwa tanggung jawab seluruh lini perusahaan untuk menjaga dan menciptakan nilai perusahaan dengan menerapkan manajemen risiko dalam setiap prosesnya. Penerapan ISO 31000:2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandat dan Komitmen
   Mandat dan komitmen Direksi Pertamina disusun sebagai bentuk komitmen Direksi untuk memperhitungkan aspek risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Mandat dan Komitmen Direksi tersebut mengacu pada Prinsip Manajemen Risiko pada ISO 31000:2018 dan telah dituangkan dalam Piagam Manajemen Risiko Pertamina yang telah diresmikan dan ditandatangani oleh seluruh Direksi pada 01 November 2017.

   Piagam Manajemen Risiko Pertamina tersebut kemudian dijadikan landasan dalam penerapan Manajemen Risiko di Pertamina dengan didukung Sistem Tata Kerja, Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Individu. Landasan tersebut merupakan acuan bagi seluruh pekerja dalam menerapkan mengelola risiko di masing – masing Direktorat dan Fungsi Leher.

2. Penyusunan Profil Risiko Pertamina
   Penyusunan Profil Risiko Pertamina dilakukan dengan metode *Fault Tree Analysis* (FTA) dan *Failure Mode Effect Analysis* (FMEA). Kombinasi penerapan kedua metode tersebut dapat mengidentifikasi risiko secara *top down* maupun *bottom up* sehingga profil risiko dapat digambarkan lebih komprehensif. Profil risiko Pertamina disusun berdasarkan aspirasi Direksi sehingga diharapkan dapat mencakup risiko-risiko yang bersifat strategis maupun operasional. Penyusunan profil risiko Pertamina mengacu pada Proses Manajemen Risiko dalam ISO 31000:2018 yang mencakup penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan dan pemantauan risiko. Penetapan konteks dalam penyusunan profil risiko dibatasi untuk risiko *Ongoing Business* dan *Business Development* yang berpotensi terjadi selama periode 1 tahun anggaran, baik yang memiliki dampak secara finansial maupun reputasi, strategis, legal dan aspek bisnis lainnya. *Risk owner* sebagai *first line defense* dan unit bisnis terdepan dalam pengelolaan risiko melakukan identifikasi risiko yang melekat dalam setiap proses dan unit bisnis beserta penyebab risiko (*Risk Agent*), *Key Risk Indicator* (KRI), faktor positif (*control*) serta dampak risiko. Selanjutnya dilakukan analisis risiko oleh *Risk Owner*, baik secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan data historis maupun *expert judgement*. Metode analisis risiko yang umum digunakan adalah *Value at Risk* (VaR) dan *Delphi Method*.

   Berikutnya dilakukan evaluasi risiko berdasarkan hasil analisis sebelumnya untuk menentukan keputusan apakah perlu dilakukan penanganan risiko lebih lanjut dan jenis tindakan penanganan risiko yang diambil agar mampu mengatasi *Risk Agent* secara efektif dan efisien. Setiap tahapan di atas senantiasa disertai proses komunikasi dan konsultasi dengan tujuan untuk memastikan *risk owner* memahami dan menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan korporat. Proses tersebut di atas didokumentasikan dalam *Risk Register*.

Risk Register yang telah disusun oleh *Risk Owner* dikonsolidasikan oleh setiap Direktorat, Fungsi leher dan Anak Perusahaan di Pertamina untuk selanjutnya diseleksi menjadi *Top Risk* Direktorat, Fungsi Leher dan Anak Perusahaan berdasarkan threshold dan hasil challenge session dengan setiap pemimpin tertinggi. Selanjutnya, Manajemen Risiko Korporat yang dalam hal ini adalah Fungsi ERM mengkonsolidasi *Top Risk* Direktorat, Fungsi Leher dan Anak Perusahaan yang telah disetujui setiap pemimpin tertinggi untuk diolah menjadi *Top Risk* Pertamina.

Pengelolaan *Top Risk* Pertamina menjadi tanggung jawab Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan seluruh Direksi Pertamina. Melalui pelaksanaan pengelolaan risiko, baik di level korporat maupun fungsional, diharapkan mampu meningkatkan *assurance* bagi seluruh *stakeholder* Pertamina dalam mencapai target korporasi.

3. *Monitoring & Review*
   Risk Owner selaku pemilik risiko berkewajiban untuk melaksanakan rencana mitigasi dan memastikan bahwa mitigasi yang dilaksanakan berdampak pada penurunan skala dampak, skala risiko maupun keduanya. Kegiatan tersebut kemudian dilaporkan setiap triwulan kepada Manajemen Risiko Korporat. Dalam setiap kegiatan tersebut, *Risk Owner* maupun Manajemen Risiko Direktorat / Fungsi Leher dapat berkonsultasi dengan Manajemen Risiko Korporat.

Penerapan Manajemen Risiko di Pertamina dapat berjalan dengan baik karena ditunjang oleh struktur organisasi yang ditunjuk untuk bertanggung jawab di setiap Direktorat, Fungsi dan Anak Perusahaan dan dikoordinasikan oleh Manajemen Risiko Korporat. Selain itu, pengelolaan risiko di Pertamina dapat berjalan dengan baik dikarenakan manajemen risiko telah menjadi salah satu *item Key Performance Indicator* (KPI) dengan nama *Enterprise Risk Management* untuk level Direksi dan *Risk Management Implementation* untuk mendorong seluruh lini melakukan pengelolaan risiko.

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI PERTAMINA DAN PENGELOLAANNYA

Perkembangan bisnis energi yang pesat, memunculkan risiko – risiko baru yang akan dihadapi oleh Pertamina. Keadaan tersebut mendorong Pertamina untuk mengidentifikasi risiko baru sehingga seluruh lini Perusahaan diharapkan senantiasa waspada terhadap kondisi internal maupun eksternal Perusahaan.

Proses manajemen risiko yang telah dilakukan Pertamina merupakan proses yang tepat untuk mengidentifikasi risiko Perusahaan. Sepanjang tahun 2018, teridentifikasi 2399 risiko dengan rincian 1842 risiko bersifat kualitatif dan 557 risiko merupakan risiko kuantitatif. Dari hasil identifikasi, diperoleh profil risiko Pertamina yang menjadi perhatian Direksi sesuai dengan *Risk Intelligence Map* (RIM) Pertamina, antara lain:

1. Risiko Strategis dan Perencanaan
   Risiko Strategis dan Perencanaan merupakan risiko terkait dengan perencanaan strategis Pertamina antara lain *corporate responsibility & sustainablility, external factors, planning, project,* dan *strategy*. Risiko strategis dan perencanaan yang dialami Pertamina antara lain Risiko Tidak Tercapainya Produksi Migas, Tidak Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Minyak Mentah dan Risiko Realisasi Target Investasi Tidak Tercapai.

2. Risiko Finansial
   Risiko Finansial merupakan adalah risiko terkait dengan kegiatan bisnis antara lain *accounting, credit, liquidity & finance intelligence, financial market, planning & budgeting*, dan *operational* yang mengakibatkan kerugian keuangan Pertamina. Risiko yang muncul terkait dengan kegiatan bisnis antara lain, risiko pergerakan atau fluktuasi variabel pasar seperti harga komoditas, suku bunga, dan harga minyak serta risiko terjadinya *event of default* (*Global Bond*) dan *cross default* (*Corporate Loan*).

3. Risiko Operasional dan Infrastruktur
   Risiko Operasional dan Infrastruktur merupakan risiko terkait dengan kegiatan operasional dan prasarana Pertamina antara lain *corporate*

assets, human resources, information technology, external events, legal, process management, product development, dan sales, marketing and communications. Risiko operasional dan Infrastruktur yang dihadapi oleh Pertamina antara lain Risiko Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Serta Pencemaran Lingkungan serta Risiko Aset-Aset Pertamina yang Tidak Optimal.

4. Risiko Tata Kelola
   Risiko Tata Kelola merupakan risiko yang disebabkan oleh kurang atau tidak patuhnya terhadap aturan Tata Kelola Pertamina (*Corporate Governance*) dan Etika Bisnis (*Business Ethics*) dalam pengelolaan Pertamina. Risiko Penurunan Brand Equity Pertamina dan Risiko Kerugian dalam Pelaksanaan Penugasan BBM PSO merupakan risiko utama yang perlu diperhatikan Pertamina.

5. Risiko Kepatuhan
   Risiko Kepatuhan merupakan risiko terkait dengan kegiatan bisnis Pertamina yang disebabkan oleh kurang atau tidak patuhnya terhadap peraturan. Terdapat risiko 2 risiko utama yang dihadapi yaitu Risiko Penurunan GCG *Assessment* dan Risiko *Fraud*.

6. Risiko Pelaporan
   Risiko Pelaporan merupakan risiko terkait dengan kewajiban Pertamina untuk menyampaikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/ *shareholder*. Risiko Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Tidak Tepat Waktu, Tidak Reliable dan Tidak Wajar dan Risiko Pelaksanaan RUPS Tidak Terlaksana dengan Baik Sesuai Jadwal merupakan 2 risiko utama yang diperhatikan.

Rencana mitigasi yang disusun saat proses identifikasi risiko dilakukan dengan tujuan mengurangi dampak yang ditimbulkan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Adapun tindakan mitigasi yang dilakukan atas risiko–risiko Pertamina yaitu:

1. Risiko Strategis dan Perencanaan
   Upaya mitigasi yang dilakukan untuk menangani Risiko Tidak Tercapainya Produksi Migas, Tidak Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Minyak Mentah adalah dengan mencari cadangan baru secara organik maupun anorganik, diversifikasi produk minyak serta mencari dan mengembangkan alternatif energi lain (energi baru dan terbarukan).

2. Risiko Finansial
   Risiko Pergerakan atau Fluktuasi Variabel Pasar Seperti Harga Komoditas, Suku Bunga dan Harga Minyak Mentah dapat dilakukan tindakan mitigasi dengan cara melakukan transaksi Lindung Nilai Valuta Asing, mengupayakan tingkat suku bunga pinjaman yang kompetitif serta melakukan analisis risiko pasar. Upaya mitigasi untuk Risiko terjadinya *event of default* (*Global Bond*) dan *cross default* (*Corporate Loan*) adalah melakukan analisis terhadap *covenant* secara berkala.

3. Risiko Operasional dan Infrastruktur
   Mengatasi Risiko Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Serta Pencemaran Lingkungan, Pertamina meningkatkan *safety awareness* pekerja melalui program training dan mendaftarkan aspek keselamatan sebagai KPI seluruh pekerja. Risiko Aset-Aset Pertamina yang Tidak Optimal diatasi dengan melakukan perbaikan, perawatan, peremajaan aset produksi dengan teknologi baru.

4. Risiko Tata Kelola
   Risiko Program CSR Tidak Tepat Sasaran dimitigasi dengan cara menjalankan strategi *top-down approach* untuk memastikan pelaksanaan program di tingkat operasional serta *monitoring* pelaksanaan CSR. Optimasi hilir dan mengusulkan penyesuaian alpha BBM PSO dilakukan untuk memitigasi Risiko Kerugian dalam Pelaksanaan Penugasan BBM PSO.

5. Risiko Kepatuhan
   Tindakan mitigasi Risiko Penurunan GCG *Assessment* yaitu sosialisasi dan internalisasi GCG, *monitoring* kepatuhan LHKPN serta pelaksanaan *assessment* oleh pihak eksternal. Risiko *Fraud* ditangani melalui tindakan implementasi *Whistle Blowing System* dan melakukan audit secara berkala dan diinisiasinya pengenalan terhadap parameter-parameter dalam persiapan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.

6. Risiko Pelaporan
   Risiko Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Tidak Tepat Waktu, Tidak Reliable dan Tidak Wajar dimitigasi dengan rekonsiliasi data secara berkala, penggunaan *Business Process Control* (BPC) serta penyempurnaan sistem terkait konfigurasi *actual costing*. Tindakan mitigasi Risiko Pelaksanaan RUPS Tidak Terlaksana dengan Baik Sesuai Jadwal yaitu dengan melakukan persiapan dan pelaksanaan rapat Pra RUPS , Sirkuler dan RUPS RJPP.

Melalui pelaksanaan mitigasi tersebut, diharapkan profil risiko Pertamina yang semula *High Risk* dapat turun menjadi *Low Risk* dan atau sesuai dengan *appetite* Komite Manajemen Risiko.

Strategi pengelolaan risiko 2019 harus dapat mencakup serta mempertimbangkan kondisi bisnis di tahun 2019, implementasi Manajemen Risiko harus dapat memberikan *early warning* melalui analisa bisnis yang komprehensif dengan tetap menerapkan pengelolaan risiko yang telah dijalankan dan ditambah dengan *monitoring* mitigasi secara lebih detail yang akan dituangkan dalam Laporan Monitoring Top Risk Pertamina 2019.

Secara khusus, Direksi memiliki aspirasi dalam strategi pengelolaan risiko Pertamina yaitu dengan merancang program–program kerja yang efektif, memastikan koordinasi yang efisien antar Direktorat, melakukan evaluasi terkait proyek–proyek strategis serta melakukan *enhancement* terhadap fasilitas dan pelayanan terhadap pekerja.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko di Pertamina memiliki sistem pengendalian pengelolaan risiko yang disebut sebagai *three lines of defense*. Secara umum, sistem *three lines of defense* dapat dilihat melalui grafik berikut:

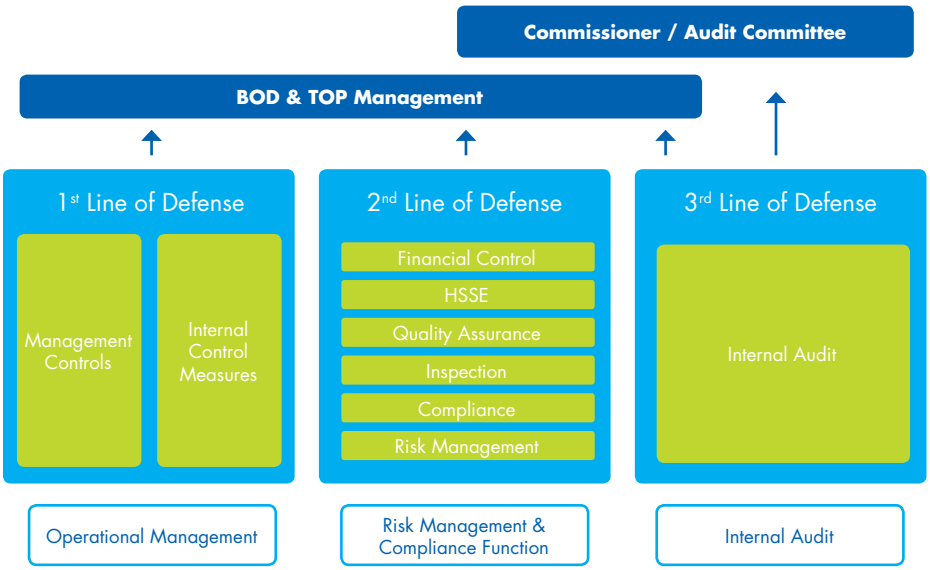

Source: The Institute of Innternal Auditors, IIA Position Paper – The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Controls,Jan 2013

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan penilaian maturitas pengelolaan Manajemen Risiko Pertamina. Pendekatan penilaian maturitas pengelolaan manajemen risiko terintegrasi yang digunakan di seluruh PT Pertamina (Persero), termasuk Anak-anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Survei dengan *e-kuisioner* yang dilakukan pada pekerja dengan jenjang Pelaksana dan Manajemen Dasar, serta;
2. *Interview* atau wawancara yang dilakukan pada Direksi Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero)

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maturitas pengelolaan Manajemen Risiko Pertamina mencapai pada tahap *Mature Growth* dengan beberapa *opportunity for improvement* yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan maturitas di seluruh Pertamina. Salah satu langkah dalam *opportunity for improvement* adalah dengan memperkuat *three lines of defense*. Pada tahun 2018, Pertamina mulai menentukan fungsi-fungsi yang terkait dalam pengelolaan *three lines of defense* di Pertamina. Hal ini merupakan landasan untuk program kerja pengelolaan Manajemen Risiko tahun 2019.

Model *three lines of defense* tersebut menunjukkan peran masing - masing tahap dalam mengendalikan pengelolaan risiko. Evaluasi manajemen risiko di Pertamina dibedakan menjadi 2 bagian yaitu Audit Manajemen Risiko dan *Risk-Based Audit* (RBA). Audit Manajemen Risiko merupakan pengkajian ulang dan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan risiko yang dibuat sedangkan RBA merupakan audit terhadap pengelolaan risiko di seluruh lini. RBA bersumber dari hasil penyusunan *Risk Register*. *Risk Register* tersebut menjadi salah satu materi penting dalam rencana audit dalam setahun. Secara prinsip, auditor akan melakukan *sampling* evaluasi atas efektivitas implementasi pengelolaan risiko atas potensi risiko teridentifikasi yang dicantumkan dalam rencana audit. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi atau temuan yang dilaporkan ke Manajemen Risiko Korporat dan *Risk Owner*. Rekomendasi atau temuan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbarui *Risk Register* dan atau melakukan perbaikan atau penambahan mitigasi agar menjadi lebih efektif.

PENCAPAIAN MANAJEMEN RISIKO DI PERTAMINA

Perkembangan era digital yang semakin pesat, mendorong Pertamina untuk melakukan digitalisasi termasuk dalam pengelolaan risiko. Oleh karena itu, sejak tahun 2014 *Enterprise Risk Management* mendorong dibentuknya sistem yang dapat diakses secara *real time.* ERM *System* dibentuk guna mempermudah *Risk Owner* untuk mendaftarkan risiko dan berfungsi sebagai *database* risiko Pertamina. Pengisian di ERM *System* dilakukan mulai tahun 2016 dan terus berkembang hingga kini. Selain mempermudah *Risk Owner* dalam mendaftarkan risiko, ERM *System* juga diharapkan dapat berfungsi sebagai *dashboard* pengelolaan risiko yang dapat dipantau langsung oleh Direksi.

Lini bisnis Pertamina dibedakan menjadi *Ongoing Business* dan *Business Development* sehingga pengelolaan risiko di Pertamina perlu dibedakan menjadi kedua lini bisnis tersebut, demikian pula dengan pembentukan ERM *System*. Secara garis besar, ERM *System* terbagi menjadi pengelolaan untuk *Ongoing Business* dan *Business Development.* Alur atau sistem pengoperasian tersebut dibentuk sesuai dengan standar operasional Pertamina.
Sebagai salah satu pengakuan dan penghargaan atas pengelolaan risiko yang telah dijalankan tersebut, Pertamina mendapatkan apresiasi dari ajang ASEAN RISK AWARDS yang diselenggarakan oleh *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017, Pertamina pertama kalinya mengikuti ASEAN Risk Award dan dinobatkan sebagai *Runner Up* dalam kategori Risk Champion. Penghargaan tersebut diberikan kepada organisasi yang terbukti dapat menunjukkan inovasi dalam pengelolaan risiko perusahaan. Kemudian pada tahun 2018, prestasi Pertamina semakin meningkat, dengan diperolehnya 4 (empat) nominasi dalam ASEAN Risk Award, yaitu nominasi untuk *Risk Technology*, *Public Initiative, Public Risk* dan ASEAN *Risk Champion*. Dari keempat nominasi tersebut, Pertamina memperoleh penghargaan sebagai *Runner Up* untuk kategori *Risk Technology* dan mendapatkan gelar dalam nominasi tertinggi dalam ASEAN Risk Award yaitu ASEAN *Risk Champion*.

Bentuk apresiasi atas pengelolaan risiko yang baik di Pertamina juga ditunjukkan dengan semakin banyak Perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara maupun Perusahaan Swasta yang melakukan studi banding pengelolaan risiko ke Pertamina. Hingga tahun 2018, Pertamina menerima permintaan *benchmark* dari belasan Perusahaan yang terdiri dari perusahaan tambang, penerbangan, keuangan, otomotif, pupuk, kereta api, kelistrikan, senjata, semen, asuransi, properti, baja, pengelola jalan tol, navigasi udara, konstruksi, pengelola bandara, *surveyor* dan juga universitas.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

PRINSIP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal Perseroan sejalan dengan sistem pengendalian internal yang berlaku secara internasional menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission* (COSO). Prinsip sistem pengendalian internal Pertamina terdiri dari beberapa komponen, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*) dan pemantauan (*monitoring*).

PENGENDALIAN AKTIVITAS OPERASIONAL DAN KEUANGAN DALAM PENGENDALIAN AKTIVITAS OPERASIONAL

Perseroan melakukan penegakan integritas dan nilai etika, mendorong pegawai untuk melaksanakan aturan dan kebijakan Perseroan, mengimbau pekerja untuk menampilkan sikap keteladanan dalam sikap dan perbuatan, menegakkan tindakan kedisiplinan atas pelanggaran peraturan, menetapkan kebijakan diskresi terkait intervensi terhadap kebijakan manajemen, meminimalisir potensi terjadinya benturan kepentingan, menyusun SOP dan standar kompetensi, mengupayakan kepemimpinan yang kondusif, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dalam pengendalian aktivitas keuangan, Pertamina menetapkan kebijakan mengenai pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) serta pelaksanaan evaluasinya. Penerapan kebijakan ini mengarahkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan efektivitas pengendalian intern baik tingkat entitas maupun transaksional termasuk pengendalian intern yang difasilitasi oleh *Information Technology* (*IT General Control & IT Application Control*). Dalam jangka panjang, penerapan ICoFR memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan atas efektivitas pengendalian intern dalam pelaporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap Perseroan dan Manajemen Perseroan.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

Pertamina telah mengadaptasi dan menyesuaikan penerapan sistem pengendalian internal dengan kerangka COSO dengan mengimplementasikan 5 komponen dan 17 prinsip yang ditentukan dalam kerangka COSO. Terkait dengan aspek manajemen risiko dalam *system* pengendalian internal, Pertamina juga merujuk pada (ISO) 31000:2009 *Risk Management - Principles and Guidelines*. Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan kerangka COSO bertujuan agar Pertamina mampu menentukan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan, memastikan efektivitas dan efsiensi penggunaan sumber daya, mengutamakan kepercayaan pelaporan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Secara berkala, Pertamina melakukan memonitor atas efektivitas pengendalian internal (*on-going monitoring*), kemudian dilanjutkan dengan evaluasi terpisah (*separate evaluation*) yang dilakukan oleh Pertamina Internal Audit dan menganalisis hasil yang didapatkan. Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal menjadi salah satu dasar evaluasi manajemen terhadap efektivitas sistem pengendalian internal untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan manajemen dapat secara lebih efektif menjalankan kegiatan operasional Perseroan. Pengendalian internal di lingkungan Perseroan senantiasa dievaluasi guna mengikuti perkembangan bisnis dan mendukung kinerja Perseroan.

KODE ETIK

POKOK-POKOK

Kode etik atau panduan etika Pertamina tercermin pada *Code of Conduct* (COC) terbaru yang disahkan pada tahun 2017 dan merupakan *improvement* atas COC sebelumnya. Terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang visi, misi, tata nilai unggulan, prinsip-prinsip GCG dan model-model perilaku, sebagai berikut:

1. Operasional yang memenuhi *health, safety, security* dan *environment*
2. Sumber daya manusia meliputi integritas dalam bekerja, sikap kerja profesional, kesempatan karier yang sama, serta menghindari diskriminasi.
3. Komitmen kepada mitra kerja dan pelanggan meliputi persaingan usaha yang sehat; hadiah, jamuan makan dan hiburan; tindak pidana pencucian uang; serta komitmen terhadap pelanggan.
4. Komitmen kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan meliputi komitmen terhadap pemerintah sebagai pemegang saham; komitmen terhadap *stakeholder*; tanggung jawab sosial dan lingkungan; aktivitas politik & organisasi profesi; serta keterbukaan informasi publik.
5. Perlindungan terhadap aset Perseroan, dengan ketentuan pokok untuk melindungi aset Perseroan; kerahasiaan data dan informasi; hak kekayaan intelektual; serta *Whistleblowing System*.

Buku COC ini dapat diunduh melalui website www.pertamina.com

PEMBERLAKUAN KODE PERILAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode Perilaku Pertamina bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh anggota organisasi dari setiap tingkatan jabatan di Pertamina. Pedoman Perilaku ini ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Perusahaan dan diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.Kpts-42/C00000/2017-S0 tanggal 22 Juni 2017. Pedoman ini dijadikan panduan bagi Insan Pertamina untuk selalu berperilaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Perusahaan berdasarkan nilai dan prinsip GCG.

SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN

Sosialisasi dan penyebarluasan Kode Perilaku dilakukan ke seluruh fungsi dan direktorat Pertamina melalui portal *Compliance Online System*, sosialisasi secara tatap muka dan pembentukan champion GCG.

KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI

Pertamina menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak dapat dihindarkan hubungan dan interaksi berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal, untuk menjalin kerja sama dan hubungan harmonis dan berkesinambungan. Dalam kerja sama tersebut, tidak dapat terhindarkan pula adanya gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Oleh karena itu, Pertamina senantiasa menjaga integritas Perusahaan dengan berkomitmen untuk menerapkan prinsip anti gratifikasi. Inisiasi anti gratifikasi disosialisasikan kepada seluruh Insan Pertamina demi menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya Perseroan. Kebijakan anti gratifikasi Pertamina tertuang dalam Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) No.A-002/N00010/2012-S0. Secara rutin, Pertamina juga aktif berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).

KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Ketentuan mengenai kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pertamina mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terkait dengan kewajiban LHKPN tersebut, berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-70/C00000/2017-S0 tanggal 30 November 2017, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menetapkan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terdiri dari:

1. Dewan Komisaris baik di Pertamina maupun Anak Perusahaan
2. Direksi baik di Pertamina maupun Anak Perusahaan
3. Senior Vice President/setara
4. Vice President/setara baik di Pertamina maupun Anak Perusahaan
5. Manajer/setara baik di Pertamina maupun Anak Perusahaan
6. Area/Unit/Region Manager
7. Komisaris Anak Perusahaan yang bukan Pejabat Tugas Perbantuan

Pada tahun 2018, Wajib Lapor di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan yang telah memenuhi kewajiban LHKPN adalah sebanyak 1.646 orang dari keseluruhan Wajib Lapor sejumlah 2.038 orang (tingkat kepatuhan LHKPN sebesar 81%).

KEBIJAKAN PARTISIPASI DALAM POLITIK

Perseroan menghormati hak berpolitik dan berserikat insan Pertamina. Perseroan bersikap netral dengan tidak berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian dan tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apa pun. Komitmen ini merupakan perwujudan atas dedikasi Pertamina dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Bentuk komitmen Pertamina tercantum dalam *Code of Conduct* Pertamina dan Surat Edaran Direktur SDM No.E-14/K00000/2018-S8 tentang Penegasan Kembali atas Netralitas dan Larangan Penggunaan Sumber Daya BUMN dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilihan Eksekutif dan Pemilihan Legislatif yang menetapkan sebagai berikut:

1. Insan Pertamina dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan Perusahaan dan memberikan sumbangan serta bantuan lain dalam bentuk apa pun yang mengatasnamakan Perusahaan, termasuk penggunaan sarana, fasilitas, dan dana Perusahaan untuk kepentingan Partai Politik.
2. Insan Pertamina dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau ornamen Partai Politik di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perusahaan.
3. Insan Pertamina dilarang membawa dan/atau menggunakan logo/simbol perseroan dan menggunakan sebutan jabatan di perseroan dalam aktivitas/partisipasi politik apapun.
4. Insan Pertamina wajib menghindari, menghentikan dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi/kelompok/golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif.
5. Insan Pertamina diimbau tidak menggunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, visi misi, dan informasi apapun terkait bakal calon/bakal pasangan calon eksekutif atau calon anggota legistatif.
6. Insan Pertamina dapat menjadi pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif atau calon/Pimpinan Daerah/Pemerintahan dengan mengajukan PHK sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perseroan.
7. Perusahaan mendukung Insan Pertamina untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi Pertamina.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Whistleblowing System (WBS) merupakan suatu sistem yang memberikan sarana kepada para pemangku kepentingan untuk membuat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan. Untuk menghindari potensi benturan kepentingan, pengelolaan WBS Pertamina bekerja sama dengan Konsultan Independen.

WBS Pertamina dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat melalui berbagai saluran pengaduan, yaitu:

Telepon	: (021) 381 5909/5910/5911
SMS dan Whatsapp	: 0811 861 5000
Faksimili	: (021) 381 5912
Situs	: https://pertaminaclean.tipoffs.info
Email	: pertaminaclean@tipoffs.com.sg
Pos	: P.O.Box 2600 JKP 10026

SISTEM PERLINDUNGAN PELAPOR

Perlindungan kepada Pelapor diberikan oleh Perusahaan dan dicantumkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan hal-hal yang dilaporkan; perlindungan hukum terhadap konsekuensi yang timbul akibat pelaporan; perlindungan terhadap gangguan/ancaman fisik bagi pelapor dan jaminan untuk tidak mendapatkan tindakan diskriminasi kepersonaliaan seperti hambatan dalam pembinaan karier, mutasi atau demosi. Selain itu Perusahaan juga memberikan ancaman PHK bagi atasan yang memberikan sanksi kepada pelapor.

PENGELOLA WBS

Sistem pelaporan pelanggaran Pertamina dikelola oleh konsultan internasional yang profesional dan bereputasi.

MEKANISME PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN WBS

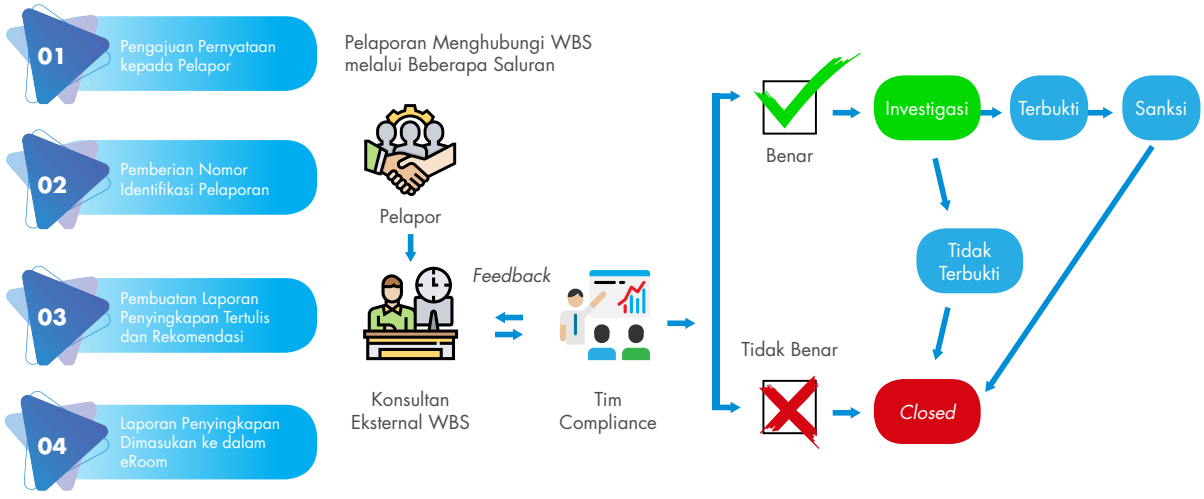

MEKANISME PENANGANAN DAN PENINDAKLANJUTAN LAPORAN WBS

Pengelolaan WBS dilakukan dengan prinsip rahasia, anonim dan independen. Setiap pengaduan yang masuk diterima oleh Konsultan Independen yang akan menganalisis dan meminta keterangan lebih detail kepada pelapor untuk kemudian disampaikan kepada Pertamina. Mekanisme penanganan laporan WBS dilakukan berdasarkan Tata Kerja Organisasi *Whistle Blowing System* No. B-001/M00000/2018-S0 Revisi ke-5 yang berlaku terhitung mulai tanggal 02 April 2018.

Setelah laporan diterima dari Konsultan Independen, Fungsi Compliance akan melakukan penelaahan awal untuk meyakini apakah laporan WBS tersebut benar dan layak untuk diinvestigasi. Proses investigasi akan dilaksanakan oleh Fungsi Internal Audit. Tindak lanjut penanganan laporan pengaduan WBS dilakukan dengan sinergi antara lain Fungsi Legal Counsel & Compliance, Fungsi Security, *Bunker & Operation Compliance* (BOC) dan Internal Audit.

JUMLAH LAPORAN WBS DAN SANKSI YANG DIBERIKAN

Selama tahun 2018 telah diterima dan ditindaklanjuti 95 laporan WBS, dengan jumlah laporan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 25 laporan dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 70 laporan. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel Rincian Kategori WBS (September)

No	Kategori	Jumlah
1.	Korupsi	11
2.	Penyuapan	3
3.	Konflik Kepentingan	10
4.	Pencurian	22
5.	Penipuan	12
6.	Pelanggaran Hukum dan Peraturan	37
7.	Lainnya	0
	Total tahun 2018	95

Tabel Jumlah Pengaduan

Tahun	Jumlah Pengaduan WBS	Selesai Ditindaklanjuti
2018	95	25
2017	75	27
2016	69	34

INFORMASI DAN KLARIFIKASI PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
▸ Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Tabel Informasi dan Klarifikasi Praktik Bad Corporate Governance

Praktik	Penjelasan
Ada/tidaknya praktik GCG yang belum menjadi standar praktik GCG yang baik	Praktik GCG yang dijalankan Perseroan telah mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Perseroan tidak menerima adanya laporan dari pihak internal dan eksternal terkait pencemaran lingkungan.
Perkara penting yang sedang dihadapi	Daftar perkara penting telah disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.
Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Perseroan telah mematuhi kewajiban perpajakan dan tidak menerima adanya teguran dan sanksi terkait dengan kegiatan perpajakan.
Ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAK	Perseroan telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

"Sebagai warga korporasi yang baik, Pertamina menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dua orang pria berpakaian tradisional Betawi tengah bertanding adu ketangkasan bela diri. Pertandingan yang disebut seni bela diri pencak silat ini merupakan seni budaya yang banyak berkembang di berbagai daerah Indonesia, mulai dari Betawi, Jawa Barat, hingga Sumatera Barat. Ia memiliki filosofi yang tinggi yaitu setiap langkah harus dilakukan dengan pikiran dan hati tenang penuh kewaspadaan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Sudah lebih dari 60 tahun Pertamina berdiri. Dari tahun ke tahun Pertamina tumbuh, berkembang, dan mencapai kemajuan-kemajuan luar biasa sebagai perusahaan energi nasional. Pertamina menyadari bahwa kemajuan-kemajuan tersebut tidaklah terwujud dengan upaya sendiri, melainkan melalui sinergi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat. Melalui bisnisnya, Pertamina tidak hanya berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan tapi juga bagi masyarakat luas. Nilai tambah ini tidak hanya berupa energi sumber daya alam yang dirasakan oleh orang banyak melainkan juga "energi" positif lainnya, seperti akses terhadap pendidikan yang lebih baik, kemandirian ekonomi, serta pelestarian lingkungan, yang pada akhirnya untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sesuai visi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina.

Secara konkret, misi CSR Pertamina mencakup sebagai berikut :

- Melaksanakan komitmen korporat atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang akan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.
- Melaksanakan tanggung jawab korporat dan kepedulian sosial untuk sebuah pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Prinsip CSR Pertamina mengacu pada ISO 26000, yaitu:

- Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
- Mempertimbangkan ekspektasi semua stakeholder
- Taat hukum dan konsisten dengan norma internasional.
- Terintegrasi ke dalam bisnis.

Dalam hal mengintegrasikan program CSR ke dalam kegiatan bisnis korporasi, Pertamina berkomitmen untuk:

- Mengatasi dampak negatif operasi perusahaan melalui kepatuhan terhadap regulasi serta menciptakan nilai baru yang lebih baik kepada masyarakat dan lingkungan.
- Memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan kepada masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi perusahaan.
- Meningkatkan regulasi perusahaan, efisiensi, pertumbuhan usaha, dan menerapkan mitigasi risiko bisnis.

Dalam melaksanakan CSR, Pertamina berlandaskan pada strategi-strategi besar sebagai berikut :

1. Saling memberi manfaat.
2. Berkelanjutan.
3. Prioritas masyarakat wilayah operasi dan terkena dampak.
4. Pengembangan energi hijau dan selaras dengan PROPER-LH.
5. Sosialisasi dan publikasi yang efektif.

Dengan wilayah operasi dan spektrum bisnis yang sangat luas dengan pemangku kepentingan yang beragam karakteristik serta kondisinya, Pertamina mengacu pada 3 konsep CSR dalam pelaksanaannya, yaitu CSR sebagai filantropi perusahaan, CSR sebagai manajemen risiko, dan CSR sebagai *value creation*. Pertamina mengelompokkan program CSR dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ke dalam 4 pilar.

"SINERGI BERBAGI"

Pertamina percaya bahwa dengan sinergi akan menghasilkan proses kerja yang lebih positif. Sinergi tidak hanya mempercepat pencapaian tujuan tapi juga menghasilkan dampak positif yang lebih besar dan luas. Di tahun 2018, Pertamina memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program CSR, baik dengan pemangku kepentingan eksternal maupun dengan Anak Perusahaan serta afiliasi.

Sinergi dengan masyarakat selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program CSR Pertamina. Sebagai pemangku kepentingan eksternal yang menerima manfaat secara langsung dari Program CSR yang dilaksanakan, maka sinergi antara masyarakat dan Pertamina merupakan kunci dalam keberhasilan program tersebut. Bentuk-bentuk sinergi yang dikembangkan antara Pertamina dengan masyarakat adalah dalam lingkup pemberdayaan masyarakat yang kemudian akan melahirkan kemandirian masyarakat. Program Desa Binaan dan Kawasan Ekonomi Masyarakat yang saat ini sudah diimplementasikan dan tersebar ke seluruh wilayah Indonesia merupakan perwujudan nyata dari hasil sinergi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat tersebut.

Selain dengan masyarakat, Pertamina juga bersinergi dengan pihak-pihak lain dalam mengimplementasikan program-program CSR yang dikembangkan, termasuk diantaranya dengan BUMN-BUMN lainnya. Salah satu perwujudan Program CSR dalam kerangka sinergi antar BUMN adalah Program 100 Taman Bacaan. Bersinergi dengan PT Balai Pustaka dan PT Pos Indonesia, program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2016. Contoh lain dari sinergi antar BUMN yang sudah dijalankan adalah pembangunan rumah ramah gempa di wilayah Lombok yang merupakan hasil sinergi antara PT PERTAMINA (Persero) dengan PT Adi Karya.

Seperti sudah disampaikan di atas, sinergi akan menghasilkan dampak posiif yang lebih besar dan luas. Hal ini terbukti dari hasil sinergi antara PT PERTAMINA (Persero) dengan salah satu anak perusahaannya, yaitu PT Pertamina Lubricants. Dari hasil sinergi dalam program Enduro Student Program, program CSR yang dilaksanakan dapat dikembangkan lebih lanjut hingga menjadi program yang bersifat *Creating Shared Value* (CSV). Pengembangan dalam program CSV merupakan tingkatan lebih tinggi dari program CSR yang dilaksanakan, di mana aspek sosial menjadi salah satu faktor yang ditekankan dalam menyusun strategi bisnis perusahaan.

PERTAMINA CERDAS

Telah menjadi pemahaman yang diyakini secara umum bahwa kemajuan suatu bangsa dan negara sangat ditentukan oleh pendidikan masyarakatnya. Untuk itu pendidikan menjadi hal yang fundamental dalam pembangunan masyarakat. Pertamina melalui pilar Pertamina Cerdas berupaya memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan generasi muda.

Salah satu program unggulan Pertamina Cerdas adalah Beasiswa Sobat Bumi. Yang membedakan Beasiswa Sobat Bumi Pertamina dengan program beasiswa lainnya adalah lingkup peruntukan penerima beasiswa yang mempunyai cakupan lebar, yaitu selain pelajar berprestasi, terdapat juga penerima beasiswa dalam kerangka apresiasi yang dikhususkan pada atlet. Selain itu, terdapat juga kerangka sosial dalam menyalurkan Beasiswa Sobat Bumi dengan penerima penyandang disabilitas dan anak-anak yang orang tuanya mengalami kecelakaan kerja. Selain itu, Beasiswa Sobat Bumi juga menyasar kepada penerima di Kawasan Timur Indonesia. Di tahun 2018 Pertamina mengelola dana Beasiswa Sobat Bumi dengan penerima sebanyak 405 orang siswa. Hingga 2018, total penerima Beasiswa Sobat Bumi mencapai 1.157 orang.

PERTAMINA SEHAT

Selain pendidikan, kesehatan jasmani menjadi salah satu faktor penting dalam membangun masyarakat. Pertamina meyakini bahwa kualitas kesehatan generasi suatu bangsa harus dimulai sejak di dalam kandungan sang ibu. Keyakinan tersebut menjadi landasan salah satu program unggulan pilar Pertamina Sehat, yaitu Pertamina Sehati. Pertamina Sehati menyasar pada ibu hamil, menyusui, bayi, dan balita. Cakupan program Pertamina Sehati meliputi revitalisasi posyandu, pelaksanaan *capacity building* kader-kader posyandu, *awareness* dan aktivasi terhadap para ibu pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta merancang dan menerapkan dasar-dasar kemandirian untuk posyandu-posyandu binaan program Pertamina Sehati.

Sejalan dengan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals*, yaitu kehidupan sehat sejahtera, dan juga dengan program nawacita yang digagas oleh pemerintah Republik Indonesia, Pertamina Sehati mempunyai target 0,08% dalam hal *maternal mortality ratio* di tahun 2020. Pertamina Sehati menyasar pada daerah-daerah sekitar Unit Operasi dan Anak Perusahaan Pertamina serta pada wilayah yang termasuk *remote area* dan wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) sehingga mempermudah dan meningkatkan akses kesehatan yang selama ini sulit didapatkan di daerah-daerah tersebut, dengan melibatkan komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam menekan tingkat kematian ibu melahirkan dan kesehatan anak balita. Pada tahun 2018, program Pertamina Sehati diterapkan di tidak kurang dari 29 Posyandu dari total Posyandu yang sudah melaksanakan program tersebut hingga tahun 2018.

PERTAMINA HIJAU

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri ekstraktif, Pertamina memiliki kepedulian besar untuk memberi manfaat kembali kepada alam. Pertamina menyadari betapa alam turut mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. Melalui sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, Pertamina membuat dan melaksanakan program-program pelestarian lingkungan.

Dua Program besar yang diusung Pertamina dalam kerangka memberikan kembali kepada alam adalah program Penanaman Mangrove dan Keanekaragaman Hayati. Sepanjang tahun 2018, Pertamina melakukan penanaman mangrove sebanyak 52.000 Pohon Mangrove merupakan pohon yang dapat tumbuh di daerah pesisir. Hal tersebut jugalah yang membuat Pertamina memilih jenis pohon ini untuk ditumbuhkembangkan, mengingat kebanyakan wilayah operasi Pertamina juga berada di tepi laut atau sungai besar. Selain itu, pohon mangrove juga menyediakan banyak efek domino terhadap peningkatan keanekaragaman Hayati di wilayah tersebut, seperti kepiting bakau, beragam jenis ikan, serangga, dan juga hewan-hewan yang mengkonsumsi biji atau buah mangrove. Sementara itu, kawasan penanaman mangrove yang sudah terbentuk dengan baik dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian bagi warga sekitar, tidak hanya dari pengelolaan hasil pohon mangrove berupa produk-produk kuliner dan kerajinan, namun juga dengan dijadikannya kawasan tersebut sebagai kawasan argowisata. Hutan Mangrove Karangsong merupakan salah satu contoh keberhasilan program penanaman mangrove tersebut.

Sementara itu, program lainnya yang digalakkan adalah Keanekaragaman Hayati. Secara garis besar, program ini bertujuan untuk melestarikan kekayaan flora dan fauna endemik asli Indonesia. Melalui unit operasi yang tersebar di seluruh Indonesia, Pertamina menyadari bahwa setiap wilayah Indonesia mempunyai satwa atau tumbuhan endemik asli daerah tersebut yang sudah berstatus langka, sangat langka, atau bahkan di ambang kepunahan. Oleh karena itu, Pertamina melaksanakan program Keanekaragaman Hayati sebagai upaya melestarikan atau bahkan dapat meningkatkan kekayaan alam asli Indonesia tersebut. Tidak kurang dari 25 jenis flora dan fauna menjadi sasaran program ini. Di tahun 2018 saja, terdapat 25 Program Keanekaragaman Hayati yang dilakukan, yang meliputi antara lain Konservasi elang laut di Kepulauan Seribu, konservasi tuntong laut di Aceh Tamiang, konservasi yaki hitam di Bitung.

PERTAMINA BERDIKARI

Pertamina percaya bahwa bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis di mana keuntungan yang dihasilkan perusahaan harus turut menciptakan "efek domino" bagi perekonomian masyarakat sekitar. Melalui CSR, Pertamina telah banyak menciptakan program-program yang mendukung terwujudnya ekonomi masyarakat lokal yang mandiri. Pertamina telah membina lebih dari 100 Desa Binaan dan Kawasan Ekonomi Masyarakat di tahun 2018. Program ini merupakan program pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Pertamina sebagai BUMN turut mendukung peningkatan kualitas UMKM melalui program Rumah Kreatif BUMN. Hingga 2018, Pertamina telah membina sebanyak 15 Rumah Kreatif BUMN.

Rumah Kreatif BUMN (RKB) merupakan rumah bersama untuk berkumpul, belajar dan membina para pelaku UMKM menjadi UMKM Indonesia yang berkualitas, serta sebagai wadah bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk **Digital Economy Ecosystem** melalui pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM itu sendiri.

RKB berperan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UMKM

Rumah Kreatif BUMN akan **mendampingi dan mendorong** para pelaku UMKM dalam menjawab tantangan utama pengembangan usaha UMKM dalam hal

- Peningkatan kompetensi
- Peningkatkan Akses Pemasaran
- Kemudahkan Akses Permodalan

Dukungan Pertamina terhadap UMKM juga diwujudkan melalui pinjaman lunak sebagai modal usaha bagi UMKM dari dana Program Kemitraan. Program ini sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02-MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dana untuk pelaksanaan Program Kemitraan ditetapkan berasal dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina, yaitu maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

Program Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi usaha kecil dan pemberdayaan sosial masyarakat agar menjadi tangguh dan mandiri. Dalam penerapan Program Kemitraan Pertamina juga bekerja sama dengan BUMN lain serta lembaga-lembaga lain yang relevan.

Di sini Pertamina menyediakan pinjaman kemitraan bergulir kepada Mitra Binaan yaitu perorangan, baik dengan sistem kluster atau bentuk kelompok untuk permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pembinaan Mitra Binaan juga diberikan melalui kegiatan pameran nasional maupun internasional, pelatihan, workshop ekspor impor dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pertamina telah menerapkan program kemitraan sejak tahun 1993. Hingga saat ini total sudah 60.338 UMKM yang bergabung menjadi mitra binaan Pertamina dengan total penyaluran Program Kemitraan sebesar Rp 3.371.666.349.575 di mana realisasi tahun 2018 sebesar Rp 265.371.258.000,- dan tingkat efektifitas penyaluran dana sebesar 31,46%.

Realisasi Penyaluran Dana CSR

Bidang	Realisasi Penyaluran Dana CSR (% terhadap total realisasi)
Pendidikan	25,9
Kesehatan	9,1
Lingkungan Hidup	12,2
Pemberdayaan	52,8
Total	100,0

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan

Jenis Usaha	Jumlah Mitra Binaan	Realisasi Penyaluran Cana PK (% terhadap total realisasi)
Sektor Industri	253	5,8
Sektro Perdagangan	609	11,1
Sektor Pertanian	103	2,2
Sektor Peternakan	164	4,3
Sektor Perkebunan	5	58,9
Sektor Perikanan	520	15,2
Sektor Jasa	120	2,4
Sektor Lainnya	4	0,1
Total		100,0
Hibah		4,4

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan

Jenis Bantuan	Realisasi Penyaluran Cana BL (% terhadap total realisasi)
Bantuan Bencana Alam	4,0
Bantuan Pendidikan & Pelatihan	24,4
Bantuan Kesehatan Masyarakat	10,9
Bantuan Prasarana Umum	34,9
Bantuan Sarana Ibadah	19,1
Bantuan Pelestarian Alam	1,9
Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan	4,9
Total	100,0

ENERGI DI TENGAH BENCANA

Gempa yang terjadi pada 5 Agustus 2018 di Lombok memberikan, dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Sebagai aksi tanggap darurat, Pertamina membentuk beberapa Posko Tanggap Darurat Gempa Lombok.Posko Utama berada di pusat lokasi gempa, Posko I berada di DPPU Lombok, dan Posko II berada di Ampenan.

DPPU Lombok berperan sebagai lokasi pertama penerimaan dan penjemputan logistik bantuan dari seluruh daerah yang berikutnya disalurkan ke Posko II. Pertamina mendedikasikan satu *refueller*-nya di Selaparang untuk TNI AU sebagai bentuk bantuan pelayanan dukungan udara dan program rekonstruksi lokasi bencana.

Tanggal 28 September 2018 terjadi bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah (Palu, Donggala, dan Sigi). Bencana alam tersebut mengakibatkan dampak kerusakan sarfas di DPPU Mutiara dan TBBM Donggala serta terganggunya kegiatan suplai Avtur dari TBBM Donggala ke DPPU Mutiara. Sebagai aksi tanggap darurat, Pertamina membentuk Posko Pertamina Peduli di TBBM Donggala dan DPPU Mutiara.

Untuk menjamin keandalan suplai Avtur kepada pelanggan, khususnya pesawat dalam rangka bantuan dan evakuasi korban bencana, DPPU Mutiara memberlakukan RAE suplai dari TBBM Makassar, TBBM Gorontalo dan TBBM Luwuk.

Untuk mendukung kegiatan operasional DPPU Mutiara, beberapa pekerja relawan DPPU dari seluruh Indonesia didatangkan untuk membantu kelancaran operasional DPPU Mutiara. Di samping itu, DPPU Hasanuddin berperan sebagai DPPU Penyangga untuk mensuplai kebutuhan logistik (material sarfas dan QC, ATK, makanan dan lainnya) untuk kelancaran operasional DPPU Mutiara.

Selain dalam pemenuhan BBM Avtur dalam tanggap darurat, Pertamina melalui Industrial Fuel Marketing melalukan canvasing melalui mobil tangki eceran untuk pemenuhan kebutuhan BBM khususnya untuk PLN, Basarnas serta Instansi – Instansi Pemerintah sehingga operasional untuk pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan Tanggal 22 Desember 2018 terjadi bencana alam tsunami selat sunda yang melanda daerah pesisir Pantai Cilegon, Banten dan sekitarnya. Pertamina berinisiatif menggalang bantuan dengan mendirikan Posko Pusat Logistik Pertamina Group di Terminal BBM Tanjung Gerem. Seluruh bantuan yang terkumpul di Terminal BBM Tanjung Gerem disalurkan kelima posko yang ada di sekitar lokasi bencana yaitu posko Carita, posko Anyer, posko Labuan yang dikoordinir oleh Kementerian BUMN, posko Lebak, dan posko Pandeglang.

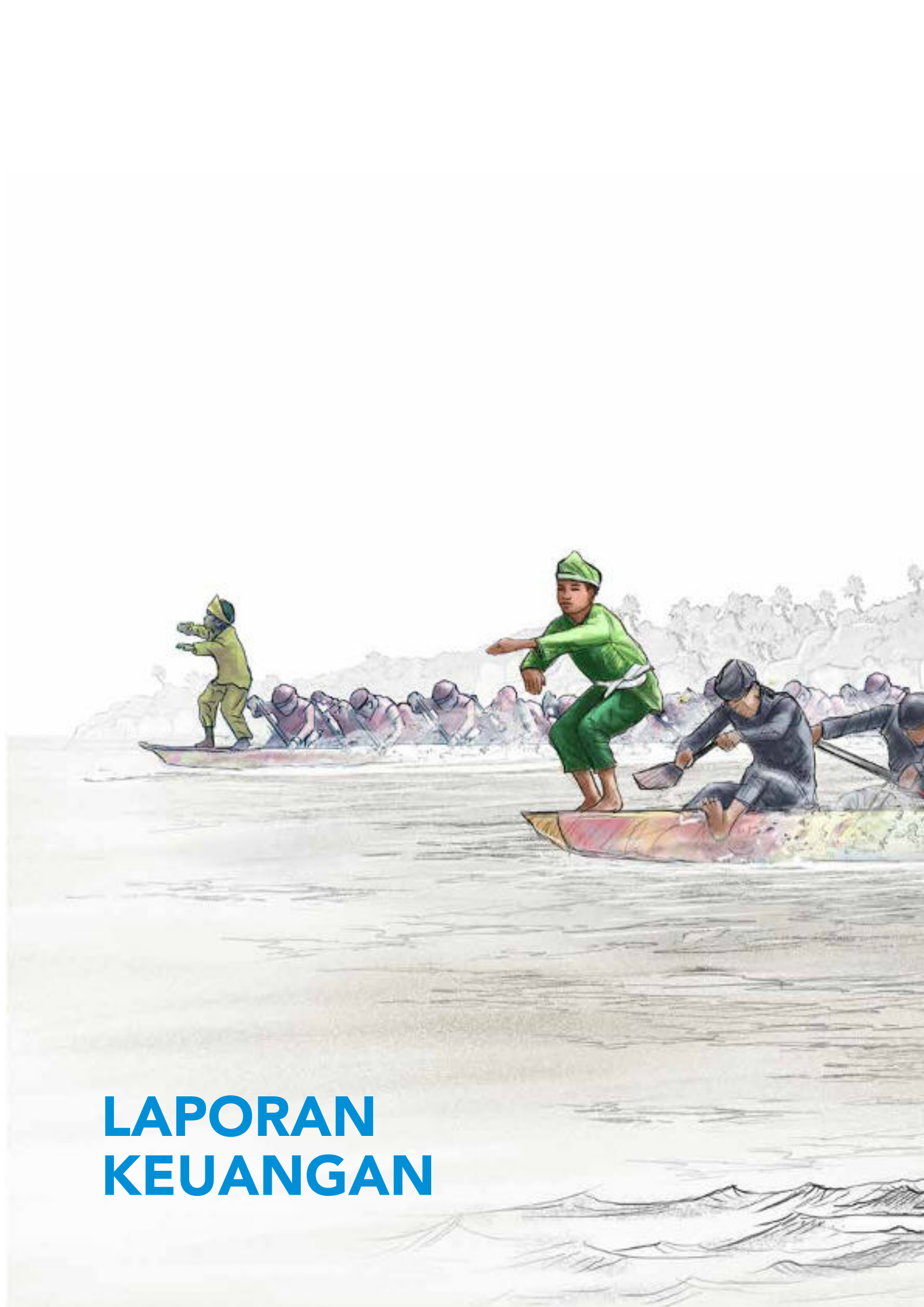

LAPORAN KEUANGAN

Beberapa regu dayung dengan pakaian tradisonal tengah perpacu adu cepat di sebuah sungai yang besar. Perlombaan ini merupakan salah satu budaya masyarakat tradisional Riau yang disebut pacu jalur. Pacu Jalur memiliki filosofi yang mendalam tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mencapai sebuah kesuksesan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT PERTAMINA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-6
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	7-8
Laporan Arus Kas Konsolidasian	9-10
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	11-157
Informasi Keuangan Tambahan	158-167

****

PERTAMINA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN
1 JANUARI 2017/31 DESEMBER 2016
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Pahala N. Mansury
   Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Timur 1A
   Jakarta 10110
   Telepon : 021 - 3815200
   Jabatan : PTH. Direktur Utama

2. Nama : Pahala N. Mansury
   Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Timur 1A
   Jakarta 10110
   Telepon : 021 - 3815400
   Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya ("Grup");

2. Laporan Keuangan Konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Mei 2019
Atas nama dan mewakili Direksi

Pahala N. Mansury	Pahala N. Mansury
PTH. Direktur Utama	**Direktur Keuangan**

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01326/2.1032/AU.1/02/0684-4/1/V/2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Pertamina (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memeroleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Building a better working world

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01326/2.1032/AU.1/02/0684-4/1/V/2019 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 51 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Perusahaan menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan pemutakhiran atas pengungkapan transaksi serta basis pencatatan pengakuan pendapatan dan piutang dari pemerintah atas kekurangan penerimaan yang berasal dari selisih Harga Jual Eceran ("HJE") formula dan HJE penetapan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan ("JBKP") Premium di luar wilayah Jawa, Madura, dan Bali ("Non Jamali") tahun 2018. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-hal lain

Sebelum disajikan dan diterbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 01241/2.1032/AJ.1/02/0684-4/1/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019 yang menyatakan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai suatu informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01326/2.1032/AU.1/02/0684-4/1/V/2019 (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Drs. Hari Purwantono
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0684

28 Mei 2019

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

			Disajikan kembali (Catatan 5)	
	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017	1 Januari 2017/ 31 Desember 2016
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2g,2h,6	9.112.312	6.409.827	6.721.568
Kas yang dibatasi penggunaannya	2g,2h,7	108.915	119.671	122.697
Investasi jangka pendek	2h	225.199	249.282	130.820
Piutang usaha	2h,2i			
Pihak berelasi	2f,41a	1.297.651	1.095.016	1.422.268
Pihak ketiga	8a	1.933.455	1.580.627	1.442.452
Piutang Pemerintah - bagian lancar	2h,9	1.834.261	1.492.625	1.792.457
Piutang lain-lain	2h,2i			
Pihak berelasi	2f,41b	149.178	255.054	242.839
Pihak ketiga	8b	734.312	620.460	649.798
Persediaan	2j,10	6.323.165	6.036.137	4.795.022
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	2u,40a	820.598	794.255	567.621
Beban dibayar di muka dan uang muka	2k	534.987	476.326	503.382
Investasi lainnya	2h,11	80.171	27.328	43.190
Jumlah Aset Lancar		**23.154.204**	**19.156.608**	**18.434.114**
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang Pemerintah - dikurangi bagian lancar	2h,9	2.924.148	663.114	-
Aset pajak tangguhan	2u,40e	1.441.866	1.371.080	751.463
Penyertaan jangka panjang	2h,2m,12	2.819.054	2.970.918	3.329.439
Aset tetap	2n,2o,13	12.859.274	12.439.511	12.156.785
Aset minyak dan gas serta panas bumi	2o,2p,14	18.614.286	18.031.374	16.397.662
Pajak dibayar di muka - dikurangi bagian lancar	2u,40a	820.287	829.300	1.469.767
Aset tidak lancar lainnya	2h,15	2.085.333	1.977.470	1.436.864
Jumlah Aset Tidak Lancar		**41.564.248**	**38.282.767**	**35.541.980**
JUMLAH ASET		**64.718.452**	**57.439.375**	**53.976.094**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

			Disajikan kembali (Catatan 5)	
	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017	1 Januari 2017/ 31 Desember 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman jangka pendek	2h,16	4.347.035	452.879	230.293
Utang usaha	2h			
Pihak berelasi	2f,41c	78.781	49.277	118.540
Pihak ketiga	17	3.597.777	3.900.121	3.290.665
Utang Pemerintah - bagian lancar	2h,18	1.207.743	1.050.619	952.545
Utang pajak	2u,40b			
Pajak penghasilan		467.605	308.803	475.576
Pajak lain-lain		258.405	250.533	251.553
Beban akrual	2h,19	2.135.509	2.019.896	1.596.612
Liabilitas jangka panjang - bagian lancar	2h,2o,20	420.577	365.959	722.200
Utang lain-lain	2h			
Pihak berelasi	2f,41d	54.011	56.625	50.947
Pihak ketiga		1.203.426	1.121.494	1.026.808
Pendapatan tangguhan - bagian lancar		202.013	260.838	177.499
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**13.972.882**	**9.837.044**	**8.893.238**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Pemerintah - dikurangi bagian lancar	2h,18	795.082	780.626	732.573
Liabilitas pajak tangguhan	2u,40e	3.307.406	2.848.152	2.528.517
Liabilitas jangka panjang - dikurangi bagian lancar	2h,2o,20	1.805.300	2.109.767	2.716.909
Utang obligasi	2h,21	11.094.096	10.385.873	9.772.656
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2s,22	1.850.383	2.208.220	2.058.732
Provisi pembongkaran dan restorasi	2q,23	2.029.735	2.129.337	1.900.093
Pendapatan tangguhan - dikurangi bagian lancar		74.623	42.716	65.715
Utang jangka panjang lain-lain	2h	178.905	84.373	62.903
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**21.135.530**	**20.589.064**	**19.838.098**
JUMLAH LIABILITAS		**35.108.412**	**30.426.108**	**28.731.336**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

			Disajikan kembali (Catatan 5)	
	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017	1 Januari 2017/ 31 Desember 2016
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham				
Modal dasar - 600.000.000 (2018) dan 200.000.000 (2017 dan 2016) saham biasa - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham; Ditempatkan dan disetor - 171.227.044 saham (2018), 133.090.697 saham (2017 dan 2016)	25a	16.191.204	13.417.047	13.417.047
Tambahan modal disetor	2e,4a,25b	(924.296)	2.736	2.736
Ekuitas *merging entities*		-	1.804.579	1.801.742
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	26	401.120	1.361	1.361
Komponen ekuitas lainnya		607.564	487.699	664.617
Saldo laba	27			
- Ditentukan penggunaannya		8.796.357	6.871.101	4.631.441
- Belum ditentukan penggunaannya		2.526.772	2.540.195	3.147.043
		27.598.721	25.124.718	23.665.987
Kepentingan non-pengendali	2c,24	2.011.319	1.888.549	1.578.771
JUMLAH EKUITAS		**29.610.040**	**27.013.267**	**25.244.758**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**64.718.452**	**57.439.375**	**53.976.094**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	Disajikan kembali (Catatan 5) 2017
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya:	2r		
Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak	28	44.742.511	39.788.784
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah	29	5.632.468	3.572.084
Penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi dan produk minyak	30	3.636.953	1.874.281
Imbalan jasa pemasaran		15.432	25.474
Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya	31	3.906.207	740.100
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA		**57.933.571**	**46.000.723**
Beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya:	2r		
Beban pokok penjualan	32	(42.787.916)	(33.175.656)
Beban produksi hulu dan *lifting*	33	(4.386.516)	(3.421.207)
Beban eksplorasi	34	(267.680)	(165.356)
Beban dari aktivitas operasi lainnya	35	(1.271.977)	(862.962)
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA		**(48.714.089)**	**(37.625.181)**
LABA BRUTO		**9.219.482**	**8.375.542**
Beban penjualan dan pemasaran	2r,36	(1.642.831)	(1.590.202)
Beban umum dan administrasi	2r,37	(1.329.911)	(1.598.934)
Laba selisih kurs, neto	2r,2t	19.622	58.137
Pendapatan keuangan	2r,38	256.573	233.074
Beban keuangan	2r,38	(835.238)	(817.711)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama	2c,2r	122.724	37.904
Beban lain-lain, neto	2r,39	(80.825)	(830.582)
		(3.489.886)	(4.508.314)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**5.729.596**	**3.867.228**
Beban pajak penghasilan, neto	2u,40c	(3.013.202)	(1.166.824)
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*		**2.716.394**	**2.700.404**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	Disajikan kembali (Catatan 5) 2017
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*		**2.716.394**	**2.700.404**
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak):			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti, neto	2s	228.498	(129.059)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak):			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2c,2t	(79.561)	7.060
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	2c,2m	(130.775)	(25.134)
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lainnya tahun berjalan setelah pajak		18.162	(147.133)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN *MERGING ENTITIES*		**2.734.556**	**2.553.271**
Penyesuaian atas laba *merging entities*:			
Pemilik entitas induk		(45.770)	(81.537)
Kepentingan non-pengendali	2c	(34.585)	(66.248)
		(80.355)	**(147.785)**
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		2.526.772	2.540.195
Kepentingan non-pengendali	2c	109.267	12.424
		2.636.039	**2.552.619**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	Disajikan kembali (Catatan 5) 2017
Penyesuaian penghasilan komperehensif lainnya atas *merging entities*:			
Pemilik entitas induk		(42.546)	(80.710)
Kepentingan non-pengendali	2c	(32.682)	(65.549)
		(75.228)	**(146.259)**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN *MERGING ENTITIES* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		2.536.559	2.363.277
Kepentingan non-pengendali	2c	122.769	43.735
		2.659.328	**2.407.012**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk										
						Komponen ekuitas lainnya		Saldo laba				
	Catatan	Modal saham ditempatkan dan disetor	Ekuitas *merging entites*	Tambahan modal disetor	Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Ekuitas lainnya	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2017/ 31 Desember 2016 (disajikan kembali)		**13.417.047**	**1.801.742**	**2.736**	**1.361**	**(304.201)**	**968.818**	**4.631.441**	**3.147.043**	**23.665.987**	**1.578.771**	**25.244.758**
Dampak konsolidasi saldo awal kepentingan non-pengendali Etablissements Maurel et Prom		-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.158	252.158
Penyesuaian laba komprehensif lainnya atas *merging entities*		-	80.710	-	-	-	-	-	-	80.710	65.549	146.259
Penyesuaian transaksi ekuitas lain entitas *merging entities*		-	(77.873)	-	-	-	-	-	-	(77.873)	(51.664)	(129.537)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2c,2t	-	-	-	-	1.225	-	-	-	1.225	3.271	4.496
Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-	-	-	-	-	(55.421)	-	-	(55.421)	28.050	(27.371)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti, neto	2s	-	-	-	-	-	(122.722)	-	-	(122.722)	(10)	(122.732)
Pembagian dividen	2aa,27	-	-	-	-	-	-	-	(907.383)	(907.383)	-	(907.383)
Alokasi cadangan lain	27	-	-	-	-	-	-	2.239.660	(2.239.660)	-	-	-
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	2.540.195	2.540.195	12.424	2.552.619
Saldo 31 Desember 2017/ (disajikan kembali)		**13.417.047**	**1.804.579**	**2.736**	**1.361**	**(302.976)**	**790.675**	**6.871.101**	**2.540.195**	**25.124.718**	**1.888.549**	**27.013.267**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk										
						Komponen ekuitas lainnya		Saldo laba				
	Catatan	Modal saham ditempatkan dan disetor	Ekuitas *merging entites*	Tambahan modal disetor	Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Ekuitas lainnya	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2018/ 31 Desember 2017 (disajikan kembali)		**13.417.047**	**1.804.579**	**2.736**	**1.361**	**(302.976)**	**790.675**	**6.871.101**	**2.540.195**	**25.124.718**	**1.888.549**	**27.013.267**
Penyesuaian laba komprehensif lainnya atas *merging entities*		-	42.546	-	-	-	-	-	-	42.546	32.682	75.228
Perubahan atas kepemilikan di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi		-	-	-	-	-	13.710	-	-	13.710	68.814	82.524
Kapitalisasi uang muka untuk penerbitan saham		2.774.157	(1.847.125)	(927.032)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	26	-	-	-	399.759	-	-	-	-	399.759	-	399.759
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2c,2t	-	-	-	-	(59.338)	-	-	-	(59.338)	(20.223)	(79.561)
Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-	-	-	-	-	(69.138)	-	-	(69.138)	(61.637)	(130.775)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti, neto	2s	-	-	-	-	-	234.631	-	-	234.631	(6.133)	228.498
Pembagian dividen	2aa,27	-	-	-	-	-	-	-	(614.939)	(614.939)	-	(614.939)
Alokasi cadangan lain	27	-	-	-	-	-	-	1.925.256	(1.925.256)	-	-	-
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	2.526.772	2.526.772	109.267	2.636.039
Saldo 31 Desember 2018		**16.191.204**	**-**	**(924.296)**	**401.120**	**(362.314)**	**969.878**	**8.796.357**	**2.526.772**	**27.598.721**	**2.011.319**	**29.610.040**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	Disajikan kembali (Catatan 5) 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan		48.878.496	40.220.288
Penerimaan kas dari Pemerintah		7.805.648	3.787.855
Penerimaan kas dari restitusi pajak		185.016	616.698
Pembayaran kas kepada pemasok		(38.227.640)	(29.261.802)
Pembayaran kas kepada Pemerintah		(11.279.557)	(7.524.628)
Pembayaran pajak penghasilan badan		(2.688.175)	(2.100.297)
Pembayaran kas kepada pekerja dan manajemen		(1.640.855)	(1.540.805)
Penerimaan dari (penempatan pada) kas yang dibatasi penggunaannya		73.109	(156.047)
Penerimaan bunga		63.327	35.616
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi		**3.169.369**	**4.076.878**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Hasil dari pelepasan investasi jangka pendek		198.439	99.870
Hasil dari pelepasan investasi jangka panjang		-	15.801
Penerimaan bunga dari investasi		13.784	18.240
Penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya		262.222	28.681
Hasil penjualan aset tetap		176	102
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi		214.083	81.648
Pembelian aset tetap		(1.287.975)	(981.944)
Pembelian aset minyak dan gas serta panas bumi		(1.482.518)	(891.964)
Penempatan penyertaan jangka panjang		(1.062.244)	(659.992)
Penempatan investasi jangka pendek		(237.577)	(226.322)
Pembayaran aset eksplorasi dan evaluasi		(99.538)	(37.200)
Penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya		(22.614)	(29.433)
Kas yang diterima karena perubahan pengendalian		-	203.230
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi		**(3.503.762)**	**(2.379.283)**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	Disajikan kembali (Catatan 5) 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari pinjaman jangka pendek	46	9.489.219	4.039.533
Penerimaan dari penerbitan obligasi	46	734.407	-
Penerimaan dari pinjaman jangka panjang	46	255.931	1.288.204
Pembayaran pinjaman jangka pendek	46	(5.583.278)	(3.786.723)
Pembayaran pinjaman jangka panjang	46	(465.351)	(2.109.038)
Pembayaran dividen	27,46	(585.755)	(867.751)
Pembayaran beban keuangan		(538.489)	(523.147)
Pembayaran obligasi	46	(37.649)	-
Penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya		(312)	(13.249)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		**3.268.723**	**(1.972.171)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		**2.934.330**	**(274.576)**
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas		(231.845)	(37.165)
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	6	**6.409.827**	**6.721.568**
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	6	**9.112.312**	**6.409.827**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

1. UMUM

a. PT Pertamina (Persero) ("Perusahaan")

i. Profil Perusahaan

PT Pertamina (Persero) ("Perusahaan") didirikan sesuai dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., No. 20 tanggal 17 September 2003. Akta pendirian Perusahaan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003 dan melalui Surat Edaran No. 93 lampiran No. 11620 tanggal 21 November 2003. Pendirian Perusahaan didasarkan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas ("PT"), Peraturan Pemerintah ("PP") No. 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dan PP No. 31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang perubahan status Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Badan Usaha Milik Negara ("Persero").

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir diaktakan untuk menambah modal Perusahaan, dengan Akta Notaris of Aulia Taufani, S. H., No. 29 tertanggal 13 April 2018, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0008395.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 13 April 2018.

Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 2003, seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak dan perjanjian-perjanjian antara Entitas Pertamina sebelumnya dan pihak ketiga, yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang Undang No. 22 Tahun 2001, dialihkan ke Perusahaan. Sesuai PP No. 31 Tahun 2003, tujuan dari Perusahaan adalah untuk terlibat dalam kegiatan usaha minyak dan gas di pasar domestik maupun pasar luar negeri dan kegiatan bisnis terkait lainnya. Dalam menjalankan usahanya, tujuan Perusahaan adalah memperoleh pendapatan dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia.

Pada tanggal pendirian Perusahaan, seluruh aktivitas minyak dan gas serta panas bumi Entitas Pertamina sebelumnya, termasuk operasi bersama (*joint operations)* dengan perusahaan lain, dialihkan ke Entitas Anak Perusahaan. Seluruh karyawan Entitas Pertamina sebelumnya menjadi karyawan Perusahaan.

ii. Kegiatan usaha dan alamat utama

Sesuai dengan Akta No. 29 tanggal 13 April 2018 oleh Notaris Aulia Taufani S.H., yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi melalui Surat Keputusan No. AHU-0008395.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 13 April 2018, Perusahaan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi;
b. Melaksanakan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi;
c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang energi listrik, termasuk tetapi tidak terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi energi panas bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTPB"), Pembangkit Listrik Tenaga Gas ("PLTG") dan energi listrik yang dihasilkan Perseroan;
d. Melaksanakan kegiatan pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak ("BBM"), Bahan Bakar Khusus, Bahan Bakar Non-Minyak, Petrokimia, Bahan Bakar Diesel, Gas Alam Cair ("LNG"), dan Gas Cair ("GTL") maupun produk-produk intermedia;
e. Melaksanakan kegiatan penyediaan bahan baku, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*);

1. UMUM (lanjutan)

a. PT Pertamina (Persero) ("Perusahaan") (lanjutan)

ii. Kegiatan usaha dan alamat utama (lanjutan)

f. Melaksanakan kegiatan pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, BBM, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil/produk lainnya untuk tujuan komersil;
g. Melaksanakan kegiatan penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, BBM, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil/produk lainnya untuk tujuan komersil;
h. Melaksanakan kegiatan niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, BBM, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil/produk lainnya, penyaluran gas bumi melalui pipa termasuk niaga energi listrik yang dihasilkan Perseroan; dan
i. Melaksanakan kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi dan niaga energi baru dan terbarukan, *Coal Bed Methane* ("CBM"), Batu Bara Cair, Batu Bara Tergaskan (*Gasified Coal*), *Shale Gas*, *Shale Oil*, Bahan Bakar Nabati, Energi Surya, Energi Angin, dan Biomasa.

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
a. *Trading house, real estate*, pergudangan, pariwisata, resor, olah raga dan rekreasi, *rest area*, rumah sakit, pendidikan, penelitian, prasarana, telekomunikasi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan, jalan bebas hambatan (tol) dan pusat perbelanjaan/mall;
b. Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus;
c. Pengelolaan Kawasan Industri (*industrial complex*); dan
d. Kegiatan usaha lainnya yang menunjang dan terkait usaha utama Perusahaan.

mempunyai aktivitas pengolahan yang meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah menjadi produk minyak dan produksi *Liquified Petroleum Gas* ("LPG") dan petrokimia (*paraxylene* dan *propylene*). Perusahaan memiliki enam Unit Pengolahan ("UP") dengan kapasitas pengolahan terpasang sebagai berikut:

UP			Kapasitas pengolahan minyak mentah terpasang (barrel/hari) (tidak diaudit)
UP II	-	Dumai dan Sungai Pakning, Riau	170.000
UP III	-	Plaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan	133.700
UP IV	-	Cilacap, Jawa Tengah	348.000
UP V	-	Balikpapan, Kalimantan Timur	260.000
UP VI	-	Balongan, Jawa Barat	125.000
UP VII	-	Kasim, Papua Barat	10.000

Perusahaan, melalui entitas anaknya, juga melakukan beberapa kegiatan usaha seperti yang dijelaskan dalam Catatan 1b dan 43.

Alamat utama kantor pusat Perusahaan adalah Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A, Jakarta, Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

a. PT Pertamina (Persero) ("Perusahaan") (lanjutan)

iii. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Komisaris Utama	Tanri Abeng[a]	Tanri Abeng[a]
Wakil Komisaris Utama	Arcandra Tahar	Arcandra Tahar
Komisaris	Sahala Lumban Gaol	Sahala Lumban Gaol
Komisaris	Suahasil Nazara	Suahasil Nazara
Komisaris	Ahmad Bambang[c]	Edwin Hidayat Abdullah
Komisaris	Alexander Lay[a,c]	Alexander Lay[b]
Komisaris	Ego Syahrial[c]	-

[a] Komisaris Independen
[b] Efektif sejak 12 September 2017 berdasarkan keputusan RUPS No. SK-194/MBU/09/2017
[c] Efektif sejak 30 Mei 2018 berdasarkan keputusan RUPS No. SK-142/MBU/05/2018

Susunan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Direktur Utama	Nicke Widyawati[b]	Elia Massa Manik
Direktur Pemasaran	-	Muchamad Iskandar
Direktur Pemasaran Korporat	Basuki Trikora Putra[a]	-
Direktur Pemasaran Ritel	Mas'ud Khamid[a]	-
Direktur Hulu	Dharmawan H. Samsu[b]	Syamsu Alam
Direktur Gas	-	Yenni Andayani
Direktur Keuangan	Pahala N. Mansury[c]	Arief Budiman
Direktur Sumber Daya Manusia	Koeshartanto[b]	Nicke Widyawati
Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur	Gandhi Sriwidodo[a]	-
Direktur Pengolahan	Budi Santoso Syarif[a]	Toharso
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia	Ignatius Tallulembang[c]	Ardhy N. Mokobombang
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko	Heru Setiawan[c]	Gigih Prakoso
Direktur Manajemen Aset	M. Haryo Yunianto[a]	Dwi Wahyu Daryoto

[a] Efektif sejak 20 April 2018 berdasarkan keputusan RUPS No. SK-97/MBU/04/2018
[b] Efektif sejak 29 Agustus 2018 berdasarkan keputusan RUPS No. SK-232/MBU/08/2018
[c] Efektif sejak 13 September 2018 berdasarkan keputusan RUPS No. SK-242/MBU/09/2018

1. UMUM (lanjutan)

a. PT Pertamina (Persero) ("Perusahaan") (lanjutan)

iii. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Ketua	Tanri Abeng[a]	Tanri Abeng[a]
Wakil Ketua	Sahala Lumban Gaol[c]	Sahala Lumban Gaol
Wakil Ketua	Ahmad Bambang[c]	Edwin Hidayat Abdullah
Anggota	-	Dwi Martani
Anggota	Agus Yulianto[b]	Agus Yulianto[b]
Anggota	Bonar Lumban Tobing[b]	Bonar Lumban Tobing[b]

[a] Efektif sejak 6 Mei 2015 berdasarkan surat keputusan No. SK-60/MBU/05/2015
[b] Efektif sejak 1 Januari 2016 berdasarkan surat keputusan keputusan No. 023/KPTS/K/DK/2015
[c] Efektif sejak 18 Juli 2018 berdasarkan surat keputusan keputusan No. 005/KPTS/DK/2018

iv. Jumlah Karyawan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Grup memiliki masing-masing sebanyak 31.569 dan 30.118 karyawan tetap (tidak diaudit).

b. Entitas anak, entitas asosiasi dan pengaturan bersama

i. Entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Grup memiliki pengendalian secara langsung maupun tidak langsung, pada entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Tahun pendirian	Persentase kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
		2018	2017	2018	2017
Eksplorasi dan produksi minyak dan gas					
1. PT Pertamina Hulu Energi	1990	100,00%	100,00%	4.531.667	4.780.787
2. PT Pertamina EP	2005	100,00%	100,00%	7.498.644	7.621.461
3. PT Pertamina EP Cepu	2005	100,00%	100,00%	2.992.894	2.608.022
4. Pertamina E&P Libya Limited, British Virgin Island	2005	100,00%	100,00%	154	154
5. PT Pertamina East Natuna	2012	100,00%	100,00%	129	129
6. PT Pertamina EP Cepu ADK	2013	100,00%	100,00%	12.847	18.534
7. PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	2013	100,00%	100,00%	5.841.041	5.776.299
8. ConocoPhillips Algeria Limited, Cayman Island *)	2013	100,00%	100,00%	774.216	1.065.720
9. PT Pertamina Hulu Indonesia	2015	100,00%	100,00%	1.478.109	304.838
10. PT Pertamina Hulu Rokan**)	2018	100,00%	-	785.000	-
Eksplorasi dan produksi panas bumi					
11. PT Pertamina Geothermal Energy	2006	100,00%	100,00%	2.556.651	2.408.120
Jasa pengeboran minyak dan gas					
12. PT Pertamina Drilling Services Indonesia	2008	100,00%	100,00%	560.423	574.402

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak, entitas asosiasi dan pengaturan bersama (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Entitas Anak	Tahun pendirian	Persentase kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
		2018	2017	2018	2017
Jasa pengolahan dan penjualan hasil olahan minyak dan gas, konstruksi dan perminyakan, teknologi informasi dan telekomunikasi					
13. PT Elnusa Tbk	1969	41,10%	41,10%	390.995	358.319
Perdagangan minyak dan gas bumi, transportasi gas, pemrosesan, distribusi dan penyimpanan minyak dan gas					
14. PT Pertamina Gas***)	2007	-	100,00%	-	1.926.760
15. PT Perusahaan Gas Negara Tbk***)	2018	56,96%	-	8.764.437	6.293.129
Ketenagalistrikan					
16. PT Pertamina Power Indonesia	2016	100,00%	100,00%	114.721	99.726
Jasa perdagangan dan aktivitas industri					
17. PT Pertamina Patra Niaga	1997	100,00%	100,00%	908.986	960.394
18. Pertamina International Timor S.A	2015	95,00%	95,00%	36.643	28.677
Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ("SPBU")					
19. PT Pertamina Retail	1997	100,00%	100,00%	203.312	150.643
Pengolahan dan pemasaran pelumas					
20. PT Pertamina Lubricants	2013	100,00%	100,00%	413.332	500.637
Perkapalan					
21. PT Pertamina Trans Kontinental	1969	100,00%	100,00%	307.519	287.014
22. PT Pertamina International Shipping	2016	100,00%	100,00%	296.335	217.466
Jasa pengangkutan udara					
23. PT Pelita Air Service	1970	100,00%	100,00%	60.380	65.300
Manajemen investasi					
24. PT Pertamina Pedeve Indonesia (dahulu PT Pertamina Dana Ventura)	2002	100,00%	100,00%	62.098	71.327
Jasa pengembangan sumber daya manusia					
25. PT Pertamina Training & Consulting	1999	100,00%	100,00%	39.799	40.768
Sewa perkantoran, perumahan dan hotel					
26. PT Patra Jasa	1975	100,00%	100,00%	236.119	229.394
Jasa kesehatan dan pengoperasian rumah sakit					
27. PT Pertamina Bina Medika	1997	100,00%	100,00%	105.743	111.006
Jasa asuransi					
28. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk ("ATPI") (dahulu PT Tugu Pratama Indonesia) ****)	1981	58,50%	65,00%	923.376	836.387

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak, entitas asosiasi dan pengaturan bersama (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Entitas Anak	Tahun pendirian	Persentase kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
		2018	2017	2018	2017
Kilang Pengolahan					
29. PT Kilang Pertamina Internasional	2017	100,00%	100,00%	1.836	738
Liquified Natural Gas* ("LNG") *regasification					
30. PT Nusantara Regas*****)	2010	82,78%	60,00%	240.817	277.438

*) Efektif dilikuidasi pada tanggal 28 Februari 2019
**) Catatan 4g
***) Catatan 4a
****) Catatan 4j
*****) Catatan 4b

ii. Entitas asosiasi

Entitas asosiasi dengan kepemilikan langsung pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Entitas Asosiasi	Persentase kepemilikan	Kegiatan usaha
1. PPT Energy Trading Co., Ltd.	50,00%	Jasa pemasaran
2. PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	48,59%	Jasa pengolahan dan penjualan hasil olahan minyak dan gas

Entitas asosiasi dengan kepemilikan tidak langsung pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Entitas Asosiasi	Persentase kepemilikan	Kegiatan usaha
1. PT Donggi Senoro LNG	29,00%	Pengolahan LNG
2. PT Asuransi Samsung Tugu	19,50%	Asuransi
3. Seplat Petroleum Development Company Plc, ("Seplat") Nigeria	21,37%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
4. PT Gas Energi Jambi	22,78%	Transportasi dan distribusi gas bumi

iii. Pengaturan bersama

Ventura bersama dengan kepemilikan tidak langsung pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Ventura bersama	Persentase kepemilikan	Kegiatan usaha
1. PT Patra SK	35,00%	Pengolahan *Lube Base Oil* (LBO)
2. PT Perta-Samtan Gas	66,00%	Pengolahan LNG
3. PT Perta Daya Gas	65,00%	Regasifikasi LNG
4. PT Indo Thai Trading	51,00%	Perdagangan petrokimia
5. PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia	55,00%	Pengembangan kilang minyak bumi dan petrokimia

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak, entitas asosiasi dan pengaturan bersama (lanjutan)

iii. Pengaturan bersama (lanjutan)

Ventura bersama	Persentase kepemilikan	Kegiatan usaha
6. PT Transportasi Gas Indonesia (Transgasindo)	59,87%	Transportasi gas bumi melalui jaringan pipa transmisi
7. Unimar LLC	50,00%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
8. PT Permata Karya Jasa ("Perkasa")	60,00%	Jasa perbengkelan, pembinaan, dan penyaluran tenaga kerja

PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia ("PRPP") didirikan oleh Akta Notaris No. 13 tanggal 28 November 2017 dari Mina NG, SH., M.KN., Akta Pendirian PRPP telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-0053838.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 28 November 2017.

Tanggal 24 Januari 2018, berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perkasa, Grup tidak lagi mengendalikan Perkasa. Pada 31 Desember 2018, Grup mengakui investasi pada Perkasa sebagai investasi ventura bersama.

Tanggal 11 April 2018, Perusahaan memiliki kendali atas PT Nusantara Regas. Sebelumnya, Perusahaan mengakui investasi pada PT Nusantara Regas sebagai investasi ventura bersama (Catatan 4b).

Operasi bersama dengan kepemilikan tidak langsung adalah sebagai berikut:

Operasi bersama	Persentase kepemilikan	Kegiatan usaha
1. Natuna 2 B.V., Belanda	50,00%	Eksplorasi dan produksi

Grup menganggap keberadaan hak keikutsertaan substantif dari pemegang saham nonpengendali PT Perta-Samtan Gas, PT Perta Daya Gas, PT Indo Thai Trading dan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia menyebabkan pemegang saham tersebut memiliki pengendalian bersama atas kebijakan keuangan dan operasional yang penting. Dengan pertimbangan hak yang dimiliki pemegang saham nonpengendali tersebut, Grup tidak memiliki pengendalian atas kebijakan keuangan dan operasional penting di PT Perta-Samtan Gas, PT Perta Daya Gas, PT Indo Thai Trading dan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia meskipun Grup memiliki kepemilikan saham lebih dari 50%.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Grup sesuai dengan standar akuntasi keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"). Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 oleh Grup.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang dicatat berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi akun tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan mengklasifikasikan arus kas menjadi kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat (US$ atau Dolar AS), mata uang fungsional Grup, kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

i. Penerapan dari standar dan interpretasi baru/revisi berikut, tidak menimbulkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan efek material terhadap laporan keuangan konsolidasian

Standar baru, revisi terhadap standar yang telah ada dan interpretasi berikut ini, telah diterbitkan dan wajib untuk diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku Grup yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 atau periode setelahnya. Grup telah mengadopsinya tetapi tidak ada dampak signifikan terhadap bisnis Grup saat ini.

- Amendemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amendemen PSAK 13: Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

ii. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut:

Berlaku efektif 1 Januari 2019

- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka yang mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi dalam menentukan kurs yang digunakan dalam pengakuan awal suatu aset, beban atau pendapatan ketika entitas menerima atau membayar imbalan di muka dalam mata uang asing.

- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang merupakan interpretasi atas PSAK 46: Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

- Amendemen PSAK 24: Imbalan Kerja yang memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi akturial pada awal periode pelaporan tahunan) dan mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

ii. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2019 (lanjutan)

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): Kombinasi Bisnis yang mengklarifikasi bahwa ketika salah satu pihak dalam suatu pengaturan bersama, memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan suatu operasi bersama (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66), dan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut sesaat sebelum tanggal akuisisi, transaksi tersebut adalah kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap.

- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): Biaya Pinjaman yang mengklarifikasi bahwa tarif kapitalisasi biaya pinjaman adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode namun entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai.

- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan yang menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): Pengaturan Bersama yang Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama dapat memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama dalam hal aktivitas operasi bersama merupakan suatu bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 22: Kombinasi Bisnis). Dalam kasus demikian, kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama tidak diukur kembali.

- Amendemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, yang mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

- Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi, yang mengizinkan yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 (*deferral approach*) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (*overlay approach*) untuk aset keuangan yang ditetapkan.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

ii. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2019 (lanjutan)

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73: Sewa, kodengan penerapan dini diperkenankan khusus bagi entitas yang telah menerapkan PSAK 72 yang menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui hak guna aset (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset terkait (*underlying assets*) bernilai rendah.

- Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif yang mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian.

c. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas itu.

Grup menilai kembali apakah masih mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian Grup pada entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada Entitas Anak, maka Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, Kepentingan Non-pengendali ("KNP") dan komponen ekuitas lainnya serta mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian. Saldo investasi yang masih dimiliki diakui pada nilai wajarnya.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Jika anggota Grup menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang serupa, maka penyesuaian dilakukan atas laporan keuangannya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip konsolidasi (lanjutan)

Seluruh saldo akun dan transaksi yang signifikan antara Perusahaan dengan Entitas Anak telah dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil dari operasi Grup sebagai satu kesatuan bisnis.

KNP merupakan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang diatribusikan kepada kepemilikan atas ekuitas yang secara langsung atau tidak langsung tidak dimiliki oleh Perusahaan, yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan sebagai ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ("OCI") diatribusikan kepada pemilik entitas Induk dari Grup dan KNP, meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Untuk tujuan konsolidasi entitas anak yang menggunakan mata uang selain dari Dolar AS sebagai mata uang fungsional, aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Di sisi lain, pendapatan dan beban dijabarkan menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia ketika periode laba rugi.

Perbedaan yang muncul dari penjabaran laporan keuangan entitas anak tersebut ke dalam Dolar AS disajikan sebagai akun "Pendapatan komprehensif lainnya - Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" sebagai bagian komponen ekuitas lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian bagian ekuitas.

d. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 22 (Revisi 2015). Biaya perolehan dari suatu akuisisi diukur dari nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan dicatat dalam "Beban Penjualan, Umum dan Administrasi".

Ketika Grup melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan atas derivatif yang melekat pada kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepemilikan atas ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang terjadi dalam laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang akan dibayarkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi atau sebagai pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensinya tidak diukur kembali sampai penyelesaian terakhir dalam ekuitas.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Pada tanggal akuisisi, pertama kali *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dibayarkan dan jumlah yang diakui untuk KNP dibandingkan dengan jumlah dari aset teridentifikasi dan liabilitas yang diperoleh. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, setiap akhir periode *goodwill* akan diuji penurunan nilai.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis dialokasikan sejak tanggal akuisisi kepada setiap unit penghasil kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan memperoleh manfaat dari kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang mengakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu dalam UPK tersebut dilepas, maka *goodwill* yang terasosiasi dengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan operasi. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dilepas dan porsi UPK yang ditahan.

Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 22 (Revisi 2015), apabila proses akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan pada saat kombinasi terjadi, Kelompok Usaha melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Kelompok Usaha menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

Perusahaan mengklasifikasikan investasi pada PT Badak Natural Gas Liquefaction ("Badak NGL") sebagai investasi aset keuangan tersedia untuk dijual pada harga perolehan karena secara substansi Perusahaan tidak memiliki pengendalian pada perusahaan tersebut karena operasinya dikendalikan oleh para produsen gas bumi. Investasi ini diukur dengan menggunakan harga perolehan karena nilai wajarnya sulit untuk diukur secara handal.

e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, dalam bentuk transfer bisnis dalam bentuk reorganisasi entitas dalam grup yang sama dalam substansi ekonomi bukan merupakan perubahan kepemilikan, oleh karena itu, transaksi tersebut tidak akan menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi grup sebagai induk maupun entitas individu dalam grup yang sama sehingga transaksi dicatat menggunakan metode penyatuan kepemilikan *(pooling-of-interests method).*

Entitas yang melepas dan menerima bisnis mencatat perbedaan antara imbalan diterima/ditransfer dan bisnis dilepas/jumlah tercatat seluruh transaksi kombinasi bisnis dalam ekuitas dan menyajikannya dalam akun "Tambahan Modal Disetor" *(Additional Paid-in Capital)*.

Dalam penerapan metode *pooling-of-interests*, komponen laporan keuangan pada periode di mana kombinasi bisnis terjadi dan untuk periode lain yang disajikan sebagai pembanding, disajikan seolah-olah kombinasi bisnis terjadi sejak awal periode di mana entitas-entitas tersebut ada dalam satu pengendali.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Transaksi-transaksi pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai PSAK 7 (Revisi 2015): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, bank dan semua deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi cerukan.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun disajikan sebagai Kas yang dibatasi penggunaannya dan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian disajikan dalam Aset tidak lancar lainnya.

h. Instrumen keuangan

i. Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif. Pengklasifikasian ini tergantung pada hakikat dan tujuan aset keuangan diperoleh dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

Aset keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diakui pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran setelah pengakuan

Pengukuran setelah pengakuan awal atas aset keuangan bergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan (lanjutan)

iii. Aset keuangan tersedia untuk dijual
Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam dua kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iv. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo
Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap dan liabilitas tetap dan jangka waktu jatuh tempo diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo pada saat Grup memiliki niat dan kemampuan yang positif untuk mempertahankannya hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Amortisasi SBE diakui sebagai pendapatan keuangan dalam laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui dalam laba rugi sebagai beban keuangan.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau suatu kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Kriteria yang digunakan Grup untuk menentukan bahwa ada bukti objektif dari suatu penurunan nilai meliputi:

i. debitur gagal membayar atau menunggak pembayaran;
ii. kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur;
iii. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
iv. pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan kepada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
v. terdapat kemungkinan besar bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
vi. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
vii. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi ke aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk antara lain:
    1. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
    2. kondisi ekonomi lokal dan nasional yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebesar selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto dengan menggunakan Suku Bunga Efektif ("SBE") awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos provisi. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui akan dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos provisinya. Jumlah pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan jumlahnya tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dilakukan seandainya tidak ada penurunan nilai.

Aset yang tersedia untuk dijual

Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan aset tersebut mengalami penurunan nilai yang signifikan dan dalam jangka panjang atau terdapat bukti yang objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi.

Kerugian penurunan nilai atas instrumen ekuitas yang telah diakui pada laporan laba rugi tidak dapat dipulihkan melalui laporan laba rugi. Kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui di OCI.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

(i) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
(ii) Grup telah mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) Grup secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Grup secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan lainnya yang tidak tersedia untuk diperdagangkan atau tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Grup yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan lainnya meliputi pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang Pemerintah, beban akrual, liabilitas jangka panjang, utang lain-lain, utang obligasi dan utang jangka panjang lain-lain.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

i. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

ii. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya akrual bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Penghentian pengakuan

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Metode suku bunga efektif ("SBE")

Metode SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan, transaksi derivatif dan akuntansi lindung nilai

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

iv. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai

Grup menggunakan instrumen keuangan kontrak *forward* dan *option* mata uang asing untuk melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing. Instrumen keuangan tersebut pada awalnya diakui sebesar nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif dimulai dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat nilai wajarnya positif dan sebagai liabilitas keuangan saat nilai wajarnya negatif.

Perusahaan mempunyai kontrak *forward* dan *option* antar mata uang yang digunakan sebagai lindung nilai atas eksposur perubahan dalam arus kas sehubungan dengan perubahan nilai tukar mata uang asing. Kontrak *forward* dan *option* tersebut tidak memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai.

i. Piutang

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika lebih, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

j. Persediaan

Persediaan minyak mentah dan persediaan produk minyak dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.

Biaya perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata dan termasuk semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang terjadi untuk membawa persediaan ke tempat dan kondisi saat ini.

Nilai realisasi neto untuk produk BBM bersubsidi adalah berdasarkan nilai terendah antara harga ketetapan dan harga formula untuk bulan berikutnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Persediaan (lanjutan)

Nilai realisasi neto untuk produk LPG tabung 3 kg adalah harga kontrak LPG Aramco ditambah biaya distribusi dan margin (*alpha*) dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan.

Persediaan material seperti suku cadang, bahan kimia dan sebagainya, dicatat berdasarkan metode rata-rata. Persediaan material tidak termasuk persediaan usang, tidak terpakai dan lambat pergerakannya yang disajikan dalam akun Aset lain-lain dan menjadi bagian dari Aset Tidak Lancar Lainnya.

Penyisihan penurunan nilai persediaan usang, tidak terpakai dan lambat pergerakannya dilakukan berdasarkan analisis manajemen terhadap kondisi material tersebut pada akhir tahun.

k. Biaya dibayar di muka dan uang muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode manfaat masing-masing biaya.

l. Aset dimiliki untuk didistribusikan kepada Perusahaan

Aset dimiliki untuk didistribusikan kepada Perusahaan dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

m. Penyertaan jangka panjang

i. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan diakui awalnya sebesar harga perolehan. Nilai investasi Grup atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi, dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi setelah akusisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas penghasilan komprehensif lain.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi.

ii. Properti investasi

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang dikuasai Grup untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha normal.

Properti investasi diukur dengan menggunakan metode biaya, yang dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya penggantian bagian properti investasi, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya operasi penggunaan properti tersebut.

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berkisar antara 10 (sepuluh) sampai 25 (duapuluh lima) tahun yang merupakan estimasi umur manfaat ekonomisnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Penyertaan jangka panjang (lanjutan)

ii. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut ditarik secara permanen dari penggunaan dan tidak ada manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemiliknya atau dimulainya sewa operasi ke pihak lain. Transfer dari properti investasi juga dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik.

Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Grup menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan Grup menjadi properti investasi, Grup mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

n. Aset tetap

Perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi aktiva tetap sesuai dengan ketentuaan dalam PSAK 16 (Revisi 2015) sebagai berikut:

Pemilikan langsung

Tanah diakui sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya, kecuali tanah, dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Grup mengakui biaya perbaikan dan pemeliharaan yang bersifat signifikan sebagai aset tetap. Nilai tercatat yang terkait dengan komponen yang diganti tidak diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya dibebankan dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	5-25
Kilang	10-20
Bangunan	5-25
Kapal laut dan pesawat terbang	6-25
Harta benda modal (“HBM”) bergerak	5-20
Biaya perbaikan dan pemeliharaan signifikan	3

Pada setiap akhir tahun buku, nilai sisa, umur manfaat dan metode penyusutan aset ditinjau ulang dan disesuaikan secara prospektif sebagaimana mestinya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Pemilikan langsung (lanjutan)

Apabila suatu aset tetap sudah tidak digunakan atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Aset dalam penyelesaian

Aset dalam penyelesaian merupakan biaya-biaya yang berhubungan secara langsung dengan pembangunan dan akuisisi aset tetap dan biaya-biaya lainnya. Biaya-biaya tersebut akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pembangunan selesai.

o. Sewa

Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

Grup sebagai *Lessee*

i. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar yang lebih kecil nilai wajar aset sewaan dan nilai kini pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung dalam laporan laba rugi.

ii. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui pada laporan laba rugi dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Grup sebagai *Lessor*

Sewa dimana grup tidak mengalihkan secara subtansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

p. Aset minyak dan gas serta panas bumi

i. Aset eksplorasi dan evaluasi

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan evaluasi minyak dan gas serta panas bumi dicatat dengan menggunakan metode akuntansi *successful efforts*. Biaya-biaya yang terjadi diakumulasikan berdasarkan lapangan per lapangan.

Biaya geologi dan geofisika dibebankan pada saat terjadi.

Biaya-biaya untuk memperoleh hak eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dicatat sebagai biaya perolehan aset yang belum terbukti jika cadangan terbukti belum ditemukan, atau sebagai biaya perolehan aset terbukti bila cadangan terbukti telah ditemukan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Aset minyak dan gas serta panas bumi (lanjutan)

i. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Biaya-biaya pengeboran sumur eksplorasi dan biaya-biaya pengeboran-sumur tes stratigrafi, dikapitalisasi sebagai bagian dari aset dalam penyelesaian - sumur eksplorasi dan evaluasi, di dalam aset minyak dan gas bumi hingga ditentukan apakah sumur tersebut menemukan cadangan terbukti. Jika sumur tersebut tidak menemukan cadangan terbukti, biaya pengeboran sumur yang telah dikapitalisasi akan dibebankan ke dalam laporan laba rugi sebagai beban sumur kering (*dry hole*).

Selanjutnya, aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi dari aset eksplorasi dan evaluasi ketika prosedur evaluasi telah selesai. Aset eksplorasi dan evaluasi yang cadangannya secara komersial telah terbukti akan direklasifikasi menjadi aset pengembangan. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilai sebelum direklasifikasi keluar dari aset eksplorasi dan evaluasi.

ii. Aset pengembangan

Biaya-biaya pengeboran sumur dalam pengembangan termasuk biaya pengeboran sumur pengembangan yang tidak menghasilkan dan sumur pengembangan stratigrafi dikapitalisasi sebagai bagian dari aset dalam penyelesaian sumur pengembangan hingga proses pengeboran selesai. Pada saat pengembangan sumur telah selesai pada lapangan tertentu, maka sumur tersebut akan ditransfer sebagai sumur produksi.

iii. Aset produksi

Aset produksi merupakan agregasi aset eksplorasi dan evaluasi dan pengeluaran pengembangan yang berhubungan dengan sumur berproduksi. Aset produksi dideplesikan menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti yang telah dikembangkan sejak dimulainya produksi komersialnya dari masing-masing lapangan.

iv. Aset minyak dan gas serta panas bumi lainnya

Aset minyak dan gas serta panas bumi lainnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis atau masa Kontrak Kerja Sama ("KKS") yang relevan, mana yang lebih rendah, sebagai berikut:

	Tahun
Instalasi	3-30
Pabrik LPG	10-20
Bangunan	5-30
HBM bergerak	2-27
Sumur panas bumi	10-20

Tanah dan hak atas tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah minimal setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan terjadi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Aset minyak dan gas serta panas bumi (lanjutan)

iv. Aset minyak dan gas serta panas bumi lainnya (lanjutan)

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Akumulasi biaya atas pembangunan, instalasi, atau penyelesaian bangunan, pabrik dan fasilitas infrastruktur seperti anjungan dan saluran pipa dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke aset tetap yang relevan pada saat pembangunan atau instalasinya telah siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada saat tersebut.

v. Hak kepemilikan atas operasi unitisasi

Aset bersama adalah aset dimana setiap pihak mempunyai hak dan kepemilikan bersama. Setiap pihak memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan bagian dari aset dan manfaat ekonomis yang dihasilkan oleh aset tersebut.

Pada unitisasi, operator dan non-operator mempersatukan aset mereka di dalam satu lapangan produksi untuk membentuk satu unit produksi dan sebagai imbalan menerima kepemilikan di dalam unit tersebut. Dengan demikian, operasi unitisasi adalah perjanjian pengendalian bersama aset setiap liabilitas yang terjadi, bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama dengan pihak lain yang berkaitan dengan perjanjian bersama, setiap penghasilan dari penjualan atau penggunaan bagiannya atas output ventura bersama, bersama dengan bagiannya atas beban yang terjadi pada ventura bersama. Apabila Grup sebagai operator, Grup akan mengakui piutang dari pihak non-operator (sebesar porsi pihak non-operator atas beban dan pengeluaran modal yang ditanggung oleh operator); jika sebaliknya, Grup akan mengakui utang kepada operator.

q. Provisi pembongkaran dan restorasi

Provisi pembongkaran dan restorasi dicatat untuk mengakui kewajiban hukum berkaitan dengan penarikan aset minyak dan gas bumi termasuk fasilitas produksi yang berasal dari akuisisi, konstruksi atau pengembangan dan/atau operasi normal dari aset tersebut. Penarikan aset tersebut ini, termasuk penjualan, peninggalan, pendaurulangan atau penghapusan dengan cara lain, adalah penarikan selain penghentian sementara pemakaian.

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban konstruktif yang berkaitan dengan penarikan sebuah aset. Biaya penarikan aset dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas dikapitalisasi sebagai bagian dari suatu aset tertentu dan kemudian disusutkan atau dideplesikan selama masa manfaat aset tersebut. Kewajiban ini diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

q. Provisi pembongkaran dan restorasi (lanjutan)

Penyisihan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penarikan aset, dimana Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab, diakui ketika:
- Grup memiliki kewajiban kini baik yang bersifat hukum maupun konstruktif, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- besar kemungkinan penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
- estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat ditentukan.

Kewajiban penarikan aset untuk fasilitas hilir secara umum baru dapat dipastikan pada saat fasillitas tersebut ditutup secara permanen dan dibongkar. Namun demikian, fasilitas ini memiliki umur yang tidak terbatas berdasarkan rencana kelanjutan penggunaannya dan dengan demikian, nilai wajar dari liabilitas hukum bersyarat ini tidak dapat diukur karena tanggal penyelesaian di masa depan dari liabilitas tersebut tidak dapat diperkirakan. Grup melakukan evaluasi secara berkala atas aset di hilir untuk menentukan apakah ada perubahan dalam fakta dan kondisi yang ada yang dapat menyebabkan timbulnya kewajiban penarikan aset.

r. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Pendapatan

Pendapatan produksi minyak mentah dan gas bumi diakui berdasarkan metode *provisional entitlements* pada saat *lifting*. Perbedaan *lifting* aktual minyak mentah dan gas bumi menghasilkan piutang ketika *lifting* minyak mentah dan gas bumi (posisi *underlifting*), dan menghasilkan utang ketika *lifting* minyak mentah dan gas bumi melebihi *entitlements* final (posisi *overlifting*). Volume *underlifting* dan *overlifting* dinilai berdasarkan harga rata-rata tertimbang tahunan Minyak Mentah Indonesia - (*Indonesia Crude Price* atau "ICP") (untuk minyak mentah) dan harga yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas yang bersangkutan (untuk gas bumi).

Perusahaan mengakui pendapatan subsidi ketika Perusahaan menjual produk subsidi dan berhak atas subsidinya.

Pendapatan dari penjualan barang dan jasa masing-masing diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli dan pada saat jasa diberikan.

Pendapatan denda yang berasal dari piutang penjualan produk BBM yang tertunggak diakui pada saat Perusahaan dan pelanggan tersebut menyepakati jumlah denda dan ada bukti-bukti bahwa pelanggan berkomitmen untuk membayar denda.

Pendapatan dari distribusi gas dan *toll fees* dari transmisi gas diakui ketika gas didistribusikan atau ditransmisikan kepada pelanggan berdasarkan pembacaan meter gas.

Pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian aset dan pipa transmisi diakui setelah layanan diberikan dan diukur berdasarkan unit gas yang dialirkan selama periode tertentu.

Biaya dan pendapatan sehubungan dengan penjualan listrik antara PGE, kontraktor panas bumi dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") dicatat berdasarkan *Energy Sales Contracts* dalam Kontrak Operasi Bersama ("KOB"). KOB tersebut mengharuskan penjualan listrik dari kontraktor KOB ke PLN dilakukan melalui PGE pada nilai yang sama dengan biaya pembelian listrik dari kontraktor KOB.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

i. Pendapatan (lanjutan)

Kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan akibat perbedaan harga jual eceran ("HJE") formula dan HJE penetapan ("Selisih Harga") JBT Minyak Solar dan JBKP Premium diakui pada tahun penjualan JBT Solar dan JBKP Premium tersebut terjadi sepanjang terdapat keyakinan atas pengembalian dan/atau ketertagihan Selisih Harga tersebut pada saat penyelesaian laporan keuangan.

Perusahaan mencatat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan atas Selisih Harga pada akun pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya karena merupakan bagian dari operasi Perusahaan.

ii. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan konsep akrual.

s. Program pensiun dan imbalan kerja

i. Kewajiban pensiun

Entitas-entitas di dalam Grup menggunakan berbagai skema pensiun. Grup memiliki program imbalan pasti dan iuran pasti. Program iuran pasti adalah program imbalan pascakerja yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan pascakerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan dan periode lalu.

Grup harus menyediakan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") Grup, mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau PKB adalah program imbalan pasti.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan keuangan dikurangi nilai wajar aset program.

Besarnya kewajiban imbalan pasti ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara tahunan menggunakan metode *projected unit credit*.

Beban yang diakui di laporan laba rugi termasuk biaya jasa kini, beban/pendapatan bunga, biaya jasa lalu dan keuntungan/kerugian penyelesaian. Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari program pensiun manfaat pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Program pensiun dan imbalan kerja (lanjutan)

i. Kewajiban pensiun (lanjutan)

Pesangon pemutusan kontrak kerja terhutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal atau ketika karyawan menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon.

Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal diantara: (a) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan (b) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang melibatkan pembayaran pesangon.

ii. Kewajiban pascakerja lainnya

Beberapa entitas di dalam Grup memberikan imbalan kesehatan pascakerja bagi pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Imbalan ini diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini terhutang selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

t. Transaksi dan saldo dalam denominasi non-Dolar AS

Unsur-unsur yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke dalam mata uang Dolar AS menggunakan kurs penutup. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi, kecuali jika ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi neto yang memenuhi syarat.

Untuk entitas anak dalam negeri dan luar negeri, yang bukan merupakan bagian integral dari operasi Perusahaan dan mata uang fungsionalnya bukan Dolar AS, aset dan liabilitasnya dijabarkan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai tukar yang digunakan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebagai berikut (nilai dibulatkan dalam dua angka desimal):

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.000 Rupiah/Dolar AS	0,07	0,07
Dolar Singapura/Dolar AS	0,73	0,75
100 Yen Jepang/Dolar AS	0,91	0,89
Dolar Hong Kong/Dolar AS	0,13	0,13
Euro/Dolar AS	1,14	1,19
Ringgit Malaysia/Dolar AS	0,24	0,25
Dinar Aljazair/Dolar AS	0,01	0,01

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Pajak penghasilan

Pajak Penghasilan Lancar

Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan

Grup secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang belaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Grup menentukan penyisihan berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak termasuk pertimbangan keputusam pengadilan pajak dan Mahkamah Agung jika perusahaan mengajukan banding.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau dalam hal Grup mengajukan banding, ketika: (1) pada saat hasil banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap liabilitas perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau (2) pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat itu perubahan kewajiban perpajakan diakui berdasarkan jumlah ketetapan pajak yang diajukan banding.

Dalam menghitung pajak penghasilan, Perusahaan mengakui pendapatan atas Selisih Harga sebesar nilai piutang sebelum penyesuaian nilai wajar (Catatan 9a). Selisih nilai piutang dengan nilai wajar diakui sebagai aset pajak tangguhan. Pemulihan atas penyesuaian nilai wajar piutang pada tahun-tahun berikutnya akan dibukukan sebagai pendapatan bunga. Atas pendapatan bunga tersebut tidak diakui sebagai objek pajak penghasilan tetapi sebagai pembalik aset pajak tangguhan yang sebelumnya diakui.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

i. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal goodwill atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;

ii. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo kredit pajak yang tidak digunakan dan akumulasi rugi fiskal yang tidak terpakai. Aktiva pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan penerapan kredit pajak yang tidak terpakai serta akumulasi rugi fiskal yang dapat digunakan, kecuali:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait kegiatan KKS dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal efektifnya KKS atau tanggal perpanjangan atau tanggal perubahan KKS.

Pajak tangguhan atas barang yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Taksiran pajak tangguhan diakui berkorelasi dengan underlying transaction baik di OCI maupun langsung di ekuitas.

Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

PPN atas subsidi dan/atau Selisih Harga akan dicatat Perusahaan pada saat mengajukan pembayaran atas subsidi dan/atau Selisih Harga kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, Pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

v. Informasi segmen

Segmen operasi adalah sebuah komponen dari entitas yang:

a. Terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Informasi segmen (lanjutan)

Segmen operasi adalah sebuah komponen dari entitas yang: (lanjutan)

b. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

w. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas - sebagai contoh, *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan.

Aset yang diamortisasi atau didepresiasi diuji terhadap penurunan nilai ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

x. Biaya emisi penerbitan obligasi

Biaya emisi penerbitan obligasi disajikan sebagai pengurang utang obligasi sebagai bagian dari liabilitas tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto yang diamortisasi dengan metode SBE selama jangka waktu utang obligasi.

y. Pengaturan bersama

Grup merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Grup dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas entitas anak.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama berdasarkan kepentingan sebagai berikut:
a. Ventura bersama (*Joint Venture*): di mana Grup memiliki hak hanya atas aset bersih dalam pengaturan bersama.
b. Operasi bersama (*Joint Operation*): di mana Grup memiliki baik hak atas aset maupun kewajiban dalam pengaturan bersama.

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Grup mempertimbangkan hal-hal berikut:
a. Struktur pengaturan bersama;
b. Bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah;
c. Persyaratan pengaturan kontraktual;
d. Relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Grup mencatat kepentingannya dalam ventura bersama menggunakan metode ekuitas.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

y. Pengaturan bersama (lanjutan)

Selisih lebih biaya investasi pada ventura bersama dibandingkan dengan nilai wajar aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen teridentifikasi yang diakuisisi, dikapitalisasi dan termasuk dalam jumlah tercatat investasi pada ventura bersama. Jika terdapat indikasi bahwa investasi pada ventura bersama mengalami penurunan nilai, maka dilakukan uji penurunan nilai dengan cara yang sama dengan uji penurunan nilai pada aset non-keuangan.

Grup mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, bagian atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

z. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas.

Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, neto setelah pajak, dari jumlah yang diterima.

aa. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham diakui sebagai liabilitas dan mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup dalam periode dimana pembagian dividen tersebut diumumkan.

ab. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman merupakan bunga dan selisih kurs pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan biaya lainnya (amortisasi diskonto/premi dari pinjaman diterima, dan lain-lain) yang terjadi sehubungan dengan peminjaman dana.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya telah selesai.

ac. Pengukuran nilai wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:
- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ac. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, katedigorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Tingkat 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

ad. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 28 Mei 2019.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.

Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup:

i. Biaya eksplorasi dan evaluasi

Kebijakan akuntansi Grup untuk biaya eksplorasi dan evaluasi mengakibatkan biaya tertentu dikapitalisasi untuk sebuah *area of interest* yang dianggap dapat dipulihkan oleh eksploitasi di masa depan atau penjualan atau dimana kegiatan belum mencapai tahap tertentu yang memungkinkan dilakukan penilaian estimasi yang wajar atas keberadaan cadangan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu atas peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya apakah operasi eksploitasi dapat dilaksanakan secara ekonomis.

ii. Biaya pengembangan

Kegiatan pengembangan dimulai setelah dilakukan pengesahan proyek oleh tingkat manajemen yang berwenang. Pertimbangan diterapkan oleh manajemen dalam menentukan kelayakan suatu proyek secara ekonomis.

iii. Eksposur ketidakpastian pajak

Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku saat ini, manajemen melakukan penilaian jika jumlah tercatat atas pengajuan pengembalian pajak yang dapat diperoleh dan diterima kembali dari Kantor Pajak. Lebih jauh, manajemen juga menilai kemungkinan kewajiban yang timbul dari pemeriksaan keberatan pajak.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

iii. Eksposur ketidakpastian pajak (lanjutan)

Keputusan signifikan meliputi penentuan cadangan pajak penghasilan perusahaan dan pajak-pajak lainnya dalam transaksi tertentu. Ketidakpastian muncul seiring interpretasi peraturan pajak yang kompleks dan jumlah serta penentuan waktu pajak penghasilan masa mendatang. Grup membuat analisa dari semua posisi terkait pajak penghasilan untuk menentukan jika kewajiban pajak atas manfaat pajak tidak diakui harus diakui dalam catatan Grup.

iv. Pengakuan Selisih Harga penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium

Berdasarkan Peraturan Presiden No.43 Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan HJE BBM, disebutkan bahwa dalam hal hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang (BPK) dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan HJE BBM, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha setelah berkordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN.

Keyakinan manajemen untuk mencatat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan atas Selisih Harga pada tahun penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium dilakukan apabila terdapat keyakinan atas ketertagihan dan/atau pengembalian Selisih Harga yang didukung terutama jika, Perusahaan telah memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas JBT Minyak Solar dan JBKP Premium kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia dan tidak lagi memiliki hak untuk mengelola dan mengendalikan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium tersebut pada saat penjualan terjadi dan telah menerima hasil audit BPK atas Selisih Harga. Selain itu, untuk kekurangan penerimaan atas Selisih Harga, keyakinan atas ketertagihan pendapatan atas Selisih Harga juga didukung oleh Surat Ketetapan dari Kementrian Keuangan (“Surat Ketetapan”) yang telah diterima sebelum penyelesaian laporan keuangan. Perusahaan mencatat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan atas Selisih Harga pada akun pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya karena merupakan bagian dari operasi Perusahaan.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai memerlukan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan, biaya operasi, biaya pembongkaran dan restorasi serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat memengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

ii. Estimasi cadangan

Cadangan minyak dan gas bumi terbukti adalah perkiraan jumlah minyak mentah dan gas alam yang berdasarkan data geologis dan teknis dapat diambil dengan tingkat kepastian yang memadai di tahun-tahun mendatang dari cadangan yang ada berdasarkan kondisi ekonomi dan operasi yang sekarang ada. Cadangan terbukti meliputi:

(i) Cadangan terbukti dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan akan diambil melalui metode sumur, fasilitas, dan operasi yang sekarang ada; dan
(ii) Cadangan terbukti yang belum dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan dapat diambil setelah adanya pengeboran, fasilitas dan metode operasi baru.

Akurasi dari cadangan terbukti tergantung pada sejumlah faktor, asumsi dan variabel seperti: kualitas data geologi, teknis dan ekonomi yang tersedia beserta interpretasi dan pertimbangan terkait, hasil pengeboran, pengujian dan produksi setelah tanggal estimasi, kinerja produksi *reservoir*, teknik produksi, proyeksi tingkat produksi di masa mendatang, estimasi besaran biaya dan waktu terjadinya pengeluaran pengembangan, ketersediaan pasar komersial, harga komoditi yang diharapkan dan nilai tukar.

Karena asumsi ekonomis yang digunakan untuk mengestimasi cadangan berubah dari waktu ke waktu dan tambahan data geologi yang dihasilkan selama operasi, estimasi cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

i. Penyusutan dan amortisasi yang ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi sumur aset berubah.
ii. Provisi biaya pembongkaran, restorasi lokasi aset dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
iii. Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

Grup menetapkan cadangan terbukti berdasarkan pada prinsip *Petroleum Resources Management System* (“PRMS”) 2007. Karakteristik alamiah *reservoir* minyak dan gas bumi yang penuh ketidakpastian dapat menyebabkan terjadinya perubahan estimasi cadangan karena penambahan data yang diperoleh Grup.

iii. Aset minyak dan gas bumi

Grup menerapkan metode *successful efforts* untuk kegiatan eksplorasi dan evaluasi minyak dan gas bumi.

Untuk sumur eksplorasi dan sumur uji eksplorasi stratigrafi, biaya yang secara langsung terkait dengan pengeboran sumur-sumur tersebut, dikapitalisasi dahulu sebagai aset dalam penyelesaian dalam akun aset minyak dan gas bumi, hingga ditentukan apakah telah ditemukan cadangan minyak dan gas yang berpotensi ekonomis berdasarkan pengeboran tersebut.

Setiap estimasi dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika sumur tidak menemukan cadangan yang memiliki potensi ekonomi, biaya sumur akan dibebankan sebagai beban sumur kering (*dry hole)* dan diklasifikasikan sebagai biaya eksplorasi.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

iv. Penyisihan penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan dan piutang

Penyisihan penurunan nilai piutang dikelola pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Pada setiap tanggal laporan keuangan, Grup secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan yang dibentuk berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas.

Akun pinjaman dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

v. Piutang Pemerintah

Grup mengakui piutang Pemerintah untuk penggantian biaya subsidi untuk jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 kg dan piutang imbalan jasa pemasaran atas jasa memasarkan minyak mentah, gas bumi dan LNG bagian Pemerintah. Grup melakukan estimasi atas jumlah dari piutang Pemerintah tersebut berdasarkan parameter volume penyerahan aktual dan tarif yang telah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Jumlah piutang subsidi tersebut menjadi subjek yang diaudit dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK"). Hasil audit dapat berbeda dengan jumlah yang diakui.

vi. Penyusutan, estimasi nilai sisa dan masa manfaat aset tetap

Masa manfaat properti investasi dan aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diperkirakan dapat digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman terhadap aset sejenis.

vii. Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui hanya bila saldo aset pajak tangguhan tersebut kemungkinan besar dapat direalisasi, dimana hal ini tergantung dari jumlah laba kena pajak yang memadai yang dapat dihasilkan di masa depan.

viii. Provisi untuk biaya pembongkaran dan restorasi lokasi aset

Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembongkaran fasilitas produksi minyak dan gas bumi dan pipa pada akhir umur manfaat aset-aset tersebut. Kewajiban pembongkaran terbesar yang dihadapi Grup berkaitan dengan penutupan dan peninggalan sumur-sumur yang sudah tidak terpakai dan pembuangan platform minyak dan gas alam dan saluran pipa pada area kontrak Grup.

Sebagian besar pembongkaran akan dilakukan di masa yang akan datang sehingga terdapat ketidakpastian mengenai persyaratan yang harus dipenuhi pada saat dilakukannya pembongkaran. Teknologi pembongkaran dan biaya pembongkaran terus berubah, termasuk ekspektasi politik, lingkungan, keselamatan dan publik. Akibatnya, terdapat ketidakpastian yang signifikan terkait kapan dan jumlah arus kas masa depan yang harus dikeluarkan. Perubahan dalam ekspektasi biaya masa depan yang diharapkan tercermin dalam aset dan provisi terkait yang dapat memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN

Grup telah melakukan akusisi dan penambahan *participating interest* melalui transaksi akuisisi maupun perolehan blok eks terminasi. Transaksi akuisisi ini dilakukan sejalan dengan strategi Grup dalam pengembangan bisnis hulu minyak dan gas yaitu untuk peningkatan jumlah produksi dan cadangan minyak, gas dan panas bumi serta pengembangan bisnis ke luar negeri. Ringkasan transaksi selama tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut:

Akuisisi	Wilayah Kerja	Wilayah	Persentase kepemilikan	Produksi	Dimiliki oleh
Akuisisi Saham Etablissements Maurel et Prom SA (M&P)	Perancis	Canada, Colombia, Nigeria, Gabon, France, Italy, Tanzania, Namibia dan Myanmar	72,65%	Minyak dan gas bumi	PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi

Akuisisi	Wilayah Kerja	Wilayah	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Persentase kepemilikan	Produksi	Periode Kontrak	Dimiliki oleh
Perolehan Wilayah Kerja Offshore North West Java	Blok Offshore North West Java	Utara Laut Jawa	19/01/2017	18/01/2037*	90%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Perolehan Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Lawu	Gunung Lawu	Jawa Tengah dan Jawa Timur	30/01/2017	29/01/2054	100%	Panas bumi	37 tahun	PT Pertamina Geothermal Energy
Perolehan Hak Unit *Interest* di Lapangan Unitisasi Field Jambaran Tiung Biru	Blok EP dan Blok Cepu	Jawa Tengah - Jawa Timur	03/11/2017	16/09/2035	91,93%	Minyak dan gas bumi	Hingga akhir kontrak PEPC	PT Pertamina EP Cepu
Perolehan Wilayah Kerja Attaka (unitisasi)	Attaka	Kalimantan Timur	01/01/2018	24/10/2018	100%	Minyak dan gas bumi	10 bulan	PT Pertamina Hulu Indonesia
Perolehan *Participating Interest* di Wilayah Kerja Mahakam	Mahakam	Kalimantan Timur	01/01/2018	31/12/2037	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Indonesia
Perolehan Wilayah Kerja Panas Bumi Seulawah Agam	Seulawah Agam	Aceh	09/04/2018	08/04/2055	75%	Panas bumi	37 tahun	PT Pertamina Geothermal Energy
Perolehan Wilayah Kerja Blok Tuban	Blok Tuban	Jawa Timur	20/05/2018*	19/05/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Perolehan Wilayah Kerja Blok Ogan Komering	Blok Ogan Komering	Sumatera Selatan	20/05/2018*	19/05/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Perolehan Hak Unit *Interest* di Lapangan Unitisasi Sukowati	Sukowati	Tuban	25/06/2018	24/06/2028	100%	-	20 tahun	PT Pertamina EP
Perolehan Wilayah Kerja Blok Sanga Sanga	Blok Sanga Sanga	Kalimantan Timur	08/08/2018*	07/08/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Indonesia
Perolehan Wilayah Kerja Blok Offshore Southeast Sumatera ("OSES")	Blok OSES	Sumatera Tenggara	06/09/2018*	05/09/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Perolehan Wilayah Kerja Blok North Sumatera Offshore ("NSO")	Blok NSO	Sumatera Utara	17/10/2018*	16/10/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Perolehan Wilayah Kerja Blok East Kalimantan dan Attaka	Blok East Kalimantan dan Attaka	Kalimantan Timur	25/10/2018*	24/10/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Indonesia
Perolehan Wilayah Kerja Jambi Merang	Blok Jambi Merang	Sumatera Selatan	10/02/2019*	09/02/2039	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Perolehan Wilayah Kerja Blok Raja/Pendopo	Blok Raja/ Pendopo	Sumatera Selatan	06/07/2019*	05/07/2039	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Perolehan Wilayah Kerja Blok Salawati	Blok Salawati	Papua	23/04/2020*	22/04/2040*	30%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Perolehan Wilayah Kerja Blok Kepala Burung	Blok Kepala Burung	Papua	15/10/2020*	14/10/2040*	30%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi

* (Catatan 4d)

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

Grup telah melakukan akusisi dan penambahan *participating interest* melalui transaksi akuisisi maupun perolehan blok eks terminasi. Transaksi akuisisi ini dilakukan sejalan dengan strategi Grup dalam pengembangan bisnis hulu minyak dan gas yaitu untuk peningkatan jumlah produksi dan cadangan minyak, gas dan panas bumi serta pengembangan bisnis ke luar negeri. Ringkasan transaksi selama tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

a. Pembentukan *Holding* Migas

Pada tanggal 30 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") menerbitkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 72 Tahun 2016 sebagai perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005 mengenai prosedur dan administrasi Penanaman Modal Negara pada BUMN. Peraturan ini adalah dasar hukum untuk menciptakan *holding* BUMN yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pada tanggal 28 Februari 2018, Pemerintah menerbitkan PP No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Penambahan penyertaan modal negara berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Negara pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN") sebanyak 13.809.038.755 lembar saham yang mewakili 56,96% jumlah saham PGN kepada Perusahaan.

Pada tanggal 28 Maret 2018, Kementrian Keuangan menerbitkan surat keputusan No. 286/KMK.06/2018 tentang penetapan nilai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan. Surat keputusan tersebut menetapkan bahwa nilai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan sebesar Rp38.136.346.046.696 (nilai penuh).

Pada tanggal 11 April 2018, Menteri BUMN menerbitkan Surat Keputusan No. S-216/MBU/2018 untuk menyetujui pengalihan 56,96% saham seri-B milik Pemerintah di PGN dan tambahan penyertaan modal negara di Perusahaan sebesar Rp38.136.346.046.696 (nilai penuh). Pada tanggal yang sama, Menteri BUMN menerbitkan Surat Keputusan No. S-217/MBU/04/2018 untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp200.000.000 juta menjadi Rp600.000.000 juta dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham. Surat ini juga yang menyetujui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan menjadi 38.136.347 lembar saham (nilai penuh) atau setara dengan US$2.774.157.

Lebih lanjut, pada tanggal 11 April 2018, Menteri BUMN dan Perusahaan mengadakan perjanjian terkait pemindahan hak Pemerintah di PGN kepada Perusahaan untuk meningkatkan penyertaan modal negara di Perusahaan.

Pada tanggal 13 April 2018 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008395.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Bahwa perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui dengan jumlah modal ditempatkan senilai Rp171.227.044.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan US$16.191.204.

Pada 9 Mei 2018, Menteri BUMN sebagai pemegang saham dwiwarna seri-A PGN menerbitkan Surat Kuasa terkait pemindahan hak dan kewenangan saham Seri-A PGN kepada Perusahaan sebagai pemilik saham mayoritas seri B. Surat ini untuk menyatakan kendali Perusahaan atas PGN.

Transaksi tersebut di atas dicatat sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

a. Pembentukan *Holding* Migas (lanjutan)

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan PGN pada tanggal perolehan:

	Nilai Buku
ASET	
Aset lancar	2.021.879
Aset tidak lancar	4.442.988
Jumlah aset	**6.464.867**
LIABILITAS	
Liabilitas lancar	553.560
Liabilitas tidak lancar	2.649.167
Jumlah liabilitas	**3.202.727**
EKUITAS	
Modal Saham	344.019
Tambahan modal disetor lainnya	284.339
Laba ditahan	
Ditentukan pengunaannya	2.427.854
Belum ditentukan pengunaannya	223.501
Komponen ekuitas lainnya	(36.868)
Jumlah ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**3.242.845**
Saham seri B pindahan mewakili 56,96% kepemilikan	(1.847.125)
Nilai perolehan melalui penambahan modal Perusahaan	2.774.157
Tambahan modal disetor	**927.032**

Berdasarkan amandemen dan pernyataan kembali perjanjian jual beli saham antara Perusahaan dan PGN tanggal 28 Desember 2018, PGN resmi mengakuisi saham PT Pertamina Gas ("Pertagas") yang dimiliki oleh Perusahaan sebanyak 51% saham (atau 2.591.099 saham) senilai Rp20,18 triliun setara dengan US$1.351.955. Dengan akuisisi saham ini, PGN resmi memiliki 51% saham Pertagas termasuk 5 anak perusahaan Pertagas, yaitu PT Pertagas Niaga, PT Perta Arun Gas, PT Perta Daya Gas, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Kalimantan Gas. Sehubungan dengan restrukturisasi ini kepemilikan efektif Perusahaan atas Pertagas turun dari 100% menjadi 78,05%.

b. Pengendalian atas PT Nusantara Regas ("Regas")

Perusahaan dan PGN masing-masing memiliki 60% dan 40% kepemilikan dalam Regas. Sebagai hasil pembentukan BUMN *holding* migas, Perusahaan secara tidak langsung memiliki 82,78% kepemilikan dalam Regas. Manajemen menyimpulkan bahwa Perusahaan memiliki hak suara mayoritas atas Regas untuk mengarahkan aktivitas keuangan dan operasional Regas. Oleh karena itu, Perusahaan memiliki kendali atas Regas dan mulai 11 April 2018, Perusahaan mengkonsolidasi laporan keuangan Regas.

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

b. Pengendalian atas PT Nusantara Regas ("Regas") (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan Regas pada tanggal di saat Perusahaan memperoleh pengendalian:

	Nilai Buku
ASET	
Aset lancar	233.935
Aset tidak lancar	56.116
Jumlah aset	**290.051**
LIABILITAS	
Liabilitas lancar	20.769
Liabilitas tidak lancar	12.707
Jumlah liabilitas	**33.476**
EKUITAS	
Modal saham	145.589
Laba ditahan	
Ditentukan penggunaannya	43.129
Belum ditentukan pengunaannya	68.026
Komponen ekuitas lainnya	(169)
Jumlah ekuitas	**256.575**

c. Akuisisi saham Etablissements Maurel et Prom SA ("M&P")

M&P terdaftar di Bursa Saham Paris dengan kepemilikian aset-aset produksi sebagai berikut: Blok Ezanga di Gabon (sebagai operator dengan *Working Interest* ("WI") 80%); Lapangan Mnazi Bay di Tanzania (sebagai operator dengan WI 48,06%); dan memiliki 21,37% saham Seplat (terdaftar di Bursa Saham Lagos, Nigeria dan London, Inggris) yang memiliki beberapa aset produksi di Nigeria. M&P juga memiliki area *undeveloped discovery* dan aset-aset eksplorasi yang berada di Italia, Prancis, Myanmar, Kanada, Tanzania, Gabon, Kolombia, dan Namibia.

Pada tanggal 25 Agustus 2016, Grup melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi ("PIEP"), entitas anak yang sepenuhnya dimiliki oleh Perusahaan, membeli saham M&P sebanyak 47.916.026 lembar saham yang setara dengan 24,53% saham M&P. PIEP kemudian telah menambah kepemilikan saham melalui proses *tender offer* dengan syarat dan ketentuan yang sama terhadap seluruh saham M&P.

Proses akuisisi bertahap melalui *Voluntary Tender Offer* dilaksanakan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2017 dan pembayaran dilakukan di tanggal 1 Februari 2017, dimana PIEP memiliki 64,46% saham M&P dan 63,35% hak suara, sehingga terjadi "*change of control*" atas M&P. Untuk tahap kedua *voluntary tender over* selesai pada tanggal 15 Februari 2017 dan pembayaran dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017 sehingga sejak tanggal tersebut PIEP menjadi pemegang atas:

1. 141.911.939 lembar saham M&P, yang merepresentasikan 72,65% dari modal saham dan 71,39% dari hak suara di M&P;
2. 14.641.233 lembar obligasi ORNANE 2019, yang merepresentasikan 99,88% dari jumlah obligasi yang beredar;

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

c. Akuisisi saham Etablissements Maurel et Prom SA ("M&P") (lanjutan)

3. 10.435.331 lembar obligasi ORNANE 2021, yang merepresentasikan 99,99% dari jumlah obligasi yang beredar.

Tanggal 20 Desember 2017, M&P membeli kembali seluruh obligasi ORNANE 2019 dan ORNANE 2021 yang dimiliki PIEP dan membayar secara tunai sejumlah nilai nominal obligasi beserta bunganya, sehingga per tanggal tersebut PIEP tidak lagi memiliki obligasi ORNANE 2019 dan ORNANE 2021.

Dengan berakhirnya proses akuisisi saham tersebut di atas, PIEP menjadi pemilik mayoritas dan memiliki pengendalian penuh terhadap M&P.

Perhitungan nilai wajar aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih oleh PIEP telah selesai pada tanggal 31 Desember 2017.

Penyesuaian nilai wajar terutama berasal dari penilaian cadangan dan sumber minyak yang diakuisisi, untuk aset eksplorasi dan/atau produksi yaitu Gabon, Nigeria dan Tanzania.

Nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi yang timbul dari akuisisi M&P sebagai berikut:

	Jumlah
ASET	
Aset keuangan	353.653
Persediaan	9.678
Pajak dibayar di muka	70.844
Aset pajak tangguhan	35.096
Investasi jangka panjang	94.697
Aset minyak dan gas bumi	1.723.322
Aset lainnya	85.318
Jumlah aset	**2.372.608**
LIABILITAS	
Liabilitas keuangan	913.431
Utang pajak	39.801
Liabilitas pajak tangguhan	371.004
Liabilitas imbalan kerja	1.143
Provisi biaya restorasi dan reklamasi	41.110
Jumlah liabilitas	**1.366.489**
Nilai buku atas aset neto pada tanggal akuisisi (termasuk aset dan liabilitas pajak tangguhan)	**1.006.119**
Selisih nilai wajar dengan nilai buku	9.600
Nilai wajar aset bersih	1.015.719
Kepemilikan yang diakuisisi	72,65%
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh	737.920
Efek selisih kurs	28.337
Pembelian dengan diskon	(54.130)
Harga perolehan melalui pembayaran kas	**712.127**

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

c. Akuisisi saham Etablissements Maurel et Prom SA ("M&P") (lanjutan)

Berikut ini adalah analisis arus kas atas transaksi akuisisi M&P:

	Jumlah
Nilai transaksi akuisisi	712.127
Dikurangi: Kas dari M&P	(203.230)
Arus kas neto untuk memperoleh pengendalian	**508.897**

Nilai keuntungan dari pembelian dengan diskon termasuk keuntungan dari pengukuran kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya sebesar US$42.658.

Pada tanggal 5 November 2018 M&P menandatangani perjanjian dengan Rockover Energy Limited ("Rockover") untuk memperoleh hak atas *deferred payments* yang dimiliki oleh Rockover dengan pembayaran dalam bentuk tunai sebesar US$10,75 ribu dan penerbitan saham M&P sebanyak 5.373.209 lembar saham.

Pada tanggal 12 Desember 2018, rapat umum pemegang saham luar biasa M&P menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk peningkatan modal sehubungan dengan transaksi dengan Rockover. Pada tanggal 14 Desember 2018, Direksi melaksanakan wewenang tersebut dengan memutuskan untuk melakukan penambahan modal dengan jumlah nominal sebesar €4.137.371 (nilai penuh) melalui penerbitan 5.373.209 saham baru dengan nilai nominal sebesar €0,77 (nilai penuh) per lembar saham dan nilai setoran modal sebesar €5,182 (nilai penuh) per lembar saham. Setelah pelaksanaan penambahan modal terebut, Rockover memiliki modal saham M&P sebesar 2,68% dan mengakibatkan terdilusinya kepemilikan Perusahaan di M&P dari 72,65% menjadi 70,75%.

d. *Gross split contract ("Gross Split")*

Pada tanggal 13 Januari 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") No. 08/2017 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama Tanpa Mekanisme Pengembalian Biaya Operasi atau disebut sebagai KKS *Gross Split* telah diterbitkan.

Setelah berakhirnya KKS Blok Offshore North West Java ("ONWJ") pada tanggal 18 Januari 2017, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ ("PHE ONWJ") dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") menandatangani KKS *Gross Split* Blok ONWJ yang berlaku efektif sejak tanggal 19 Januari 2017 dengan jangka waktu kontrak selama 20 tahun. Kontrak ONWJ tersebut menggunakan skema *Gross Split* antara Pemerintah Indonesia dan Kontraktor seperti yang diungkapkan pada Catatan 43d.

Pada tanggal 20 April 2018, PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java, PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering dan SKK Migas menandatangani *Gross Split* Blok Tuban dan *Production Sharing Contract* ("PSC") Blok Ogan Komering yang berlaku efektif sejak tanggal 20 Mei 2018 dengan jangka waktu kontrak selama 20 tahun. PT Pertamina Hulu Energi OSES, PT Pertamina Hulu Energi NSO dan SKK Migas juga menandatangani *Gross Split* Blok OSES yang berlaku efektif sejak tanggal 6 September 2018 dan 17 Oktober 2018 dengan jangka waktu kontrak selama 20 tahun.

Pada tanggal 31 Mei 2018, PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai, PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan SKK Migas menandatangani *Gross Split* Blok Raja Tempirai dan Jambi Merang yang berlaku efektif sejak tanggal 6 Juli 2019 dan 10 Februari 2019 dengan jangka waktu kontrak selama 20 tahun.

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

d. *Gross split contract ("Gross Split")* (lanjutan)

Pada tanggal 11 Juli 2018, PT Pertamina Hulu Energi Salawati, PT Pertamina Hulu Energi Salawati Basin, dan SKK Migas menandatangani kontrak *Gross Split* untuk Blok Salawati dan Blok Kepala Burung yang masing-masing berlaku efektif mulai tanggal 23 April 2020 dan 15 Oktober 2020.

Pada tanggal 8 Agustus 2018, PT Pertamina Hulu Sanga sanga dan SKK Migas menandatangani kontrak *Gross Split* untuk blok Sanga sanga yang berlaku efektif sejak 8 Agustus 2018 selama 20 tahun.

Pada tanggal 25 Oktober 2018, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur dan SKK Migas menandatangani kontrak *Gross Split* untuk Blok East Kalimantan dan Attaka yang berlaku efektif sejak tanggal 25 Oktober 2018 selama 20 tahun.

e. Kontrak kerjasama Blok Mahakam

Merujuk pada surat Menteri ESDM No. 2793/13/ME.M/2015 mengenai Pengelolaan Wilayah Kerja ("WK") Mahakam Pasca 2017, menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola WK Mahakam dari kontraktor yang lama Total E&P Indonesie & INPEX Corporation. Untuk mengelola WK tersebut, Perusahaan melalui PT Pertamina Hulu Indonesia ("PHI") mendirikan entitas baru yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam ("PHM").

PSC Mahakam ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2015 oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") dan PHM dengan tanggal efektif 1 Januari 2018. Kontrak PSC tersebut masih menerapkan konsep *production sharing*, namun menggunakan pendekatan *sliding scale* untuk perhitungan *entitlement* kontraktor berdasarkan rasio *Revenue over Costs* ("R/C").

Pada tanggal 25 Oktober 2016 telah dilakukan amandemen PSC Mahakam yang pertama dengan menambahkan beberapa poin penting, diantaranya kepastian atas biaya yang dikeluarkan oleh PHM setelah tanggal penandatanganan kontrak namun sebelum tanggal efektif. Biaya tersebut dapat di-*cost recovery*-kan sebagai biaya operasi setelah tanggal efektif kontrak.

PSC ini mengacu pada PP No. 79 tahun 2010, dimana mekanisme *assume and discharge* untuk pajak yang menjadi insentif bagi Kontraktor KKS diakui sebagai bagian dari biaya yang akan ditagihkan melalui mekanisme *cost recovery*.

Provisi yang ada sebagai berikut:

- **Bagi hasil minyak mentah dan gas bumi**

  Bagi hasil produksi minyak antara PHM dan Pemerintah masing-masing sebesar 23,5294% dan 76,4706%, sedangkan untuk bagi hasil gas masing-masing sebesar 47,0588% dan 52,9412% untuk tahun pertama kontrak. Adapun faktor R/C yang berlaku di tahun pertama adalah 1,3 sesuai dengan yang tercantum dalam KKS. Untuk tahun-tahun berikutnya akan menggunakan persentase bagi hasil sesuai tabel dibawah dengan menggunakan faktor R/C akhir tahun di tahun sebelumnya.

  Faktor R/C sendiri adalah pendapatan kumulatif kontraktor sejak tanggal penandatanganan kontrak dibagi dengan biaya kumulatif kontraktor sejak penandatanganan kontrak.

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

e. Kontrak kerjasama Blok Mahakam (lanjutan)

- **Bagi hasil minyak mentah dan gas bumi (lanjutan)**

  Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

R/C	Tax Rate	Gross Contractor Share		Net Contractor Share	
		Oil	Gas	Oil	Gas
0 - 1	36,25%	31,3726%	54,9020%	20%	35%
0 - 1,2	36,25%	27,4510%	50,9804%	18%	33%
1,2 – 1,4	36,25%	23,5294%	47,0588%	15%	30%
1,4 - 1,6	36,25%	19,6078%	43,1373%	12%	28%
> 1,6	36,25%	15,6863%	39,2157%	10%	25%

- ***First Tranche Petroleum*** **("FTP")**

  Pemerintah dan PHM berhak untuk menerima sebesar 20% dari jumlah produksi minyak dan gas setiap tahunnya sebelum dikurangi dengan pengembalian biaya operasi dan kredit investasi. FTP dibagi antara Pemerintah dan PHM sesuai dengan bagi hasil atas produksi minyak dan gas.

  Jumlah pengeluaran barang modal dan beban operasi terkait dengan penyerahan Blok Mahakam per tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar US$99.780 dan US$63.666 dicatat sebagai aset minyak dan gas bumi serta beban ditangguhkan yang baru dapat diajukan untuk pengembalian biaya mulai tanggal 1 Januari 2018.

  Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, skema pemanfaatan aset yang dahulunya dimiliki oleh PSC Mahakam masih belum diputuskan oleh Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian ESDM.

  Pada tanggal 20 April 2018, telah dilakukan amandemen PSC Mahakam yang kedua dengan menambahkan beberapa poin penting, diantaranya adalah penambahan wilayah kerja Tengah ke dalam wilayah kerja Mahakam. Amandemen ini berlaku efektif pada tanggal 5 Oktober 2018.

f. Penambahan 41,37% *participating interest* di lapangan unitisasi Jambaran-Tiung Biru ("JTB")

Efektif sejak tanggal 3 November 2017, PEPC memperoleh tambahan 41,37% *participating interest* di lapangan JTB yang sebelumnya dimiliki oleh ExxonMobil Cepu Limited dan Ampolex (Cepu) Pte. Ltd., sehingga *participating interest* PEPC di lapangan JTB menjadi 82,74%. Kontraktor lain di lapangan JTB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah PT Pertamina EP sebesar 8,06% dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 9,19%.

Melalui Surat No. 001/KETUA-BKS/XI/2017 tanggal 17 November 2017 dan Surat No. 004/KETUA-BKS/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, BKS PI Blok Cepu menyampaikan pengunduran diri untuk 4 Anggota BKS PI Blok Cepu yaitu PT Asri Dharma Sejahtera ("ADS"), PT Sarana Patra Hulu Cepu ("SPHC"), PT Blora Patragas Hulu ("BPH"), PT Petrogas Jatim Utama Cendana ("PJUC"), yang mana keempat anggota tersebut menyatakan tidak akan ikut berpartisipasi dalam pengembangan proyek Gas Lapangan Jambaran-Tiung Biru ("JTB") terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menambah 9,19% *participating interest* di lapangan unitisasi JTB yang sebelumnya dimiliki oleh BKS (ADS, SPHC, BPH dan PJUC) sehingga *participating interest* Perusahaan di lapangan unitisasi JTB menjadi 91,93%. Pembayaran untuk akuisisi ini adalah senilai US$16.764. Akuisisi atas *participating interest* ini dicatat sebagai aset minyak dan gas bumi.

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

g. Pendirian PT Pertamina Hulu Rokan ("PHR")

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1923K/10/MEM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pengelolaan Penetapan Bentuk dan Ketentuan-Ketentuan Pokok (*Term and Conditions*) Kontrak Kerja Sama Pada Wilayah Kerja Rokan, syarat yang harus dipenuhi Pertamina antara lain membentuk anak usaha baru, melunasi bonus tanda tangan dan membayar jaminan komitmen pelaksanaan.

Pada tanggal 20 Desember 2018, PT Pertamina Hulu Rokan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 20 Desember 2018 dari Lenny Janis Ishak, S.H. Akta pendirian PHR telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-0061348.AH.01.01.2018 tanggal 21 Desember 2018. PHR akan mengelola Blok Rokan mulai dari tahun 2021 sampai 2041. Jumlah modal dasar PHR sebesar US$3.140.000 dengan modal disetor sebesar US$785.000. Modal disetor tersebut digunakan untuk membayar bonus penandatanganan (*Signature Bonus*) kepada Pemerintah Indonesia sebesar US$783.980 pada tanggal 21 Desember 2018, serta digunakan sebagai modal kerja selama tahun pertama mengelola wilayah kerjanya.

h. Penambahan 20% *participating interest* PT Pertamina EP di lapangan unitisasi Sukowati

Berdasarkan surat SKK Migas No. SRT-0493/SKKMA0000/2018/S1 tanggal 25 Juni 2018 perihal penetapan operator baru unitisasi Lapangan Sukowati, fasilitas produksi CPA Mudi dan FSO Cintanatomas, PT Pertamina EP ditunjuk sebagai operator baru Lapangan Sukowati.

Berdasarkan kesepakatan bersama terkait pengelolaan unitisasi Lapangan Sukowati, pengoperasian fasilitas produksi CPA Mudi dan FSO Cintanatomas tanggal 16 Mei 2018 antara PT Pertamina EP dengan PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java, disepakati bahwa PT Pertamina EP memiliki unit partisipasi *interest* sebesar 100% (Catatan 43c).

i. Kontrak kerja sama sementara wilayah kerja Attaka

Kontrak kerja sama sementara wilayah kerja Attaka dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 November 2017, oleh SKK Migas dan Pertamina Hulu Attaka. Berdasarkan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("MESDM") wilayah kerja Attaka setelah tanggal 24 Oktober 2018, tidak lagi ditugaskan kepada Pertamina.

j. Penurunan persentase kepemilikan Perusahaan di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

Pada tanggal 28 Mei 2018, TPI menjadi perusahaan publik dengan megeluarkan saham baru sebanyak 177.777.800 saham. Sebagai akibatnya persentase kepemilikan Perusahaan di TPI turun dari 65,0% menjadi 58,5%. Penurunan persentase kepemilikan ini tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian Perusahaan di TPI. Sehingga, dampak dari transaksi ini sebesar US$20.551 diperhitungkan sebagai transaksi ekuitas dan dicatat dalam akun selisih dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali.

5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2018, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017/31 Desember 2016 serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 karena penerapan secara retrospektif PSAK 38 (Revisi 2012) Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (Catatan 2e) sehubungan dengan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali antara Perusahaan dan PGN (Catatan 4a) dan Pengendalian atas Regas (Catatan 4b).

5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Dampak penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017/31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2017:

	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian proforma	Sesudah penyajian kembali
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	5.226.332	1.183.495	6.409.827
Kas yang dibatasi penggunaannya	89.919	29.752	119.671
Investasi jangka pendek	247.119	2.163	249.282
Piutang usaha			
Pihak berelasi	946.027	148.989	1.095.016
Pihak ketiga	1.385.519	195.108	1.580.627
Piutang Pemerintah - bagian lancar	1.492.625	-	1.492.625
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	286.233	(31.179)	255.054
Pihak ketiga	430.766	189.694	620.460
Persediaan	5.967.627	68.510	6.036.137
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	794.236	19	794.255
Beban dibayar di muka dan uang muka	393.075	83.251	476.326
Investasi lainnya	27.328	-	27.328
Jumlah Aset Lancar	**17.286.806**	**1.869.802**	**19.156.608**
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Pemerintah - dikurangi bagian lancar	663.114	-	663.114
Aset pajak tangguhan	1.304.196	66.884	1.371.080
Penyertaan jangka panjang	2.821.999	148.919	2.970.918
Aset tetap	10.728.017	1.711.494	12.439.511
Aset minyak dan gas serta panas bumi	16.359.682	1.671.692	18.031.374
Pajak dibayar di muka - dikurangi bagian lancar	593.898	235.402	829.300
Aset tidak lancar lainnya	1.455.858	521.612	1.977.470
Jumlah Aset Tidak Lancar	**33.926.764**	**4.356.003**	**38.282.767**
JUMLAH ASET	**51.213.570**	**6.225.805**	**57.439.375**
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman jangka pendek	452.879	-	452.879
Utang usaha			
Pihak berelasi	56.013	(6.736)	49.277
Pihak ketiga	3.828.858	71.263	3.900.121
Utang Pemerintah - bagian lancar	1.027.762	22.857	1.050.619
Utang pajak			
Pajak penghasilan	283.985	24.818	308.803
Pajak lain-lain	241.874	8.659	250.533
Beban akrual	1.987.659	32.237	2.019.896
Liabilitas jangka panjang - bagian lancar	365.959	-	365.959
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	74.228	(17.603)	56.625
Pihak ketiga	836.934	284.560	1.121.494
Pendapatan tangguhan - bagian lancar	260.838	-	260.838
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**9.416.989**	**420.055**	**9.837.044**

5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2017 (lanjutan):

	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian proforma	Sesudah penyajian kembali
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Pemerintah - dikurangi bagian lancar	391.577	389.049	780.626
Liabilitas pajak tangguhan	2.724.624	123.528	2.848.152
Liabilitas jangka panjang - dikurangi bagian lancar	2.085.084	24.683	2.109.767
Utang obligasi	8.498.447	1.887.426	10.385.873
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2.099.487	108.733	2.208.220
Provisi pembongkaran dan restorasi	2.040.097	89.240	2.129.337
Pendapatan tangguhan - dikurangi bagian lancar	51.621	(8.905)	42.716
Utang jangka panjang lain-lain	79.290	5.083	84.373
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**17.970.227**	**2.618.837**	**20.589.064**
JUMLAH LIABILITAS	**27.387.216**	**3.038.892**	**30.426.108**
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham			
Modal dasar - 200.000.000 Saham Biasa - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham; Ditempatkan dan disetor - 133.090.697 saham	13.417.047	-	13.417.047
Tambahan modal disetor	2.736	-	2.736
Ekuitas *merging entities*	-	1.804.579	1.804.579
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	1.361	-	1.361
Komponen ekuitas lainnya	487.699	-	487.699
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.871.101	-	6.871.101
- Belum ditentukan penggunaannya	2.540.195	-	2.540.195
	23.320.139	1.804.579	25.124.718
Kepentingan non-pengendali	506.215	1.382.334	1.888.549
JUMLAH EKUITAS	**23.826.354**	**3.186.913**	**27.013.267**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**51.213.570**	**6.225.805**	**57.439.375**

5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 1 Januari 2017/31 Desember 2016:

	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian proforma	Sesudah penyajian kembali
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	5.258.526	1.463.042	6.721.568
Kas yang dibatasi penggunaannya	122.697	-	122.697
Investasi jangka pendek	116.987	13.833	130.820
Piutang usaha			
Pihak berelasi	1.301.759	120.509	1.422.268
Pihak ketiga	1.231.289	211.163	1.442.452
Piutang Pemerintah - bagian lancar	1.792.457	-	1.792.457
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	235.225	7.614	242.839
Pihak ketiga	415.704	234.094	649.798
Persediaan	4.727.594	67.428	4.795.022
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	567.339	282	567.621
Beban dibayar di muka dan uang muka	428.220	75.162	503.382
Investasi Lainnya	43.190	-	43.190
Jumlah Aset Lancar	**16.240.987**	**2.193.127**	**18.434.114**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	671.230	80.233	751.463
Penyertaan jangka panjang	3.156.761	172.678	3.329.439
Aset tetap	10.322.976	1.833.809	12.156.785
Aset minyak dan gas serta panas bumi	14.636.401	1.761.261	16.397.662
Pajak dibayar di muka - dikurangi bagian lancar	1.282.917	186.850	1.469.767
Aset tidak lancar lainnya	921.934	514.930	1.436.864
Jumlah Aset Tidak Lancar	**30.992.219**	**4.549.761**	**35.541.980**
JUMLAH ASET	**47.233.206**	**6.742.888**	**53.976.094**
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman jangka pendek	130.293	100.000	230.293
Utang usaha			
Pihak berelasi	128.760	(10.220)	118.540
Pihak ketiga	3.201.391	89.274	3.290.665
Utang Pemerintah - bagian lancar	930.308	22.237	952.545
Utang pajak			
Pajak penghasilan	445.052	30.524	475.576
Pajak lain-lain	237.999	13.554	251.553
Beban akrual	1.543.358	53.254	1.596.612
Liabilitas jangka panjang - bagian lancar	573.450	148.750	722.200
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	49.270	1.677	50.947
Pihak ketiga	689.776	337.032	1.026.808
Pendapatan tangguhan - bagian lancar	177.499	-	177.499
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**8.107.156**	**786.082**	**8.893.238**

5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 1Januari 2017/31 Desember 2016 (lanjutan):

	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian proforma	Sesudah penyajian kembali
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Pemerintah - dikurangi bagian lancar	332.189	400.384	732.573
Liabilitas pajak tangguhan	2.443.871	84.646	2.528.517
Liabilitas jangka panjang - dikurangi bagian lancar	1.820.977	895.932	2.716.909
Utang obligasi	8.492.312	1.280.344	9.772.656
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.963.749	94.983	2.058.732
Provisi pembongkaran dan restorasi	1.824.155	75.938	1.900.093
Pendapatan tangguhan - dikurangi bagian lancar	120.155	(54.440)	65.715
Utang jangka panjang lain-lain	54.075	8.828	62.903
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**17.051.483**	**2.786.615**	**19.838.098**
JUMLAH LIABILITAS	**25.158.639**	**3.572.697**	**28.731.336**
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham			
Modal dasar - 200.000.000 Saham Biasa - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham; Ditempatkan dan disetor - 133.090.697 saham	13.417.047	-	13.417.047
Tambahan modal disetor	2.736	-	2.736
Ekuitas *merging entities*	-	1.801.742	1.801.742
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	1.361	-	1.361
Komponen ekuitas lainnya	664.617	-	664.617
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	4.631.441	-	4.631.441
- Belum ditentukan penggunaannya	3.147.043	-	3.147.043
	21.864.245	1.801.742	23.665.987
Kepentingan non-pengendali	210.322	1.368.449	1.578.771
JUMLAH EKUITAS	**22.074.567**	**3.170.191**	**25.244.758**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**47.233.206**	**6.742.888**	**53.976.094**

5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017:

	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian proforma	Sesudah penyajian kembali
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya:			
Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak	36.782.295	3.006.489	39.788.784
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah	3.572.084	-	3.572.084
Penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi dan produk minyak	1.874.281	-	1.874.281
Imbalan jasa pemasaran	25.474	-	25.474
Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya	705.191	34.909	740.100
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	**42.959.325**	**3.041.398**	**46.000.723**
Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung Lainnya:			
Beban pokok penjualan	(31.117.915)	(2.057.741)	(33.175.656)
Beban produksi hulu dan *lifting*	(3.321.895)	(99.312)	(3.421.207)
Beban eksplorasi	(165.356)	-	(165.356)
Beban dari aktivitas operasi lainnya	(839.864)	(23.098)	(862.962)
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA	**(35.445.030)**	**(2.180.151)**	**(37.625.181)**
LABA BRUTO	**7.514.295**	**861.247**	**8.375.542**
Beban penjualan dan pemasaran	(1.353.052)	(237.150)	(1.590.202)
Beban umum dan administrasi	(1.395.004)	(203.930)	(1.598.934)
Laba selisih kurs, neto	68.399	(10.262)	58.137
Pendapatan keuangan	212.779	20.295	233.074
Beban keuangan	(670.110)	(147.601)	(817.711)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama	48.379	(10.475)	37.904
Beban lain-lain, neto	(850.076)	19.494	(830.582)
	(3.938.685)	**(569.629)**	**(4.508.314)**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**3.575.610**	**291.618**	**3.867.228**
Beban pajak penghasilan, neto	(1.022.991)	(143.833)	(1.166.824)
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**2.552.619**	**147.785**	**2.700.404**

5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 (lanjutan):

	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian Proforma	Sesudah penyajian kembali
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**2.552.619**	**147.785**	**2.700.404**
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak):			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti, neto	(122.732)	(6.327)	(129.059)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak):			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	4.599	2.461	7.060
Bagian (rugi) penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(27.474)	2.340	(25.134)
Rugi komprehensif lain neto setelah pajak	(145.607)	(1.526)	(147.133)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**2.407.012**	**146.259**	**2.553.271**

Laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017:

	Sebelum penyajian kembali	Penyajian kembali	Sesudah penyajian kembali
Arus kas dari aktivitas operasi	3.577.810	499.068	4.076.878
Arus kas dari aktivitas investasi	(2.130.189)	(249.094)	(2.379.283)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(1.461.032)	(511.139)	(1.972.171)
Penurunan kas dan setara kas	**(13.411)**	**(261.165)**	**(274.576)**
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	(18.783)	(18.382)	(37.165)
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun	**5.258.526**	**1.463.042**	**6.721.568**
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun	**5.226.332**	**1.183.495**	**6.409.827**

6. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kas	4.119	8.174
Kas di bank	5.045.496	2.770.229
Deposito berjangka	4.062.697	3.631.424
Jumlah	**9.112.312**	**6.409.827**

Rincian kas dan setara kas berdasarkan mata uang dan tiap bank adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kas		
Rupiah	3.128	7.515
Dolar AS	891	567
Lain-lain	100	92
Jumlah kas	**4.119**	**8.174**
Kas di bank		
Dolar AS:		
Entitas berelasi dengan Pemerintah		
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	891.329	514.299
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	844.933	636.281
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	581.752	562.533
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US$10.000)	1.526	852
Pihak ketiga		
- Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ("Crédit Agricole CIB", dahulu Calyon)	214.982	83.209
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation	94.194	-
- Citibank, N.A.	49.440	35.603
- J.P. Morgan Chase & Co.	16.130	-
- PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	2.515	32.293
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US$10.000)	13.532	18.814
Jumlah rekening Dolar AS	**2.710.333**	**1.883.884**

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rupiah:		
Entitas berelasi dengan Pemerintah		
- Bank Mandiri	651.073	270.785
- BRI	598.851	132.696
- BNI	547.355	185.568
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	265.065	198.404
- PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRI Syariah")	48.692	9
- PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah")	14.188	1.065
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US$10.000)	9.745	2.664
Pihak ketiga		
- PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	40.008	32.022
- Citibank, N.A.	24.875	20.965
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US$10.000)	17.866	15.622
Jumlah rekening Rupiah	**2.217.718**	**859.800**
Euro:		
Pihak ketiga		
- Crédit Agricole CIB	64.889	-
Entitas berelasi dengan Pemerintah		
- Bank Mandiri	220	123
- BNI	8	554
- BRI	1	1
Jumlah rekening Euro	**65.118**	**678**
Malaysian Ringgit		
Pihak ketiga		
- RHB Bank Berhad	39.417	20.946
Kas di bank - rekening mata uang asing lainnya - Pihak ketiga	12.910	4.921
Jumlah kas di bank	**5.045.496**	**2.770.229**
Deposito berjangka dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang		
Rekening Dolar AS:		
Entitas berelasi dengan Pemerintah		
- BRI	508.397	1.003.976
- BNI	193.671	398.530
- BTN	127.500	17.500
- PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	50.005	5
- Bank Mandiri	32.760	22.958
Pihak ketiga		
- Industrial and Commercial Bank of China	20.000	-
- Citibank, NA	15.000	-
- PT Bank Muamalat Tbk	12.000	-
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US$10.000)	7.900	3.915
Jumlah deposito berjangka - rekening Dolar AS	**967.233**	**1.446.884**

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rekening Rupiah:		
Entitas berelasi dengan Pemerintah		
- BRI	1.351.105	999.443
- Bank Mandiri	516.931	410.020
- BNI	505.346	471.616
- BTN	454.425	129.046
- BSM	137.711	48.435
- PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	47.807	25.834
- BNI Syariah	18.591	29.340
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US$10.000)	17.264	2.952
Pihak ketiga:		
- PT Bank Bukopin Tbk	12.098	24.648
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US$10.000)	27.845	43.206
Jumlah deposito berjangka - rekening Rupiah	**3.089.123**	**2.184.540**
Jumlah deposito berjangka - rekening mata uang asing lainnya - pihak ketiga	**6.341**	**-**
Jumlah deposito berjangka	**4.062.697**	**3.631.424**
Jumlah kas dan setara kas	**9.112.312**	**6.409.827**

Suku bunga tahunan deposito berjangka selama tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rupiah	3,25% - 9,00%	3,00% - 8,75%
Dolar AS	0,50% - 3,37%	0,40%-2,36%
Dolar Singapura	0,50%	-

Eksposur maksimum terhadap resiko kredit pada akhir periode pelaporan senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan di atas.

7. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Kas yang dibatasi pengunaannya menunjukkan Dolar AS dan Rupiah rekening *escrow* yang ada di bank adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rekening Dolar AS:		
Entitas berelasi dengan Pemerintah		
- Bank Mandiri	58.140	2.165
- BRI	11.725	40.469
- BNI	10.401	38.526

7. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rekening Dolar AS (lanjutan):		
Pihak ketiga		
- PT Bank BNP Paribas Indonesia	18.000	18.000
- PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	4.000	11.752
- Bank lain (masing-masing di bawah US$10.000)	685	231
Rekening Rupiah:		
Entitas berelasi dengan Pemerintah		
- BNI	3.553	3.453
- BRI	1.421	3.408
- Bank Mandiri	990	875
Pihak ketiga		
- Bank lain (masing-masing di bawah US$10.000)	-	792
Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya	**108.915**	**119.671**

Tingkat bunga per tahun atas kas yang dibatasi penggunaannya selama tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rupiah	5,00%-7,80%	2,00%-8,50%
Dolar AS	0,24%-0,80%	0,75%-0,80%

Rekening Dolar AS
Rekening *escrow* berkaitan dengan *Letter of Credit* ("L/C") yang diterbitkan untuk pengadaan minyak mentah dan produk turunannya serta bank garansi.

Rekening Rupiah
Rekening *escrow* adalah deposito berjangka yang dijaminkan untuk penerbitan bank garansi dan *performance bond*.

8. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

a. Piutang usaha

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang usaha	2.161.456	1.792.133
Penyisihan penurunan nilai, neto	(228.001)	(211.506)
Jumlah	**1.933.455**	**1.580.627**

Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan sebesar nilai tercatat dari piutang di atas.

Grup tidak menguasai aset-aset pelanggan sebagai jaminan piutang.

Beberapa piutang usaha entitas anak tertentu digunakan sebagai jaminan atas pinjaman utang jangka panjang entitas anak tertentu tersebut (Catatan 20a).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha dari pihak ketiga.

8. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

a. Piutang usaha (lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo awal	211.506	204.340
Penurunan nilai	29.957	42.001
Pemulihan penurunan nilai	(7.652)	(33.935)
Selisih kurs	(5.810)	(900)
Saldo akhir	**228.001**	**211.506**

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2018, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha dari pihak ketiga.

Piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dolar AS	1.323.528	1.037.216
Rupiah	837.130	754.907
Euro	98	10
Dolar Singapura	700	-
Jumlah	**2.161.456**	**1.792.133**

b. Piutang lain-lain

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset reasuransi	333.119	243.068
Piutang yang berasal dari operasi minyak dan gas bumi pada Entitas Anak	132.545	256.883
Lain-lain	286.788	139.060
Sub jumlah	752.452	639.011
Penyisihan penurunan nilai	(18.140)	(18.551)
Jumlah piutang lain-lain	**734.312**	**620.460**

8. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

b. Piutang lain-lain (lanjutan)

Aset reasuransi mempresentasikan jumlah premi yang dibayar atau bagian premi PT Asuransi Tugu Pratama Tbk atas transaksi reasuransi dan retrosesi prospektif.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo awal	(18.551)	(11.635)
Pemulihan/(penambahan) penurunan nilai	411	(6.916)
Saldo akhir	**(18.140)**	**(18.551)**

Berdasarkan penelaahan atas saldo piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

9. PIUTANG PEMERINTAH

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Perusahaan:		
Piutang atas pengakuan pendapatan Selisih Harga	2.924.148	-
Piutang atas penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg	1.147.538	1.404.911
Piutang atas penggantian biaya subsidi jenis BBM tertentu	175.556	473.928
Piutang atas penggantian biaya subsidi minyak tanah	16.828	-
Piutang imbalan jasa pemasaran	72.489	49.902
Konversi minyak tanah	10.626	-
Piutang lain-lain	-	102
Sub jumlah	4.347.185	1.928.843
Entitas anak	411.224	337.832
Sub jumlah	4.758.409	2.266.675
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai	-	(110.936)
Jumlah (Catatan 41)	**4.758.409**	**2.155.739**
Bagian lancar	(1.834.261)	(1.492.625)
Bagian tidak lancar	**2.924.148**	**663.114**

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang Pemerintah adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo awal	110.936	-
Penurunan nilai	-	363.830
Pemulihan penurunan nilai	(106.085)	(252.894)
Laba selisih kurs	(4.851)	-
Saldo akhir	**-**	**110.936**

9. PIUTANG PEMERINTAH (lanjutan)

Penyisihan piutang pemerintah tahun 2017 sebesar US$110.936 atas piutang subsidi 2016 sebagai dampak adanya penundaan pembayaran sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Anggaran No. S-2616/AG/2017 tertanggal 12 Desember 2017.

a. Piutang atas pengakuan pendapatan Selisih Harga

Rincian piutang atas pengakuan Selisih Harga adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang atas pendapatan Selisih Harga:		
2018	2.657.132	-
2017	1.248.347	-
Sub jumlah	**3.905.479**	**-**
Penyesuaian nilai wajar piutang:		
2018	(773.562)	-
2017	(207.769)	-
Sub jumlah	**(981.331)**	**-**
Piutang bersih setelah penyesuaian nilai wajar:		
2018	1.883.570	-
2017	1.040.578	-
Jumlah (Catatan 31)	**2.924.148**	**-**

Pada tanggal 16 Juli 2018, BPK mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan ("LHP") atas perhitungan dan pendistribusian subsidi JBT Minyak Solar dan LPG tabung 3 kg No. 36/AUDITAMA VII/PDTT/07/2018. Berdasarkan LHP tersebut, Perusahaan direkomendasikan untuk meminta penggantian kepada Pemerintah atas Selisih Harga untuk JBT Minyak Solar sebesar Rp20,79 triliun atau setara dengan US$1.444.076 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai – "PPN" dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – "PBBKB" Rp2,71 triliun atau setara dengan US$188.358) dan JBKP Premium Tahun 2017 sebesar Rp5,51 triliun atau setara dengan US$382.904 (termasuk PPN dan PBBKB sebesar Rp0,72 triliun atau setara dengan US$49.944).

Sesuai Surat Menteri Keuangan No. 642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018, Menteri Keuangan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN, mengeluarkan kebijakan bahwa Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan Perusahaan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar sesuai dengan LHP BPK.

Pada tanggal 20 Mei 2019, BPK mengeluarkan LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta Penghitungan Subsidi JBT & LPG 3 Kg Tahun 2018 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk dan instansi terkait lainnya di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua No. 31/AUDITAMA VII/PDTT/05/2019 yang diterima Perusahaan pada tanggal 23 Mei 2019. Berdasarkan LHP tersebut antara lain, Perusahaan mengalami:

9. PIUTANG PEMERINTAH (lanjutan)

a. Piutang atas pengakuan pendapatan Selisih Harga (lanjutan)

- Kekurangan penerimaan atas Selisih Harga dalam penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar sebesar Rp29,31 triliun atau setara dengan US$2.024.203 (termasuk PPN dan PBBKB sebesar Rp4,18 triliun atau setara dengan US$288.943);
- Kekurangan penerimaan atas penyaluran JBT Minyak Tanah tahun 2018 sebesar Rp243,68 miliar atau setara dengan US$16.828 (tidak termasuk PPN) akibat penetapan Harga Indeks Pasar ("HIP") dan Harga Dasar JBT Minyak Tanah tidak sesuai dengan formula perhitungan harga jual eceran BBM;
- Kekurangan penerimaan atas Selisih Harga JBKP Premium sebesar Rp23,27 triliun atau setara dengan US$1.456.076, yang terdiri dari kekurangan penerimaan atas pendistribusian JBKP wilayah Jawa, Madura, dan Bali ("Jamali") dan diluar wilayah Jawa, Madura dan Bali ("Non Jamali") masing-masing sebesar Rp7,74 triliun dan atau setara dengan US$534.205 dan Rp15,53 triliun atau setara dengan US$921.871; dan
- Kelebihan penerimaan atas penjualan JBKP Premium Jamali yang melebihi HJE ketetapan Pemerintah sebesar Rp234,82 miliar atau setara dengan US$16.216 akibat penetapan wilayah Jamali menjadi wilayah penugasan.

Berdasarkan LHP tersebut, Perusahaan direkomendasikan oleh BPK agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait kebijakan pengaturan kekurangan penerimaan dalam kegiatan penyaluran JBT Minyak Solar, JBT Minyak Tanah dan JBKP Premium tahun 2018 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk kelebihan penerimaan atas penjualan JBKP Premium Jamali, Perusahaan direkomendasikan oleh BPK untuk menyetorkan kelebihan penerimaan tersebut ke Kas Negara.

Sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019, Menteri Keuangan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN, mengeluarkan kebijakan bahwa Pemerintah akan mengganti kekurangan penerimaan Perusahaan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Non Jamali Tahun 2018 sesuai dengan LHP BPK No. 31/AUDITAMA VII/PDTT/05/2019. Sedangkan untuk kekurangan dan kelebihan penerimaan Perusahaan dari penjualan JBKP Premium Jamali sebagai kekurangan dan kelebihan penerimaan Perusahaan.

Sebelum diterimanya LHP BPK dan Surat Menteri Keuangan tersebut diatas, Perusahaan menerima Surat BPK RI No. 126/S/XX/05/2019 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta Penghitungan Subsidi JBT & LPG 3 Kg Tahun 2018 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk dan instansi terkait lainnya tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Menteri BUMN No. SR-330/MBU/05/2019 mengenai pembukuan Selisih Harga jual eceran JBT dan JBKP Non Jamali serta kekurangan penerimaan JBT Minyak Tanah dengan nilai sesuai dengan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 17 Mei 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perusahaan mencatat pendapatan dan piutang dari Pemerintah atas Selisih Harga JBT Minyak Solar dan JBKP Non Jamali tahun 2018, sebelum penyesuaian nilai wajar masing-masing sebesar Rp25,13 triliun atau setara dengan US$1.735.260 (tidak termasuk PPN dan PBBKB sebesar Rp4,18 triliun atau setara dengan US$813.389) dan Rp13,35 triliun atau setara dengan US$921.871 (tidak termasuk PPN dan PBBKB sebesar Rp2,19 triliun atau setara dengan US$151.057) dan atas Selisih Harga JBT Minyak Solar tahun 2017 sebesar Rp18,08 triliun atau setara dengan US$1.248.347 (tidak termasuk PPN dan PBBKB sebesar Rp2,71 triliun atau setara dengan US$187.252).

9. PIUTANG PEMERINTAH (lanjutan)

a. Piutang atas pengakuan pendapatan Selisih Harga (lanjutan)

Penyesuaian nilai wajar atas pengakuan pendapatan dan piutang dari Pemerintah atas Selisih Harga tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp11,20 triliun atau setara dengan US$773.562, dan Rp3,01 triliun atau setara dengan US$207.769. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan nilai wajar tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun	Termin Pembayaran	Tingkat suku bunga diskonto (Yield) Obligasi Rupiah Pemerintah Per 31 Desember 2018	Estimasi Tahun Penerimaan
2018	Termin 1	7.91%	2022
	Termin 2	8.01%	2023
2017	Termin 1	7.38%	2020
	Termin 2	7.72%	2021

b. Piutang atas penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg

Piutang ini merupakan penggantian biaya subsidi LPG 3 kg yang disalurkan kepada masyarakat. Penugasan Pemerintah dalam bentuk *Public Service Obligation* ("PSO") kepada Perusahaan dan penetapan harganya ditetapkan berdasarkan kontrak tahunan dengan Menteri ESDM.

Saldo piutang subsidi LPG 3 kg ini akan dibayarkan melalui mekanisme APBN periode berikutnya.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo awal	1.404.911	1.068.920
Penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg tahun berjalan (Catatan 29)	3.496.603	2.977.967
Koreksi audit Pemerintahan (BPK dan ESDM) untuk penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg tahun:		
- 2018 (Catatan 29)	(1.252)	-
- 2017 (Catatan 29)	(5.661)	-
- 2016 (Catatan 29)	-	(484)
Penerimaan tunai	(3.614.277)	(2.624.110)
Kerugian selisih kurs	(132.786)	(17.382)
Saldo akhir	**1.147.538**	**1.404.911**

9. PIUTANG PEMERINTAH (lanjutan)

c. Piutang atas penggantian biaya subsidi jenis BBM tertentu

Piutang Perusahaan atas penggantian biaya subsidi jenis BBM tertentu merupakan tagihan atas subsidi BBM yang disalurkan kepada masyarakat.

Penugasan Pemerintah dalam bentuk PSO kepada Perusahaan ditetapkan berdasarkan kontrak tahunan dengan BPH Migas. Penetapan harga jual BBM bersubsidi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Saldo piutang penggantian subsidi jenis BBM tertentu ini akan dibayarkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") periode berikutnya.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo awal	473.928	422.398
Penggantian biaya subsidi jenis BBM tertentu untuk tahun berjalan (Catatan 29)	2.126.796	595.206
Pajak-pajak	266.693	69.617
Koreksi audit Pemerintahan (BPK dan ESDM) untuk penggantian biaya subsidi jenis BBM tertentu tahun:		
- 2018 (Catatan 29)	(699)	-
- 2017 (Catatan 29)	(147)	-
- 2016 (Catatan 29)	-	(605)
Penerimaan tunai	(2.600.487)	(600.992)
Kerugian selisih kurs	(90.528)	(11.696)
Saldo akhir	**175.556**	**473.928**

Koreksi atas perhitungan tagihan penggantian biaya subsidi BBM dilakukan berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") dan dicatat pada periode dimana audit diselesaikan.

Selama periode 2017, Perusahaan menggunakan harga ketetapan untuk pengakuan penjualan Minyak Solar Jenis BBM Tertentu ("JBT") dan Premium Jenis BBM Khusus Penugasan ("JBKP") sesuai dengan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2017 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada tanggal 17 Januari 2018 dan 9 Desember 2017.

Pada 16 Agustus 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan No. 40 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak. Sesuai dengan peraturan baru tersebut, harga jual eceran ADO per liter pada titik pengiriman dihitung berdasarkan harga formula, termasuk PPN, dengan subsidi maksimum Rp2.000 (nilai penuh) per liter dan diterapkan secara retrospektif mulai 1 Januari 2018.

d. Piutang atas penggantian biaya subsidi jenis minyak tanah

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 9a di atas, berdasarkan LHP BPK No. 31/AUDITAMA VII/PDTT/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, Perusahaan mengalami kekurangan penerimaan dalam penyaluran JBT Minyak Tanah sebesar Rp243,68 miliar atau setara dengan US$16.828 (tidak termasuk PPN sebesar Rp24,38 miliar atau setara dengan US$1.683) akibat penetapan Harga Indeks Pasar ("HIP") dan Harga Dasar JBT Minyak Tanah tidak sesuai dengan formula perhitungan harga jual eceran BBM yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.62K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa atas kekurangan tersebut akan mendapatkan penggantian dari Pemerintah melalui mekanisme subsidi.

9. PIUTANG PEMERINTAH (lanjutan)

e. Piutang imbalan jasa pemasaran

Piutang ini merupakan jumlah tagihan Perusahaan kepada Pemerintah melalui SKK Migas untuk komisi jasa memasarkan minyak mentah, gas bumi dan LNG milik Pemerintah.

Rincian piutang imbalan jasa pemasaran adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Imbalan jasa pemasaran:		
2018	22.587	-
2017	26.529	26.529
2016	23.373	23.373
Saldo akhir	**72.489**	**49.902**

f. Piutang entitas anak

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PEP		
- *Domestic Market Obligation* ("DMO") *fees*	106.398	90.930
- *Underlifting*	18.942	-
PHE		
- DMO *fees*	15.414	25.859
- *Underlifting*	25.730	46.480
PEPC		
- *Underlifting*	224.904	174.563
PHI		
- DMO *fees*	18.780	-
- *Underlifting*	1.056	-
Jumlah - entitas anak	**411.224**	**337.832**

DMO *fees* merupakan tagihan kepada Pemerintah sehubungan dengan kewajiban entitas anak dalam menyediakan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri untuk produk minyak sesuai dengan KKS-nya.

Piutang underlifting merupakan piutang entitas anak dari SKK Migas karena volume *lifting* minyak mentah dan gas bumi yang dilakukan oleh SKK Migas melebihi *entitlement* pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang entitas anak, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang entitas anak dari Pemerintah.

10. PERSEDIAAN

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Gas	13.984	23.528
Minyak mentah:		
Produksi dalam negeri	1.026.225	1.029.639
Impor	579.765	754.663
Sub jumlah minyak mentah	1.605.990	1.784.302
Produk minyak:		
Minyak solar	1.018.791	755.620
Bensin Premium	536.309	594.740
Bensin Pertamax, Pertamax Plus Pertalite dan Pertadex (minyak diesel)	491.005	451.999
Intermedia	337.246	272.786
Produk minyak dalam proses produksi	399.963	347.408
Avtur dan Avigas	264.545	220.903
LPG	262.104	277.690
Petrokimia	170.815	127.457
BBM industri dan *marine*	148.621	118.515
Minyak tanah	94.299	75.503
Minyak diesel industri	17.563	21.722
Lainnya	476.999	514.176
Sub jumlah produk minyak (Catatan 32)	4.218.260	3.778.519
Sub jumlah gas, minyak mentah dan produk minyak	5.838.234	5.586.349
Penyisihan penurunan nilai persediaan produk minyak (Catatan 32)	(167.270)	(92.854)
	5.670.964	5.493.495
Material	754.228	645.825
Penyisihan penurunan nilai persediaan material	(102.027)	(103.183)
	652.201	542.642
Jumlah	**6.323.165**	**6.036.137**

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan produk minyak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo awal (Catatan 32)	(92.854)	(76.542)
Penambahan selama tahun berjalan, neto	(74.416)	(16.312)
Saldo akhir (Catatan 32)	**(167.270)**	**(92.854)**

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan material adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo awal	(103.183)	(30.223)
Pembalikan (penambahan) selama tahun berjalan, neto	1.156	(72.960)
Saldo akhir	**(102.027)**	**(103.183)**

10. PERSEDIAAN (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan produk minyak dan material mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari penurunan nilai realisasi persediaan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya (Catatan 13). Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang dapat timbul terkait dengan persediaan yang diasuransikan.

11. INVESTASI LAINNYA

Investasi ini merupakan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada Perusahaan sehubungan likuidasi Pertamina Energy Trading Limited ("Petral"), Zambesi Investment Limited ("Zambesi") dan Pertamina Energy Services Pte.Ltd. ("PES") sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan tanggal 13 Juli 2015.

Pada tanggal 13 Maret 2017, Petral telah mendistribusikan dananya kepada Perusahaan.

Pada 16 Juni 2017, Zambesi telah dilikuidasi.

Pada tanggal 31 Oktober 2017, Petral telah dilikuidasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada Perusahaan berdasarkan laporan likuidator untuk PES sebesar US$80.171 (2017: US$27.328) (Catatan 39).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 3 Januari 2019, Pemegang Saham Perusahaan menyetujui untuk memperpanjang proses likuidasi PES sampai dengan selesainya proses pembubaran/likuidasi sekaligus melakukan aksi korporasi yang diperlukan untuk menuntaskan proses pembubaran/likuidasi tersebut.

12. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Investasi pada blok minyak dan gas, neto	1.024.237	1.227.187
Investasi pada entitas asosiasi, neto	725.846	583.694
Investasi pada obligasi, neto	391.307	391.307
Investasi pada ventura bersama	369.922	457.405
Properti investasi	280.668	284.354
Penyertaan saham, neto	6.292	6.292
Aset keuangan lainnya	20.782	20.679
Jumlah	**2.819.054**	**2.970.918**

12. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Investasi pada blok minyak dan gas

Investasi pada blok minyak dan gas menunjukkan investasi Grup pada beberapa blok minyak dan gas di Malaysia yang dioperasikan oleh Murphy Sabah Oil Co. Ltd. dan Murphy Sarawak Oil Co. Ltd. Grup mencatat investasi tersebut menggunakan metode ekuitas karena memiliki pengaruh yang signifikan dalam *undivided interest* pada blok minyak dan gas tersebut.

	31 Desember 2018					
	Saldo awal	Penambahan	Penyesuaian	Transfer	Penurunan nilai	Saldo akhir
Biaya	1.614.965	-	96.295	-	(154.773)	1.556.487
Akumulasi amortisasi	(387.778)	(144.472)	-	-	-	(532.250)
Nilai buku, neto	**1.227.187**	**(144.472)**	**96.295**	**-**	**(154.773)**	**1.024.237**

	31 Desember 2017					
	Saldo awal	Penambahan	Penyesuaian	Transfer	Penurunan nilai	Saldo akhir
Biaya	1.698.348	-	(113)	-	(83.270)	1.614.965
Akumulasi amortisasi	(271.337)	(116.441)	-	-	-	(387.778)
Nilai buku, neto	**1.427.011**	**(116.441)**	**(113)**	**-**	**(83.270)**	**1.227.187**

b. Investasi pada entitas asosiasi

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan/ (pengurangan)	Perubahan lain	Bagian laba/ (rugi), neto	Dividen	Saldo akhir
Perusahaan							
PPT Energy Trading Co., Ltd.	50,00%	35.489	-	-	12.549	-	48.038
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI")	48,59%	151.937	-	-	(69.932)	-	82.005
		187.426	-	-	(57.383)	-	130.043
Investasi tidak langsung pada saham entitas asosiasi							
PT Donggi Senoro LNG	29,00%	240.437	-	2	38.780	-	279.219
PT Asuransi Samsung Tugu	19,50%	8.741	-	19	434	(125)	9.069
Seplat Petroleum Development Company Plc, Nigeria	20,46%	92.440	-	68.043	76.124	(12.059)	224.548
PT Gas Energi Jambi [c]	40,00%	-	-	-	-	-	-
Lainnya	19,67%-50,00%	54.650	27.458	2.298	(1.439)	-	82.967
		396.268	27.458	70.362	113.899	(12.184)	595.803
Jumlah investasi pada entitas asosiasi		**583.694**	**27.458**	**70.362**	**56.516**	**(12.184)**	**725.846**

	31 Desember 2017						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan/ (pengurangan)	Perubahan lain	Bagian laba/ (rugi), neto	Dividen	Saldo akhir
Perusahaan							
PPT Energy Trading Co., Ltd.	50,00%	32.499	-	1.516	2.616	(1.142)	35.489
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI")	48,59%	204.907	-	-	(52.970)	-	151.937
		237.406	-	1.516	(50.354)	(1.142)	187.426

12. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2017						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan/ (pengurangan)	Perubahan lain	Bagian laba/ (rugi) net	Dividen	Saldo akhir
Investasi tidak langsung pada saham entitas asosiasi							
PT Donggi Senoro LNG	29,00%	195.083	-	-	45.354	-	240.437
PT Tugu Reasuransi Indonesia[a)]	33,01%	29.849	-	(29.849)	-	-	-
PT Asuransi Samsung Tugu	19,50%	8.290	-	(19)	648	(178)	8.741
Etablissements Maurel et Prom SA [b)] (Catatan 4c)	72,65%	227.222	-	(227.222)	-	-	-
Seplat Petroleum Development Company Plc. Nigeria	21,37%	-	92.440	-	-	-	92.440
PT Gas Energi Jambi [c)]	40,00%	-	-	-	-	-	-
Lainnya	19,67%-50,00%	-	54.650	-	-	-	54.650
		460.444	147.090	(257.090)	46.002	(178)	396.268
Jumlah investasi pada entitas asosiasi		**697.850**	**147.090**	**(255.574)**	**(4.352)**	**(1.320)**	**583.694**

a) Pada tahun 2017, Grup memiliki pengendalian atas PT Tugu Reasuransi Indonesia dan mengkonsolidasikan laporan keuangannya.
b) Pada tanggal 15 Februari 2017, PT Pertamina Internasional Eksplorasi & Produksi memiliki 72,65% kepemilikan saham pada Etablissements Maurel et Prom.
c) PGN memiliki bagian kepemilikan pada PT Gas Energi Jambi sebesar 40% dan sejak tahun 2015 mengalami kerugian.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai investasi di entitas asosiasi sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai investasi.

Bagian Grup atas hasil dari asosiasi utama dan aset teragregasi (termasuk *goodwill*) dan liabilitas, adalah sebagai berikut:

	Negara berdiri	Aset	Liabilitas	Pendapatan	Laba/(rugi)	Persentase kepemilikan
31 Desember 2018						
- PPT Energy Trading Co., Ltd.	Jepang	118.983	(30.486)	731.189	25.098	50,00%
- PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI")	Indonesia	866.155	(697.385)	65.136	(141.991)	48,59%
- PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	2.646.556	(1.669.778)	1.174.024	133.726	29,00%
- PT Asuransi Samsung Tugu	Indonesia	61.997	(31.766)	9.046	1.446	19,50%
- Seplat	Nigeria	2.526.565	(925.680)	746.140	146.576	20,46%
- PT Gas Energi Jambi	Indonesia	41	(653)	-	-	-
31 Desember 2017						
- PPT Energy Trading Co., Ltd.	Jepang	153.471	(82.496)	692.966	5.232	50,00%
- PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI")	Indonesia	601.445	(1.045.454)	59.574	(50.519)	48,59%
- PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	2.466.693	(1.627.338)	998.208	155.704	29,00%
- PT Asuransi Samsung Tugu	Indonesia	55.775	(36.791)	11.161	2.163	19,50%
- Seplat	Nigeria	2.207.964	(975.232)	371.413	(3.307)	21,37%
- PT Gas Energi Jambi	Indonesia	41	(653)	-	-	-

c. Investasi pada obligasi

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo investasi pada obligasi sebesar US$391.307 merupakan investasi obligasi yang dikeluarkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama.

12. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

d. Investasi pada ventura bersama

Perubahan investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2018						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan) investasi	Perubahan lain	Bagian laba/ (rugi) neto	Dividen	Pemulihan/ (penurunan) nilai	Saldo akhir
Investasi tidak langsung pada ventura bersama								
PT Transportasi Gas Indonesia	59,87%	281.700	-	(1.013)	27.814	(105.758)	-	202.743
PT Perta Samtan Gas	66,00%	91.173	-	32	21.871	(23.100)	-	89.976
PT Patra SK	35,00%	65.769	-	-	5.387	(8.750)	-	62.406
PT Indo Thai Trading	51,00%	6.281	790	(791)	790	-	-	7.070
PT Perta Daya Gas	65,00%	1.683	-	28	2.023	-	-	3.734
Unimar LLC	50,00%	10.392	(7.176)	(1.657)	6.941	(8.500)	-	-
PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia	55,00%	407	-	-	-	-	-	407
PT Permata Karya Jasa*)	60,00%	-	2.416	-	1.382	(212)	-	3.586
Jumlah investasi pada ventura bersama		**457.405**	**(3.970)**	**(3.401)**	**66.208**	**(146.320)**	**-**	**369.922**

		31 Desember 2017						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan investasi	Perubahan lain	Bagian laba/ (rugi) neto	Dividen	Pemulihan/ (penurunan) nilai	Saldo akhir
Investasi tidak langsung pada ventura bersama								
PT Perta Samtan Gas	66,00%	79.383	-	7.355	17.635	(13.200)	-	91.173
PT Patra SK	35,00%	68.919	-	(26)	3.876	(7.000)	-	65.769
PT Indo Thai Trading	51,00%	4.815	-	(2)	1.468	-	-	6.281
PT Perta Daya Gas	65,00%	1.403	-	(111)	391	-	-	1.683
PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia	55,00%	-	407	-	-	-	-	407
PT Elnusa CGGVeritas Seismic**)	20,96%	-	-	-	-	-	-	-
PT Transportasi Gas Indonesia	59,87%	281.167	-	-	26.072	(25.539)	-	281.700
Unimar LLC	50,00%	45.069	-	-	(7.177)	(27.500)	-	10.392
Jumlah investasi pada ventura bersama		**480.756**	**407**	**7.216**	**42.265**	**(73.239)**	**-**	**457.405**

Bagian Grup atas hasil entitas ventura bersama utama dan aset agregat (termasuk *goodwill*) dan liabilitas adalah sebagai berikut:

	Negara berdiri	Aset	Liabilitas	Pendapatan	Laba/(rugi)	Persentase kepemilikan
31 Desember 2018						
- PT Patra SK	Indonesia	232.842	(54.539)	341.114	15.391	35,00%
- PT Perta Samtan Gas	Indonesia	166.010	(29.683)	121.802	33.187	66,00%
- PT Perta Daya Gas	Indonesia	48.618	(42.873)	12.497	3.113	65,00%
- PT Indo Thai Trading	Indonesia	35.332	(21.470)	184.779	1.549	51,00%
- PT Elnusa CGGVeritas Seismic	Indonesia	511	-	-	3	20,96%
- PT Transportasi Gas Indonesia	Indonesia	735.029	(96.391)	153.413	46.458	59,87%
- Unimar LLC	USA	33.740	(19.387)	43.918	13.881	50,00%
- PT Permata Karya Jasa*)	Indonesia	6.308	(2.040)	16.301	1.383	60,00%
31 Desember 2017						
- PT Patra SK	Indonesia	244.717	(59.696)	259.596	11.072	35,00%
- PT Perta Samtan Gas	Indonesia	180.172	(42.032)	106.950	26.720	66,00%
- PT Perta Daya Gas	Indonesia	53.219	(50.630)	12.469	602	65,00%
- PT Indo Thai Trading	Indonesia	31.994	(19.369)	156.716	2.869	51,00%
- PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia	Indonesia	739	-	-	-	55,00%
- PT Elnusa CGGVeritas Seismic	Indonesia	515	-	-	-	20,96%
- PT Transportasi Gas Indonesia	Indonesia	557.875	(87.357)	151.625	43.548	59,87%
- Unimar LLC	USA	49.370	(31.899)	62.993	(9.991)	50,00%

*) Catatan 1b.iii
**) Dilikuidasi pada tanggal 24 Mei 2017.

12. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

e. Properti investasi

	31 Desember 2018				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Pengalihan/ Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya historis:					
Tanah dan hak atas tanah	269.226	1.074	(17.368)	13.979	266.911
Bangunan	43.287	1.217	-	(2.402)	42.102
Jumlah biaya historis	312.513	2.291	(17.368)	11.577	309.013
Akumulasi depresiasi					
Bangunan	(28.159)	(2.058)	-	1.872	(28.345)
Nilai buku, neto	**284.354**				**280.668**

	31 Desember 2017				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Pengalihan/ Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya historis:					
Tanah dan hak atas tanah	288.314	-	-	(19.088)	269.226
Bangunan	43.042	-	-	245	43.287
Jumlah biaya historis	331.356	-	-	(18.843)	312.513
Akumulasi depresiasi					
Bangunan	(26.983)	(2.301)	-	1.125	(28.159)
Nilai buku, neto	**304.373**				**284.354**

Beban depresiasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 untuk properti investasi senilai US$2.058 dan US$2.301 (Catatan 37)

Pada tanggal 31 Desember 2018, seluruh properti investasi Grup, kecuali tanah dan hak atas tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lain yang mungkin terjadi (Catatan 13).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen telah mengestimasikan nilai wajar untuk properti investasi senilai US$1.803.218 dan US$1.503.088.

Pendapatan rental dari properti investasi yang dicatat untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 senilai US$26.588 dan US$11.792.

Manajemen berkeyakinan, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan pada kondisi tertentu yang mengindikasikan penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2018.

f. Penyertaan saham

	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Saldo	Persentase kepemilikan	Saldo	Persentase kepemilikan
Perusahaan				
- PT Seamless Pipe Indonesia Jaya	25.026	4,97%	25.026	4,97%
- PT Arun NGL [a)]	170	100,00%	170	100,00%
- PT Badak NGL [b)]	149	55,00%	149	55,00%
Sub jumlah	25.345		25.345	

12. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

f. Penyertaan saham (lanjutan)

	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Saldo	Persentase kepemilikan	Saldo	Persentase kepemilikan
Entitas Anak				
- PT Staco Jasapratama Indonesia	751	4,46%	751	4,46%
- PT Marga Raya Jawa Tol	2.690	6,86%	2.690	6,86%
- PT Trans Javagas Pipeline	739	10,00%	739	10,00%
- PT Asuransi Maipark Indonesia	604	7,31%	604	7,31%
- PT Bhakti Patra Nusantara	77	4,11%	77	4,11%
- PT Banten Gas Sinergy	3	0,14%	3	0,14%
Sub jumlah	4.864		4.864	
Jumlah	**30.209**		**30.209**	
Dikurangi:				
Penyisihan penurunan nilai	(23.917)		(23.917)	
Neto	**6.292**		**6.292**	

a) dalam proses likuidasi
b) lihat Catatan 2d

Grup mengelompokkan penyertaan modalnya sebagai tersedia untuk dijual pada harga perolehan karena Perusahaan, secara substansial, tidak memiliki kendali atas Perusahaan tersebut. Penyertaan ini diukur pada harga perolehan karena nilai wajarnya sulit untuk ditentukan secara layak.

g. Aset keuangan lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2018, aset keuangan lainnya secara umum merupakan investasi obligasi yang dimiliki oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

13. ASET TETAP

	31 Desember 2018					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Pengalihan/ Reklasifikasi	Penjabaran	Saldo akhir
Harga perolehan						
Perolehan langsung:						
Tanah dan hak atas tanah	1.702.277	3.034	-	5.618	(5.834)	1.705.095
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	9.168.847	28.693	(569)	131.485	(6.438)	9.322.018
Kilang	4.022.746	145.518	-	97.740	(70)	4.265.934
Bangunan	1.200.885	20.252	(367)	70.994	(10.313)	1.281.451
Kapal laut dan pesawat terbang	2.015.720	120.523	-	(26.626)	(13.282)	2.096.335
HBM bergerak	1.624.785	36.722	(5.875)	7.713	(29.707)	1.633.638
Aset dalam penyelesaian	1.446.340	1.083.618	-	(397.603)	(2.438)	2.129.917
Sub jumlah	21.181.600	1.438.360	(6.811)	(110.679)	(68.082)	22.434.388

13. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2018					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Pengalihan/ Reklasifikasi	Penjabaran	Saldo akhir
Aset sewa pembiayaan:						
Hak atas tanah	157.605	-	-	(155.364)	(2.241)	-
Bangunan	83.987	-	-	121.750	-	205.737
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	369.534	44.097	-	1.003	-	414.634
HBM bergerak	156.432	10.707	-	-	(124)	167.015
Sub jumlah	767.558	54.804	-	(32.611)	(2.365)	787.386
Jumlah harga perolehan	**21.949.158**	**1.493.164**	**(6.811)**	**(143.290)**	**(70.447)**	**23.221.774**
Akumulasi penyusutan						
Perolehan langsung:						
Hak atas tanah	(876)	-	-	-	664	(212)
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	(4.393.822)	(504.253)	42	58.559	5.153	(4.834.321)
Kilang	(2.349.134)	(249.586)	-	(307)	101	(2.598.926)
Bangunan	(477.017)	(52.430)	271	(1.435)	3.796	(526.815)
Kapal laut dan pesawat terbang	(775.835)	(105.264)	-	65.138	2.870	(813.091)
HBM bergerak	(969.682)	(103.113)	5.697	61.156	19.138	(986.804)
Sub jumlah	(8.966.366)	(1.014.646)	6.010	183.111	31.722	(9.760.169)
Aset sewa pembiayaan:						
Hak atas tanah	(82.872)	(6.070)	-	88.942	-	-
Bangunan	(58.902)	(14.272)	-	(88.215)	-	(161.389)
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	(210.786)	(38.302)	-	(727)	-	(249.815)
HBM bergerak	(133.666)	(7.877)	-	4.628	77	(136.838)
Sub jumlah	(486.226)	(66.521)	-	4.628	77	(548.042)
Jumlah akumulasi penyusutan	**(9.452.592)**	**(1.081.167)**	**6.010**	**187.739**	**31.799**	**(10.308.211)**
Penyisihan penurunan nilai	(57.055)	-	2.719	-	47	(54.289)
Nilai buku neto	**12.439.511**					**12.859.274**

	31 Desember 2017					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Pengalihan/ Reklasifikasi	Penjabaran	Saldo akhir
Harga perolehan						
Perolehan langsung:						
Tanah dan hak atas tanah	1.663.116	29.716	-	10.259	(814)	1.702.277
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	8.226.598	156.997	(1.855)	787.473	(366)	9.168.847
Kilang	3.815.932	175.395	(349)	31.774	(6)	4.022.746
Bangunan	1.003.055	16.298	(1.984)	193.110	(9.594)	1.200.885
Kapal laut dan pesawat terbang	1.894.266	52.838	-	70.460	(1.844)	2.015.720
HBM bergerak	1.563.969	86.287	(7.203)	(29.853)	11.585	1.624.785
Aset dalam penyelesaian	1.792.241	999.558	(12.896)	(1.332.310)	(253)	1.446.340
Sub jumlah	19.959.177	1.517.089	(24.287)	(269.087)	(1.292)	21.181.600
Aset sewa pembiayaan:						
Hak atas tanah	122.815	-	-	35.216	(426)	157.605
Bangunan	83.987	-	-	-	-	83.987
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	305.567	63.967	-	-	-	369.534
HBM bergerak	152.167	6.498	-	(1.740)	(493)	156.432
Sub jumlah	664.536	70.465	-	33.476	(919)	767.558
Jumlah harga perolehan	**20.623.713**	**1.587.554**	**(24.287)**	**(235.611)**	**(2.211)**	**21.949.158**

13. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2017					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Pengalihan/ Reklasifikasi	Penjabaran	Saldo akhir
Akumulasi penyusutan						
Perolehan langsung:						
Hak atas tanah	(697)	-	-	(181)	2	(876)
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	(3.883.879)	(544.907)	676	34.121	167	(4.393.822)
Kilang	(2.139.241)	(223.626)	-	13.722	11	(2.349.134)
Bangunan	(426.461)	(59.431)	492	8.136	247	(477.017)
Kapal laut dan pesawat terbang	(675.211)	(101.882)	-	849	409	(775.835)
HBM bergerak	(883.826)	(106.150)	4.229	21.281	(5.216)	(969.682)
Sub jumlah	(8.009.315)	(1.035.996)	5.397	77.928	(4.380)	(8.966.366)
Aset sewa pembiayaan:						
Hak atas tanah	(70.578)	(12.294)	-	-	-	(82.872)
Bangunan	(50.506)	(8.396)	-	-	-	(58.902)
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	(165.624)	(34.098)	-	(11.064)	-	(210.786)
HBM bergerak	(121.208)	(9.216)	-	(4.432)	1.190	(133.666)
Sub jumlah	(407.916)	(64.004)	-	(15.496)	1.190	(486.226)
Jumlah akumulasi penyusutan	**(8.417.231)**	**(1.100.000)**	**5.397**	**62.432**	**(3.190)**	**(9.452.592)**
Penyisihan penurunan nilai	(49.697)	(7.364)	-	-	6	(57.055)
Nilai buku neto	**12.156.785**					**12.439.511**

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban pokok penjualan (Catatan 32)	566.412	551.911
Beban dari aktivitas operasi lainnya (Catatan 35)	88.405	84.636
Beban penjualan dan pemasaran (Catatan 36)	328.695	362.241
Beban umum dan administrasi (Catatan 37)	97.655	101.212
Jumlah	**1.081.167**	**1.100.000**

Pada tanggal 31 Desember 2018, Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai lokasi di Indonesia dengan Hak Guna Bangunan (“HGB”) berkisar antara 20-30 tahun. Beberapa HGB akan habis masa berlakunya dalam waktu dekat. Manajemen berpendapat bahwa sertifikat HGB tersebut dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset minyak dan gas serta panas bumi dari Grup, kecuali tanah dan hak atas tanah (Catatan 10, 12, 13 dan 14), telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lain yang mungkin terjadi dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US$53.391.900 dan US$50.430.767. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul terkait dengan aset yang diasuransikan.

Aset tetap tertentu telah dijaminkan untuk pinjaman jangka panjang anak perusahaan (Catatan 20a).

Bunga yang dikapitalisasi sebagai bagian dari aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar US$31.500 serta US$25.611 (Catatan 46a).

13. ASET TETAP (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai aset tetap.

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari kilang, bangunan, kapal, instalasi dan aset bergerak.

14. ASET MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI

	31 Desember 2018				
	Saldo awal	Penambahan	Pengalihan/ Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Harga perolehan					
Perolehan langsung:					
Tanah dan hak atas tanah	18.243	-	-	38	18.281
Sumur minyak dan gas	13.915.574	1.116.330	(107.073)	537.014	15.461.845
Sumur panas bumi	671.595	4.671	-	83.085	759.351
Instalasi	7.213.878	109.761	(1.195)	353.064	7.675.508
Pabrik LPG	1.538.366	-	-	-	1.538.366
Bangunan	173.184	1.152	-	24.277	198.613
HBM bergerak	346.955	39.034	-	32.522	418.511
Sub jumlah	23.877.795	1.270.948	(108.268)	1.030.000	26.070.475
Aset dalam penyelesaian					
Sumur eksplorasi dan evaluasi	1.326.425	606.380	(120.381)	(431.694)	1.380.730
Sumur pengembangan	2.096.876	1.163.019	(4.519)	(831.877)	2.423.499
Sub jumlah	3.423.301	1.769.399	(124.900)	(1.263.571)	3.804.229
Aset sewa pembiayaan:					
Instalasi	4.672	-	-	-	4.672
Pabrik LPG	12.501	-	-	-	12.501
Bangunan	19.939	-	-	-	19.939
HBM bergerak	195.595	-	-	-	195.595
Sub jumlah	232.707	-	-	-	232.707
Jumlah harga perolehan	**27.533.803**	**3.040.347**	**(233.168)**	**(233.571)**	**30.107.411**
Akumulasi penyusutan, deplesi dan amortisasi					
Perolehan langsung:					
Sumur minyak dan gas	(6.096.976)	(965.091)	38.038	(52.132)	(7.076.161)
Sumur panas bumi	(113.904)	(38.223)	-	-	(152.127)
Instalasi	(2.121.664)	(586.590)	-	(9.548)	(2.717.802)
Pabrik LPG	(179.681)	(113.920)	-	-	(293.601)
Bangunan	(36.698)	(11.743)	-	-	(48.441)
HBM bergerak	(214.002)	(30.358)	-	-	(244.360)
Sub jumlah	(8.762.925)	(1.745.925)	38.038	(61.680)	(10.532.492)
Aset sewa pembiayaan:					
Instalasi	(16.695)	(2.028)	-	-	(18.723)
Pabrik LPG	(5.469)	(308)	-	-	(5.777)
Bangunan	(18.198)	(324)	-	-	(18.522)
HBM bergerak	(181.118)	(280)	-	-	(181.398)
Sub jumlah	(221.480)	(2.940)	-	-	(224.420)
Jumlah akumulasi penyusutan, deplesi dan amortisasi	**(8.984.405)**	**(1.748.865)**	**38.038**	**(61.680)**	**(10.756.912)**
Penyisihan penurunan nilai	(518.024)	(218.189)	-	-	(736.213)
Jumlah nilai buku	**18.031.374**				**18.614.286**

14. ASET MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI (lanjutan)

	31 Desember 2017				
	Saldo awal	Penambahan	Pengalihan/ Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Harga perolehan					
Perolehan langsung:					
Tanah dan hak atas tanah	17.651	-	-	592	18.243
Sumur minyak dan gas	10.936.067	2.030.494	(172.042)	1.121.055	13.915.574
Sumur panas bumi	473.810	-	-	197.785	671.595
Instalasi	6.345.909	138.748	(144)	729.365	7.213.878
Pabrik LPG	1.435.050	-	-	103.316	1.538.366
Bangunan	139.738	2.054	-	31.392	173.184
HBM bergerak	306.208	9.942	-	30.805	346.955
Sub jumlah	19.654.433	2.181.238	(172.186)	2.214.310	23.877.795
Aset dalam penyelesaian					
Sumur eksplorasi dan evaluasi	1.851.229	463.671	(85.882)	(902.593)	1.326.425
Sumur pengembangan	1.769.156	1.190.713	-	(862.993)	2.096.876
Sub jumlah	3.620.385	1.654.384	(85.882)	(1.765.586)	3.423.301
Aset sewa pembiayaan:					
Instalasi	21.260	-	(16.588)	-	4.672
Pabrik LPG	28.163	-	-	(15.662)	12.501
Bangunan	19.962	-	-	(23)	19.939
HBM bergerak	195.572	-	-	23	195.595
Sub jumlah	264.957	-	(16.588)	(15.662)	232.707
Jumlah harga perolehan	**23.539.775**	**3.835.622**	**(274.656)**	**433.062**	**27.533.803**
Akumulasi penyusutan, deplesi dan amortisasi					
Perolehan langsung:					
Sumur minyak dan gas	(4.582.073)	(914.618)	103.496	(703.781)	(6.096.976)
Sumur panas bumi	(81.462)	(32.442)	-	-	(113.904)
Instalasi	(1.592.282)	(529.382)	-	-	(2.121.664)
Pabrik LPG	(105.817)	(58.200)	-	(15.664)	(179.681)
Bangunan	(26.761)	(9.937)	-	-	(36.698)
HBM bergerak	(176.852)	(37.150)	-	-	(214.002)
Sub jumlah	(6.565.247)	(1.581.729)	103.496	(719.445)	(8.762.925)
Aset sewa pembiayaan:					
Instalasi	(31.060)	(2.223)	16.588	-	(16.695)
Pabrik LPG	(20.517)	(617)	-	15.665	(5.469)
Bangunan	(17.787)	(411)	-	-	(18.198)
HBM bergerak	(180.831)	(287)	-	-	(181.118)
Sub jumlah	(250.195)	(3.538)	16.588	15.665	(221.480)
Jumlah akumulasi penyusutan, deplesi dan amortisasi	**(6.815.442)**	**(1.585.267)**	**120.084**	**(703.780)**	**(8.984.405)**
Penyisihan penurunan nilai	(326.671)	(234.614)	43.261	-	(518.024)
Jumlah nilai buku	**16.397.662**				**18.031.374**

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban produksi hulu dan *lifting* (Catatan 33)	1.741.040	1.578.988
Beban umum dan administrasi (Catatan 37)	7.825	6.279
Jumlah	**1.748.865**	**1.585.267**

14. ASET MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, seluruh aset panas bumi miliki PGE, PEP, dan PGN, kecuali tanah dan hak atas tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lain yang mungkin terjadi (Catatan 13). Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul terkait dengan aset minyak dan gas serta panas bumi yang diasuransikan.

Beban bunga milik PGE yang dikapitalisasi sebagai bagian dari aset panas bumi masing-masing sebesar US$24.885 dan US$32.338 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Catatan 46a).

Kenaikan nilai sumur minyak dan gas pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing, merupakan akibat dari pembayaran *signature bonus* Blok Rokan (Catatan 4g) dan dikonsolidasikannya Etablissements Maurel et Prom.

Penurunan nilai aset minyak dan gas bumi
Manajemen melakukan pengujian penurunan nilai pada tahun 2018 dan 2017 untuk semua Blok karena terdapat indikasi eksternal dari perkembangan harga minyak. Manajemen telah mengevaluasi aspek komersial dan teknikal berdasarkan hasil dari produksi terkini.

Estimasi jumlah terpulihkan dan nilai buku aset minyak dan gas bumi yang diturunkan nilainya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018				
	Estimasi jumlah terpulihkan	Nilai buku	Estimasi penurunan (pemulihan) nilai	Jumlah penurunan (pemulihan) *goodwill*	Penurunan (pemulihan) nilai pada aset minyak dan gas serta panas bumi
PHE dan entitas anaknya	173.488	366.793	193.305	-	193.305
Pertamina EP Cepu ADK	55.046	53.708	(1.338)	-	(1.338)
PGN dan entitas anaknya	872.528	898.750	26.222	-	26.222
Nilai buku, neto	**1.101.062**	**1.319.251**	**218.189**	**-**	**218.189**

	31 Desember 2017				
	Estimasi jumlah terpulihkan	Nilai buku	Estimasi penurunan (pemulihan) nilai	Jumlah penurunan (pemulihan) *goodwill*	Penurunan (pemulihan) nilai pada aset minyak dan gas serta panas bumi
PHE dan entitas anaknya	856.112	1.097.805	241.693	6.890	234.803
PIEP dan entitas anaknya	740.580	708.003	(32.577)	-	(32.577)
Pertamina EP Cepu	58.888	-	(58.888)	-	(58.888)
Pertamina EP Cepu ADK	8.817	63.864	55.047	-	55.047
PGN dan entitas anaknya	842.735	835.703	(7.032)	-	(7.032)
Nilai buku, neto	**2.507.132**	**2.705.375**	**198.243**	**6.890**	**191.353**

Asumsi harga minyak dan gas bumi serta tingkat diskonto yang digunakan diungkapkan di Catatan 15d.

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dana yang dibatasi penggunaannya	915.221	867.332
Aset bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya (Catatan 26)	401.120	1.361
Piutang sewa pembiayaan	200.770	208.908
Uang muka ke pemasok, neto	133.406	217.704
Piutang lain-lain - pihak ketiga	80.287	243.786
Biaya dibayar dimuka	65.319	31.601
Piutang lain-lain - pihak berelasi (Catatan 41b)	64.907	80.349
Goodwill	53.807	53.807
Piutang pegawai jangka panjang	37.530	45.652
Aset dimiliki tidak digunakan untuk operasi	23.454	24.819
Biaya hak atas tanah	18.917	21.653
Beban tangguhan	17.256	92.834
Aset tidak berwujud	13.711	17.771
Imbalan pascakerja	11.589	9.181
Aset *non-free* dan *non-clear,* neto	1.837	1.837
Lain-lain	46.202	58.875
Jumlah	**2.085.333**	**1.977.470**

a. Dana yang dibatasi penggunaannya

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rekening Dolar AS:		
Entitas berelasi dengan Pemerintah		
- BRI	286.789	252.149
- Bank Mandiri	14.030	47.038
- BNI	50.016	-
Pihak ketiga		
- JP Morgan	31.087	24.661
- Lain-lain	540	-
	382.462	323.848
Rekening Rupiah:		
Entitas berelasi dengan Pemerintah		
- BRI	290.500	296.096
- Bank Mandiri	233.993	238.692
- BNI	840	899
Pihak ketiga		
Lain-lain	7.426	7.797
	532.759	543.484
Jumlah	**915.221**	**867.332**

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

a. Dana yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Pertamina EP telah mendepositokan dana sebesar US$275.660 (2017: US$252.501) di BRI dan Bank Mandiri untuk dana pembongkaran, restorasi lokasi aset dan aktivitas lain yang terkait ke dalam rekening bersama antara SKK Migas dan PT Pertamina EP sesuai dengan instruksi SKK Migas. Pada tanggal 31 Desember 2018, PIEP untuk PT Pertamina Malaysia EP ("PMEP") juga mendepositokan dana pembongkaran, restorasi lokasi aset dan aktivitas lainnya dalam rekening bank bersama sebesar US$31.087 (2017: US$24.661).

Perusahaan mencadangkan pendanaan kewajiban pascakerja pegawai pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.534.125 juta (setara dengan US$520.277) dan Rp7.185.952 juta (setara dengan US$530.407).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, cadangan pendanaan untuk kegiatan Program Kemitraan masing-masing sebesar Rp12.174 juta (setara dengan US$840) dan Rp12.174 juta (setara dengan US$899).

Termasuk di dalam dana yang dibatasi penggunaannya adalah deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan bank garansi yang diterbitkan untuk kontrak kerja operasi di PT Pertamina Bina Medika, dan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi.

b. Piutang sewa pembiayaan

Akun ini menampilkan bagian tidak lancar dari piutang sewa pembiayaan yang muncul dari perjanjian sewa antara PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG"), entitas anak PGN, dan PLN terkait jalur pipa bawah laut KJG dan fasilitas penerimaan di darat (Perjanjian Pengangkutan Gas ("PPG")) Kalija 1 yang diklasifikasikan sebagai transaksi sewa pembiayaan.

c. Uang muka ke pemasok, neto

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Uang muka ke pemasok	166.110	250.408
Penyisihan penurunan nilai	(32.704)	(32.704)
Jumlah	**133.406**	**217.704**

Perusahaan melakukan penyisihan penurunan nilai atas uang muka proyek pembuatan kapal tanker kapasitas 30.000 LTDW antara Perusahaan dengan Zhejiang Chenye Shipbuilding Co. Ltd. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut telah mencukupi.

d. *Goodwill*

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
31 Desember 2018				
PT PHE ONWJ	53.337	-	-	53.337
PHE Nunukan Company	415	-	-	415
PGN dan entitas anaknya	55	-	-	55
Jumlah	**53.807**	**-**	**-**	**53.807**

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

d. *Goodwill* (lanjutan)

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
31 Desember 2017				
PT PHE ONWJ	53.337	-	-	53.337
PHE Tuban	4.538	-	(4.538)	-
PGN dan entitas anaknya	55	-	-	55
Lainnya	2.767	-	(2.352)	415
Jumlah	**60.697**	**-**	**(6.890)**	**53.807**

Goodwill dialokasikan atas Unit Penghasil Kas Perusahaan ("UPK") yang diidentifikasi berdasarkan blok KKS.

Grup memperhitungkan jumlah terpulihkan berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan yang memberikan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan nilai pakai. Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan ditentukan dengan menggunakan perhitungan arus kas diskonto setelah pajak.

Proyeksi arus kas didasarkan pada produksi dan rencana pengembangan yang telah disetujui oleh manajemen yang mencakup estimasi periode kontrak termasuk perpanjangan kontrak dan investasi masa depan untuk peningkatan *output*. Periode proyeksi berkisar antara 3-30 tahun.

PT PHE ONWJ, PHE Tuban Company
Grup mengambil alih PT Medco E&P Tuban (kemudian berubah nama menjadi PT PHE Tuban) di tahun 2008, BP West Java Ltd., (kemudian berubah nama menjadi ONWJ Ltd.) di tahun 2009 dan PT PHE Oil dan Gas ("PHE OG") dan pengambilalihan lainnya di tahun 2013. Grup telah melakukan pembukuan penurunan nilai *goodwill* di tahun 2018 sebesar nihil dan 2017 masing-masing sebesar US$4.538 dan US$2.352 (Catatan 39) masing-masing untuk dari PHE Blok Tuban dan Blok Ambalat, terhadap nilai tercatat dari PHE OG.

PGN dan entitas anaknya
Tahun 2013, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara ("PGASKOM"), entitas anak PGN, mengambil alih 100% kepemilikan PT Telemedia Dinamika Sarana ("TDS") dengan pembayaran Rp675 juta (atau setara dengan US$55). PGASKOM mengakui *goodwill* dari akuisisi ini sebesar US$55.

Asumsi utama yang digunakan untuk harga minyak dan gas bumi diproyeksikan berdasarkan perkembangan pasar mengingat volatilitas dari harga minyak. Tingkat diskonto yang digunakan mencerminkan risiko yang berkaitan dengan industri minyak dan gas yang relevan dan mempertimbangkan risiko dari negara masing-masing operasi.

Asumsi yang digunakan sebagai dasar pengujian penurunan nilai tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	Asumsi 2018				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Proyeksi Indonesia ICP	US$68,60	US$67,90	US$66,20	US$66,60	US$68,10
Proyeksi Brent	US$72,00	US$71,30	US$69,60	US$70,00	US$71,60

Proyeksi nilai ICP untuk tahun 2024 sampai dengan 2030 mengalami kenaikan antara US$1,60 sampai dengan US$1,80, sedangkan untuk nilai Brent antara US$1,60 sampai dengan US$1,90.

Harga gas	Sesuai kontrak penjualan gas
Tingkat diskonto	6,71% - 10,20%

Manajemen berpendapat penurunan nilai *goodwill* sudah mencukupi berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai.

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

e. Aset *non-free* dan *non-clear*, neto

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset *non-free* dan *non-clear*	112.237	112.237
Penyisihan penurunan nilai	(110.400)	(110.400)
Jumlah	**1.837**	**1.837**

Aset *non-free* dan *non-clear* merupakan tanah yang berlokasi di Teluk Semangka, Lampung dan aset di daerah lainnya yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, dokumentasi dan hak Perusahaan atas aset-aset ini masih dalam proses hukum dan penyelesaian agar aset tersebut dapat sepenuhnya digunakan oleh Perusahaan.

Perusahaan mengakui penyisihan penurunan nilai untuk mengurangi nilai dari aset-aset tersebut menjadi nilai terpulihkan. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut telah mencukupi.

16. PINJAMAN JANGKA PENDEK

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 41)		
Bank Mandiri	1.705.709	166.151
BRI	820.154	189.027
BNI	638.751	340
Lainnya (masing-masing di bawah US$10.000)	110	-
Sub jumlah	3.164.724	355.518
Bank pihak ketiga		
- PT Bank Mizuho Indonesia	203.272	10.000
- PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	145.368	-
- Citibank, N.A.	145.344	.-
- PT ANZ Panin Bank Indonesia Tbk	139.491	-
- BCA	118.934	-
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation	97.016	10.000
- Deutsche Bank AG	93.970	32.285
- PT Bank DBS Indonesia	86.842	-
- The Hongkong and Shanghai Banking Corp (“HSBC”)	67.075	-
- PT Bank Permata Tbk	59.804	-
- PT Bank ICBC Indonesia	23.974	27.292
- PT Bank UOB Indonesia	-	10.000
- Lainnya (masing-masing di bawah US$10.000)	1.221	7.784
Sub jumlah	1.182.311	97.361
Jumlah	**4.347.035**	**452.879**

16. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Informasi lain mengenai fasilitas pinjaman bank jangka pendek Grup pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Kreditur	Masa berlaku
Bank Mandiri	17 Juni 2019
BNI	14 Juni 2019
BRI	17 Juni 2019
Citibank, N.A.	8 Mei 2019
BNI Syariah	31 Mei 2019
PT Bank Mizuho Indonesia	22 Mei 2019
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	26 Juni 2019
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2 April 2019
PT ANZ Panin Bank Indonesia Tbk	17 Juni 2019
BCA	20 Maret 2019
PT Bank Permata Tbk	10 Mei 2019
PT Bank DBS Indonesia	5 Juli 2019
Deutsche Bank AG	19 Juni 2019
HSBC	14 Agustus 2019
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	31 Mei 2019
PT Bank ICBC Indonesia	31 Oktober 2019

Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah tingkat suku bunga pasar (contoh: *Singapore Interbank Offered Rate* ("SIBOR") atau *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR")) ditambah dengan persentase tertentu tergantung hasil negosiasi pada saat penarikan.

Tingkat suku bunga per tahun pinjaman jangka pendek selama tahun 2018 dan 2017 adalah:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dolar AS	2,76% - 3,71%	1,42% - 2,52%
Rupiah	7,25% - 11,50%	6,40% - 12,50%

Dana yang diperoleh dari pinjaman jangka pendek digunakan untuk tujuan modal kerja.

17. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dolar AS	3.215.103	3.719.566
Rupiah	374.194	152.548
Lain-lain	8.480	28.007
Jumlah	**3.597.777**	**3.900.121**

Utang usaha - pihak ketiga Grup terutama berkaitan dengan pembelian minyak mentah, gas bumi dan produk minyak.

18. UTANG PEMERINTAH

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Perusahaan:		
Nilai lawan (utang Pemerintah atas bagian produksi minyak mentah Indonesia yang masuk ke kilang Perusahaan)	961.481	749.956
Pinjaman proyek panas bumi Ulubelu dan Lahendong	253.310	252.123
Pinjaman proyek panas bumi Lumut Balai	84.594	47.590
Bagian Pemerintah atas penjualan gas bumi domestik termasuk bagian Pemerintah atas produksi gas Indonesia	36.889	30.674
Utang dari pembelian produksi LPG bagian Pemerintah	11.358	8.826
Pinjaman proyek pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara ("DPPU") Bandara Ngurah Rai	4.505	5.152
Liabilitas lain	-	174.907
Sub jumlah	1.352.137	1.269.228
Entitas anak:		
PT Pertamina EP		
Bagian Pemerintah atas bagi hasil produksi	25.764	1.897
Liabilitas sewa pembiayaan - Barang Milik Negara ("BMN")	81.815	88.536
Sub jumlah	107.579	90.433
PT Pertamina Hulu Energi		
Utang *overlifting*	37.878	59.678
PT Pertamina Hulu Indonesia		
Utang *overlifting*	109.126	-
PT Perusahaan Gas Negara Tbk		
Pinjaman untuk pembangunan jaringan pipa transmisi gas dari Sumatera Selatan sampai Jawa Barat dan jaringan pipa distribusi di Jawa Barat	352.971	360.034
Pinjaman proyek pengembangan pasar gas domestik	36.008	39.996
Pinjaman untuk pembiayaan proyek distribusi dan transmisi gas tahap II	7.126	11.876
Sub jumlah	650.688	562.017
Jumlah (Catatan 41)	**2.002.825**	**1.831.245**
Bagian lancar	**(1.207.743)**	**(1.050.619)**
Bagian tidak lancar	**795.082**	**780.626**

a. Nilai lawan (utang Pemerintah atas bagian produksi minyak mentah Indonesia yang masuk ke kilang Perusahaan)

Nilai lawan menunjukkan liabilitas Perusahaan kepada Pemerintah terkait pengapalan minyak mentah bagian Pemerintah atas produksi minyak mentah Indonesia untuk diproses di kilang perusahaan dalam memenuhi permintaan produk olahan minyak domestik. Bagian Pemerintah dalam produksi minyak mentah Indonesia diperoleh dari wilayah kerja Kontraktor KKS.

18. UTANG PEMERINTAH (lanjutan)

a. Nilai lawan (utang Pemerintah atas bagian produksi minyak mentah Indonesia yang masuk ke kilang Perusahaan) (lanjutan)

Pergerakan nilai lawan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Perusahaan		
Saldo awal	749.956	586.171
Bagian Pemerintah atas produksi minyak minyak mentah Indonesia yang masuk ke kilang milik Perusahaan	10.289.631	6.819.294
Pembayaran tunai	(10.029.737)	(6.641.271)
Laba selisih kurs	(48.369)	(14.238)
Saldo akhir	**961.481**	**749.956**

b. Pinjaman proyek panas bumi Ulubelu dan Lahendong

Dalam implementasi Proyek Investasi Energi Bersih Panas Bumi Ulubelu dan Lahendong, Perusahaan memperoleh pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") sebagai bagian dari pinjaman Bank Dunia.

Pada tanggal 5 Desember 2011, Perjanjian LA 8082-ID dan TF10417-ID ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan IBRD dengan Perusahaan sebagai Agen Penyelenggara dan PGE sebagai Agen Pelaksana Proyek, dengan jumlah pinjaman sebesar US$300.000 yang terdiri dari LA 8082-ID sebesar US$175.000 dan LA TF10417-ID sebesar US$125.000. Suku bunga pinjaman dari Bank Dunia adalah sebesar LIBOR + 0,45% + 0,5% (biaya bank) + *variance spread* per tahun, sedangkan tingkat bunga dari Japan International Cooperation Agency ("JICA") sebesar 0,25% + 0,25%.

Pembayaran kembali pokok pinjaman dilakukan setiap semester pada tanggal 10 April dan 10 Oktober untuk LA-8082-ID, dimulai tanggal 10 Oktober 2020 sampai 10 Oktober 2035 dan untuk LA TF10417-ID dimulai tanggal 10 Oktober 2021 sampai 10 April 2051.

Berikut adalah saldo pinjaman pada 31 Desember 2018 dan 2017:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
LA 8082-ID	129.044	131.055
LA TF10417-ID	124.266	121.068
Jumlah	**253.310**	**252.123**

c. Pinjaman proyek panas bumi Lumut Balai

Pada tanggal 29 Maret 2011 telah ditandatangani *Loan Agreement IP-557* antara Pemerintah Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dengan Japan International Cooperation Agency ("JICA") yang diwakili oleh *Chief Representative* JICA, dengan Perusahaan bertindak sebagai Agen Penyelenggara dan PGE sebagai Agen Pelaksana Proyek, dengan Jumlah pinjaman sebesar ¥26.966.000.000 (nilai penuh) untuk jangka waktu penarikan pinjaman delapan tahun sejak dinyatakan efektif dengan tingkat SBE masing-masing sebesar 0,6% dan 0,02%.

18. UTANG PEMERINTAH (lanjutan)

c. Pinjaman proyek panas bumi Lumut Balai (lanjutan)

Pelunasan pokok pinjaman dilakukan setiap setengah tahunan, setiap tanggal 20 Maret dan 20 September, dimulai tanggal 20 Maret 2021 sampai Maret 2051. Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar ¥9.343.033.479 dan ¥5.363.082.289 (nilai penuh) atau setara dengan US$84.594 dan US$47.590.

d. Pinjaman proyek pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara ("DPPU") Bandara Ngurah Rai

Pada tanggal 7 Mei 2007, Pemerintah meneruskan pinjaman sebesar ¥1.172.872.837 (nilai penuh) yang diperoleh dari Overseas Economic Cooperation Fund Jepang kepada Perusahaan untuk proyek pembangunan DPPU Bandara Ngurah Rai sesuai dengan perjanjian pinjaman tanggal 29 November 1994.

Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam 36 kali cicilan semesteran mulai Mei 2007 sampai dengan November 2024 dan dikenakan suku bunga 3,1% per tahun. Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar ¥497.492.834 dan ¥580.408.306 (nilai penuh) atau setara dengan US$4.505 dan US$5.152.

e. Liabilitas lain

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan mencatat Selisih Harga JBKP Premium tahun 2016 yang menyebabkan kelebihan pendapatan sebesar Rp2,37 triliun (setara dengan US$174.907 per tanggal 31 Desember 2017) (nilai sebelum PPN dan PBBKB) sesuai dengan LHP BPK No. 39/AUDITAMA VII/PDTT/11/2017 tanggal 13 November 2017.

Pada tanggal 8 Juni 2018, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan surat No. S-100/MK.2/2018 tentang Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ("LKPP") dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara ("LKBUN") Tahun 2015-2017 serta LHP atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Kementerian Keuangan Tahun 2015-2016, menyatakan bahwa atas kelebihan pendapatan Selisih Harga pada penjualan JBKP Premium tahun 2016 diakui sebagai kelebihan pendapatan bagi Perusahaan. Hal ini menyebabkan jumlah sebesar Rp2,37 triliun (setara dengan US$178.070) yang sebelumnya dicatat sebagai liabilitas lain kepada Pemerintah diakui sebagai pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya di tahun 2018 (Catatan 31).

f. Liabilitas sewa pembiayaan - Barang Milik Negara ("BMN") di PT Pertamina EP

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 2 Mei 2007, aset - aset yang sebelumnya dimiliki oleh Entitas Pertamina yang tidak diakui dalam saldo awal neraca Perusahaan, merupakan BMN, pengendalian aset tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pada tanggal 20 September 2016, Perjanjian Sewa Barang Milik Negara antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Pertamina EP No. PRJ-3-MK.6/2016 dan No. 1307/EP0000/2016-S0 telah ditanda-tangani. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa utang sewa untuk BMN yang tidak digunakan tidak akan ditagih oleh Pemerintah karena tidak termasuk dalam lingkup perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2016, PT Pertamina EP melakukan koreksi atas utang sewa untuk BMN yang tidak digunakan oleh PT Pertamina EP.

18. UTANG PEMERINTAH (lanjutan)

f. Liabilitas sewa pembiayaan - Barang Milik Negara ("BMN") di PT Pertamina EP (lanjutan)

Jumlah ini merupakan utang sewa pembiayaan atas BMN yang meliputi instalasi, bangunan dan harta bergerak yang digunakan di dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi PT Pertamina EP.

Lessor	Jenis Aset	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kementerian Keuangan	Aset instalasi, bangunan dan HBM	81.815	88.536
Bagian lancar		(1.180)	(1.087)
Bagian tidak lancar		**80.635**	**87.449**

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jatuh tempo kurang dari satu tahun	14.310	15.295
Jatuh tempo lebih dari satu tahun, sampai dengan lima tahun	71.550	76.475
Jatuh tempo lebih dari lima tahun	153.832	179.716
Jumlah	239.692	271.486
Bunga	(157.877)	(182.950)
Neto	81.815	88.536
Bagian lancar	(1.180)	(1.087)
Bagian jangka panjang	**80.635**	**87.449**

g. Utang *overlifting*

Utang *overlifting* merupakan utang anak perusahaan kepada SKK Migas sebagai hasil dari *lifting* minyak dan gas akrual yang lebih tinggi daripada hak *entitlement* pada tahun yang bersangkutan.

h. Pinjaman untuk pembangunan jaringan pipa transmisi gas dari Sumatera Selatan sampai Jawa Barat dan jaringan pipa distribusi di Jawa Barat

Pada tanggal 27 Maret 2003, Japan Bank for International Cooperation ("JBIC") menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah dengan jumlah keseluruhan setara dengan ¥49.088.000.000 (nilai penuh) untuk membantu Pemerintah dalam membiayai pembangunan jaringan pipa transmisi gas dari Sumatera Selatan sampai Jawa Barat dan jaringan pipa distribusi di Jawa Barat.

Pada tanggal 28 Mei 2003, PGN dan Pemerintah mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA1156/DP3/2003, dimana Pemerintah meneruskan pinjaman dari JBIC ini dengan jumlah tidak melebihi JPY49.088.000.000 (nilai penuh) kepada PGN.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, PGN telah membayar angsuran masing-masing sebesar ¥1.591.118.000 (nilai penuh) dan ¥1.591.118.000 (nilai penuh). Pembayaran atas pokok pinjaman dilakukan setiap enam bulan pada 20 Maret dan 15 September. Pembayaran dimulai sejak 20 Maret 2013 hingga 20 Maret 2043. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2018 adalah sebesar ¥38.983.847.840 (nilai penuh) atau setara dengan US$352.971.

18. UTANG PEMERINTAH (lanjutan)

i. Pinjaman proyek pengembangan pasar gas domestik

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 7 Februari 2006, IBRD menyetujui memberikan fasilitas pinjaman kepada Pemerintah dengan jumlah keseluruhan setara dengan US$80.000 untuk membantu Pemerintah dalam membiayai Proyek Pengembangan Pasar Gas Domestik.

Pada tanggal 3 April 2006, PGN dan Pemerintah mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman, dimana Pemerintah meneruskan hasil pinjaman dari IBRD sebesar US$80.000 kepada PGN yang akan melaksanakan Proyek.

Pada bulan Desember 2011, jumlah fasilitas pinjaman diubah menjadi US$69.381. Pada tanggal 14 November 2013, PGN mendapatkan Surat No. 5786/PU/2013 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, mengenai persetujuan pembatalan sisa fasilitas pinjaman sebesar US$7.616 terhitung mulai pada tanggal 1 Februari 2013.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, PGN telah membayar angsuran di masing-masing periode sebesar US$3.988 dan US$3.820.

j. Pinjaman untuk pembiayaan proyek distribusi dan transmisi gas tahap II

Pada tanggal 15 September 2000, PGN dan Pemerintah mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman, dimana Pemerintah meneruskan pinjaman dari European Investment Bank (“EIB”) (dalam mata uang Dolar AS) dengan jumlah tidak melebihi dari US$54.633 kepada PGN sebagai bagian dari pembiayaan proyek distribusi dan transmisi gas tahap II.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan 1 Januari 2017, PGN telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, PGN telah membayar angsuran di masing-masing periode sebesar US$4.752.

19. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pemasok dan kontraktor	1.069.409	1.040.540
Bonus, insentif, dan gaji	441.536	460.779
Estimasi klaim retensi sendiri	286.508	190.458
Liabilitas imbalan kerja karyawan yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 22b)	232.994	260.010
Bunga pinjaman	105.062	68.109
Jumlah	**2.135.509**	**2.019.896**

20. LIABILITAS JANGKA PANJANG

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pinjaman bank:		
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 41)	179.361	174.638
Pihak ketiga	1.891.264	2.100.822
	2.070.625	2.275.460
Biaya penerbitan, neto	(4.775)	(6.838)
Jumlah pinjaman bank, neto	2.065.850	2.268.622
Sewa pembiayaan	160.027	207.104
Jumlah liabilitas jangka panjang (Catatan 48d)	**2.225.877**	**2.475.726**
Bagian lancar	**(420.577)**	**(365.959)**
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar	**1.805.300**	**2.109.767**

Tingkat bunga per tahun pinjaman jangka panjang selama tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rupiah	2,35% - 13,00%	7,25% - 13,00%
Dolar AS	1,37% - 5,60%	1,37% - 3,51%

a. Pinjaman bank

Rincian pinjaman sindikasi dan pinjaman bank Grup pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018		
	Jumlah	Lancar	Tidak Lancar
Entitas berelasi dengan Pemerintah			
Bank Mandiri	19.753	10.043	9.710
PT Bank Syariah Mandiri	9.330	-	9.330
BRI	181	181	-
PT Bank BNI Syariah	97	70	27
Lembaga Keuangan lainnya:			
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	150.000	-	150.000
Pihak ketiga			
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BOTM") (pinjaman sindikasi)	1.609.539	333.569	1.275.970
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (pinjaman sindikasi)	199.318	10.601	188.717
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	67.407	9.083	58.324
PT Bank ICBC Indonesia	15.000	-	15.000
Jumlah	**2.070.625**	**363.547**	**1.707.078**

20. LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

	31 Desember 2017		
	Jumlah	Lancar	Tidak Lancar
Entitas berelasi dengan Pemerintah			
Bank Mandiri	17.463	15.981	1.482
BNI	2.715	2.449	266
BRI	1.725	1.532	193
PT Bank BNI Syariah	359	255	104
Lembaga Keuangan lainnya:			
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	150.000	-	150.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	2.376	2.376	-
Pihak ketiga			
The Bank of Tokyo-Mitsui UFJ, Ltd. (Pinjaman sindikasi)	1.935.000	277.547	1.657.453
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	105.575	10.602	94.973
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	60.247	7.273	52.974
Jumlah	**2.275.460**	**318.015**	**1.957.445**

Informasi lain mengenai pinjaman sindikasi dan bank Grup pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Kreditur	Jadwal pembayaran
Perusahaan	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	
(Pinjaman berjangka)	Beberapa cicilan (2016-2025)
Lembaga Keuangan Lainnya	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	
(Pinjaman berjangka)	Beberapa cicilan (2015-2025)
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	Beberapa cicilan (2016-2021)
Entitas anak	
PT Bank BNI Syariah	
PT Pertamina Trans Kontinental	Beberapa cicilan (2016-2019)
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	
PT Pertamina Trans Kontinental	Beberapa cicilan (2015-2024)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Pelita Air Service	Beberapa cicilan (2014-2019)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Pertamina Patra Niaga	Beberapa cicilan (2016-2019)
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (Pinjaman sindikasi)	
PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	Beberapa cicilan (2015-2023)
PT Bank Syariah Mandiri	
PT Pertamina International Shipping	Beberapa cicilan (2018-2024)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Pinjaman sindikasi)	
PGN	Beberapa cicilan (2015-2020)
PT Bank ICBC Indonesia	
PT Elnusa Tbk	Beberapa cicilan (2018-2023)

Pinjaman ini ditujukan untuk mendanai belanja modal Perusahaan dan/atau Entitas Anak, kegiatan umum dan biaya proyek tertentu sehubungan dengan perjanjian.

20. LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

Berdasarkan beberapa perjanjian pinjaman, debitur diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu seperti batasan rasio keuangan, batasan melakukan perubahan bisnis yang substansial dan tidak melakukan merger.

Pinjaman bank jangka panjang entitas anak tertentu dijaminkan dengan piutang (Catatan 8) dan aset tetap (Catatan 13) entitas anak tersebut.

Pada tanggal 12 Desember 2017, Etablissements Maurel et Prom menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi dengan 2 (dua) bank nasional dan 7 (tujuh) bank asing. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch bertindak sebagai *Facility Agent*. Jumlah fasilitas pinjaman sindikasi tersebut adalah sebesar US$600.000 dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah 1,5% margin dan harus dibayar kembali secara triwulanan mulai bulan Maret 2020 sampai Desember 2023.

Sebelum tanggal efektif perjanjian pinjaman sindikasi tersebut di atas pada tanggal 11 Desember 2017, sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian sindikasi tersebut di atas, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi ("PIEP"), sebagai *Sponsor*, Maurel & Prom West Africa SA, sebagai *Borrower*, dan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Hongkong Branch sebagai *Facility Agent*, menandatangani perjanjian *Sponsor Support Agreement*. Perjanjian ini mengatur bahwa apabila *Borrower* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan (*Borrower Non-Payment*), maka *Borrower* harus segera menyampaikan *Sponsor Loan Request Notice* yang ditujukan kepada *Sponsor*, dan *Sponsor* berkewajiban untuk menyediakan dana kepada *Borrower* sebesar seluruh kewajiban yang belum terselesaikan termasuk didalamnya bunga yang masih terhutang. Pada tanggal 11 Desember 2017, Perusahaan telah mengeluarkan *comfort letter* seperti yang diminta dalam perjanjian sindikasi tersebut di atas, namun Perusahaan tidak memberikan jaminan terhadap kewajiban PIEP dalam perjanjian *Sponsor Support Agreement* dan Perusahaan tidak bertindak sebagai penjamin.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Grup memenuhi batasan-batasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut.

b. Sewa pembiayaan

Akun ini merupakan pembayaran sewa minimum Grup di masa yang akan datang dari transaksi-transaksi sewa pembiayaan untuk Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji ("SPPBE"), *landing craft transports*, mobil tanki BBM dan LPG, server komputer, instalasi pipa gas dan pabrik LPG. Akun ini merepresentasikan pembayaran sewa guna usaha minimum Grup di masa mendatang dari transaksi *finance lease* untuk Pengisian dan Transportasi LPG ("SPPBE"), *landing craft transports*, Truk Tanker BBM dan LPG, server komputer, instalasi pipa gas dan LPG *plant*.

Pembayaran sewa minimum masa akan datang pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jatuh tempo kurang dari satu tahun	84.137	54.407
Jatuh tempo lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	115.474	121.179
Jatuh tempo lebih dari lima tahun	32.487	49.493
Jumlah	232.098	225.079
Bunga	(72.071)	(17.975)
Jumlah setelah dikurangi bunga	160.027	207.104
Bagian lancar	(58.722)	(50.008)
Bagian tidak lancar	**101.305**	**157.096**

21. UTANG OBLIGASI

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Perusahaan:		
Obligasi senior		
Penerbitan tahun 2011		
Jatuh tempo 2021	1.000.000	1.000.000
Jatuh tempo 2041	500.000	500.000
Penerbitan tahun 2012		
Jatuh tempo 2022	1.242.000	1.242.000
Jatuh tempo 2042	1.221.590	1.230.000
Penerbitan tahun 2013		
Jatuh tempo 2023	1.615.000	1.615.000
Jatuh tempo 2043	1.433.261	1.462.500
Penerbitan tahun 2014		
Jatuh tempo 2044	1.500.000	1.500.000
Penerbitan tahun 2018		
Jatuh tempo 2048	750.000	-
Jumlah	9.261.851	8.549.500
Diskonto	(65.722)	(51.180)
Biaya penerbitan	(27.211)	(23.552)
Amortisasi diskonto dan biaya penerbitan	28.608	23.679
Utang obligasi Perusahaan yang dimiliki entitas anak:	(62.000)	(68.500)
Sub jumlah	**9.135.526**	**8.429.947**
PGN dan entitas anaknya:		
Obligasi senior		
PGN	1.350.000	1.350.000
PT Saka Energi Indonesia (“SEI”)	625.000	625.000
Biaya diskonto dan penerbitan, neto	(16.430)	(19.074)
Sub jumlah	**1.958.570**	**1.955.926**
Jumlah utang obligasi (Catatan 48d)	**11.094.096**	**10.385.873**

Informasi lainnya terkait utang obligasi Perusahaan pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal	Harga penerbitan	Tanggal mulai	Tanggal jatuh tempo	Wali Amanat	Tingkat bunga
Perusahaan:						
Penerbitan tahun 2011						
Jatuh tempo 2021	1.000.000	98,097%	23 Mei 2011	23 Mei 2021	HSBC Bank USA, N.A	5,25%
Jatuh tempo 2041	500.000	98,380%	27 Mei 2011	27 Mei 2041	HSBC Bank USA, N.A	6,50%
Penerbitan tahun 2012						
Jatuh tempo 2022	1.250.000	99,414%	3 Mei 2012	3 Mei 2022	HSBC Bank USA, N.A	4,88%
Jatuh tempo 2042	1.250.000	98,631%	3 Mei 2012	3 Mei 2042	HSBC Bank USA, N.A	6,00%
Penerbitan tahun 2013						
Jatuh tempo 2023	1.625.000	100,000%	20 Mei 2013	20 Mei 2023	The Bank of New York Mellon	4,30%
Jatuh tempo 2043	1.625.000	100,000%	20 Mei 2013	20 Mei 2043	The Bank of New York Mellon	5,63%
Penerbitan tahun 2014						
Jatuh tempo 2044	1.500.000	100,000%	3 Mei 2014	30 Mei 2044	The Bank of New York Mellon	6,45%
Penerbitan tahun 2018						
Jatuh tempo 2048	750.000	98,061%	7 November 2018	7 November 2048	The Bank of New York Mellon	6,50%

	Nilai Nominal	Harga penerbitan	Tanggal mulai	Tanggal jatuh tempo	Wali Amanat	Tingkat bunga
Entitas anak:						
Penerbitan tahun 2014						
Jatuh tempo 2024	1.350.000	99,037%	12 Mei 2014	16 Mei 2024	The Bank of New York Mellon	5,13%
Penerbitan tahun 2017						
Jatuh tempo 2024	625.000	100,000%	26 April 2017	5 Mei 2024	Citicorp International Limited	4,45%

21. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Perusahaan

Perjanjian Wali Amanat menetapkan bahwa:

- Tidak lebih dari 30 hari sejak kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perusahaan *(Change of Control Triggering Event)*, Perusahaan dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali obligasi senior dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal pembelian kembali. Perusahaan mempunyai opsi untuk menebus kembali seluruh obligasi senior ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Indonesia.

- Pembatasan yang dipersyaratkan antara lain: pembatasan atas hak-hak gadai, pembatasan atas transaksi penjualan dan sewa kembali dan penyampaian laporan keuangan dan laporan lainnya.

- Perusahaan memenuhi pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian dengan Wali Amanat.

- Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi senior ini digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan investasi akuisisi blok baru, pengembangan lapangan yang sudah ada, pembelian *rig* dan pembangunan tanker.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memperoleh peringkat Baa2 dengan *outlook stable* dari Moody's Investors Service, BBB dengan *outlook stable* dari *Fitch Ratings* dan BBB- dengan *outlook stable* dari Standard & Poor's ("S&P").

Selama tahun 2018, Perusahaan melakukan pembelian kembali sebagian obligasi senior sejumlah US$37.649 (2017: nihil).

Entitas anak

- *Senior unsecured fixed rate notes*
  Sehubungan obligasi tersebut, Perusahaan dibatasi dalam melaksanakan konsolidasi, merger, transfer, sewa atau penghapusan atas semua aset-aset. Berdasarkan Moody's Investors Services, S&P dan *Fitch Ratings*, obligasi tersebut secara berurutan diberikan peringkat Baa3, BB+, dan BBB-.

- SEI *senior unsecured fixed rate notes*
  SEI tidak mewajibkan membuat *sinking fund payment* yang berkaitan obligasi ini. Berdasarkan Moody's Investors Services, S&P dan *Fitch Ratings*, obligasi tersebut secara berurutan diberikan peringkat Ba1, BB+, dan BB+.

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

a. Program imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan dan entitas anak tertentu menyelenggarakan program imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya sebagai berikut:

1. Program imbalan pascakerja

(i) Program imbalan pasti dikelola Dana Pensiun Pertamina

Perusahaan dan entitas anak tertentu telah menerima persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Pengesahan No. S-190/MK.6/1977 tanggal 15 Juli 1977 untuk mendirikan dana pensiun terpisah, Dana Pensiun Pertamina, dimana seluruh pekerja, setelah memenuhi periode bakti tertentu, berhak atas imbalan pasti saat pensiun, cacat atau kematian, serta imbalan kesehatan pascakerja. Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") ini berlaku bagi pekerja yang direkrut sebelum tahun 2005.

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

a. Program imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

1. Program imbalan pascakerja (lanjutan)

(ii) Tunjangan kesehatan pascakerja

Tunjangan kesehatan pascakerja meliputi para pensiunan Perusahaan dan pasangannya yang telah menyelesaikan masa kerja minimum 15 tahun dan usia minimum 46 tahun.

(iii) Penghargaan atas pengabdian ("PAP")

Manfaat PAP terdiri dari imbalan tambahan yang diberikan pada saat karyawan memasuki usia pensiun dan dalam hal mengalami cacat tetap, meninggal, atau mengundurkan diri secara sukarela.

2. Program imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk tunjangan Masa Persiapan Purnakarya ("MPPK"), biaya pemulangan, tunjangan cuti, Program Asuransi Mandiri Guna I dan ulang tahun dinas, kecuali untuk program asuransi.

3. Program Tabungan Pekerja

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu (keseluruhannya disebut Peserta) menyelenggarakan program Tabungan Pekerja ("TP") berupa program iuran pasti dan yang akan diterima oleh pekerja pada saat masa kerjanya berakhir. Hingga tahun buku 2015, seluruh iuran dikelola oleh PT Pertamina Pedeve Indonesia. Efektif per tanggal 28 Oktober 2016, PT Pertamina Dana Ventura membuat keputusan melakukan restrukturisasi dan tidak lagi melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Modal Ventura sehingga seluruh dana yang tersedia dialihkelolakan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK").

b. Provisi imbalan kerja karyawan

Taksiran kewajiban imbalan kerja Perusahaan dan sebagian besar entitas anaknya per tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dihitung berdasarkan laporan penilaian dari aktuaris independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, masing-masing tanggal 9 Januari 2019 dan 25 Januari 2018. Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar kewajiban imbalan kerja sebagaimana tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Perusahaan:		
Pensiun dan imbalan pascakerja lainnya:		
- PPMP	142.585	200.990
- Tunjangan kesehatan pascakerja	786.489	924.654
- PAP	718.902	900.396
- Biaya pemulangan	5.423	8.480
Sub jumlah	1.653.399	2.034.520
Imbalan kerja jangka panjang lainnya:		
- MPPK	104.428	129.278
- Tunjangan cuti dan ulang tahun dinas	10.035	16.063
Sub jumlah	114.463	145.341
Jumlah - Perusahaan	1.767.862	2.179.861

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

b. Provisi imbalan kerja karyawan (lanjutan)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Entitas anak:		
Pensiun dan imbalan pascakerja lainnya	315.515	288.369
Jumlah	**2.083.377**	**2.468.230**
Bagian jangka pendek (Catatan 19)	(232.994)	(260.010)
Bagian jangka panjang	**1.850.383**	**2.208.220**

c. Perubahan nilai kini dari liabilitas imbalan kerja dan aset program

Tabel berikut ini merangkum komponen biaya manfaat bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya dan status pendanaan serta jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk masing-masing manfaat untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

i. Liabilitas imbalan pascakerja

	31 Desember 2018						
	PPMP						
	Nilai kini imbalan pasca kerja	Nilai wajar aset program	Liabilitas imbalan pascakerja	Tunjangan kesehatan pascakerja	PAP	Biaya pemulangan	Jumlah
Saldo awal	790.740	(589.750)	200.990	924.654	900.396	8.480	2.034.520
Biaya jasa kini (iuran yang dibayarkan karyawan)	3.935	(1.057)	2.878	27.061	48.428	405	78.772
Beban (pendapatan) bunga	55.823	(42.502)	13.321	67.111	50.139	542	131.113
Sub jumlah yang diakui dalam laporan laba-rugi	**59.758**	**(43.559)**	**16.199**	**94.172**	**98.567**	**947**	**209.885**
Kerugian (keuntungan) aktuarial atas:							
Perubahan asumsi keuangan	(67.025)	36.386	(30.639)	(256.537)	(85.986)	(676)	(373.838)
Penyesuaian historis	2.452	-	2.452	117.720	31.520	(1.715)	149.977
Sub jumlah biaya (penghasilan) diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**(64.573)**	**36.386**	**(28.187)**	**(138.817)**	**(54.466)**	**(2.391)**	**(223.861)**
Pembayaran imbalan dari aset program	(61.562)	61.562	-	-	-	-	-
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	-	-	-	(35.241)	(169.620)	(1.107)	(205.968)
Iuran Perusahaan	-	(34.218)	(34.218)	-	-	-	(34.218)
(Kerugian) keuntungan selisih kurs	(49.870)	37.671	(12.199)	(58.279)	(55.975)	(506)	(126.959)
Saldo akhir	**674.493**	**(531.908)**	**142.585**	**786.489**	**718.902**	**5.423**	**1.653.399**

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

c. Perubahan nilai kini dari liabilitas imbalan kerja dan aset program (lanjutan)

i. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

	31 Desember 2017						
	PPMP						
	Nilai kini imbalan pasca kerja	Nilai wajar aset program	Liabilitas imbalan pascakerja	Tunjangan kesehatan pascakerja	PAP	Biaya pemulangan	Jumlah
Saldo awal	735.775	(593.449)	142.326	832.487	922.194	8.230	1.905.237
Biaya jasa kini							
(iuran yang dibayarkan Karyawan)	3.569	(1.266)	2.303	16.809	45.431	534	65.077
Beban (pendapatan) bunga	60.762	(50.168)	10.594	72.036	67.105	654	150.389
Sub jumlah yang diakui dalam laporan laba-rugi	**64.331**	**(51.434)**	**12.897**	**88.845**	**112.536**	**1.188**	**215.466**
Kerugian (keuntungan) aktuarial atas:							
Perubahan asumsi keuangan	80.080	22.798	102.878	166.048	76.914	836	346.676
historis	(18.440)	-	(18.440)	(120.215)	(35.473)	(1.111)	(175.239)
Sub jumlah biaya (penghasilan) diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**61.640**	**22.798**	**84.438**	**45.833**	**41.441**	**(275)**	**171.437**
Pembayaran imbalan dari aset program	(64.177)	64.177	-	-	-	-	-
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	-	-	-	(34.417)	(168.325)	(590)	(203.332)
Iuran Perusahaan	-	(36.763)	(36.763)	-	-	-	(36.763)
(Kerugian) keuntungan selisih kurs	(6.829)	4.921	(1.908)	(8.094)	(7.450)	(73)	(17.525)
Saldo Akhir	**790.740**	**(589.750)**	**200.990**	**924.654**	**900.396**	**8.480**	**2.034.520**

Atas status yang belum didanai pada Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") akan diselesaikan/ dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tingkat pengembalian aktual aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah US$6.116 and US$27.369.

ii. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

	31 Desember 2018			31 Desember 2017		
	MPPK	Tunjangan cuti dan ulang tahun dinas	Jumlah	MPPK	Tunjangan cuti dan ulang tahun dinas	Jumlah
Saldo awal	129.278	16.063	145.341	114.778	12.843	127.621
Biaya jasa kini	6.743	3.866	10.609	6.573	7.039	13.612
Bunga neto	7.995	802	8.797	8.828	817	9.645
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(18.078)	(3.605)	(21.683)	4.604	864	5.468
Sub jumlah yang diakui dalam laporan laba-rugi	**(3.340)**	**1.063**	**(2.277)**	**20.005**	**8.720**	**28.725**
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(13.453)	(6.138)	(19.591)	(4.367)	(5.353)	(9.720)
Keuntungan selisih kurs	(8.057)	(953)	(9.010)	(1.138)	(147)	(1.285)
Saldo akhir	**104.428**	**10.035**	**114.463**	**129.278**	**16.063**	**145.341**

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

d. Asumsi-asumsi aktuarial

Asumsi-asumsi aktuarial signifikan yang diterapkan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Tingkat diskonto:		
- Program imbalan pasti dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina	8,41% per tahun	7,76% per tahun
- Penghargaan atas pengabdian	8,12% per tahun	6,44% per tahun
- Tunjangan kesehatan pascakerja	8,77% per tahun	7,76% per tahun
- Biaya pemulangan	8,29% per tahun	7,26% per tahun
- Masa persiapan purnakarya	8,27% per tahun	7,07% per tahun
- Tunjangan cuti	7,39% per tahun	6,35% per tahun
- Ulang tahun dinas	8,30% per tahun	7,07% per tahun
Tingkat inflasi emas	8,00% per tahun	9,00% per tahun
Kenaikan gaji	9,50% per tahun	9,50% per tahun
Tren biaya kesehatan tahunan:	8,00% per tahun untuk seterusnya	8,00% per tahun untuk seterusnya
Faktor demografis:		
- Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia 3-2011 ("TMI 3" 2011)	Tabel Mortalita Indonesia 3-2011 ("TMI 3" 2011)
- Tingkat cacat	0,75% TMI 3	0,75% TMI 3
- Pengunduran diri		
Sampai usia 20 (per tahun)	1%	1%
Usia 26 - 45 (per tahun)	berkurang secara linear sebesar 0% per tahun sampai usia 56	berkurang secara linear sebesar 0% per tahun sampai usia 56
- Pensiun	100% pada usia pensiun normal	100% pada usia pensiun normal
- Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun
- Biaya operasional program pensiun	8% dari biaya jasa dan 2,11% dari pembayaran manfaat	8% dari biaya jasa dan 2,11% dari pembayaran manfaat

Komposisi investasi aset program terdiri dari:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Nilai investasi	%	Nilai investasi	%
Instrumen ekuitas	154.253	29%	171.028	29%
Instrumen utang	218.082	41%	247.694	42%
Lain-lain	159.573	30%	171.028	29%
Jumlah	**531.908**	**100%**	**589.750**	**100%**

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbalan hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk setiap pasar.

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah US$31.166 dan US$35.703.

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

d. Asumsi-asumsi aktuarial (lanjutan)

Analisis sensitivitas kualitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan terhadap liabilitas imbalan pasti untuk asumsi-asumsi pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	Kenaikan 1%	Penurunan 1%
Tingkat diskonto	(199.710)	227.399
Tingkat upah	46.164	(68.845)
Tingkat tren biaya kesehatan	115.726	(93.508)

Durasi rata-rata tahun liabilitas manfaat pascakerja di akhir periode pelaporan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Program pensiun manfaat pasti	14,35	15,38
Penghargaan atas pengabdian	5,98	6,71
Tunjangan kesehatan pascakerja	17,84	25,57

Jadwal jatuh tempo dari program imbalan pascakerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dalam 1 tahun	266.405	291.079
2 - 5 tahun	791.955	903.342
Lebih dari 5 tahun	22.500.076	23.312.066
Jumlah	**23.558.436**	**24.506.487**

Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dari imbalan kerja karyawan yang diberikan dari keseluruhan program pensiun Grup, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

23. PROVISI PEMBONGKARAN DAN RESTORASI

Mutasi provisi pembongkaran dan restorasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo awal	2.129.337	1.900.093
(Pengurangan)/penambahan, neto	(186.637)	177.746
Biaya akresi (Catatan 38 dan 46a)	87.035	51.498
Saldo akhir	**2.029.735**	**2.129.337**

Pengurangan disebabkan karena perubahan asumsi estimasi pembongkaran dan restorasi yang diterapkan oleh Grup.

24. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.397.957	1.382.334
PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	333.294	263.376
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (sebelumnya PT Tugu Pratama Indonesia)	143.831	108.797
PT Elnusa Tbk	134.790	132.956
Pertamina International Timor S.A.	1.447	1.086
Jumlah	**2.011.319**	**1.888.549**

25. MODAL SAHAM, UANG MUKA SETORAN MODAL DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

a. Modal disetor dan uang muka setoran modal

Sesuai Akta Notaris No. 20 tanggal 17 September 2003 oleh Lenny Janis Ishak, S.H., dan keputusan Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. 408/KMK.02/2003 (KMK 408) tanggal 16 September 2003, jumlah modal dasar Perusahaan sebesar Rp200 triliun yang terdiri dari 200.000.000 saham (nilai penuh) biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham dimana jumlah modal yang ditempatkan sebesar Rp100 triliun (nilai penuh) dan telah disetor oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui pengalihan kekayaan tertentu dari Pertamina Lama termasuk Entitas Anak dan Ventura Bersamanya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 23/KMK.06/2008 pada tanggal 30 Januari 2008, tentang Penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 2003, jumlah penyertaan modal Pemerintah dalam Perusahaan ditetapkan sebesar Rp82,57 triliun (nilai penuh). Nilai ini terdiri dari seluruh aset dan liabilitas neto Pertamina Lama tidak termasuk aset pabrik LNG yang dikelola oleh PT Badak Natural Gas Liquefaction dan PT Arun Natural Gas Liquefaction, aset hulu eks kontrak yang saat ini dikelola oleh PT Pertamina EP dan aset berupa tanah dan bangunan tertentu.

Perubahan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp100 triliun menjadi Rp82,57 triliun (setara dengan US$9.809.882) (nilai penuh) telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Juni 2009 dan didokumentasikan dengan Akta Notaris No. 11 dari Lenny Janis Ishak, S.H. Perubahan tersebut telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 14 Juli 2009 oleh Lenny Janis Ishak, S.H. dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45429.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 14 September 2009. Pengurangan modal saham Perusahaan yang diterbitkan dan disetor berlaku surut sejak tanggal 17 September 2003.

Pada tanggal 1 Agustus 2012 terjadi penambahan penyertaan modal saham yang didokumentasikan dengan Akta Notaris No. 1 dari Lenny Janis Ishak, S.H. sebesar Rp520,92 miliar (setara dengan US$55.019) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tanggal 14 Desember 2015, Kementerian BUMN menyetujui permohonan kapitalisasi laba ditahan menjadi modal disetor sebesar Rp50 triliun dengan jumlah lembar saham sebesar 50.000.000 lembar (nilai penuh) (setara dengan US$3.552.146).

Uang muka setoran modal kemudian dikapitalisasi menjadi penambahan modal saham ditempatkan dan disetor melalui Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., No. 10 tanggal 11 Januari 2016.

Penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.3-0003113 tanggal 15 Januari 2016.

25. MODAL SAHAM, UANG MUKA SETORAN MODAL DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

a. Modal disetor dan uang muka setoran modal (lanjutan)

Peningkatan modal yang diotoritasi dari Rp200 triliun menjadi Rp600 triliun (nilai penuh) telah disetujui oleh Kementerian BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham melalui Surat persetujuan No.S-217/MBU/04/2018 tanggal 11 April 2018 dan didokumentasikan dalam Akta Notaris No. 29 tanggal 13 April 2018 oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0052766.01.Tahun 2018 tanggal 13 April 2018 (Catatan 4a).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah modal Perusahaan yang ditempatkan dan disetor adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan disetor (nilai penuh)	Persentase kepemilikan	Modal ditempatkan dan disetor
31 Desember 2018			
Pemerintah Republik Indonesia	171.227.044	100%	16.191.204
31 Desember 2017			
Pemerintah Republik Indonesia	133.090.697	100%	13.417.047

b. Tambahan modal disetor

Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 merupakan dampak penerapan PSAK 38, Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (Revisi 2012), untuk mencatat selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dan jumlah tercatat.

26. BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA (“BPYBDS”)

a. Instalasi *refuelling apron* di Bandara Sultan Hasanuddin-Makassar dan *fuel hydrant facilities* di Bandara Juanda-Surabaya

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional (“BASTO”) No.05/BA/MKS-HND/XII/2011, No.AU/14525/KEU.1227/XII/2011, No.BA 084/F100000/2011-S3 dan BASTO No. 005/F00000/2012-S0, No. BA.125 Tahun 2012, No. 0573/B3/KOBU/IV/2012 dari Kementerian Perhubungan, Perusahaan telah mendapatkan hak pengelolaan dan operasional atas aset Instalasi *Refuelling Apron* di Bandara Sultan Hasanuddin-Makassar dan *Fuel Hydrant Facilities* di Bandara Juanda-Surabaya, sehingga saldo akun ini menjadi Rp12.453 juta (setara dengan US$1.361) (Catatan 15) pada tanggal 31 Desember 2017.

b. Jaringan Distribusi (“Jargas”) gas bumi untuk rumah tangga dan stasiun pengisian bahan bakar gas (“SPBG”) dan infrastruktur pendukung

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan dan Sekretaris Jenderal Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM selaku kuasa pengguna anggaran/barang telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengoperasian. Penggunaan (“BASTO”) Barang Milik Negara (“BMN”) berupa Jaringan Distribusi (“Jargas”) Gas Bumi untuk Rumah Tangga Nomor BA-05/C00000/2018-S0 dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (“SPBG”) dan Infrastruktur Pendukung Nomor BA-06/C00000/2018-S0. Nilai aset BMN yang berupa aset tanah dan non-tanah dengan kategori aset beroperasi dan tidak beroperasi adalah sebesar Rp5,8 triliun (setara dengan US$399.759) (Catatan 15), saat ini aset tersebut dikelola oleh PT Pertagas Niaga dan PGN.

26. BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA ("BPYBDS") (lanjutan)

b. Jaringan Distribusi ("Jargas") gas bumi untuk rumah tangga dan stasiun pengisian bahan bakar gas ("SPBG") dan infrastruktur pendukung (lanjutan)

Berdasarkan hasil pembahasan Kementerian Keuangan, Kementrian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP"), dan Perusahaan disepakati BASTO tersebut dicatat dan di perlakukan sebagai BPYBDS dan dibukukan dalam akun aset lain-lain. Berdasarkan hasil reviu BPKP aset Jargas dan SPBG yang berstatus *free and clear* akan direkomendasikan untuk dilakukan proses Penyertaan Modal Negara ("PMN"), sedangkan untuk yang tidak berstatus *free and clear* akan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM.

27. SALDO LABA DAN DIVIDEN

Pada 16 Maret 2017, Perusahaan menyelenggarakan RUPS untuk tahun buku 2016. Berdasarkan notulen rapat, pemegang saham menetapkan antara lain penggunaan laba neto Perusahaan tahun buku 2016 sebagai berikut:
- Pembagian dividen sebesar Rp12,10 triliun (nilai penuh) (setara dengan US$907.383)
- Sisanya sebesar US$2.239.660 digunakan sebagai cadangan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan.

Berdasarkan keputusan RUPS pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") PT Pertamina (Persero) tahun 2017, terdapat tambahan alokasi laba untuk program pengembangan lingkungan sebesar Rp250 miliar (setara dengan US$18.707).

Pada 2 Mei 2018, Perusahaan menyelenggarakan RUPS untuk tahun buku 2017. Berdasarkan notulen rapat, pemegang saham menetapkan antara lain penggunaan laba neto Perusahaan tahun buku 2017 sebagai berikut:
- Pembagian dividen sebesar Rp8,57 triliun (nilai penuh) (setara dengan US$614.939);
- Sisanya sebesar US$1.925.256 digunakan sebagai cadangan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan.

28. PENJUALAN DALAM NEGERI MINYAK MENTAH, GAS BUMI, ENERGI PANAS BUMI DAN PRODUK MINYAK

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Pertamax, Pertamax Turbo, Pertalite, dan Pertadex (bahan bakar diesel)	11.215.914	9.794.161
Minyak Solar ("ADO")	10.713.543	9.388.019
LPG, petrokimia, pelumas dan lainnya	8.201.023	4.313.150
Bensin Premium	4.509.233	5.429.272
Avtur dan Avigas	3.955.434	2.990.276
Gas alam	3.196.038	5.461.178
Minyak bumi	917.333	763.281
Panas bumi-uap dan listrik	645.593	609.610
DMO *fees*-minyak mentah	612.953	400.621
BBM industri dan *marine*	639.575	492.753
Minyak tanah	123.894	137.924
Minyak diesel industri	11.978	8.539
Jumlah	**44.742.511**	**39.788.784**

29. PENGGANTIAN BIAYA SUBSIDI DARI PEMERINTAH

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Tahun berjalan:		
Penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg (Catatan 9b)	3.496.603	2.977.967
Penggantian biaya subsidi jenis BBM tertentu (Catatan 9c)	2.126.796	595.206
Penggantian biaya subsidi Kerosene (Catatan 9)	16.828	-
Sub jumlah	5.640.227	3.573.173
Koreksi audit Pemerintah (BPK dan ESDM) untuk penggantian biaya subsidi:		
LPG tahun 2018(Catatan 9b)	(1.252)	-
BBM tahun 2018 (Catatan 9c)	(699)	-
LPG tahun 2017(Catatan 9b)	(5.661)	-
BBM tahun 2017 (Catatan 9c)	(147)	-
LPG tahun 2016 (Catatan 9b)	-	(484)
BBM tahun 2016 (Catatan 9c)	-	(605)
Sub jumlah	(7.759)	(1.089)
Jumlah	**5.632.468**	**3.572.084**

Selisih yang timbul antara jumlah penggantian biaya subsidi yang telah dibukukan dengan hasil audit BPK dicatat pada periode dimana laporan hasil audit tersebut diperoleh.

30. PENJUALAN EKSPOR MINYAK MENTAH, GAS BUMI DAN PRODUK MINYAK

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Produk minyak	1.811.257	968.882
Gas bumi	1.187.824	245.677
Minyak mentah	637.872	659.722
Jumlah	**3.636.953**	**1.874.281**

31. PENDAPATAN USAHA DARI AKTIVITAS OPERASI LAINNYA

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Selisih Harga ketetapan dan formula (Catatan 9a dan 18e)	3.102.218	-
Jasa transportasi gas bumi	204.140	151.916
Jasa penunjang hulu	156.869	155.442
Jasa perkapalan	127.010	124.224
Jasa asuransi	84.585	98.870
Jasa kesehatan dan rumah sakit	76.607	85.383
Jasa regasifikasi gas	31.108	19.224
Jasa perkantoran dan perhotelan	26.155	23.656
Jasa transportasi udara	18.756	39.137
Jasa teknik dan transportasi	13.359	8.994
Jasa manajemen portofolio	4.962	9.157
Jasa pelatihan dan alih daya	4.825	2.026
Lain-lain	55.613	22.071
Jumlah	**3.906.207**	**740.100**

32. BEBAN POKOK PENJUALAN

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Saldo awal persediaan produk minyak	(3.778.519)	(2.990.517)
Penyisihan penurunan nilai persediaan produk minyak (Catatan 10)	92.854	76.542
Sub jumlah	(3.685.665)	(2.913.975)
Beban produksi:		
- Bahan baku	(20.349.186)	(15.368.304)
- Bahan pembantu	(1.151.033)	(879.291)
- Penyusutan (Catatan 13)	(566.412)	(551.911)
- Utilitas, prasarana dan bahan bakar	(484.322)	(441.655)
- Gaji, upah dan tunjangan karyawan lainnya	(452.184)	(503.547)
- Sewa (Catatan 49c)	(286.481)	(717.475)
- Bea masuk	(152.255)	(112.534)
- Angkut dan transportasi	(124.215)	(138.148)
- Jasa profesional	(124.109)	(82.225)
- Perawatan dan perbaikan	(115.899)	(114.228)
- Material dan peralatan	(84.460)	(71.035)
- Perjalanan dinas	(17.109)	(98.863)
- Lain-lain	(99.311)	(15.569)
Sub jumlah	(24.006.976)	(19.094.785)

32. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Pembelian produk minyak dan lainnya:		
- Impor produk minyak lainnya	(9.230.605)	(7.515.863)
- Impor bensin Premium	(4.433.062)	(3.811.785)
- Pembelian domestik produk minyak lainnya	(2.782.989)	(2.340.875)
- Impor Minyak Solar	(1.385.810)	(853.533)
- Pembelian energi panas bumi	(1.313.799)	(330.505)
Sub jumlah	(19.146.265)	(14.852.561)
Saldo akhir persediaan produk minyak (Catatan 10)	4.218.260	3.778.519
Penyisihan penurunan nilai persediaan produk minyak (Catatan 10)	(167.270)	(92.854)
Sub jumlah	4.050.990	3.685.665
Jumlah	**(42.787.916)**	**(33.175.656)**

33. BEBAN PRODUKSI HULU DAN *LIFTING*

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Penyusutan, deplesi dan amortisasi (Catatan14)	(1.741.040)	(1.578.988)
Kontrak jasa	(734.342)	(373.194)
Gaji, upah dan tunjangan karyawan lainnya	(618.458)	(419.526)
Mitra Kontrak Bantuan Teknis (“KBT”)	(335.532)	(136.609)
Material	(267.437)	(287.612)
Amortisasi investasi blok minyak dan gas (Catatan 12a)	(144.472)	(116.441)
Lain-lain	(545.235)	(508.837)
Jumlah	**(4.386.516)**	**(3.421.207)**

34. BEBAN EKSPLORASI

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Sumur kering (*dry hole*)	(112.476)	(74.744)
Seismik, geologi dan geofisika	(89.680)	(40.000)
Lain-lain	(65.524)	(50.612)
Jumlah	**(267.680)**	**(165.356)**

35. BEBAN DARI AKTIVITAS OPERASI LAINNYA

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
Beban pokok pendapatan jasa	(917.123)	(561.688)
Gaji, upah dan tunjangan karyawan lainnya	(173.585)	(148.022)
Klaim asuransi	(92.864)	(68.616)
Penyusutan (Catatan 13)	(88.405)	(84.636)
Jumlah	**(1.271.977)**	**(862.962)**

36. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
Angkut dan transportasi	(453.664)	(519.929)
Penyusutan (Catatan 13)	(328.695)	(362.241)
Gaji, upah dan tunjangan karyawan lainnya	(263.020)	(222.447)
Beban pengisian tabung LPG	(113.971)	(132.647)
Jasa profesional	(96.851)	(53.660)
Pajak, retribusi dan denda	(89.179)	(46.201)
Perawatan dan perbaikan	(84.776)	(66.757)
Material dan peralatan	(33.441)	(45.992)
Sewa	(26.210)	(44.981)
Iklan dan promosi	(24.151)	(25.102)
Utilitas, prasarana dan bahan bakar	(21.092)	(8.339)
Perjalanan dinas	(15.331)	(12.483)
Lain-lain	(92.450)	(49.423)
Jumlah	**(1.642.831)**	**(1.590.202)**

37. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
Gaji, upah dan tunjangan karyawan lainnya	(649.669)	(825.414)
Pajak, retribusi dan denda	(295.439)	(222.737)
Penyusutan, deplesi dan amortisasi (Catatan 12e, 13 dan 14)	(107.538)	(109.792)
Jasa profesional	(41.828)	(113.979)
Material dan peralatan	(36.022)	(52.663)
Sewa (Catatan 49c)	(31.177)	(19.906)
Pelatihan, pendidikan dan rekrutmen	(29.828)	(22.570)
Perawatan dan perbaikan	(24.825)	(38.009)
Perjalanan dinas	(23.252)	(26.136)
Lain-lain	(90.333)	(167.728)
Jumlah	**(1.329.911)**	**(1.598.934)**

38. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Pendapatan keuangan:		
Deposito berjangka	161.818	162.988
Investasi lainnya	54.797	25.277
Jasa giro	39.958	38.779
Lain-lain	-	6.030
Jumlah	**256.573**	**233.074**
Beban keuangan:		
Obligasi	(351.914)	(352.622)
Pinjaman jangka panjang	(172.586)	(202.974)
Biaya akresi (Catatan 23)	(87.035)	(51.498)
Pinjaman jangka pendek	(56.499)	(8.465)
Sewa pembiayaan	(30.309)	(58.323)
Lain-lain	(136.895)	(143.829)
Jumlah	**(835.238)**	**(817.711)**

39. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Pemulihan/(penyisihan) penurunan nilai piutang	108.757	(49.826)
Pendapatan dari denda kontrak dan material serta klaim	91.101	41.058
Penyesuaian nilai wajar investasi lainnya (Catatan 11)	52.843	-
Sewa	35.325	34.167
Kenaikan/(penurunan) nilai aset tetap (Catatan 13)	2.719	(7.364)
Penyisihan penurunan nilai aset minyak dan gas (Catatan 14)	(218.189)	(191.353)
Penurunan nilai investasi pada blok minyak dan gas (Catatan 12a)	(154.773)	(83.270)
Denda pajak surat ketetapan pajak kurang bayar ("SKPKB") dan surat tagihan pajak ("STP") (Catatan 40a)	(36.622)	-
Pendapatan bunga restitusi PPh	-	99.577
Penyisihan penurunan nilai *goodwill* (Catatan 15d)	-	(6.890)
Penyisihan kasus pajak (Catatan 40g)	-	(621.148)
Pengembalian atas putusan banding	-	121.676
PPh final atas revaluasi aset (Catatan 40h)	-	(129.610)
Penghapusan aset minyak dan gas bumi	-	(68.546)
Lain-lain, neto	38.014	30.947
Jumlah	**(80.825)**	**(830.582)**

40. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pajak Penghasilan Badan ("PPh")		
Perusahaan:		
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan:		
- 2017	14.520	164.266
Entitas anak:		
Pajak penghasilan badan dan dividen	458.483	330.676
Sub jumlah PPh - Konsolidasian	473.003	494.942
Pajak pertambahan nilai ("PPN")		
Perusahaan:		
- 2018	386.989	-
- 2017	-	418.255
- 2016	84.290	-
Sub jumlah	471.279	418.255
Entitas anak:		
PPN yang dapat ditagihkan kembali	290.872	313.468
PPN	386.737	396.890
Sub jumlah	677.609	710.358
Sub jumlah PPN - Konsolidasian	1.148.888	1.128.613
Pajak lain-lain	18.994	-
Jumlah	**1.640.885**	**1.623.555**
Bagian lancar	**(820.598)**	**(794.255)**
Bagian tidak lancar	**820.287**	**829.300**

Rincian PPN yang dapat ditagihkan kembali adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PPN yang dapat ditagihkan kembali dari SKK Migas:		
- PT Pertamina EP	84.264	73.348
- PGN dan entitas anaknya	69.014	75.356
- PT Pertamina EP Cepu	31.194	43.160
- PHE dan entitas anaknya	3.643	26.638
Sub jumlah	188.115	218.502
PPN yang dapat ditagihkan kembali kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan:		
PT Pertamina Geothermal Energy	102.757	94.966
Jumlah	**290.872**	**313.468**

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

Pada tanggal 27 Desember 2018, Perusahaan menerima SKPKB dan STP atas hasil pemeriksaan pajak tahun buku 2016 sebesar Rp3,23 triliun (setara dengan US$222.250). SKPKB terdiri dari SKPKB PPh Badan sebesar Rp565,95 miliar (setara dengan US$39.031), SKPKB PPh Potong Pungut sebesar Rp1,38 triliun (setara dengan US$94.851) dan SKPKB PPN sebesar Rp295 miliar (setara dengan US$20.260). STP terdiri dari tagihan pajak atas PPN sebesar Rp991,86 miliar (setara dengan US$68.108).

Dari nilai keseluruhan SKPKB dan STP tersebut, Perusahaan telah membebankan sebesar Rp533,32 miliar (setara dengan US$36.622) pada laporan laba rugi tahun 2018 (Catatan 39), sebesar Rp1,5 triliun (setara dengan US$103.283) dibukukan sebagai uang muka pajak dan sebesar Rp565,95 miliar (setara dengan US$39.030) dibukukan sebagai penyesuaian pajak PPh badan tahun sebelumnya, sedangkan untuk nilai sisa sebesar Rp630,78 miliar (setara dengan US$43.315) belum dibayarkan.

Pada tanggal 25 Januari 2019, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Potong Pungut 22, PPh 23, PPh 4 ayat (2), PPh 15, SKPKB dan STP PPN.

Pada tanggal 7 November 2018, Perusahaan menerima surat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan bayar pajak penghasilan badan tahun 2017 dari Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga No. 80367/051-00367-2018 atas pengembalian pajak sebesar Rp2,26 triliun dengan menghitung kompensasi utang pajak sebesar Rp159 juta, sehingga dibayarkan sebesar Rp2,26 triliun (setara dengan US$154.758).

Pada tanggal 9 Februari 2018, Perusahaan memperoleh keputusan dari DJP nomor Kep-29/WPJ.19/2018 tentang Penetapan Wajib Pajak Tertentu dengan Kriteria Khusus, yang diberlakukan mulai 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2019. Wajib pajak yang memenuhi semua kriteria dapat diberikan pengembalian pajak jika sebelumnya mereka telah membayar pajak berlebih.

Pada tanggal 21 Maret 2017, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian banding Perusahaan atas SKPKB pajak pertambahan nilai masa pajak Desember 2007. Perusahaan telah menerima pengembalian pajak atas pajak pertambahan nilai tersebut sebesar Rp1,62 triliun (setara dengan US$121.576) pada tanggal 3 Agustus 2017.

Peningkatan pembayaran PPN pada tahun 2017 sebagian besar disebabkan atas pembayaran dimuka PPN atas subsidi Solar dan LPG, serta PPh Potong Pungut.

Pada tanggal 3 Maret 2017, Perusahaan menerima surat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan bayar pajak penghasilan badan tahun 2014 dan 2013, masing-masing sebesar Rp3,88 triliun (setara dengan US$296.363) dan Rp23,25 miliar (setara dengan US$1.754).

Pada tanggal 31 Desember 2015, melalui surat No. 860/H00000/2015-S4, Perusahaan mengajukan permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan pada tahun 2015 kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Final sebesar Rp1,3 triliun (setara dengan US$95.182).

Pada tanggal 7 Desember 2016, melalui surat No. 751/H00000/2016-S4, Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa penyampaian persyaratan penilaian kembali aset tetap akan disampaikan pada tahun 2017. Sebagai konsekuensinya, Perusahaan membayar tambahan pajak penghasilan final pada bulan Desember 2016 atas penilaian kembali sebesar Rp429,77 miliar (setara dengan US$31.899).

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pajak penghasilan badan - Perusahaan	19.684	-
Pajak penghasilan badan - Entitas anak	447.921	308.803
Sub jumlah	467.605	308.803
Pajak lain-lain:		
- Pajak penghasilan - Pasal 21	33.909	39.763
- Pajak penghasilan - Pasal 23/26	13.189	11.363
- Pajak penghasilan - Pasal 22	10.580	6.341
- Pajak penghasilan - Pasal 15/4(2)	6.271	7.101
- Pajak penghasilan - Pasal 24	269	1
- PPN	74.542	68.617
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	119.645	117.347
Sub jumlah	258.405	250.533
Jumlah	**726.010**	**559.336**

c. Beban pajak penghasilan, neto

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
Beban pajak kini (Catatan 40d)	(2.627.443)	(1.699.088)
(Beban)/manfaat pajak tangguhan	(385.759)	532.264
Neto	**(3.013.202)**	**(1.166.824)**

d. Pajak kini

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak (kerugian). Nilai tersebut mungkin disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke DJP.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan	5.729.596	3.867.228
Ditambah:		
Eliminasi konsolidasian	3.610.474	2.247.936
Laba sebelum pajak penghasilan - Entitas anak	(6.610.027)	(3.821.301)
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	**2.730.043**	**2.293.863**
Perbedaan temporer:		
Penyisihan insentif dan bonus kinerja (*tantiem*)	(6.894)	19.920
Penyisihan penurunan nilai atas aset keuangan	(139.273)	20.305
Aset dan liabilitas sewa pembiayaan	(7.368)	48.659

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak kini (lanjutan)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi	(55)	8.095
Biaya akrual hukum	14.918	8.087
Penyisihan penurunan nilai persediaan	137.248	32.404
Penyusutan aset tetap	(112.976)	(2.756)
Penyesuaian nilai wajar piutang dari Selisih Harga (Catatan 2u dan 9a)	981.331	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	(181.421)	(121.652)
Revaluasi aset tetap	(14.221)	-
Lain-lain	7.624	(346)
Perbedaan permanen:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	342.456	1.093.884
Biaya kesehatan pensiunan	648	46.334
Aset tetap yang tidak dapat disusutkan	5.372	5.201
Laba dari entitas anak dan entitas asosiasi	(3.341.620)	(1.997.866)
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(149.244)	(148.704)
Pendapatan lain-lain dikenakan pajak final	1.055.818	(147.399)
Jumlah perbedaan temporer dan permanen	(1.407.657)	(1.135.834)
Laba fiskal Perusahaan	**1.322.386**	**1.158.029**
Pajak penghasilan kini - Perusahaan	330.597	289.507
Penyesuaian tahun sebelumnya	42.403	-
Pajak penghasilan kini - Entitas anak	2.254.443	1.409.581
Pajak penghasilan kini konsolidasian (Catatan 40c)	**2.627.443**	**1.699.088**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan Grup dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**
Laba sebelum pajak penghasilan - Konsolidasian	5.729.596	3.867.228
Pajak penghasilan dihitung dengan rata-rata tarif pajak *statutory*	2.301.890	1.828.634
Beban yang tidak dapat dikurangkan	375.007	492.336
Biaya kesehatan pensiunan	162	11.583
Aset tetap yang tidak dapat disusutkan	1.368	(8.856)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	(868.954)	(553.989)
Pendapatan yang dikenakan pajak final	1.198.784	(35.280)
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(37.458)	(34.943)
Penyesuaian tahun sebelumnya	42.403	-
Revaluasi aset tetap	-	(532.661)
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**3.013.202**	**1.166.824**

Jumlah teoritis beban pajak penghasilan dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas masing-masing entitas yang dikonsolidasi ke dalam Grup. Rata-rata tertimbang tarif pajak yang digunakan adalah 53% (2017: 30%).

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak tangguhan

	31 Desember 2018						
	1 Januari 2018	Penambahan dari bisnis kombinasi	Dibebankan pada ekuitas	Selisih penjabaran	Dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif lain	Dibebankan pada laporan laba rugi	31 Desember 2018
Aset pajak tangguhan							
Imbalan kerja karyawan	314.471	-	516	5.143	(1.302)	(71.306)	247.522
Penyisihan penurunan nilai aset keuangan	121.406	-	-	(367)	-	(41.562)	79.477
Provisi pembongkaran dan restorasi	136.394	-	591	-	-	(14.749)	122.236
Penyisihan insentif dan bonus kinerja (*tantiem*)	83.513	-	-	(43)	-	(21.374)	62.096
Laba yang belum direalisasi dari transaksi konsolidasian	64.825	-	-	-	-	10.869	75.694
Aset tetap	518.336	-	-	(3.486)	133	71.595	586.578
Penyisihan penurunan nilai persediaan	37.156	-	-	(46)	-	33.257	70.367
Penyisihan penurunan nilai aset *non-free* dan *non-clear*	27.588	-	-	1	-	-	27.589
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	13.764	-	1.567	(27)	-	(13.233)	2.071
Pendapatan tangguhan	7.590	-	-	-	-	(7.314)	276
Biaya hukum yang masih harus dibayar	3.640	-	-	-	-	3.729	7.369
Aset minyak dan gas bumi	(5.002)	-	(3.382)	-	-	(64.379)	(72.763)
Aset dan liabilitas sewa pembiayaan	(11.205)	-	-	2	-	(1.793)	(12.996)
Diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi	(5.937)	-	-	-	-	(14)	(5.951)
Penyesuaian nilai wajar piutang dari Selisih Harga (Catatan 2u dan 9a)	-	-	-	-	-	245.333	245.333
Lain-lain	64.541	-	(2.439)	(298)	-	(54.836)	6.968
Sub jumlah aset pajak tangguhan konsolidasian, neto	**1.371.080**	**-**	**(3.147)**	**879**	**(1.169)**	**74.223**	**1.441.866**
Liabilitas pajak tangguhan							
Provisi pembongkaran dan restorasi	371.738	-	-	-	-	(6.672)	365.066
Aset sewa pembiayaan	29.013	-	-	-	-	892	29.905
Pendapatan tangguhan	10.750	-	-	-	-	(2.682)	8.068
Imbalan kerja karyawan	8.549	-	-	-	(395)	8.503	16.657
Penyisihan penurunan nilai	1.081	-	-	-	-	927	2.008
Aset minyak dan gas bumi	(2.801.228)	-	-	-	-	(269.388)	(3.070.616)
Selisih nilai wajar atas nilai buku	(14.114)	-	-	-	-	1.516	(12.598)
Aset tetap	(351.100)	-	-	174	-	149.035	(201.891)
Laba yang belum direalisasikan dari transaksi konsolidasian	(377.158)	-	-	-	-	34.302	(342.856)
Lain-lain	274.317	-	-	949	-	(376.415)	(101.149)
Sub jumlah liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, neto	**(2.848.152)**	**-**	**-**	**1.123**	**(395)**	**(459.982)**	**(3.307.406)**
Jumlah	**(1.477.072)**	**-**	**(3.147)**	**2.002**	**(1.564)**	**(385.759)**	**(1.865.540)**

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2017						
	1 Januari 2017	Penambahan dari bisnis kombinasi	Dibebankan pada ekuitas	Selisih penjabaran	Dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif lain	Dibebankan pada laporan laba rugi	31 Desember 2017
Aset pajak tangguhan							
Imbalan kerja karyawan	302.651	-	321	3.365	40.486	(32.352)	314.471
Penyisihan penurunan nilai aset keuangan	114.611	-	864	(98)	-	6.029	121.406
Provisi pembongkaran dan restorasi	123.449	-	-	-	-	12.945	136.394
Penyisihan insentif dan bonus kinerja (*tantiem*)	72.084	-	-	102	-	11.327	83.513
Laba yang belum direalisasi dari transaksi konsolidasian	48.756	-	-	-	-	16.069	64.825
Aset tetap	(24.717)	-	2.612	(17)	-	540.458	518.336
Penyisihan penurunan nilai persediaan	29.194	-	-	(8)	-	7.970	37.156
Penyisihan penurunan nilai aset *non-free* dan *non-clear*	27.588	-	-	-	-	-	27.588
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	41.240	-	-	-	-	(27.476)	13.764
Pendapatan tangguhan	12.100	-	-	140	-	(4.650)	7.590
Biaya hukum yang masih harus dibayar	1.618	-	-	-	-	2.022	3.640
Aset minyak dan gas bumi	(37.375)	-	-	-	-	32.373	(5.002)
Aset dan liabilitas sewa pembiayaan	(23.333)	-	-	(1)	-	12.129	(11.205)
Diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi	(7.962)	-	-	-	-	2.025	(5.937)
Lain-lain	71.559	-	666	(36)	-	(7.648)	64.541
Sub jumlah aset pajak tangguhan konsolidasian, neto	**751.463**	**-**	**4.463**	**3.447**	**40.486**	**571.221**	**1.371.080**
Liabilitas pajak tangguhan							
Provisi pembongkaran dan restorasi	367.350	(1.058)	-	-	-	5.446	371.738
Aset sewa pembiayaan	30.670	-	-	-	-	(1.657)	29.013
Pendapatan tangguhan	22.404	-	-	-	-	(11.654)	10.750
Imbalan kerja karyawan	7.353	-	-	-	180	1.016	8.549
Penyisihan penurunan nilai	1.085	696	-	-	-	(700)	1.081
Aset minyak dan gas bumi	(2.437.710)	(276.196)	-	-	-	(87.322)	(2.801.228)
Selisih nilai wajar atas nilai buku	(30.845)	2.352	-	-	-	14.379	(14.114)
Laba yang belum direalisasikan dari transaksi konsolidasian	(410.531)	-	-	-	-	33.373	(377.158)
Aset tetap	(242.785)	(8.362)	-	575	-	(100.528)	(351.100)
Lain-lain	164.492	48	-	1.087	-	108.690	274.317
Sub jumlah liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, neto	**(2.528.517)**	**(282.520)**	**-**	**1.662**	**180**	**(38.957)**	**(2.848.152)**
Jumlah	**(1.777.054)**	**(282.520)**	**4.463**	**5.109**	**40.666**	**532.264**	**(1.477.072)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah memperhitungkan tarif pajak yang berlaku untuk setiap periode yang terkait.

Manajemen Grup berpendapat bahwa aset pajak tangguhan tersebut di atas dapat dipulihkan melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Administrasi

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

g. Pengampunan pajak

Perusahaan mengikuti Program Pengampunan Pajak pada tanggal 31 Maret 2017 dan memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-369/PP/WPJ.19/2017 tanggal 6 April 2017. Sebagai dampak Pengampunan Pajak, Perusahaan menghentikan semua proses Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali sampai dengan tahun buku 2015.

Adapun dampak dari Pengampunan Pajak sebagai berikut:
a. Nilai sisa rugi fiskal Perusahaan tahun 2014 sebesar US$75.362 tidak dapat dikompensasi.
b. Pengakuan beban atas sengketa pajak yang sebelumnya diakui sebagai pajak dibayar di muka bagian tidak lancar sebesar US$621.148 (setelah dikurangi penyisihan yang telah dibukukan) (Catatan 39).

PT Pertamina Lubricants, entitas anak Perusahaan, mengikuti Program Pengampunan Pajak pada tanggal 31 Maret 2017 dan memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak tanggal 5 April 2017. Sebagai konsekuensi Pengampunan Pajak, PT Pertamina Lubricants menghentikan semua proses Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali sampai dengan tahun buku 2015.

Adapun dampak dari Pengampunan Pajak tersebut di atas PT Pertamina Lubricants menghapusbukukan PPN masukan sebesar Rp210.301 juta (setara dengan US$15.418).

h. Revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan

Perusahaan mengajukan permohonan untuk melakukan revaluasi aset kilang tertentu untuk tujuan perpajakan pada tanggal 28 Desember 2016.

Pada tanggal 10 Juli 2017, Perusahaan mendapatkan persetujuan revaluasi merujuk keputusan DJP Nomor KEP-104/WPJ.19/2017. Adapun dampak dari persetujuan tersebut sebagai berikut:
a. Nilai pajak dibayar dimuka atas pembayaran pajak final sebesar US$129.610 dibiayakan (Catatan 39).
b. Mengakui aset pajak tangguhan sebesar US$532.660.

41. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kas dan setara kas (Catatan 6)	8.416.251	6.065.489
Kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 7)	86.230	88.896
Piutang usaha - pihak berelasi (Catatan 41a)	1.297.651	1.095.016
Piutang Pemerintah (Catatan 9)	4.758.409	2.155.739
Piutang lain-lain - pihak berelasi (Catatan 41b)	149.178	255.054
Kas yang dibatasi penggunaannya - tidak lancar (Catatan 15)	876.168	834.874
Jumlah	**15.583.887**	**10.495.068**
Persentase terhadap jumlah aset	24%	18%
Pinjaman jangka pendek (Catatan 16)	3.164.724	355.518
Utang usaha - pihak berelasi (Catatan 41c)	78.781	49.277
Utang Pemerintah (Catatan 18)	2.002.825	1.831.245
Liabilitas jangka panjang (Catatan 20)	179.361	174.638
Utang lain-lain - pihak berelasi (Catatan 41d)	54.011	56.625
Jumlah	**5.479.702**	**2.467.303**
Persentase terhadap jumlah liabilitas	16%	8%

a. Piutang usaha

Piutang usaha - pihak berelasi yang berasal dari penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi dan energi panas bumi dan ekspor produk minyak.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang usaha - pihak berelasi	1.330.381	1.141.863
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(32.730)	(46.847)
Jumlah	**1.297.651**	**1.095.016**

41. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Piutang usaha (lanjutan)

Piutang usaha berdasarkan pelanggan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PLN dan entitas anak	381.559	385.419
Tentara Nasional Indonesia ("TNI")/ Kementerian Pertahanan ("Kemhan") (Catatan 48b.II.i)	318.142	258.566
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	226.166	106.801
PT Patra SK	40.013	40.117
PT Donggi-Senoro LNG	28.828	14.789
PT Pupuk Indonesia (Persero)	25.412	43.667
PT Pembangkit Jawa-Bali	17.484	1.069
PT Aneka Tambang	14.226	5.001
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	11.499	12.254
PPT Energy Trading Co., Ltd.	22	47.275
Lain-lain	267.030	226.905
	1.330.381	1.141.863
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai	(32.730)	(46.847)
Jumlah	**1.297.651**	**1.095.016**

Mutasi saldo penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo awal	(46.847)	(105.824)
Reklasifikasi dari saldo awal penyisihan piutang	361	-
Pemulihan penurunan nilai atas piutang yang terpulihkan, neto	18.373	92.757
Penurunan nilai selama tahun berjalan	(7.606)	(32.854)
Laba (rugi) selisih kurs	2.989	(926)
Saldo akhir	**(32.730)**	**(46.847)**

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha dari pihak-pihak berelasi.

Rincian piutang usaha dari pihak-pihak berelasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rupiah	870.672	610.347
Dolar AS	459.641	531.449
Lain-lain	68	67
Jumlah	**1.330.381**	**1.141.863**

41. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Piutang usaha (lanjutan)

Piutang atas penyaluran BBM dan pelumas kepada TNI/Kemhan

Penyaluran BBM dan pelumas kepada TNI/Kemhan didasarkan pada rencana kebutuhan TNI/Kemhan dan dibatasi dengan Anggaran Belanja BBM dan Pelumas ("BMP") sebagai salah satu anggaran belanja di TNI/Kemhan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo awal	258.566	644.950
Penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas	479.959	383.307
Penerimaan atas penyaluran BMP	(403.723)	(764.355)
Rugi selisih kurs	(16.660)	(5.336)
Jumlah	**318.142**	**258.566**

Pada 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen telah mengakui penurunan nilai masing-masing sebesar US$12.992 dan US$10.409.

Piutang atas penyaluran BBM kepada PLN

Perusahaan melakukan penyaluran Minyak Solar dan minyak bakar industri kepada PLN untuk digunakan oleh pembangkit-pembangkit listrik PLN di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2018, Perusahaan telah menerima pembayaran dari PLN sesuai dengan rumusan harga yang telah disepakati antara Direksi Perusahan dan Direksi PLN pada tanggal 22 Mei 2018.

Jika kemudian terdapat perbedaan rumusan harga sementara dengan rumusan harga final yang disepakati bersama, maka koreksi akan dicatat pada periode dimana kesepakatan atas rumusan harga final tersebut telah selesai.

b. Piutang lain-lain

Piutang lain-lain berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PT Donggi Senoro LNG	115.500	109.458
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	18.190	19.472
PT Jawa Satu Power	-	96.000
PT Perta Daya Gas	-	34.152
Others (masing-masing di bawah US$10,000)	100.011	97.181
Sub jumlah	233.701	356.263
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai	(19.616)	(20.860)
Sub jumlah	**214.085**	**335.403**
Bagian lancar	**(149.178)**	**(255.054)**
Bagian tidak lancar (Catatan 15)	**64.907**	**80.349**

41. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Piutang lain-lain (lanjutan)

Mutasi saldo penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain dari pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo awal	(20.860)	(20.983)
Pemulihan penurunan nilai	699	127
Penurunan nilai	(705)	(162)
Selisih kurs	1.250	158
Saldo akhir	**(19.616)**	**(20.860)**

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain dari pihak berelasi.

Piutang dari PT Donggi Senoro LNG

Piutang dari PT Donggi Senoro LNG tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar US$115.500 dan US$109.458 ditujukan untuk pembangunan fasilitas produksi LNG yang berkapasitas 2 juta ton per tahun. PT Donggi Senoro LNG dimiliki oleh PHE (29%), Sulawesi LNG Development Limited (59,9%) dan PT Medco LNG Indonesia (11,1%). Proyek yang direncanakan selama 4 tahun ini dibiayai 40% dari ekuitas dan 60% dari pinjaman.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah LIBOR Dolar AS satu bulan ditambah 3,75% per tahun dan jatuh tempo setiap tiga bulan setelah pinjaman dicairkan. Pada tahun 2018 dan 2017, biaya bunga yang timbul ditambahkan ke pinjaman pokok karena fasilitas produksi LNG masih dalam tahap konstruksi. Pendapatan bunga selama tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar US$7.110 dan US$4.908.

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (“MNA”)

Pada tanggal 27 Oktober 2009, MNA telah mengajukan permohonan untuk merestrukturisasi utangnya. Kesepakatan dicapai pada tanggal 17 Oktober 2011 melalui rapat dengan Kementerian BUMN. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 saldo penyisihan penurunan nilai atas piutang ini masing-masing sebesar US$18.190 dan US$19.472.

c. Utang usaha

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	6.279	-
Lain-lain	72.502	49.277
Jumlah	**78.781**	**49.277**

41. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Utang lain-lain

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PLN	6.044	31.452
Lain-lain	47.967	25.173
Jumlah	**54.011**	**56.625**

e. Penjualan dan pendapatan usaha lainnya

Grup melakukan penjualan dan pendapatan usaha lainnya kepada pihak berelasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Penjualan kepada pihak berelasi mencerminkan 24% dan 18% dari jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya di tahun-tahun tersebut. Rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak		
Entitas berelasi dengan Pemerintah	4.872.641	3.961.054
Pemegang saham	3.553.097	401.299
Entitas asosiasi	1.222	735
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah		
Pemegang saham (Catatan 29)	5.632.468	3.572.084
Imbalan jasa pemasaran		
Pemegang saham	15.432	25.474
Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya		
Entitas berelasi dengan Pemerintah	108.514	128.870
Jumlah	**14.183.374**	**8.089.516**

f. Beban pokok penjualan

Pembelian dari pihak berelasi selama tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 mencerminkan 25% dan 22% dari jumlah beban pokok penjualan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Minyak mentah dan gas pemegang saham	10.002.633	6.879.687
Produk minyak:		
Entitas asosiasi	332.752	82.140
Perusahaan ventura bersama	158.260	174.842
Jumlah	**10.493.645**	**7.136.669**

41. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

g. Kompensasi manajemen kunci dan Dewan Komisaris

Manajemen kunci adalah Direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam Perusahaan. Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Gaji dan imbalan lainnya	47.273	52.781

h. Hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Sifat dari hubungan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Hubungan	Pihak berelasi
(i). Pemegang Saham	Pemerintah Republik Indonesia
(ii). Entitas asosiasi	PPT Energy Trading Co., Ltd. PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama PT Donggi Senoro LNG PT Asuransi Samsung Tugu Seplat Petroleum Development Company Plc
(iii). Perusahaan ventura bersama	PT Patra SK PT Perta Samtan Gas PT Perta Daya Gas PT Indo Thai Trading PT Elnusa CGGVeritas Seismic Unimar LLC PT Transportasi Gas Indonesia PT Permata Karya Jasa (Perkasa)
(iv). Mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan	Koperasi Karyawan Pertamina Dana Pensiun Pertamina Pertamina Foundation Yayasan Kesehatan Pertamina
(v). Entitas berelasi dengan Pemerintah	TNI/Kemhan Polisi Republik Indonesia (Polri) Kementerian Keuangan PLN PT Pupuk Indonesia (Persero) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. PT PAL Indonesia (Persero) PT Bina Bangun Wibawa Mukti PT Rekayasa Industri PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) BNI BNI Syariah BRI BRI Syariah BTN Bank Mandiri BSM Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT Arun Natural Gas Liquefaction PT Badak Natural Gas Liquefaction Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya
(vi). Personil Manajemen Kunci	Direksi Personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam Perusahaan
(vii). Dewan Pengawas Tata Kelola Perusahaan	Dewan Komisaris

42. INFORMASI SEGMEN

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh komite pengarah stratejik yang digunakan untuk mengambil keputusan stratejik.

Segmen dikelompokkan menjadi dua kegiatan usaha utama meliputi Hulu dan Hilir, yang merupakan laporan segmen Perusahaan sesuai dengan PSAK 5 (Penyesuaian 2014), Segmen Operasi (Catatan 2v). Kegiatan usaha Gas dan Energi Baru Terbarukan saat ini dikelompokkan pada segmen lain-lain karena masih belum memenuhi ambang batas kuantitatif sebagai segmen operasi dilaporkan.

	31 Desember 2018					
	Hulu	**Hilir**	**Lain-lain*)**	**Jumlah sebelum eliminasi**	**Eliminasi**	**Jumlah konsolidasian**
Penjualan eksternal	7.054.464	45.691.622	5.187.485	57.933.571	-	57.933.571
Penjualan antar segmen	5.498.100	399.699	266.115	6.163.914	(6.163.914)	-
Jumlah segmen pendapatan	12.552.564	46.091.321	5.453.600	64.097.485	(6.163.914)	57.933.571
Hasil operasi segmen**)	5.960.645	(286.777)	616.351	6.290.219	(43.479)	6.246.740
Laba selisih kurs, neto						19.622
Pendapatan keuangan						256.573
Beban keuangan						(835.238)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama						122.724
Beban lain-lain, neto						(80.825)
						(517.144)
Laba sebelum pajak penghasilan						5.729.596
Beban pajak penghasilan, neto						(3.013.202)
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian laba *merging entities*						**2.716.394**
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk						2.572.542
Kepentingan non-pengendali						143.852
Informasi lain						
Segmen aset	24.620.521	35.093.033	6.655.756	66.369.310	(4.469.912)	61.899.398
Penyertaan jangka panjang	1.472.711	14.970.480	183.158	16.626.349	(13.807.295)	2.819.054
Jumlah aset	26.093.232	50.063.513	6.838.914	82.995.659	(18.277.207)	64.718.452
Jumlah liabilitas	10.092.998	26.403.047	3.636.191	40.132.236	(5.023.824)	35.108.412
Beban penyusutan, deplesi dan amortisasi	**1.684.534**	**715.492**	**576.536**	**2.976.562**	**-**	**2.976.562**
Penambahan aset tetap, aset minyak & gas serta panas bumi	**3.110.810**	**1.135.645**	**287.056**	**4.533.511**	**-**	**4.533.511**

42. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

	31 Desember 2017					
	Hulu	Hilir	Lain-lain*)	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Penjualan segmen	4.489.320	37.000.553	4.510.850	46.000.723	-	46.000.723
Penjualan antar segmen	3.477.012	372.195	427.098	4.276.305	(4.276.305)	-
Jumlah segmen pendapatan	7.966.332	37.372.748	4.937.948	50.277.028	(4.276.305)	46.000.723
Hasil operasi segmen**)	3.327.892	1.282.198	759.793	5.369.883	(183.477)	5.186.406
Laba selisih kurs, neto						58.137
Pendapatan keuangan						233.074
Beban keuangan						(817.711)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama						37.904
Beban lain-lain, neto						(830.582)
						(1.319.178)
Laba sebelum pajak penghasilan						3.867.228
Beban pajak penghasilan, neto						(1.166.824)
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian laba *merging entities*						**2.700.404**
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada:						
pemilik entitas induk						2.621.732
kepentingan non-pengendali						78.672
Informasi Lain						
Segmen aset	23.969.823	28.451.374	8.878.406	61.299.603	(6.831.146)	54.468.457
Penyertaan jangka panjang	1.476.703	16.490.057	451.653	18.418.413	(15.447.495)	2.970.918
Jumlah aset	25.446.526	44.941.431	9.330.059	79.718.016	(22.278.641)	57.439.375
Jumlah liabilitas	12.148.638	21.037.697	4.165.216	37.351.551	(6.925.443)	30.426.108
Beban penyusutan, deplesi, dan amortisasi	**1.507.444**	**692.767**	**603.798**	**2.804.009**	**-**	**2.804.009**
Penambahan aset tetap, aset minyak & gas serta panas bumi	**3.672.689**	**1.529.130**	**221.357**	**5.423.176**	**-**	**5.423.176**

*) Lain-lain terdiri dari sewa perkantoran dan perumahan, hotel, jasa pengangkutan udara, jasa kesehatan dan pengoperasian rumah sakit, manajemen portofolio investasi, jasa transportasi gas, jasa pengembangan sumber daya manusia dan jasa asuransi.

**) Laba bruto dikurangi beban penjualan dan pemasaran, dan beban umum dan administrasi

42. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Transaksi antar segmen dilakukan dengan mengacu pada syarat yang disetujui di antara perusahaan-perusahaan.

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari pendapatan konsolidasian Grup berdasarkan segmen geografis:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pendapatan:		
Indonesia	54.296.618	44.126.442
Negara lainnya	3.636.953	1.874.281
Pendapatan konsolidasian	**57.933.571**	**46.000.723**

Pendapatan dari dua pelanggan segmen hilir untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 mencerminkan masing-masing 21% dan 11% (US$12.039.130 dan US$4.864.790) dari jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya.

Seluruh aset Grup secara substansial berlokasi di Indonesia, kecuali beberapa kepemilikan aset di luar negeri seperti anak Perusahaan PIEP yang masing-masing berlokasi di Aljazair, Irak, Malaysia, Italia, Perancis, Myanmar, Kanada, Kongo, Tanzania, Gabon, Kolombia, Namibia, dan Venezuela.

43. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI

a. Kontrak Kerja Sama ("KKS")

KKS dibuat oleh kontraktor KKS dengan Pemerintah melalui SKK Migas (dahulu BP Migas) untuk jangka waktu kontrak 20-30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- **Wilayah kerja**

  Wilayah kerja KKS adalah wilayah dimana kontraktor KKS dapat melaksanakan kegiatan operasi minyak dan gas bumi. Pada saat atau sebelum akhir tahun kontrak ke - 10 sejak tanggal efektif KKS, kontraktor KKS wajib mengembalikan persentase tertentu dari luas wilayah kerja yang ditentukan kepada Pemerintah.

- **Bagi hasil produksi minyak mentah dan gas bumi**

  Pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi dihitung secara tahunan dan merupakan jumlah *lifting* minyak dan gas bumi selama periode/tahun setelah dikurangi kredit investasi, *First Tranche Petroleum* (FTP) dan *cost recovery*.

  Kontraktor KKS dikenai pajak atas pendapatan kena pajak dari kegiatan KKS berdasarkan bagian mereka atas hasil produksi minyak dan gas bumi, dikurangi bonus-bonus, pada tarif pajak gabungan yang terdiri dari pajak penghasilan badan dan pajak dividen.

- **Pengembalian biaya operasi**

  Pengembalian biaya operasi tiap tahun terdiri dari:
  i. Biaya non-kapital tahun berjalan;
  ii. Penyusutan biaya kapital tahun berjalan; dan
  iii. Biaya operasi tahun sebelumnya yang belum memperoleh penggantian (*unrecovered costs*).

43. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

a. Kontrak Kerja Sama ("KKS") (lanjutan)

- **Harga minyak mentah dan gas bumi**

  Bagian kontraktor KKS atas produksi minyak mentah dinilai dengan Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesian Crude Prices* - "ICP"). Gas bumi yang dikirim kepada pihak ketiga dan pihak berelasi dinilai dengan harga yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli yang bersangkutan.

- ***Domestic Market Obligation*** **("DMO")**

  Minyak mentah

  Kontraktor KKS wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia dengan perhitungan setiap tahun sebagai berikut:

  i. Mengalikan jumlah minyak mentah yang diproduksi dari wilayah kerja dengan hasil pembagian antara jumlah kebutuhan minyak mentah dalam negeri sebagai pembilang dan jumlah seluruh minyak mentah Indonesia yang diproduksi oleh seluruh Perusahaan perminyakan di Indonesia sebagai penyebut;
  ii. Menghitung 25% jumlah minyak mentah yang diproduksi dari wilayah kerja KKS;
  iii. Mengalikan jumlah minyak mentah yang lebih kecil antara hitungan (i) dan (ii) dengan persentase bagi produk minyak mentah.

  Harga DMO untuk minyak mentah adalah harga rata-rata tertimbang dari seluruh jenis minyak mentah yang dijual oleh kontraktor KKS atau harga lain yang ditentukan dalam KKS.

  Gas bumi

  Kontraktor KKS juga wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia sebesar 25% dari jumlah gas bumi yang diproduksi dari wilayah kerja kontraktor KKS dikalikan dengan persentase bagi hasil gas bumi kontraktor KKS.

  Harga DMO untuk gas bumi adalah harga yang ditentukan berdasarkan harga jual yang disepakati di dalam kontrak penjualan.

- ***First Tranche Petroleum*** **("FTP")**

  Pemerintah dan kontraktor berhak untuk menerima sampai sebesar 10%-20% dari jumlah produksi minyak dan gas bumi setiap tahun sebelum dikurangi dengan pengembalian biaya operasi dan kredit investasi.

- **Hak milik atas persediaan, perlengkapan dan peralatan**

  Persediaan, perlengkapan dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor KKS untuk kegiatan operasi minyak dan gas bumi merupakan milik Pemerintah. Akan tetapi, kontraktor KKS memiliki hak untuk menggunakan persediaan, perlengkapan dan peralatan tersebut sampai dinyatakan surplus atau ditinggalkan dengan persetujuan SKK Migas.

43. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

b. Kontrak kerjasama PT Pertamina EP

Pada tanggal 17 September 2005, SKK Migas dan PT Pertamina EP menandatangani Kontrak Kerja Sama ("KKS") dalam bentuk Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina ("KMGBP") yang serupa dengan Kontrak Bagi Hasil ("KBH") sebagai kelanjutan dari KMGBP Pertamina, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dari tanggal 17 September 2005 sampai tanggal 16 September 2035. Kontrak ini dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah. Sebagai konsekuensi Perusahaan melanjutkan KMGBP Pertamina, semua aset dan liabilitas Pertamina sehubungan dengan KMGBP dialihkan ke Perusahaan sebesar nilai buku.

Kontrak Kerjasama PT Pertamina EP memiliki ketentuan-ketentuan keuangan sebagai berikut:

- **Wilayah kerja**

  Meliputi area ekplorasi dan produksi Pertamina Lama selain Blok Cepu dan Blok Randugunting.

- **Bagi hasil minyak mentah dan gas bumi**

  Bagi hasil produksi minyak dan gas antara PT Pertamina EP dan Pemerintah masing-masing 67,2269% dan 32,7731%.

- ***First Tranche Petroleum* ("FTP")**

  Pemerintah dan PT Pertamina EP berhak untuk menerima sebesar 5% dari jumlah produksi minyak dan gas setiap tahunnya sebelum dikurangi dengan pengembalian biaya operasi dan kredit investasi. FTP dibagi ke Pemerintah dan PT Pertamina EP berdasarkan jatah produksi minyak dan gas yang sudah ditentukan.

- **Harga minyak mentah dan gas bumi**

  Penjualan minyak mentah Perusahaan dinilai sebesar ICP. Penyerahan gas bumi dinilai sebesar harga yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG").

c. Perjanjian kerjasama PT Pertamina EP dengan pihak-pihak lain

PT Pertamina EP dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam kegiatan operasi minyak dan gas bumi atau perjanjian perbantuan teknis di sebagian wilayah kerja KKS dalam bentuk perjanjian kerjasama operasi dengan persetujuan Pemerintah melalui SKK Migas.

Pengembalian biaya operasi dan bagi hasil untuk pihak-pihak lain pada perjanjian kerjasama berikut, merupakan bagian dari pengembalian biaya berdasarkan KKS PT Pertamina EP.

43. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

c. Perjanjian kerjasama PT Pertamina EP dengan pihak-pihak lain (lanjutan)

Perjanjian kerja sama dengan pihak lainnya adalah sebagai berikut:

- **Kontrak Bantuan Teknis ("KBT")**

  Dalam KBT, kegiatan operasional dilakukan melalui perjanjian kemitraan dengan PT Pertamina EP. KBT diberikan pada lapangan yang telah berproduksi atau pernah berproduksi tetapi sudah tidak berproduksi. Produksi minyak dan gas bumi dibagi menjadi bagian tidak dibagi (*non-shareable*) dan bagian dibagi (*shareable*). Bagian tidak dibagi merupakan produksi yang diperkirakan dapat dicapai dari suatu lapangan (berdasarkan tren historis produksi dari suatu lapangan) pada saat KBT ditandatangani dan menjadi hak PT Pertamina EP. Produksi bagian tidak dibagi akan menurun setiap tahunnya, yang mencerminkan ekspektasi penurunan produksi. Bagian dapat dibagi berkaitan dengan penambahan produksi yang berasal dari investasi Mitra Usaha pada lapangan KBT.

  Mitra Usaha berhak atas pengembalian biaya dengan pembatasan tertentu yang diatur dalam masing-masing kontrak. Sisa produksi bagian dibagi (produksi yang dibagi dikurangi pengembalian biaya) akan dibagi antara PT Pertamina EP dan Mitra Usaha. Persentase bagi hasil sisa produksi yang dibagi untuk Mitra Usaha diatur dalam masing-masing kontrak, yaitu antara 26,7857% sampai dengan 35,7143% untuk minyak bumi dan 62,5000% untuk gas bumi.

  Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat 7 perjanjian KBT PT Pertamina EP dengan wilayah kerja di Sumatera dan Jawa serta masa kontrak selama 20 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 2000 sampai tahun 2002 dan tahun berakhir perjanjian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

  Pada saat berakhirnya KBT, seluruh aset KBT diserahkan kepada PT Pertamina EP. Mitra Usaha KBT bertanggung-jawab untuk menyelesaikan semua liabilitas KBT yang masih belum diselesaikan kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal tersebut.

- **Kontrak Kerja Sama Operasi ("KSO")**

  Dalam KSO, kegiatan operasional dilakukan melalui perjanjian Mitra Usaha dengan PT Pertamina EP. KSO diberikan pada lapangan yang telah berproduksi, dahulu pernah berproduksi tetapi kemudian dihentikan atau belum berproduksi. Terdapat dua jenis kontrak KSO yaitu:

  a. Kontrak KSO Eksplorasi-Produksi
  b. Kontrak KSO Produksi

  Pada kontrak KSO Eksplorasi-Produksi tidak ada bagian minyak mentah yang tidak dibagi (*Non-Shareable Oil* - "NSO"). Pada kontrak KSO Produksi, produksi minyak bumi dibagi menjadi bagian yang tidak dibagi (*non-shareable*) dan bagian yang dibagi (*shareable*).

  NSO merupakan produksi yang diperkirakan dapat dicapai dari suatu lapangan (berdasarkan tren historis produksi dari suatu lapangan) pada saat perjanjian KSO ditandatangani dan menjadi hak PT Pertamina EP. Bagian dibagi berkaitan dengan penambahan produksi minyak dan gas yang berasal dari investasi Mitra Usaha terhadap lapangan KSO yang bersangkutan dan secara umum dibagikan dengan pola yang sama seperti KKS. Dalam beberapa kontrak KSO produksi, meskipun produksi sama atau masih di bawah bagian minyak mentah yang tidak dibagi, penggantian biaya produksi tidak akan ditunda dan dapat diperoleh Mitra Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

43. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

c. Perjanjian kerjasama PT Pertamina EP dengan pihak-pihak lain (lanjutan)

- **Kontrak Kerja Sama Operasi ("KSO") (lanjutan)**

Mitra dapat memperoleh pengembalian Biaya Operasi pada suatu tahun kalender apabila jumlah produksi Mitra lebih besar dari Produksi Dasar dengan jumlah maksimal sebesar jumlah produksi Minyak Inkremental, yang terdiri dari:

1) Pengembalian Biaya Operasi untuk mengangkat Produksi Dasar sebesar maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Biaya Operasi minyak Operasi Dasar;
2) Pengembalian Biaya Operasi untuk mengangkat Minyak Inkremental sebesar maksimum 80% (delapan puluh persen) dari jumlah produksi Minyak Inkremental yang diproduksi dan dijual serta tidak digunakan untuk Operasi dalam suatu tahun kalender.

Apabila dalam suatu tahun kalender, Biaya Operasi melebihi nilai Minyak Mentah yang dialokasikan dalam suatu tahun kalender, maka jumlah kelebihan yang belum dikembalikan akan dikembalikan dalam tahun-tahun berikutnya.

Persentase bagi hasil produksi bagian Mitra Usaha diatur dalam masing-masing kontrak, yaitu berkisar antara 16,6667% sampai dengan 29,8039% untuk minyak dan 28,8627% sampai dengan 53,5714% untuk gas bumi.

Komitmen investasi spesifik yang harus dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun setelah tanggal kontrak KSO. Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, Mitra Usaha diharuskan memberikan garansi bank, yang tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat kepada PT Pertamina EP. Mitra Usaha KSO juga diharuskan untuk melakukan pembayaran kepada PT Pertamina EP sejumlah uang yang telah dicantumkan di dalam dokumen penawaran sebelum tanggal penandatanganan kontrak KSO.

Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat 27 perjanjian Mitra Usaha KSO PT Pertamina EP dengan wilayah kerja di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Papua serta masa kontrak selama 15-20 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 2007 sampai tahun 2018 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2022 sampai tahun 2035.

Pada saat tanggal kontrak KSO berakhir, seluruh aset KSO diserahkan kepada PT Pertamina EP. Mitra Usaha KSO bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua liabilitas KSO yang masih belum diselesaikan kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal kontrak KSO tersebut berakhir.

- **Kontrak unitisasi**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor KKS diwajibkan untuk melakukan unitisasi apabila terbukti adanya pelamparan *reservoir* yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya. MESDM menentukan operator pelaksana unitisasi berdasarkan kesepakatan di antara para Kontraktor yang melakukan unitisasi setelah mendapatkan pertimbangan SKK Migas.

Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat 6 Perjanjian Unitisasi PT Pertamina EP dengan wilayah kerja di Sumatera, Jawa dan Papua serta masa kontrak selama 10 - 50 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 1985 sampai tahun 2013 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2023 sampai tahun 2035.

Berdasarkan Surat Kepala SKK Migas No. SRT-0493/SKKMA0000/2018/S1 tanggal 25 Juni 2018, perihal Penatapan Operator Baru Unitisasi Lapanggan Sukowati, Fasilitas Produksi CPA Mudi dan FSO Cintanatomas, PT Pertamina EP ditunjuk sebagai operator baru lapangan Sukowati (Catatan 4h).

43. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

d. Kontrak kerjasama PHE dengan pihak-pihak lain

- **Kontrak *gross split* ("*Gross Split*")**

Pada tanggal 13 Januari 2017, Peraturan MESDM No.08/2017 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil Tanpa Mekanisme Pengembalian Biaya Operasi atau disebut sebagai KBH *Gross Split* diterbitkan.

Dalam KBH *Gross Split*, hasil produksi minyak dan gas bumi dibagi antara Pemerintah Indonesia dan Kontraktor berdasarkan 3 kriteria sebagai berikut:

1. *Base split;*
2. *Variable split;*
3. *Progressive split.*

Pemerintah juga telah mengatur hal-hal terkait KBH *Gross Split* sebagai berikut:

i. Rezim pajak yang berlaku untuk KBH *Gross Split* adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;
ii. Kontraktor KBH *Gross Split* diwajibkan mengganti biaya investasi yang dikeluarkan oleh kontraktor KBH lama yang belum mendapatkan penggantian;
iii. Aset minyak dan gas bumi eks-KBH lama yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ("DJKN") akan digunakan oleh kontraktor KBH *Gross Split* dengan skema sewa.
iv. Sewa dikenakan atas aset minyak dan gas bumi yang digunakan oleh kontraktor KBH *Gross Split* dan sudah *cost revovery*, kemudian dihitung kembali nilai wajarnya berdasarkan Standar Penilaian Indonesia oleh Penilai Publik, dikalikan tarif sewa yang ditetapkan oleh DJKN.

Per tanggal 31 Desember 2018, kesepakatan KBH *Gross Split* yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut:

Mitra usaha KBH	Wilayah kerja	Area	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Tanggal jatuh tempo kontrak	Persentase partisipasi	Produksi	Periode kontrak
MUJ ONWJ	Blok Offshore North West Java	Jawa Barat	19/01/2017	27/08/1971	18/01/2037	90%	Minyak dan gas	20 tahun
Tidak ada	Blok Tuban	Jawa Timur	20/05/2018	12/02/1997	20/05/2038	100%	Minyak dan gas	20 tahun
Tidak ada	Blok Ogan Komering	Sumatera Selatan	20/05/2018	11/07/1991	20/05/2038	100%	Minyak dan gas	20 tahun
Tidak ada	Blok Offshore Southeast Sumatera	Sumatera Selatan	06/09/2018*	1975	06/09/2038	100%	Minyak dan gas	20 tahun
Tidak ada	Blok NSO	Offshore Sumatera Utara	17/10/2018*	01/10/2015	17/10/2038	100%	Minyak dan gas	20 tahun
Tidak ada	Blok Raja/Pendopo	Sumatera Selatan	06/07/2019**	21/11/1992	05/07/2039	100%	Minyak dan gas	20 tahun
Tidak ada	Blok Jambi Merang	Jambi	10/02/2019**	22/02/2011	09/02/2039	100%	Minyak dan gas	20 tahun
Eni East Sepinggan Ltd.	Blok East Sepinggan	Sepinggan Timur	20/07/2012***	-	20/07/2042	15%	Minyak dan gas	30 tahun
Petrogas (Basin) Ltd.	Blok Kepala Burung	Papua	15/10/2020****	07/10/1996	15/10/2040	30%	Minyak dan gas	20 tahun
Petrogas (Island) Ltd.	Blok Salawati	Papua	23/04/2020****	21/01/1993	23/04/2040	30%	Minyak dan gas	20 tahun

* KBH *Gross Split* ditandatangani pada tanggal 20 April 2018
** KBH *Gross Split* ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2018
*** Amandemen KBH menjadi KBH *Gross Split* ditandatangani tanggal 11 Desember 2018
**** KBH *Gross Split* ditandatangani pada 11 Juli 2018

- ***Indonesian Participation Arrangements* ("IP")**

Melalui kesepakatan IP, Perusahaan, sebagai BUMN, mendapat tawaran untuk memiliki 10% kepemilikan di KKS pada saat pertama kali Rencana Pengembangan ("POD") disetujui oleh Pemerintah Indonesia ("Pemerintah"), yang diwakili oleh SKK Migas. Penyertaan di Blok Jabung sebesar 14,28% merupakan perolehan tambahan penyertaan sebesar 4,28% oleh Perusahaan. Penyertaan sebesar 5% di Blok Tengah merupakan 10% dari 50% kepemilikan kontraktor asing. Perusahaan menyerahkan kepemilikan IP ini kepada Entitas Anak PHE pada tanggal 1 Januari 2008.

43. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

d. Kontrak Kerjasama PHE dengan pihak-pihak lain (lanjutan)

- ***Indonesian Participation Arrangements*** **("IP") (lanjutan)**

  Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat 5 perjanjian kesepakatan kemitraan PHE melalui IP dengan wilayah kerja di Sumatera, Kalimantan dan Papua serta masa kontrak selama 20-30 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 1990 sampai tahun 2005 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2020 sampai tahun 2028 dengan persentase partisipasi berkisar dari 10% sampai dengan 14,28%.

- **Kepemilikan di KKS yang diperoleh setelah berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi**

  1. Minyak dan gas bumi

  Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat 18 kesepakatan kemitraan minyak dan gas bumi PHE dengan wilayah kerja di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua serta masa kontrak selama 20-30 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 1998 sampai tahun 2016 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2019 sampai tahun 2046 dengan persentase partisipasi berkisar dari 15% sampai dengan 100%.

  2. Gas metana batubara

  Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat 14 kesepakatan kemitraan Gas Metana Batubara ("GMB") dalam kegiatan eksplorasi dengan wilayah kerja di Sumatera dan Kalimantan serta masa kontrak selama 30 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2038 sampai tahun 2042 dengan persentase partisipasi berkisar dari 27,5% sampai dengan 100%.

  3. Minyak dan gas bumi non-konvensional

  Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat 2 kontrak kerjasama Migas Non-Konvensional dengan wilayah kerja di Sumatera serta masa kontrak selama 30 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2043 sampai tahun 2045 dengan persentase partisipasi berkisar dari 50% sampai dengan 100%.

- ***Joint Operating Body-Production Sharing Contracts*** **("JOB-PSC")**

  Dalam JOB-PSC, kegiatan operasional dilakukan oleh suatu badan operasi bersama antara entitas anak PHE dan kontraktor. Bagian entitas anak PHE atas kewajiban pembiayaan ditanggung lebih dahulu oleh para kontraktor dan dibayar oleh entitas anak PHE melalui bagiannya atas produksi minyak mentah dan gas bumi, ditambah dengan 50% *uplift*. Setelah semua pembiayaan dibayar kembali, maka hasil produksi minyak mentah dan gas bumi dibagi antara entitas anak PHE dan kontraktor sesuai persentase partisipasi masing-masing dalam JOB-PSC. Bagian kontraktor atas produksi minyak mentah dan gas bumi ditentukan dengan cara yang sama sesuai KKS.

  Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat 5 kesepakatan Kemitraan JOB-PSC PHE dengan wilayah kerja di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua serta masa kontrak selama 30 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 1989 sampai tahun 1998 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2019 sampai tahun 2028 dengan persentase partisipasi berkisar dari 37,5% sampai dengan 50%.

43. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

d. Kontrak kerjasama PHE dengan pihak-pihak lain (lanjutan)

- **Pertamina Participating Interests ("PPI")**

Berdasarkan Kesepakatan PPI, PHE mempunyai kepemilikan di dalam kontrak yang serupa dengan kontrak JOB-PSC. Sisa kepemilikan dimiliki oleh kontraktor yang bertindak sebagai operator. Kewajiban pembiayaan bagian PHE dapat dilakukan secara langsung oleh PHE, atau dapat pula ditanggung lebih dahulu oleh para kontraktor dan akan dibayar oleh PHE dengan cara dipotongkan dari bagian PHE atas produksi minyak mentah dan gas bumi, ditambah dengan 50% *uplift*. Produksi minyak mentah dan gas bumi dibagi antara PHE dan kontraktor sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing. Bagian kontraktor atas produksi minyak mentah dan gas bumi ditentukan dengan cara yang sama sesuai KKS.

Pada tanggal 31 Desember 2018, perjanjian entitas anak PPI adalah sebagai berikut:

Mitra usaha KBH	Wilayah kerja	Area	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Tanggal jatuh tempo kontrak	Persentase partisipasi	Produksi	Periode kontrak
ConocoPhilips (Jambi Selatan) Ltd. Petrochina International Jambi B Ltd.	Blok B	Jambi Selatan	26/01/1990	26/09/2000	25/01/2020	25%	Minyak dan gas	30 tahun

- **Kepemilikan pada KKS minyak dan gas di luar negeri**

Nama KOB	Mitra usaha KOB	Wilayah kerja	Area	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Persentase kepemilikan	Produksi	Periode kontrak
Petronas Carigali Pertamina PetroVietnam Operating Company Sdn. Bhd. ("PCPP")	Petronas Carigali Sdn. Bhd. Petrovietnam	Blok Offshore Sarawak (SK 305)	Malaysia	16/06/2003	26/07/2010	30%	Minyak dan gas	29 tahun

- **Kontrak unitisasi**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor KBH diwajibkan untuk melakukan unitisasi apabila terbukti adanya reservoar yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya. MESDM menentukan operator pelaksana unitisasi berdasarkan kesepakatan di antara para Kontraktor yang melakukan unitisasi setelah mendapatkan pertimbangan SKK Migas.

Karena beberapa pelamparan *reservoir* Entitas Anak memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya, Entitas Anak melakukan perikatan Perjanjian Unitisasi dengan beberapa kontraktor.

Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat 6 Perjanjian Unitisasi PHE dengan wilayah kerja di Sumatera, Jawa, dan Papua serta masa kontrak selama 10-50 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 1985 sampai tahun 2014 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2019 sampai tahun 2035.

- **Perpanjangan dan terminasi kontrak kerja sama PHE**

KBH "B" berakhir pada tanggal 3 Oktober 2018. Pada tanggal 25 September 2018, Pemerintah melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menunjuk PHE NSB sebagai pengelola Wilayah Kerja "B" selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2018 atau sampai KBH baru ditandatangani, mana yang terjadi lebih dahulu, dengan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok KBH sesuai dengan Wilayah Kerja "B" saat ini.

43. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

d. Kontrak kerjasama PHE dengan pihak-pihak lain (lanjutan)

- **Perpanjangan dan terminasi kontrak kerja sama PHE (lanjutan)**

  KBH Blok Tengah sudah berakhir pada tanggal 4 Oktober 2018. Pemerintah memutuskan tidak memperpanjang pengelolaan Wilayah Kerja Tengah oleh Kontraktor eksisting. Sampai dengan laporan keuangan konsolidasian ini disusun, PHE Tengah K bersama dengan kontraktor lainnya (Total Tengah dan Inpex Tengah Ltd.) masih dalam proses menyelesaikan hak dan kewajiban pasca terminasi dengan Pemerintah.

e. Kontrak kerjasama PT Pertamina EP Cepu (PEPC)'s dengan pihak-pihak lain adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 17 September 2005 ditandatangani Kontrak Kerja Sama ("KKS") antara SKK Migas dengan PEPC (50% *participating interest*), MCL (25,50% *participating interest*) dan Ampolex (24,50% *participating interest*) (secara bersama-sama disebut Kontraktor) untuk jangka waktu 30 tahun dari tanggal 17 September 2005 sampai dengan tanggal 16 September 2035, dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan pada KBH PEPC sebagai berikut :

Mitra Usaha KKS	Wilayah kerja	Area	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Tanggal jatuh tempo kontrak	Persentase partisipasi	Produksi	Periode kontrak
ExxonMobil Cepu Limited Ampolex (Cepu) Pte. Ltd. PT Sarana Patra Hulu Cepu PT Petrogas Jatim Utama Cendana PT Blora Patragas Hulu PT Asri Dharma Sejahtera	Blok Cepu	Jawa Tengah Jawa Timur	17/09/2005	31/08/2009	16/09/2035	45%	Minyak	30 tahun

- **Kontrak unitisasi**

  Pada tanggal 31 Desember 2018, kontrak unitisasi entitas anak adalah sebagai berikut:

Mitra Usaha	Wilayah kerja	Area	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Tanggal jatuh tempo kontrak	Persentase partisipasi	Produksi	Periode kontrak
PT Pertamina EP	Blok EP Blok Cepu	Jawa Tengah Jawa Timur	17/09/2005	-	16/09/2035	91.9399%	Gas	30 tahun

f. Kontrak kerjasama PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning (PEPCADK) dengan SKK Migas

KKS dibuat oleh PEPC ADK dengan Pemerintah melalui SKK Migas pada tanggal 26 Februari 2014 untuk periode 30 tahun sejak tanggal 26 Februari 2014 hingga 25 Februari 2044. Periode tersebut dapat diperpanjang bedasarkan peraturan yang berlaku. Perusahaan memiliki *participating interest* sebesar 100% pada Blok KKS Alas Dara Kemuning.

g. Kontrak kerjasama PT Pertamina Hulu Indonesia dengan SKK Migas

- **KBH**

  KBH dibuat oleh kontraktor KBH dengan Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas" - sebelumnya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/"BP MIGAS") untuk jangka waktu kontrak antara 20-30 tahun. Periode tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

43. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

g. Kontrak kerjasama PT Pertamina Hulu Indonesia dengan SKK Migas (lanjutan)

- KBH (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, KBH di PHI Grup adalah sebagai berikut:

Mitra Usaha KKS	Wilayah Kerja	Wilayah	Tanggal Efektif Kontrak	Tanggal Mulai Produksi	Tanggal Jatuh Tempo Kontrak	Persentase Partisipasi	Produksi	Periode Kontrak
Tidak ada	Blok Mahakam	*Onshore* dan *Offshore* Kalimantan Timur	01/01/2018	01/01/2018	31/12/2037	100%	Minyak dan gas	20 tahun

- Kontrak *gross split*

Mitra Usaha KKS	Wilayah Kerja	Wilayah	Tanggal Efektif Kontrak	Tanggal Mulai Produksi	Tanggal Jatuh Tempo Kontrak	Persentase Partisipasi	Produksi	Periode Kontrak
Tidak ada	Blok Sanga Sanga	*Onshore* Kalimantan Timur	08/08/2018*	08/08/2018	07/08/2038	100%	Minyak dan gas	20 tahun
Tidak ada	Blok Kalimantan Timur dan Attaka	*Onshore* dan *Offshore* Kalimantan Timur	25/10/2018*	25/10/2018	24/10/2038	100%	Minyak dan gas	20 tahun

* Kontrak ditandatangani pada tanggal 20 April 2018

- Kontrak unitisasi

Pada tanggal 31 Desember 2018, Entitas memiliki Perjanjian Unitisasi sebagai berikut:

Para pihak	Operator	Lapangan	Lokasi	Tanggal penanda-tanganan kontrak	Mulai kontrak	Produksi	Akhir kontrak	Periode Kontrak
PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) & Pertamina Hulu Sanga Sanga	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS)	Nilam & Badak	Kalimantan Timur (KKS Mahakam & KKS Sanga Sanga)	*In Progress*	08/08/2018	08/08/2018	31/12/2037	20 tahun
PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) & Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT)	PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM)	Peciko	Kalimantan Timur (KKS Mahakam & KKS Kalimantan Timur)	*In Progress*	25/10/2018	25/10/2018	31/12/2037	20 tahun

h. Kepemilikan secara langsung dan tidak langsung PIEP pada KKS minyak dan gas di luar negeri

Pada tanggal 31 Desember 2018, PIEP memiliki secara langsung dan tidak langsung kepemilikan pada KKS atau kontrak sejenis minyak dan gas di luar negeri adalah sebagai berikut:

Nama PBO	Mitra Usaha PBO	Wilayah Kerja	Negara	Tanggal Efektif Kontrak	Tanggal Mulai Produksi	Persentase Kepemilikan	Produksi	Periode Kontrak
Menzel Lejmat North (MLN)	Talisman Energy Inc	Blok 405a	Algeria	2000	2003	65%	Minyak	25 tahun
Murphy Sabah Oil Co. Ltd.	Murphy Sabah Oil Co. Ltd. Petronas Carigali Sdn. Bhd.	Blok K	Malaysia	27/01/1999	2007	24%	Minyak dan gas bumi	38 tahun
Murphy Sabah Oil Co. Ltd.	Murphy Sabah Oil Co. Ltd. Petronas Carigali Sdn. Bhd.	Blok H	Malaysia	19/03/2007	Tahap pengembangan	24%	Gas bumi	38 tahun
Murphy Sarawak Oil Co. Ltd.	Murphy Sarawak Oil Co. Ltd. Petronas Carigali Sdn. Bhd.	SK309	Malaysia	27/01/1999	2003	25.5%	Minyak, gas bumi, dan kondensat	29 tahun
Murphy Sarawak Oil Co. Ltd.	Murphy Sarawak Oil Co. Ltd. Petronas Carigali Sdn. Bhd.	SK311	Malaysia	27/01/1999	2007	25.5%	Minyak, gas bumi, dan kondensat	29 tahun

43. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

h. Kepemilikan secara langsung dan tidak langsung PIEP pada KKS minyak dan gas di luar negeri (lanjutan)

Nama PBO	Mitra Usaha PBO	Wilayah Kerja	Negara	Tanggal Efektif Kontrak	Tanggal Mulai Produksi	Persentase Kepemilikan	Produksi	Periode Kontrak
Murphy Sarawak Oil Co. Ltd.	Murphy Sarawak Oil Co. Ltd. Petronas Carigali Sdn. Bhd.	SK314A	Malaysia	07/05/2013	Tahap eksplorasi	25.5%	-	27 tahun
Mnazi Bay Exploration; Mnazi Bay Development/Production	M&P (Operator); TPDC	Mnazi Bay	Tanzania	Oktober 2006	Agustus 2015	60.075% & 48.06%	Gas	2031 dan dapat diperpanjang sampai 2051
Enzanga Production	M&P (Operator); The Gabonese Republic; Tullow	Ezanga	Gabon	1 Januari 2014	2007	80%	Minyak	2034 dan dapat diperpanjang sampai 2054
Seplat Petroleum Development Company Plc	Seplat (Operator); NPDC	OML 4, 38, 41	Nigeria	30 Juni 1989	Juli 2010	45%	Minyak dan gas	Oktober 2038
	Pillar Oil (Operator); Seplat	OPL 283	Nigeria	2009	Mei 2012	40%	Minyak	Oktober 2028
	Seplat dan NNPC (Joint Operators)	OML 53	Nigeria	1997	1978	40%	Minyak	Juni 2027
	Seplat and BelemaOil (Joint Operators); NNPC	OML 55	Nigeria	1997	Februari 2017	n/a*)	Minyak	Juni 2027
Petroregional del Lago Mixed Company	Petroleos de Venezuela S.A. & PDVSA Social	Urdaneta West Field	Venezuela	2006	1974	40%	Minyak	2026

*) berdasarkan persyaratan komersial yang telah direvisi sehubungan dengan OML 55 sejak Juli 2016 Seplat tidak lagi menjadi pemegang saham BelemaOil, namun akan memiliki pendapatan bunga sampai jumlah debit US$330 juta telah dibayarkan ke Seplat. Working interest production yang dilaporkan untuk OML 55 adalah untuk volume sebelumnya sampai akhir Juni 2016.

- Mitra Kontrak Bantuan Teknis ("KBT")

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, *participating interest* KBT yang dimiliki PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi ("PIREP") adalah sebagai berikut:

Nama PBO	Mitra Usaha PBO	Wilayah Kerja	Negara	Tanggal Efektif Kontrak	Tanggal Mulai Produksi	Persentase Kepemilikan	Produksi	Periode Kontrak
West Qurna 1 Field Operating Division	ExxonMobil Iraq Limited, Shell Iraq B.V. PetroChina International Iraq FZE, Oil Exploration Company of Iraqi Ministry of Oil	Blok West Qurna - 1	Irak	25/01/2010	25/01/2010	10%	Minyak	35 tahun

- Kontrak unitisasi

Pada tanggal 31 Desember 2018, kontrak unitisasi PIEP adalah sebagai berikut:

1. Algeria

Nama PBO	Mitra Usaha PBO	Wilayah Kerja	Negara	Tanggal Efektif Kontrak	Tanggal Mulai Produksi	Persentase Kepemilikan	Produksi	Periode Kontrak
El Merk ("EMK")	Talisman (Algeria) B.V., Sonatrach, Anadarko, Eni, Maersk, Perusahaan	Blok 405a	Algeria	Maret 2007	2013	16.90%	Minyak, kondensat, dan LPG	25 tahun
Ourhoud	Talisman (Algeria) B.V., Sonatrach, Anadarko, Eni, Maersk, Perusahaan	Blok 405a	Algeria	Desember 1997	2002	3.56%	Minyak	25 tahun

43. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

h. Kepemilikan secara langsung dan tidak langsung PIEP pada KKS minyak dan gas di luar negeri (lanjutan)

- Kontrak unitisasi (lanjutan)

2. Malaysia

Bagian	Operator	Lapangan	Persentase partisipasi PMEP	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Produksi	Periode kontrak
Shell, Conoco Phillips, Carigali Murphy, PMEP	Shell	Gumusut Kakap Field	3.25%	20/09/2004	18/11/2012	Minyak & gas bumi	Tidak disebutkan
Shell, Conoco Phillips, Carigali, Murphy, PMEP	Murphy	Siakap North Petai Field	9.6%	01/01/2007	28/02/2014	Minyak & gas bumi	Tidak disebutkan

i. Kontrak kerjasama PGN

Pada tanggal 31 Desember 2018 PGN memiliki kepemilikan pada operasi bersama maupun kontrak jasa partisipasi dan perjanjian kerjasama ekonomi dengan perusahaan-perusahaan berikut:

Wilayah Kerja	Negara	Partisipasi
Blok Ujung Pangkah	Indonesia	100,00%
Blok South Sesulu	Indonesia	100,00%
Blok Fasken	United States of America	36,00%
Blok Bangkanai	Indonesia	30,00%
Blok Bangkanai Barat	Indonesia	30,00%
Blok Muriah	Indonesia	20,00%
Blok Ketapang	Indonesia	20,00%
Blok Muara Bakau	Indonesia	11,67%
Blok Wokam II	Indonesia	100,00%
Blok Pekawai	Indonesia	100,00%
Blok Yamdena Barat	Indonesia	100,00%

44. WILAYAH KERJA PANAS BUMI

Sejak tahun 1974, Pertamina Lama memperoleh wilayah-wilayah kerja panas bumi di Indonesia berdasarkan surat-surat keputusan dari Menteri Pertambangan dan Energi. Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 2003, segala hak dan kewajiban, yang timbul dari kontrak dan perikatan antara Pertamina Lama dengan pihak ketiga, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2001, beralih kepada Perusahaan sejak tanggal 17 September 2003. Perusahaan, melalui surat No. 282/C00000/2007-S0 tertanggal 12 Maret 2007, menyerahkan wilayah kerja panas bumi kepada PGE sejak tanggal 1 Januari 2007. Pemindahan hak, kewajiban, dan kepentingan Pertamina dalam operasi bisnis panas bumi ke PGE disetujui oleh ESDM pada Surat No. 2198/30/DJB/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan No. 2523/30/DJB/2009 tanggal 1 September 2009.

Efektif mulai tanggal 28 Juni 2010, aset Perusahaan panas bumi milik Pertamina dipindahkan ke PGE, dan menjadi bagian dari kontribusi Pertamina sebagai tambahan setoran modal ke PGE. Pemindahan aset tersebut didokumentasikan pada Akta Notaris No. 23 tanggal 28 Juni 2010 oleh Lenny Janis Ishak, S.H.

44. WILAYAH KERJA PANAS BUMI (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 2067 K/30/MEM/2012 tentang penegasan wilayah kuasa dan perubahan batas-batas koordinat pengusahaan sumber daya panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy memiliki hak pengelolaan atas 14 WKP geothermal. Mengacu ketentuan asal 78 UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, pada akhir tahun 2014 mengembalikan 2 (dua) WKP yaitu Kotamobagu dan Gunung Iyang Argopuro ke Pemerintah karena dua WKP tersebut sampai 31 Desember 2014 statusnya masih belum tahap Eksploitasi. Selanjutnya, Pertamina mendapatkan tambahan dua (2) WKP baru yaitu Gunung Lawu (berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.35.K/30/ MEM/2016) dan Seulawah (berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang dari Gubernur Aceh No. 541/53157 tanggal 1 November 2013). PGE akan melakukan kegiatan eksporasi di kedua WKP baru tersebut.

Operasional wilayah kerja panas bumi di atas dilaksanakan melalui operasi sendiri dan kontrak kerja sama operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, wilayah kerja panas bumi PGE adalah sebagai berikut:

a. Operasi sendiri

Berikut informasi wilayah kerja yang dikelola sendiri oleh PGE:

Wilayah kerja	Lokasi	Status lapangan
Gunung Sibayak-Gunung Sinabung	Sibayak, Sumatera Utara	Produksi
Kamojang-Darajat	Kamojang, Jawa Barat	Produksi
Lahendong	Lahendong, Sulawesi Utara	Produksi
Gunung Way Panas	Ulubelu, Lampung	Produksi
Karaha-Cakrabuana	Karaha, Jawa Barat	Produksi
Lumut Balai dan Marga Bayur	Lumut Balai, Sumatera Selatan	Pengembangan
Hululais	Hululais, Bengkulu	Pengembangan
Sungai Penuh	Sungai Penuh, Jambi	Eksplorasi
Gunung Lawu	Jawa Tengah	Eksplorasi
Seulawah Agam	Aceh	Eksplorasi

b. Kontrak Operasi Bersama ("KOB")

Kontrak Operasi Bersama ("KOB") meliputi kegiatan panas bumi di wilayah kerja PGE, yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Berdasarkan KOB, PGE berhak mendapatkan *production allowances* dari kontraktor KOB yang besarnya 2,66% untuk KOB Darajat dan 4% untuk KOB Salak, Wayang Windu, Sarulla, dan Bedugul, dari laba operasi neto tahunan kontraktor KOB yang dihitung berdasarkan KOB.

Pada tanggal 31 Desember 2018, KOB PGE adalah sebagai berikut:

Wilayah Kerja	Lokasi	Status Lapangan	Kontraktor
Cibeureum - Parabakti	Salak, Jawa Barat	Produksi	Star Energy Geothermal Salak Ltd. & Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.
Pangalengan	Wayang Windu, Jawa Barat	Produksi	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.
Kamojang-Darajat	Darajat, Jawa Barat	Produksi	Star Energy Geothermal Darajat II Ltd.
Gunung Sibualbuali	Sarulla, Sumatera Utara	Produksi	Sarulla Operation Ltd.
Tabanan	Bedugul, Bali	Eksplorasi	Bali Energy Ltd.

Pendapatan PGE dari kegiatan panas bumi dikenakan pajak (bagian pemerintah) sebesar 34% untuk Wilayah Kerja yang dikelola sebelum UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi diterbitkan.

45. AUDIT PEMERINTAH

PT Pertamina EP, PT Pertamina EP Cepu, entitas anak PT Pertamina Hulu Energi

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam KKS menjadi subjek interpretasi oleh SKK Migas dan Pemerintah. Setiap tahun, pembukuan secara akuntansi dan informasi keuangan dari KKS menjadi objek audit oleh SKK Migas dan/atau Pemerintah. Klaim-klaim yang timbul dari audit tersebut akan disetujui oleh operator KKS dan dicatat dalam pembukuan secara akuntansi oleh KKS atau didiskusikan lebih lanjut dengan SKK Migas dan/atau Pemerintah. Penyelesaian atas klaim-klaim yang didiskusikan tersebut memerlukan proses negosiasi yang cukup lama.

Manajemen berpendapat bahwa hasil audit atas KKS PT Pertamina EP dan KKS dimana PT Pertamina EP Cepu dan entitas anak PT Pertamina Hulu Energi memiliki hak partisipasi tidak akan memiliki dampak material terhadap posisi keuangan dan arus kas Grup.

46. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS

a. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Penambahan aset sewa pembiayaan dalam aset tetap (Catatan 13)	19.828	103.022
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset tetap (Catatan 13)	31.500	25.611
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset minyak dan gas serta panas bumi (Catatan 14)	24.885	32.338
Penambahan aset minyak dan gas yang berasal dari provisi untuk pembongkaran dan restorasi (Catatan 23)	87.035	51.498

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

			Perubahan non-kas			
	31 Des 2017	Arus kas	Pembagian dividen	Pergerakan valas	Lainnya	31 Des 2018
Pinjaman jangka pendek	452.879	3.905.941	-	(11.785)	-	4.347.035
Utang dividen	-	(585.755)	614.939	(29.184)	-	-
Pinjaman jangka panjang	2.475.726	(209.420)	-	(46.045)	5.616	2.225.877
Obligasi	10.385.873	696.758	-	-	11.465	11.094.096
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**13.314.478**	**3.807.524**	**614.939**	**(87.014)**	**17.081**	**17.667.008**

			Perubahan non-kas			
	31 Des 2016	Arus kas	Pembagian dividen	Pergerakan valas	Lainnya	31 Des 2017
Pinjaman jangka pendek	230.293	252.810	-	(30.224)	-	452.879
Utang dividen	-	(867.751)	907.383	(39.632)	-	-
Pinjaman jangka panjang	3.439.109	(820.834)	-	(148.909)	6.360	2.475.726
Obligasi	9.772.656	-	-	-	613.217	10.385.873
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**13.442.058**	**(1.435.775)**	**907.383**	**(218.765)**	**619.577**	**13.314.478**

47. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

a. Kategori instrumen keuangan dan pengukuran nilai wajar

Berikut ini kategori aset dan liabilitas keuangan dari Grup:

	Aset Keuangan				
	Nilai wajar melalui laporan laba rugi	Tersedia untuk dijual	Pinjaman dan piutang	Dimiliki hingga jatuh tempo	Jumlah
31 Desember 2018					
Kas dan setara kas	-	-	9.112.312	-	9.112.312
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	108.915	-	108.915
Investasi jangka pendek	20.534	202.195	2.470	-	225.199
Investasi lainnya, neto	-	80.171	-	-	80.171
Penyertaan jangka panjang	-	15.991	1.530	532.370	549.891
Piutang usaha	-	-	3.231.106	-	3.231.106
Piutang Pemerintah	-	-	4.758.409	-	4.758.409
Piutang lain-lain	-	-	883.490	-	883.490
Aset tidak lancar lainnya	-	-	1.149.976	-	1.149.976
Jumlah aset keuangan	**20.534**	**298.357**	**19.248.208**	**532.370**	**20.099.469**

	Aset Keuangan				
	Nilai wajar melalui laporan laba rugi	Tersedia untuk dijual	Pinjaman dan piutang	Dimiliki hingga jatuh tempo	Jumlah
31 Desember 2017					
Kas dan setara kas	-	-	6.409.827	-	6.409.827
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	119.671	-	119.671
Investasi jangka pendek	24.898	208.894	15.490	-	249.282
Investasi lainnya, neto	-	27.328	-	-	27.328
Penyertaan jangka panjang	-	16.034	1.523	533.309	550.866
Piutang usaha	-	-	2.675.643	-	2.675.643
Piutang Pemerintah	-	-	2.155.739	-	2.155.739
Piutang lain-lain	-	-	875.514	-	875.514
Aset tidak lancar lainnya	-	-	1.292.628	-	1.292.628
Jumlah aset keuangan	**24.898**	**252.256**	**13.546.035**	**533.309**	**14.356.498**

	Liabilitas keuangan lainnya	
	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**
Pinjaman jangka pendek	(4.347.035)	(452.879)
Utang usaha	(3.676.558)	(3.949.398)
Utang Pemerintah	(2.002.825)	(1.831.245)
Beban akrual	(1.902.515)	(1.759.885)
Liabilitas jangka panjang	(2.225.877)	(2.475.726)
Utang lain-lain	(407.196)	(467.742)
Utang obligasi	(11.094.096)	(10.385.873)
Utang jangka panjang lain-lain	(149.428)	(69.812)
Jumlah liabilitas keuangan	**(25.805.530)**	**(21.392.560)**

Perusahaan

Nilai wajar dari kewajiban keuangan diestimasi menggunakan teknik penilaian yang memadai dengan input yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diamati.

Entitas Anak

Nilai wajar dari kewajiban keuangan diestimasi menggunakan teknik penilaian yang memadai dengan input yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diamati.

47. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

b. Saling hapus aset dan liabilitas keuangan

Instrumen keuangan di bawah ini bergantung pada saling hapus, pengaturan induk penyelesaian secara neto dan perjanjian serupa:

	Jumlah bruto Aset keuangan diakui	Jumlah bruto aset keuangan diakui saling hapus dalam keuangan	Jumlah neto aset keuangan disajikan dalam posisi keuangan	Terkait jumlah tidak saling hapus dalam laporan posisi keuangan		Jumlah neto
				Instrumen keuangan	Agunanan kas yang diterima	
31 Desember 2018						
Aset Keuangan						
- Piutang usaha	3.327.292	(96.186)	3.231.106	-	-	3.231.106
Liabilitas Keuangan						
- Utang usaha	3.772.744	(96.186)	3.676.558	-	-	3.676.558
31 Desember 2017						
Aset Keuangan						
- Piutang usaha	2.736.501	(60.858)	2.675.643	-	-	2.675.643
Liabilitas Keuangan						
- Utang usaha	4.010.256	(60.858)	3.949.398	-	-	3.949.398

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tunduk pada pengaturan induk untuk menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa, setiap perjanjian antara Grup dan pihak lawan memperbolehkan melakukan saling hapus antara aset keuangan dan liabilitas keuangan yang relevan ketika keduanya memilih untuk menyelesaikannya secara neto. Dengan tidak adanya pemilihan tersebut, aset dan kewajiban keuangan akan diselesaikan secara *gross*, namun, masing-masing pihak dengan pengaturan induk untuk menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa memiliki pilihan untuk menyelesaikan semua jumlah tersebut secara neto ketika terjadi wanprestasi dari pihak lain.

48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Grup memiliki beragam kegiatan usaha, sehingga memiliki potensi berbagai risiko. Program manajemen risiko yang dimiliki Grup ditujukan untuk meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja Grup.

Manajemen risiko dijalankan oleh Direksi Grup khususnya melalui Komite Manajemen Risiko (Komite), *Risk Management Unit* dan *Risk Taking Unit* untuk melakukan identifikasi, penilaian, mitigasi dan memonitor risiko-risiko Grup. Komite Manajemen Risiko menetapkan prinsip manajemen risiko secara keseluruhan meliputi risiko usaha dan risiko keuangan.

a. Risiko usaha

Aktivitas bisnis Grup dipengaruhi berbagai risiko usaha (hulu dan hilir) misalnya sebagai berikut:

i. Grup berada di bawah kendali Pemerintah dan tidak ada jaminan bahwa Pemerintah akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik Grup. Grup juga memperoleh keuntungan tertentu dengan status sebagai BUMN dan Grup tidak dapat menjamin bahwa setiap atau semua keuntungan tersebut akan terus berlanjut.
ii. Grup diaudit oleh SKK Migas, BPK, DJP dan/atau Pemerintah. Hasil audit dapat mengakibatkan klaim terhadap Grup atau berkurangnya klaim yang telah diakui Grup kepada Pemerintah.

48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko usaha (lanjutan)

Aktivitas bisnis Grup dipengaruhi berbagai risiko usaha (hulu dan hilir) misalnya sebagai berikut: (lanjutan)

iii. Grup tergantung pada mitra usaha patungan dan kontraktor independen pihak ketiga sehubungan dengan operasi eksplorasi dan produksi serta untuk melaksanakan program pengembangan Grup.
iv. Perkiraan cadangan minyak mentah, gas alam dan panas bumi milik Grup tidak pasti dan mungkin terbukti tidak akurat dari waktu ke waktu atau mungkin tidak dapat secara akurat mencerminkan tingkat cadangan yang sebenarnya, atau bahkan jika akurat, keterbatasan teknis dapat mencegah Grup untuk mendapatkan kembali cadangan ini.
v. Grup tergantung kepada kemampuan manajemen untuk mengembangkan cadangan yang ada, mengganti cadangan yang ada dan mengembangkan cadangan tambahan.
vi. Sejumlah besar pendapatan Grup berasal dari penjualan jenis BBM tertentu yang disubsidi Pemerintah.

b. Risiko keuangan

Risiko keuangan meliputi risiko pasar, kredit dan likuiditas.

i. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena adanya perubahan harga pasar.

Faktor-faktor risiko pasar tersebut adalah:

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Pendapatan Grup ditentukan berdasarkan pergerakan MOPS yang akan dibayarkan secara terpisah baik oleh masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam bentuk subsidi produk BBM dan LPG.

Adanya peraturan di Indonesia yang mengharuskan transaksi dalam mata uang Rupiah sementara sebagian besar biaya operasi khususnya untuk pengadaan minyak mentah dan produk minyak dilakukan dalam mata uang Dolar AS, dapat menyebabkan risiko nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas, piutang usaha, piutang Pemerintah, utang usaha, pinjaman jangka pendek, utang Pemerintah dan liabilitas jangka panjang

Grup memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing secara alami melalui pengelolaan arus kas secara efektif

Analisis sensitivitas

Penguatan (pelemahan) Rupiah terhadap Dolar AS akan meningkatkan (menurunkan) ekuitas dan laba rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat suku bunga, tetap tidak berubah dan mengabaikan dampak atas perkiraan penjualan dan pembelian.

	Penguatan		Pelemahan	
	Ekuitas	Laba rugi	Ekuitas	Laba rugi
31 Desember 2018				
IDR (pergerakan 3%)	364.017	358.908	(342.813)	(338.001)
31 Desember 2017				
IDR (pergerakan 3%)	272.198	267.015	(256.342)	(251.461)

48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko harga komoditas

Volatilitas harga minyak mentah, gas alam dan produk kilang serta ketidakpastian pasar untuk minyak mentah dan gas dapat berdampak buruk terhadap usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup.

Kemampuan Grup dalam menghasilkan laba dipengaruhi signifikan oleh harga dan permintaan minyak mentah, gas dan produk kilang, perbedaan antara harga perolehan minyak mentah, biaya eksplorasi, pengembangan, produksi, distribusi dan penjualan minyak mentah, gas dan produk minyak. Pasar internasional dan domestik untuk minyak mentah dan produk kilang berfluktuasi, yang ditandai dari fluktuasi harga belum lama ini. Fluktuasi harga pasar minyak mentah, gas dan produk kilang tergantung dari berbagai faktor diluar kendali Grup.

Grup ikut serta dalam kontrak komoditas fisik sebagai bagian kegiatan usaha normal. Kontrak ini bukan merupakan derivatif dan diukur pada harga perolehan. Dalam hal ini, Grup tidak terekspos risiko harga komoditas karena harga ditentukan pada saat tanggal pembelian.

(iii) Risiko tingkat suku bunga arus kas dan nilai wajar

Grup memiliki eksposur risiko suku bunga arus kas dan nilai wajar suku bunga yang disebabkan oleh posisi aset dan liabilitas keuangan, terutama untuk menjaga arus kas agar dapat memenuhi kebutuhan dana operasi dan pengadaan modal.

Aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga mengambang mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas. Aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko nilai wajar suku bunga.

Grup menyelenggarakan pendanaan secara terpusat dan memonitor pergerakan tingkat LIBOR, SIBOR, Jakarta Interbank Offered Rate (“JIBOR”) dan suku bunga pinjaman lain yang berlaku di pasar dan melakukan negosiasi untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan penempatan dana atau melakukan negosiasi tingkat bunga kepada pemberi pinjaman apabila tingkat suku bunga pinjaman menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku di pasar.

Grup dapat menggunakan fasilitas pinjaman dari bank pemerintah seperti BNI, BRI, Bank Mandiri serta bank swasta asing.

48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko tingkat suku bunga arus kas dan nilai wajar (lanjutan)

Pada saat tanggal pelaporan, aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga mengambang, suku bunga tetap dan non-bunga adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018					
	Suka bunga mengambang		Suku bunga tetap			
	Jatuh tempo kurang dari satu tahun	Jatuh tempo lebih dari satu tahun	Jatuh tempo kurang dari satu tahun	Jatuh tempo lebih dari satu tahun	Non-bunga	Jumlah
Aset						
Kas dan setara kas	5.045.495	-	4.062.697	-	4.120	9.112.312
Kas yang dibatasi penggunaannya	21.344	-	87.571	-	-	108.915
Investasi jangka pendek	677	-	132.430	-	92.092	225.199
Piutang usaha	-	-	-	-	3.231.106	3.231.106
Piutang Pemerintah	-	-	-	-	4.758.409	4.758.409
Piutang lain-lain	-	-	-	-	883.490	883.490
Investasi lainnya	-	-	-	-	80.171	80.171
Penyertaan jangka panjang	-	391.307	-	14.989	143.595	549.891
Aset tidak lancar lainnya	-	-	-	-	1.149.976	1.149.976
Jumlah aset keuangan	**5.067.516**	**391.307**	**4.282.698**	**14.989**	**10.342.959**	**20.099.469**
Pinjaman jangka pendek	(4.347.035)	-	-	-	-	(4.347.035)
Utang usaha	-	-	-	-	(3.676.558)	(3.676.558)
Utang Pemerintah	-	-	(25.247)	(795.082)	(1.182.496)	(2.002.825)
Beban akrual	-	-	-	-	(1.902.515)	(1.902.515)
Utang lain-lain	-	-	-	-	(407.196)	(407.196)
Liabilitas jangka panjang	(361.855)	(1.703.996)	(58.722)	(101.304)	-	(2.225.877)
Utang obligasi	-	-	-	(11.094.096)	-	(11.094.096)
Utang jangka panjang lain-lain	-	-	-	-	(149.428)	(149.428)
Jumlah liabilitas keuangan	**(4.708.890)**	**(1.703.996)**	**(83.969)**	**(11.990.482)**	**(7.318.193)**	**(25.805.530)**

	31 Desember 2017					
	Suka bunga mengambang		Suku bunga tetap			
	Jatuh tempo kurang dari satu tahun	Jatuh tempo lebih dari satu tahun	Jatuh tempo kurang dari satu tahun	Jatuh tempo lebih dari satu tahun	Non-bunga	Jumlah
Aset						
Kas dan setara kas	2.770.228	-	3.631.425	-	8.174	6.409.827
Kas yang dibatasi penggunaannya	75.243	-	44.428	-	-	119.671
Investasi jangka pendek	755	-	150.699	-	97.828	249.282
Piutang usaha	-	-	-	-	2.675.643	2.675.643
Piutang Pemerintah	-	-	-	-	2.155.739	2.155.739
Piutang lain-lain	-	-	-	-	875.514	875.514
Investasi lainnya	-	-	-	-	27.328	27.328
Penyertaan jangka panjang	-	391.307	-	20.268	139.291	550.866
Aset tidak lancar lainnya	-	-	-	-	1.292.628	1.292.628
Jumlah aset keuangan	**2.846.226**	**391.307**	**3.826.552**	**20.268**	**7.272.145**	**14.356.498**
Liabilitas						
Pinjaman jangka pendek	(452.879)	-	-	-	-	(452.879)
Utang usaha	-	-	-	-	(3.949.398)	(3.949.398)
Utang Pemerintah	-	-	(24.680)	(780.626)	(1.025.939)	(1.831.245)
Beban akrual	-	-	-	-	(1.759.885)	(1.759.885)
Utang lain-lain	-	-	-	-	(467.742)	(467.742)
Liabilitas jangka panjang	(315.951)	(1.952.671)	(50.008)	(157.096)	-	(2.475.726)
Utang obligasi	-	-	-	(10.385.873)	-	(10.385.873)
Utang jangka panjang lain-lain	-	(5.083)	-	-	(64.729)	(69.812)
Jumlah liabilitas keuangan	**(768.830)**	**(1.957.754)**	**(74.688)**	**(11.323.595)**	**(7.267.693)**	**(21.392.560)**

48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko tingkat suku bunga arus kas dan nilai wajar (lanjutan)

Perubahan 30 basis poin atas tingkat suku bunga mengambang pada tanggal pelaporan akan berpengaruh terhadap laba sebelum pajak sebesar jumlah di bawah. Analisis ini mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, terutama nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

Dampak terhadap:	**+30 bp meningkat**	**-30 bp menurun**
Laba sebelum pajak	(2.865)	2.865
Sensitivitas arus kas, neto	**(2.865)**	**2.865**

ii. Risiko kredit

Grup memiliki risiko kredit signifikan yang berasal dari piutang yang belum dibayar, kas dan setara kas, serta investasi pada efek utang. Pada sebagian besar transaksinya, Grup menggunakan bank dan lembaga keuangan yang secara independen dinilai dengan peringkat AAA, AA+, AA, AA-, A+, A dan A-.

Untuk penjualan non-tunai, Grup menerapkan sistem tata kerja yang mengatur mekanisme persetujuan kredit. Dalam praktik tersebut, beberapa penjualan kredit Grup telah disertai dengan agunan/jaminan bank. Untuk penjualan kredit lainnya tanpa jaminan, Grup memastikan dilakukannya evaluasi *credit scoring*, evaluasi batasan kredit dan persetujuan kredit sebelum melakukan penjualan ke pelanggan.

Grup mempunyai *Credit Management System* untuk memonitor penggunaan batasan kredit dan pemblokiran otomatis untuk tagihan yang melewati tanggal jatuh tempo mulai dari tujuh hari. Grup mengenakan sanksi keterlambatan pembayaran dalam sebagian kontrak penjualan yang didasarkan pada hasil evaluasi kredit masing-masing pelanggan.

(i) Pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi

Aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai

Kualitas kredit dari aset keuangan Grup yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, dianalisis dengan mengacu pada peringkat kredit yang dikeluarkan oleh pemeringkat eksternal PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau mengacu pada informasi historis tingkat risiko gagal bayar debitur. Rincian kualitas aset keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	**31 Desember 2017**
Kas dan setara kas		
Diperingkat		
Peringkat AAA	7.285.583	5.654.816
Peringkat AA+	1.139.349	426.347
Peringkat AA	50.028	26.770
Peringkat AA-	3.528	2.581
Peringkat A+	1.381	31.699
Peringkat A	20.380	147.282
Peringkat A-	21.472	-
Tidak diperingkat	590.591	120.332
Jumlah	**9.112.312**	**6.409.827**

48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kas yang dibatasi penggunaannya		
Diperingkat		
Peringkat AAA	104.230	107.688
Peringkat A+	-	5
Peringkat A	-	224
Peringkat A-	462	-
Tidak diperingkat	4.223	11.754
Jumlah	**108.915**	**119.671**
Investasi jangka pendek		
Diperingkat		
Peringkat AAA	25.332	19.022
Peringkat AA+	1.027	1.145
Peringkat AA	4.109	10.108
Peringkat AA-	3.129	3.085
Peringkat A	5.357	3.522
Peringkat A-	2.330	749
Peringkat BBB+	-	1.870
Peringkat BBB	3.887	-
Peringkat BBB-	41.948	44.149
Tidak diperingkat	138.080	165.632
Jumlah	**225.199**	**249.282**
Penyertaan jangka panjang		
Diperingkat		
Peringkat AAA	2.597	7.198
Peringkat AA	5.897	6.320
Peringkat BBB-	4.950	4.950
Tidak diperingkat	552	221
Jumlah	**13.996**	**18.689**
Piutang usaha		
Pihak ketiga		
> US$10.000 - dengan riwayat kredit baik	1.335.703	945.008
< US$10.000	362	726
Pihak-pihak berelasi	675.922	251.453
Jumlah	**2.011.987**	**1.197.187**

48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga		
> US$10.000 - dengan riwayat kredit baik	661.979	570.683
< US$10.000	31	82
Pihak-pihak berelasi	148.777	253.389
Jumlah	**810.787**	**824.154**
Aset lain-lain		
Pihak-pihak ketiga	80.287	152.791
Pihak-pihak berelasi	54.228	80.349
Jumlah	**134.515**	**233.140**

Aset keuangan yang sudah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang usaha		
- Kurang dari 3 bulan	431.868	227.439
- 3 - 6 bulan	61.194	212.778
- 6 -12 bulan	21.138	10.231
- 12 - 24 bulan	11.040	1.201
- > 24 bulan	11.561	2.194
Jumlah	**536.801**	**453.843**
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga		
- Kurang dari 3 bulan	42.912	31.832
- 3 - 6 bulan	1.699	642
- 6 -12 bulan	872	160
- 12 - 24 bulan	10.674	524
- > 24 bulan	5.476	921
Sub jumlah	61.633	34.079

48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Aset keuangan yang sudah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi		
- Kurang dari 3 bulan	9	141
- 3 - 6 bulan	7	2
- 6 -12 bulan	49	1.332
- 12 - 24 bulan	15	68
- >24 bulan	24	11
Sub jumlah	104	1.554
Jumlah	**61.737**	**35.633**
Aset lain-lain		
Pihak-pihak ketiga	-	90.995
Pihak-pihak berelasi	10.679	-
Jumlah	**10.679**	**90.995**

Piutang usaha

Piutang usaha dari pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi yang sudah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan terkait dengan pelanggan yang tidak memiliki sejarah gagal bayar dalam dua tahun terakhir. Beberapa piutang usaha dari pelanggan tersebut juga telah disertai dengan agunan/jaminan bank.

Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang usaha yang sudah lewat jatuh tempo antara 12-24 bulan dan lebih dari 24 bulan terutama berasal dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sejumlah US$3.196.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang usaha		
- Lancar	453.510	731.355
- Kurang dari 3 bulan	182.954	179.382
- 3 - 6 bulan	70.803	81.009
- 6 -12 bulan	10.541	26.250
- 12 - 24 bulan	45.159	69.412
- > 24 bulan	180.082	195.558
	943.049	1.282.966
Penurunan nilai	(260.731)	(258.353)
Jumlah	**682.318**	**1.024.613**

48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (lanjutan)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang lain-lain		
Pihak-pihak berelasi		
- Kurang dari 3 bulan	-	110
- 3 - 6 bulan	-	31
- 6 - 12 bulan	297	1
- 12 - 24 bulan	-	1
- > 24 bulan	1.426	1.434
	1.723	1.577
Pihak ketiga		
- Kurang dari 3 bulan	6.169	5.651
- 3 - 6 bulan	673	4.613
- 6 -12 bulan	975	6.734
- 12 - 24 bulan	8.362	4.112
- > 24 bulan	12.631	13.057
	28.810	34.167
	30.533	35.744
Penurunan nilai	(19.567)	(20.017)
Jumlah	**10.966**	**15.727**
Aset lain-lain		
Pihak-pihak berelasi		
- > 24 bulan	18.190	19.394
Pihak ketiga		
- 0 - 12 bulan	9.165	-
- 12 - 24 bulan	-	17.023
	27.355	36.417
Penurunan nilai	(27.355)	(36.417)
Jumlah	**-**	**-**

Piutang usaha

Piutang usaha dari pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar US$3.491.837 (2017: US$2.933.996) telah diturunkan nilainya sebesar US$260.731 (2017: US$258.353), dengan saldo piutang usaha terbesar dari institusi Pemerintah dan BUMN, yaitu TNI/Kemhan sebesar US$318.142 (Catatan 41a).

48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Piutang lain-lain

Piutang lain-lain dari pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar US$903.057 dan US$895.531 telah diturunkan nilainya masing-masing sebesar US$19.567 dan US$20.017.

(ii) Pemerintah

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Perusahaan:		
Piutang atas pengakuan pendapatan Selisih Harga	2.924.148	-
Piutang atas penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg	1.147.538	1.404.911
Piutang atas penggantian biaya subsidi jenis BBM tertentu	175.556	473.928
Piutang atas penggantian biaya subsidi minyak tanah	16.828	-
Piutang imbalan jasa pemasaran	72.489	49.902
Piutang konversi minyak tanah	10.626	-
Piutang lain-lain	-	102
Sub jumlah	4.347.185	1.928.843
Entitas anak:		
PEP		
- DMO *fees*	106.398	90.930
- *Underlifting*	18.942	-
PHE		
- DMO *fees*	15.414	25.859
- *Underlifting*	25.730	46.480
PEPC		
- *Underlifting*	224.904	174.563
PHI		
- DMO *fees*	18.780	-
- *Underlifting*	1.056	-
Sub jumlah	411.224	337.832
Jumlah	**4.758.409**	**2.266.675**

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Perusahaan:		
Penyisihan penurunan nilai	-	(110.936)
Jumlah	**4.758.409**	**2.155.739**

48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

iii. Risiko likuiditas

Tingkat likuiditas yang diperlukan Grup untuk kegiatan operasi tidak pasti dan hal ini dapat berpengaruh buruk terhadap operasi Grup apabila Grup tidak mempunyai modal kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kas dan operasi. Hal ini dapat terjadi antara lain karena keterlambatan pembayaran subsidi dari Pemerintah.

Grup menggunakan kas dalam jumlah yang cukup signifikan operasinya, terutama untuk pengadaan komoditas dan bahan baku. Salah satu biaya operasi utama adalah pembelian bahan untuk pengolahan di kilang. Fluktuasi harga minyak mentah, gas bumi dan produk turunannya dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing menyebabkan ketidakpastian jumlah modal kerja dan biaya untuk kegiatan hulu dan hilir dari Grup.

Grup mendanai kegiatan operasinya terutama melalui arus kas dari kegiatan operasi, dimana bagian yang signifikan terdiri dari penjualan, pembayaran subsidi, fasilitas modal kerja jangka pendek (termasuk cerukan bank, L/C dan *revolving credit*) dan pinjaman bank jangka panjang. Sesuai dengan penugasan PSO, Grup harus menyampaikan klaim subsidi kepada Pemerintah setiap akhir bulan untuk BBM subsidi yang didistribusikan selama bulan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 Grup memiliki saldo kas dan setara kas masing-masing sebesar US$9.112.312 dan US$6.409.827 (Catatan 6). Grup mengelola risiko likuiditas dengan melakukan monitor terhadap estimasi dan realisasi arus kas dan menyesuaikan jatuh tempo antara piutang usaha dan utang usaha.

Tabel di bawah ini merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto:

	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Jumlah
31 Desember 2018				
Liabilitas keuangan				
Pinjaman jangka pendek	4.347.035	-	-	4.347.035
Utang usaha	3.676.558	-	-	3.676.558
Utang Pemerintah	1.211.056	262.428	531.845	2.005.329
Beban akrual	1.902.515	-	-	1.902.515
Utang lain-lain	1.257.437	-	-	1.257.437
Liabilitas jangka panjang	456.506	1.530.224	343.001	2.329.731
Utang obligasi	611.409	5.886.768	14.088.112	20.586.289
Utang jangka panjang lain-lain	-	120.591	58.314	178.905
Jumlah	**13.462.516**	**7.800.011**	**15.021.272**	**36.283.799**
31 Desember 2017				
Liabilitas keuangan				
Pinjaman jangka pendek	452.879	-	-	452.879
Utang usaha	3.949.398	-	-	3.949.398
Utang Pemerintah	1.138.463	255.460	437.644	1.831.567
Beban akrual	1.759.885	-	-	1.759.885
Utang lain-lain	1.178.119	-	-	1.178.119
Liabilitas jangka panjang	394.188	1.293.419	844.763	2.532.370
Utang obligasi	575.969	4.625.314	14.773.197	19.974.480
Utang jangka panjang lain-lain	-	84.373	-	84.373
Jumlah	**9.448.901**	**6.258.566**	**16.055.604**	**31.763.071**

48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Manajemen permodalan

Kebijakan direksi adalah mempertahankan basis modal yang kuat untuk menjaga keyakinan investor, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Modal terdiri dari modal saham biasa, laba ditahan, kepentingan non-pengendali dan komponen ekuitas lainnya. Direksi memastikan tingkat pengembalian modal dan tingkat dividen yang dibagikan.

Grup sebagai entitas yang bergerak dalam bisnis minyak dan gas bumi memonitor permodalan berdasarkan rasio jumlah utang terhadap modal. Utang neto dihitung dari jumlah pinjaman termasuk jangka pendek dan jangka panjang yang mempunyai bunga, sedangkan modal dihitung dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga rata-rata tertimbang atas pinjaman dengan bunga (kecuali liabilitas dengan *imputed interest*) untuk 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 5,17%, dan 4,92%.

Rasio utang terhadap modal milik Grup yang disesuaikan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jumlah liabilitas (berbunga)	18.487.337	13.707.878
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	27.598.721	25.124.718
Rasio utang terhadap ekuitas	66,99%	54,56%
Rasio jumlah modal sendiri terhadap jumlah aset[*)]	40,31%	37,85%
Rasio tingkat pengembalian modal[*)]	10,08%	12,62%

[*)] Sesuai dengan definisi yang diatur dalam KEP-100/MBU/2002

d. Nilai wajar

Berikut aset keuangan Grup yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2018:

	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Jumlah
Aset keuangan				
Investasi jangka pendek	177.758	46.764	677	225.199
Investasi lainnya, neto	-	-	80.171	80.171
Jumlah	**177.758**	**46.764**	**80.848**	**305.370**

Pada tanggal 31 Desember 2018, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Level 1, Level 2 dan Level 3.

Berikut nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka panjang pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017:

	Jumlah tercatat		Nilai wajar	
	31 Des 2018	31 Des 2017	31 Des 2018	31 Des 2017
Liabilitas jangka panjang (Catatan 20)	2.225.877	2.475.726	2.329.464	2.478.169
Utang obligasi (Catatan 21)	11.094.096	10.385.873	11.101.427	11.504.854
Jumlah aset keuangan	**13.319.973**	**12.861.599**	**13.430.891**	**13.983.023**

Nilai wajar dari liabilitas jangka panjang dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga yang dikenakan pada masing-masing liabilitas jangka panjang Perusahaan. Nilai wajar utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar pada tanggal pelaporan keuangan.

49. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Komitmen KKS

Sesuai dengan KKS, PT Pertamina EP wajib mengembalikan minimum 10% dari wilayah kerja awal kepada Pemerintah pada saat atau sebelum akhir tahun kontrak ke sepuluh sejak tanggal efektif KKS. Pada tanggal 18 Juli 2013 PT Pertamina EP telah mengembalikan sebesar 18,02% dari wilayah kerja awal kepada Pemerintah.

PT Pertamina EP wajib membayar bonus kepada Pemerintah sejumlah US$1.500 dalam 30 hari setelah produksi kumulatif minyak dan gas bumi mencapai 1.500 MMBOE sejak tanggal efektif KKS.

Jumlah produksi kumulatif minyak dan gas bumi PT Pertamina EP hingga tanggal 31 Desember 2018 belum mencapai 1.500 MMBOE.

Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Pertamina Hulu Energi memiliki 15 komitmen eksplorasi sehubungan dengan kontrak bagi hasil PSC dengan nilai komitmen antara US$11.750 sampai dengan US$225.000 dan 10 komitmen eksplorasi sehubungan dengan kontrak *Gross Split* dengan nilai komitmen antara US$15.550 sampai dengan US$239.300.

PT Pertamina Hulu Indonesia memiliki komitmen pengeluaran dan rencana kerja dengan nilai komitmen antara US$141.300 sampai dengan US$703.000 dengan jangka waktu enam tahun sejak tanggal efektif kontrak.

b. Komitmen modal

Grup memiliki komitmen pengeluaran barang modal dalam menjalankan usaha normalnya. Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah komitmen pengeluaran barang modal yang belum terealisasi sebesar US$1.341.378.

c. Komitmen sewa operasi - Grup sebagai pihak yang menyewa

Jumlah pembayaran sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan berjumlah:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kurang dari satu tahun	493.867	465.882
Antara satu sampai lima tahun	559.313	571.611
Lebih dari lima tahun	33.284	24.160
Jumlah	**1.086.464**	**1.061.653**

Grup menyewa beberapa kapal, gedung kantor, kendaraan dan fasilitas IT atas dasar sewa operasi. Sewa umumnya berlaku selama sepuluh tahun, dengan opsi perpanjangan masa sewa.

Pada 31 Desember 2018 dan 2017, beban operasi sewa masing-masing sebesar US$343.868 dan US$782.362 (Catatan 32, 36, dan 37).

d. Perjanjian jual beli gas

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan melalui PT Pertamina EP memiliki komitmen untuk mengirimkan gas sebesar 695.419 MMSCF kepada beberapa pelanggan. Gas tersebut akan dikirimkan secara periodik dari tahun 2017 sampai 2027.

49. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Perjanjian jual beli gas (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan melalui PT Pertamina Hulu Energi memiliki kontrak-kontrak perjanjian jual beli gas yang signifikan kepada beberapa pelanggan, dengan volume gas masing-masing kontrak senilai antara 0,8 TBTU hingga 1.418 TBTU. Kontrak-kontrak tersebut akan berakhir antara tahun 2019 sampai 2031.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan melalui PT Pertamina Hulu Indonesia memiliki kontrak-kontrak perjanjian jual beli gas yang signifikan kepada beberapa pelanggan, dengan volume gas masing-masing kontrak senilai antara 0,8 TBTU hingga 183.13 TBTU. Kontrak-kontrak tersebut akan berakhir antara tahun 2018 sampai 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan melalui PGN memiliki 37 PJBG dengan wilayah kerja di Sumatera, Jawa dan Kalimantan serta masa kontrak selama 10 - 30 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 2002 sampai tahun 2018 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2019 sampai tahun 2037.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu, Perusahaan melakukan amandemen penurunan kontrak harga gas dalam perjanjian jual beli gas dengan industri tertentu dan berlaku efektif sejak 30 Januari 2017.

e. Komitmen kontrak pembelian LNG jangka panjang

Perusahaan menandatangani Kontrak Pembelian LNG Jangka Panjang dengan beberapa penjual untuk bisnis niaga LNG dengan jumlah pembelian minimum pertahun masing-masing kontrak sebanyak antara 0,1 juta ton hingga 1,5 juta ton, dengan harga beli yang terhubung dengan harga pasar tertentu pada saat pengambilan LNG tersebut. Jangka waktu kontrak tersebut dari tahun 2018 sampai 2044.

f. Perjanjian pengalihan 10% *participating interest* ("PI") di KBH Blok ONWJ

Pada tanggal 19 Desember 2017 PT PHE ONWJ dan PT Migas Hulu Jabar ONWJ ("MUJ ONWJ") menandatangi perjanjian pengalihan 10% PI di KBH Blok ONWJ dari PT PHE ONWJ ke PT Migas Hulu Jabar ONWJ. Perjanjian tersebut berlaku efektif pada tanggal diterimanya persetujuan dari Menteri ESDM atau pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dalam surat persetujuannya.

Pada tanggal 17 Mei 2018 persetujuan atas pengalihan PI 10% di wilayah kerja ONWJ telah disetujui oleh Menteri ESDM melalui Surat dari Menteri ESDM kepada Kepala SKK Migas No. 2803/13/MEM.M/2018. Dimana dinyatakan dalam surat tersebut bahwa tanggal peralihan PHE ONWJ kepada MUJ ONWJ adalah sejak tanggal efektif KBH Blok ONWJ.

Pada tanggal 17 Desember 2018, nilai pengalihan PI tersebut ditetapkan melalui Surat dari Menteri ESDM kepada Kepala SKK Migas No. 3149/12/MEM.M/2018. Nilai pengalihan dihitung dari kewajiban BUMD atas porsi besaran jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) untuk pelaksanaan komitmen kerja pasti dan porsi pembayaran *unrecovered cost* oleh Kontraktor KKS baru kepada Kontraktor KKS lama dengan nilai sebesar US$43.292.

49. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Perkara hukum

i. Perkara hukum PT Golden Spike Energy Indonesia ("GSEI")

PT Golden Spike Energy Indonesia ("GSEI") dan PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE RT), masing-masing adalah pemegang *participating interest* sebesar 50% di Blok Raja.

Pada tanggal 5 April 2013, GSEI mengajukan gugatan terhadap PHE RT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar kegiatan selama masa eksplorasi yang pendanaannya merupakan kewajiban GSEI adalah kegiatan operasi *sole risk* sehingga GSEI berhak atas kompensasi.

Proses pengadilan, banding, kasasi dan arbitrase telah diselesaikan. Pada tanggal 17 Februari 2017, Arbitrase ICC telah menerbitkan *Third and Final Award* yang memutuskan bahwa PHE RT memenangkan perkara tersebut.

Putusan ICC tersebut telah didaftarkan oleh Majelis Arbiter dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor: 02/Pdt/Arb-Int/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Juni 2017.

Selanjutnya untuk melakukan eksekusi terhadap *Third and Final Award* di atas, PHE RT telah mengajukan permohonan eksekuatur ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2017 dan sudah direspon pada tahun 2018.

Sampai dengan tanggal laporan konsolidasian ini, PHE RT sedang dalam proses untuk memasukkan '*aanmaning*' ke PN Jakarta Pusat.

ii. Gugatan PT Bakrie Harper Corporation

Pada tanggal 20 November 1996, Perusahaan mengadakan Perjanjian *Build and Rent* berupa Pembangunan, Pengoperasian, Penyewaan dan Pemeliharaan Pipanisasi Kertapati-Jambi ("Pekerjaan Proyek Pipanisasi") No. SPB-1474A/C0000/96 dengan PT Bakrie Harper (dahulu PT Bakrie Harper Corporation - "Bakrie"). Jumlah Nilai Pekerjaan Proyek Pipanisasi dan biaya sewa masing-masing adalah US$144.068 dan US$16.703 (tidak termasuk PPN). Jangka waktu sewa untuk proyek tersebut adalah 10 tahun dengan tanggal mulai pengembangan proyek pada 19 Mei 1997.

Karena krisis moneter pada tahun 1998, Perusahaan menunda Pekerjaan Proyek Pipanisasi dan menegosiasikan kembali nilai proyek. Pada tahun 2001, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Deloitte Touche ("Deloitte") sebagai pihak independen untuk mengaudit biaya pasar yang adil dari Pekerjaan Proyek Pipanisasi. Berdasarkan laporan audit Deloitte yang dikeluarkan pada tahun 2001, biaya pasar yang adil dan biaya sewa masing-masing adalah US$92.125 dan US$7.616.

Pada tanggal 27 Agustus 2002, Pertamina menunjuk BPKP untuk melakukan uji tuntas untuk mendapatkan nilai pasar yang wajar atas biaya yang dikeluarkan oleh Bakrie untuk proyek tersebut sejak tanggal mulai hingga tanggal ketika pengembangan proyek berhenti. Berdasarkan laporan BPKP yang dikeluarkan pada 23 Desember 2003, tercatat bahwa kemajuan fisik Pekerjaan Proyek Pipanisasi adalah 10,6853% dengan nilai wajar US$15.394 tidak termasuk kompensasi untuk biaya investasi yang dikeluarkan. BPKP juga mencatat bahwa Proyek Pekerjaan Pipa tidak lagi ekonomis dan tidak layak untuk dilanjutkan.

49. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Perkara hukum (lanjutan)

ii. Gugatan PT Bakrie Harper Corporation (lanjutan)

Pada tanggal 9 Juni 2017, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Jumlah yang diklaim oleh Bakrie adalah US$15.394 untuk pekerjaan kemajuan fisik dan US$17.307 untuk 14 tahun bunga. Berdasarkan putusan BANI No. 969/VIII/ARB-BANI/2017 tanggal 21 Februari 2018, diketahui bahwa Perjanjian Pekerjaan Proyek Pipanisasi telah berakhir, kemajuan fisik Pekerjaan Proyek Pipanisasi adalah 10,6853% dan Perusahaan harus membayar kepada Bakrie sebesar US$15.856, yang terdiri dari kompensasi dan jumlah bunga kepada Bakrie masing-masing sebesar US$15.394 dan US$462.

Pada tanggal 16 April 2018, Perusahaan menunjuk Kantor Jaksa Pengacara Negara ("JPN") cq Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia ("Jamdatun") untuk memberikan bantuan hukum dan mengajukan gugatan hukum terkait putusan BANI. Perusahaan bersedia untuk menyelesaikan putusan BANI dengan syarat pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan didasarkan pada laporan BPKP dan harus didukung oleh dokumen yang memadai, termasuk hak atas tanah dengan nilai yang sama dengan pembayaran yang akan dilakukan oleh Perusahaan. Gugatan Pembatalan telah diajukan Jamdatun melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun ditolak. Berdasarkan saran dari Jaksa Pengacara Negara, dalam hal Bakrie mengajukan upaya eksekusi putusan BANI, Pertamina memiliki opsi untuk mengajukan gugatan perlawanan atas eksekusi.

h. Kontrak memberatkan

Penugasan PSO untuk penyediaan BBM

Perusahaan memiliki hubungan dengan Pemerintah untuk penugasan PSO untuk memasok produk bahan bakar tertentu. Perusahaan dan Pemerintah setuju untuk menggunakan *Mean of Platts Singapore* ("MOPS") sebagai dasar harga pasar penggunaan produk bahan bakar untuk menghitung jumlah subsidi. Namun demikian, HJE untuk produk bahan bakar tertentu yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM selama tahun 2017 dan 2018 tidak dapat mencakup semua biaya untuk pengadaan dan mendistribusikan produk bahan bakar yang mengakibatkan kerugian dari penjualan produk bahan bakar PSO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

50. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Addendum perjanjian pengalihan dan pengelolaan KBH Blok ONWJ

Pada tanggal 6 Februari 2019, PHE ONWJ dan MUJ ONWJ telah menandatangani addendum atas perjanjian pengalihan dan pengelolaan 10% di KBH Blok ONWJ. Dimana akumulasi bagi hasil bersih dan kewajiban nilai pengalihan PI 10% MUJ ONWJ terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar US$16.302.702 (nilai penuh). Penyelesaian atas kewajiban tersebut telah diselesaikan pada tanggal 8 Februari 2019.

Dimulai sejak tanggal pengalihan, pembayaran bagi hasil produksi yang menjadi bagian MUJ akan dilakukan oleh PHE ONWJ setiap bulan, setelah dikurangi bagian MUJ atas biaya operasi ONWJ PSC dan kewajiban lainnya sesuai dengan KBH.

Dalam hal bagian bagi hasil produksi MUJ pada bulan berjalan tidak mencukupi bagian biaya operasi yang harus dibayarkan oleh MUJ, kekurangan pembayaran biaya operasi tersebut akan diperhitungkan di bulan-bulan berikutnya.

50. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

a. Addendum perjanjian pengalihan dan pengelolaan KBH Blok ONWJ (lanjutan)

Untuk menjamin pendapatan MUJ, bagi hasil produksi serta biaya operasi bagian MUJ, dihitung menggunakan persentase provisional untuk setahun penuh sesuai lampiran addendum perjanjian. Jika akumulasi biaya operasi yang harus dibayarkan oleh MUJ ke PHE ONWJ pada suatu tahun melebihi bagian MUJ atas bagi hasil produksi, PHE ONWJ akan memberikan pembayaran kepada MUJ ONWJ sebesar US$1 (nilai penuh) setiap bulan pada tahun yang berikutnya.

b. KBH *gross split* Blok Maratua

Pada tanggal 18 Februari 2019, PHE Lepas Pantai Bunyu menandatangani KBH *Gross Split* blok Maratua dengan jangka waktu kontrak 30 tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan KBH tersebut.

c. Penarikan fasilitas pinjaman bank jangka pendek

Pada tanggal 31 Oktober 2018, PGN dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia memperpanjang perjanjian fasilitas Cash Loan sebesar US$120.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019. Pada tanggal 4 Maret 2019, PGN telah melakukan penarikan fasilitas ini sebesar US$120.000.000 dengan tingkat bunga LIBOR 3-Month ditambah dengan spread.

d. Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan RUPS No. SK-86/MBU/04/2019 tanggal 30 April 2019, Gatot Trihargo diangkat sebagai Komisaris baru PT Pertamina (Persero). Berdasarkan keputusan RUPS yang sama, Sahala Lumban Gaol dan Ahmad Bambang diberhentikan secara hormat dari jabatan masing-masing sebagai Dewan Komisaris Pertamina. Sehingga, susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	Tanri Abeng
Wakil Komisaris Utama	Arcandra Tahar
Komisaris	Alexander Lay
Komisaris	Ego Syahrial
Komisaris	Gatot Trihargo
Komisaris	Suahasil Nazara

51. PENYAJIAN DAN PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan pemutakhiran atas pengungkapan transaksi dan basis pencatatan pengakuan pendapatan dan piutang dari pemerintah atas kekurangan penerimaan yang berasal dari selisih Harga Jual Eceran ("HJE") formula dan HJE penetapan JBKP Premium di luar wilayah Jawa, Madura, dan Bali ("Non Jamali") tahun 2018, yang mengungkapkan dan menegaskan basis pencatatan transaksi tersebut di atas berdasarkan: (i) laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.31/AUDITAMA VII/PDTT/05/2019 bertanggal 20 Mei 2019, yang diterima oleh Perusahaan pada tanggal 23 Mei 2019 ("Laporan BPK"), dan (ii) surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-430/MK.02/2019 bertanggal 28 Mei 2019, yang diterima oleh Perusahaan pada tanggal 28 Mei 2019 ("Surat Menteri Keuangan"), sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang "Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak" dan kebijakan akuntansi terkait Perusahaan yang berbasis pada Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Sebelum dilakukannya penyajian dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut, pengakuan pendapatan dan piutang dari pemerintah atas kekurangan penerimaan yang berasal dari selisih HJE formula dan HJE penetapan JBKP Premium Non Jamali tahun 2018 dilakukan sebelum diterimanya Laporan BPK dan Surat Menteri Keuangan. Pengakuan tersebut dilakukan berdasarkan: (i) surat BPK No. 126/S/XX/05/2019 bertanggal 17 Mei 2019 mengenai penyampaian konsep laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penjualan dan pendistribusian BBM dan LPG tabung 3kg serta penghitungan subsidi JBT dan LPG 3kg tahun 2018 pada Perusahaan, PT AKR Corporindo Tbk., dan instansi terkait lainnya, dan (ii) surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-330/MBU/05/2019 bertanggal 17 Mei 2019 mengenai pembukuan selisih harga jual eceran JBT dan JBKP Non-Jamali serta kekurangan penerimaan JBT minyak tanah dengan nilai sesuai dengan konsep laporan hasil pemeriksaan BPK (lihat Catatan 9a).

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Pertamina (Persero), Entitas Induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	4.567.089	2.612.796
Kas yang dibatasi penggunaannya	3.344	12.590
Piutang usaha		
Pihak berelasi	3.507.946	2.866.739
Pihak ketiga	1.474.122	626.361
Piutang Pemerintah	1.423.038	1.154.793
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	3.725	43.436
Pihak ketiga	81.805	4.622
Persediaan	5.984.287	5.730.428
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	386.989	418.255
Beban dibayar di muka dan uang muka	250.272	159.458
Investasi lainnya	80.171	27.328
Jumlah Aset Lancar	**17.762.788**	**13.656.806**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	1.166.255	996.527
Penyertaan jangka panjang	19.217.870	16.896.906
Aset tetap	8.494.968	8.183.446
Piutang Pemerintah	2.924.148	663.114
Pajak dibayar di muka - dikurangi bagian tidak lancar	117.803	164.266
Aset tidak lancar lainnya	3.085.624	3.540.800
Jumlah Aset Tidak Lancar	**35.006.668**	**30.445.059**
JUMLAH ASET	**52.769.456**	**44.101.865**

PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman jangka pendek	4.247.006	255.268
Utang usaha		
Pihak berelasi	3.492.122	2.765.645
Pihak ketiga	2.545.617	3.102.747
Utang Pemerintah - bagian lancar	1.010.478	965.099
Utang pajak		
Pajak penghasilan	19.684	-
Pajak lain-lain	148.429	151.877
Beban akrual	590.664	589.937
Liabilitas jangka panjang - bagian lancar	388.426	322.562
Utang obligasi		
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	50.382	69.626
Pihak ketiga	563.039	349.782
Pendapatan tangguhan - bagian lancar	5.545	3.177
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**13.061.392**	**8.575.720**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang Pemerintah - dikurangi bagian lancar	341.659	304.128
Liabilitas jangka panjang - dikurangi bagian lancar	895.214	1.350.300
Utang obligasi	9.197.526	8.498.447
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.542.931	1.921.710
Pendapatan tangguhan - dikurangi bagian lancar	31.044	36.976
Utang jangka panjang lain-lain	100.969	94.445
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**12.109.343**	**12.206.006**
JUMLAH LIABILITAS	**25.170.735**	**20.781.726**

PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Modal dasar – 600.000.000 (2018) dan 200.000.000 (2017) saham biasa - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham;		
Ditempatkan dan disetor – 171.227.044 saham (2018), 133.090.697 saham (2017)	16.191.204	13.417.047
Tambahan modal disetor	(924.296)	2.736
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	401.120	1.361
Komponen ekuitas lainnya	607.564	487.699
Saldo laba		
- Ditentukan penggunaannya	8.796.357	6.871.101
- Belum ditentukan penggunaannya	2.526.772	2.540.195
JUMLAH EKUITAS	**27.598.721**	**23.320.139**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**52.769.456**	**44.101.865**

PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya:		
Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak	35.665.976	32.201.911
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah	5.632.468	3.572.084
Penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi dan produk minyak	1.673.026	911.370
Imbalan jasa pemasaran	15.432	25.474
Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya	3.211.117	109.283
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	**46.198.019**	**36.820.122**
Beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya:		
Beban pokok penjualan	(44.315.959)	(33.233.974)
Beban eksplorasi	-	(619)
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA	**(44.315.959)**	**(33.234.593)**
LABA BRUTO	**1.882.060**	**3.585.529**
Beban penjualan dan pemasaran	(1.794.514)	(1.697.105)
Beban umum dan administrasi	(719.478)	(959.451)
Laba selisih kurs, neto	9.234	40.367
Pendapatan keuangan	149.244	148.704
Beban keuangan	(433.646)	(341.217)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama	3.387.233	2.014.816
Pendapatan/(beban) lain-lain, neto	249.910	(497.780)
	847.983	**(1.291.666)**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**2.730.043**	**2.293.863**

PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**2.730.043**	**2.293.863**
(Beban)/manfaat pajak penghasilan		
Pajak kini	(372.999)	(289.507)
Pajak tangguhan	169.728	535.839
Jumlah (beban)/manfaat pajak penghasilan, neto	(203.271)	246.332
LABA TAHUN BERJALAN	**2.526.772**	**2.540.195**
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak):		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto	234.631	(122.732)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak):		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(59.338)	1.345
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(69.138)	(55.532)
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, NETO SETELAH PAJAK	**106.155**	**(176.919)**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.632.927**	**2.363.276**

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	Komponen ekuitas lainnya		Saldo laba		Jumlah Ekuitas
				Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Ekuitas lainnya	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 1 Januari 2017/ 31 Desember 2016 (disajikan kembali)	**13.417.047**	**2.736**	**1.361**	**(304.201)**	**968.818**	**4.631.441**	**3.147.043**	**21.864.245**
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	-	1.225	-	-	-	1.225
Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-	(55.421)	-	-	(55.421)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti, neto	-	-	-	-	(122.722)	-	-	(122.722)
Pembagian dividen	-	-	-	-	-	-	(907.383)	(907.383)
Alokasi cadangan lain	-	-	-	-	-	2.239.660	(2.239.660)	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	2.540.195	2.540.195
Saldo 31 Desember 2017/ (disajikan kembali)	**13.417.047**	**2.736**	**1.361**	**(302.976)**	**790.675**	**6.871.101**	**2.540.195**	**23.320.139**

PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	Komponen ekuitas lainnya		Saldo laba		Jumlah Ekuitas
				Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Ekuitas lainnya	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 1 Januari 2018/ 31 Desember 2017	**13.417.047**	**2.736**	**1.361**	**(302.976)**	**790.675**	**6.871.101**	**2.540.195**	**23.320.139**
Perubahan atas kepemilikan di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	-	-	-	-	13.710	-	-	13.710
Kapitalisasi uang muka setoran modal	2.774.157	(927.032)	-	-	-	-	-	1.847.125
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	-	-	399.759	-	-	-	-	399.759
Selisih kurs karena Penjabaran laporan keuangan	-	-	-	(59.338)	-	-	-	(59.338)
Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-	(69.138)	-	-	(69.138)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti, neto	-	-	-	-	234.631	-	-	234.631
Pembagian dividen	-	-	-	-	-	-	(614.939)	(614.939)
Alokasi cadangan lain	-	-	-	-	-	1.925.256	(1.925.256)	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	2.526.772	2.526.772
Saldo 31 Desember 2018	**16.191.204**	**(924.296)**	**401.120**	**(362.314)**	**969.878**	**8.796.357**	**2.526.772**	**27.598.721**

PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	41.733.757	32.578.919
Penerimaan kas dari Pemerintah	6.224.744	3.299.858
Penerimaan kas dari restitusi pajak	154.758	514.062
Pembayaran kas kepada pemasok	(37.264.381)	(26.634.755)
Pembayaran kas kepada Pemerintah	(10.521.957)	(6.996.514)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(349.514)	(333.439)
Pembayaran kas kepada pekerja dan manajemen	(594.693)	(757.916)
Penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya	(1.735)	(132.512)
Penerimaan bunga	123.409	126.808
Kas neto yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	**(495.612)**	**1.664.511**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil dari pelepasan investasi jangka panjang	708.365	15.808
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	421.950	266.513
Pembelian aset tetap	(594.108)	(151.550)
Penempatan penyertaan jangka panjang	(1.171.616)	(1.195.112)
Penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya	-	275.567
Penerimaan bunga dari investasi	-	6.303
Penempatan investasi jangka pendek	-	(17)
Pembayaran aset eksplorasi dan evaluasi	-	(1.455)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(635.409)**	**(783.943)**

PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari pinjaman jangka pendek	8.100.439	2.543.456
Penerimaan dari penerbitan obligasi	734.407	-
Pembayaran pinjaman jangka pendek	(4.108.701)	(2.288.188)
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(341.349)	(944.502)
Pembayaran dividen	(585.755)	(867.751)
Pembayaran beban keuangan	(516.893)	(523.146)
Pembayaran obligasi	(37.649)	-
Penerimaan dari pinjaman jangka panjang	-	428.403
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**3.244.499**	**(1.651.728)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**2.113.478**	**(771.160)**
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	(159.185)	(12.251)
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**2.612.796**	**3.396.207**
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**4.567.089**	**2.612.796**

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Amendemen PSAK No. 4 (2015) memperkenankan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi Entitas Induk pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam Laporan Keuangan Tersendiri entitas tersebut.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

2. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018. Rincian akun tersebut adalah sebagai berikut:

	Dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi	Disajikan kembali
Laporan posisi keuangan tersendiri			
Aset			
Aset Lancar			
Investasi lainnya	-	27.328	27.328
Aset Tidak Lancar			
Penyertaan jangka panjang	16.924.234	(27.328)	16.896.906

DAFTAR ISTILAH

Singkatan	Definisi
APD PPE	Alat Pelindung diri
BBK	Bahan Bakar Khusus
bbl	Barrel Oil
BBM	Bahan Bakar Minyak
BBTUD	Billion British Thermal Unit per Day
BOPD	Barrel Oil Per Day
BSCF	Billion Standard Cubic Feet
BSCFG	Billion Standard Cubic Feet of Gas
CIP	Continuous Improvement Program
CNG	Compressed Natural Gas
COCO	Company Owned Company Operated
CODO	Company Owned Dealer Operated
Conco Delco	Contracting Company Delivery Company
CSS	Corporated Shared Service
CSMS	Contractor Safety Management System
DPPU	Depot Pengisian Pesawat Udara
EOR	Enhancement Oil Recovery
ERM	Enterprise Risk Management
ERP	Enterprise Resource Planing
FSRU	Floating Storage Regasification Unit
GCG	Tata Kelola Perusahaan yang Baik
GRR	Grass Root Refinery
GMB/CBM	Gas Metana Batubara
GWh	Gigawatt hours
GTL	Gas to Liquid
HBM	Harta Benda Modal
HSD	High Speed Diesel
ICoFR	Internal Control over Financial Reporting
ICP	Indonesian Crude Price
ICT	Information and Communication Technology
I-P2P	Integrated Procure to Pay
ISC	Integrated Supply Chain
ISRS	International Sustainability Rating System
JOB	Joint Operation Body
K3LL	Keselamatan, Kesehatan, Kerja dan Lindungan Lingkungan
KLH	Kementerian Negara Lingkungan Hidup
KMSS	Komite Manajemen Sistem Standar
KOMET	Knowledge Management Pertamina
KSO	Kerja Sama Operasi
KTA	Kilo Tons per Annum
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara
LNG	Liquefied Natural Gas
LPG	Liquefied Petroleum Gas

Singkatan	Definisi
LPP	Legal Preventive Program
LOBP	Lube Oil Blending Plant
MBOEPD	Million Barrel Oil Equivalent Per Day
MDGs	Millennium Development Goals
Menteri/Kementerian ESDM	Menteri/Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
MMBO	Million Metric Barrel of Oil
MMbbl	Million Barrel Oil
MMBTU	Million British Thermal Unit
MMSCFD	Million Standard Cubic Feet per Day
MOPS	Mid Oil Platts Singapore
MRU	Mobile Refueling Unit
MT	Metric Ton
MW	Mega Watt
NBBM	Non-BBM
ONWJ	Offshore Northwest Java
PCU	Pertamina Corporate University
PDSI	PT Pertamina Drilling Service Indonesia
PEP	PT Pertamina EP
PEPC	PT Pertamina EP Cepu
Pertagas	PT Pertamina Gas
Petral	Pertamina Energy Trading Limited
PGE	PT Pertamina Geothermal Energy
PHE	PT Pertamina Hulu Energi
PLBC	Proyek Langit Biru Cilacap
PKB/CLA	Perjanjian Kerja Bersama
PKBL	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PROPER	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
PSC	Production Sharing Contract
PSO	Public Service Obligation
RDMP	Refinery Development Master Plan
RFCC	Residual Fluid Catalytic Cracking
RFM	Retail Fuels Marketing
RJPP	Rencana Jangka Panjang Perusahaan
RKAP	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
RU	Refinery Unit
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SPBG	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
SPBU	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
STS	Ship to ship
TAC	Technical Assistance Contract
VHS	Vendor Held Stock
VLGC	Very Large Gas Carrier

PERTAMINA

Annual Report

2018

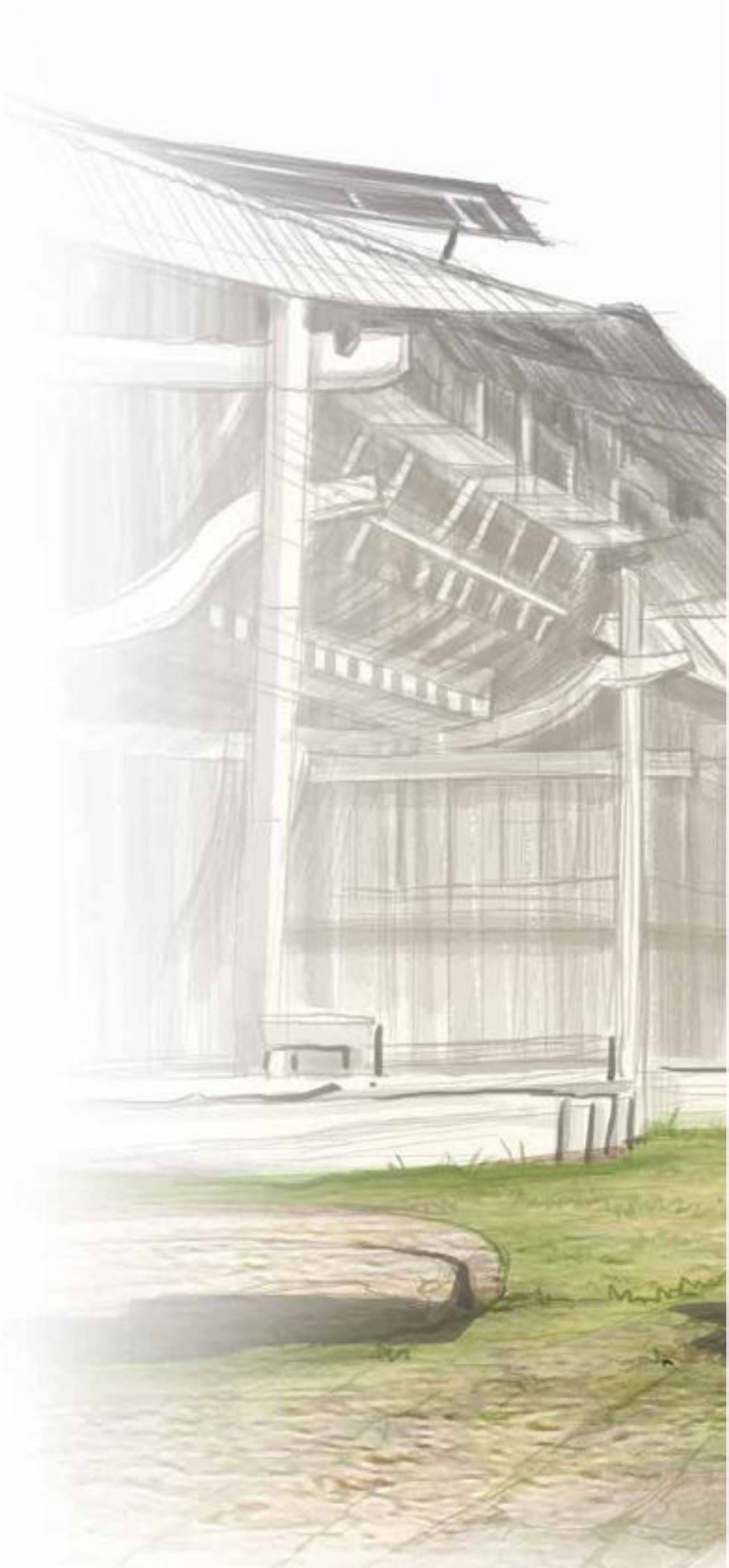

PERTAMINA

HEAD OFFICE
Jl. Medan Merdeka Timur
1A, Jakarta 10110 Indonesia
Phone : (62-21) 381 5111, 381 6111
Fax : (62-21) 384 3882, 384 6865

CORPORATE SECRETARY
Jl. Medan Merdeka Timur 1A,
Jakarta 10110 Indonesia
Phone : (62-21) 381 5611
Fax : (62-21) 350 7074

CONTACT PERTAMINA
Phone : 1500 000
SMS : (62) 815 9 500000
Email : pcc@pertamina.com